



PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

RPD

Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru

Tahun 2023-2026

Tahun 2022



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 31 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mangamanatkan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
22. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun yaitu Tahun 2023-2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RPD merupakan dokumen penjabaran Visi Misi RPJPD Kota dari tahun 2023-2026.

- (3) RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

Pasal 3

- (1) RPD Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023-2026.
- (2) Penentuan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD kota, Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tahun Keempat, dan isu strategis aktual.
- (3) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam RPD akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Maret 2022

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 31

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 4
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I - 5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II - 1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II - 12
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II - 18
2.1.1.3.1. Wilayah Rawan Bencana Banjir/Genangan	II - 18
2.1.1.3.2. Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II - 20
2.1.1.4. Demografi.....	II - 23
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 29
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 29
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II - 38
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II - 43
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 46
2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Pemerintah Wajib	II - 46
2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Pilihan.....	II - 149
2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Penunjang Urusan.....	II - 159
2.1.3.4. Unsur Pemerintahan Umum	II - 165
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 167
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II - 167

2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia	II - 169
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur.....	II - 171
2.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).....	II - 173
2.2.1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional.....	II - 175
2.2.2. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).....	II - 176
2.2.2.1. Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial	II - 176
2.2.2.2. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi	II - 177
2.2.2.3. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan.....	II - 179
2.2.2.4. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	II - 180
2.3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II - 181
2.4. Kerjasama Daerah	II - 182
2.4.1. Kerjasama Antar Daerah	II - 182
2.4.2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	II - 183
2.5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR)	II - 184
2.6. Gambaran Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Pekanbaru.....	II - 186
BAB III KERANGKA KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 2
3.1.2. Neraca Daerah	III - 9
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 11
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 12
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III - 13
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III - 14
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III - 15
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III - 18
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV - 1
4.1.1. Urusan Pendidikan.....	IV - 1
4.1.2. Urusan Kesehatan	IV - 1
4.1.3. Urusan Kebudayaan	IV - 2
4.1.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV - 2

4.1.5.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV - 2
4.1.6.	Urusan Tenaga Kerja.....	IV - 2
4.1.7.	Urusan Sosial.....	IV - 3
4.1.8.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Pangan.....	IV - 3
4.1.9.	Urusan Ketahanan Pangan.....	IV - 3
4.1.10.	Urusan Pariwisata.....	IV - 4
4.1.11.	Urusan Komunikasi dan Informatika.....	IV - 4
4.1.12.	Urusan Lingkungan Hidup.....	IV - 4
4.1.13.	Urusan Penanggulangan Bencana.....	IV - 5
4.1.14.	Urusan Perhubungan.....	IV - 5
4.1.15.	Urusan Perdagangan.....	IV - 5
4.1.16.	Urusan Perindustrian.....	IV - 5
4.1.17.	Urusan Kesatuan Bangsa.....	IV - 6
4.2.	Isu Strategis.....	IV - 6
4.2.1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	IV - 6
4.2.2.	Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Meningkatkan Ketahanan Budaya Melayu.....	IV - 7
4.2.3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.....	IV - 7
4.2.4.	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi.....	IV - 7
4.2.5.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.....	IV - 10
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN.....	V - 1
5.1.	Tujuan dan Sasaran.....	V - 1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI - 1
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII - 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII - 1
BAB IX	PENUTUP.....	IX - 1
9.1.	Kaidah Pelaksanaan.....	IX - 1
9.2.	Pedoman Transisi.....	IX - 2
9.3.	Pengembangan Pembiayaan Pembangunan.....	IX - 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan.....	II - 2
Tabel 2.2.	Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru.....	II - 5
Tabel 2.3.	Grup Fisiografi Tanah dan Satuan Lahan kota Pekanbaru	II - 9
Tabel 2.4.	Rencana Arahan Fungsi Setiap Wilayah Pengembangan (WP)	II - 11
Tabel 2.5.	Titik-Titik Genangan dan Lokasi Banjir di Kota Pekanbaru	II - 19
Tabel 2.6.	Kejadian Kebakaran Lahan per Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2021.....	II - 21
Tabel 2.7.	Kejadian Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	II - 23
Tabel 2.8.	Kejadian Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 23
Tabel 2.9.	Kejadian Puting Beliung di Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	II - 23
Tabel 2.10.	Kejadian Gas Lumpur di Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 23
Tabel 2.11.	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	II - 24
Tabel 2.12.	Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2021	II - 24
Tabel 2.13.	Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2021	II - 27
Tabel 2.14.	Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2016- 2021	II - 28
Tabel 2.15.	PDRB Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah) ..	II - 31
Tabel 2.16.	PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016–2021 (Miliar Rupiah)	II - 32
Tabel 2.17.	PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016–2021 (Miliar Rupiah)	II - 33
Tabel 2.18	Tingkat inflasi bulanan Kota Pekanbaru 2021	II - 34
Tabel 2.19	Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021	II - 36
Tabel 2.20	Umur harapan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 40
Tabel 2.21	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 40
Tabel 2.22	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020.....	II - 42
Tabel 2.23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 42
Tabel 2.24.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2021 Kota Pekanbaru	II - 43
Tabel 2.25	Lembaga Seni Budaya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 43
Tabel 2.26.	Data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 43

Tabel 2.27.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat Kota Pekanbaru tahun 2016-2021	II - 47
Tabel 2.28.	Jumlah Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	II - 49
Tabel 2.29.	Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021.....	II - 49
Tabel 2.30.	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 50
Tabel 2.31.	Rasio Guru/Murid PAUD SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekanbaru	II - 51
Tabel 2.32.	Jumlah Guru PNS Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II - 51
Tabel 2.33.	Jumlah Guru Non PNS Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II - 51
Tabel 2.34.	Layanan SPM Pendidikan Kota Pekanbaru	II - 53
Tabel 2.35.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Pendidikan	II - 53
Tabel 2.36.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022	II - 55
Tabel 2.37.	Angka kematian Ibu, bayi dan Balita di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 55
Tabel 2.38.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021	II - 56
Tabel 2.39.	Jumlah Kunjungan Rawat Inap dan Rawat Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020	II - 60
Tabel 2.40.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	II - 61
Tabel 2.41.	Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 61
Tabel 2.42.	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020.....	II - 63
Tabel 2.43.	Layanan SPM Kesehatan Kota Pekanbaru	II - 63
Tabel 2.44.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Kesehatan	II - 63
Tabel 2.45.	Indeks Aksesibilitas Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	II - 65
Tabel 2.46.	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 66
Tabel 2.47.	Kondisi Kemantapan Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021.....	II - 66
Tabel 2.48.	Konsumsi Air Bersih Disalurkan PDAM Kota Pekanbaru (m3).....	II - 68
Tabel 2.49.	Cakupan Akses Air Bersih Dengan Sistem Perpipaan (PDAM)	II - 68
Tabel 2.50.	Data Cakupan Akses Air Bersih Dengan Sistem Bukan Perpipaan	II - 69
Tabel 2.51.	Sumber Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan per Kecamatan di Kota Pekanbaru ...	II - 70
Tabel 2.52.	Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru	II - 71
Tabel 2.53.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 72

Tabel 2.54.	Cakupan Rumah Layak Huni Kota Pekanbaru	II - 73
Tabel 2.55.	Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru	II - 74
Tabel 2.56.	Kewenangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru	II - 75
Tabel 2.57.	Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru	II - 77
Tabel 2.58.	Lokasi Pemutakhiran Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru	II - 78
Tabel 2.59.	Data Capaian Indikator Kinerja RPJMD Bidang PSU.....	II - 81
Tabel 2.60.	Data TPU yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	II - 83
Tabel 2.61.	Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru	II - 85
Tabel 2.62.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat	II - 86
Tabel 2.63.	Laporan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II - 87
Tabel 2.64.	Cakupan Petugas Linmas Kota Pekanbaru.....	II - 87
Tabel 2.65.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di Kota Pekanbaru	II - 88
Tabel 2.66.	Layanan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru.....	II - 88
Tabel 2.67.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II - 88
Tabel 2.68.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 90
Tabel 2.69.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Tahun 2017-2021	II - 91
Tabel 2.70.	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 92
Tabel 2.71.	Data Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 92
Tabel 2.72.	Data PSKS di Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	II - 93
Tabel 2.73.	Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru	II - 94
Tabel 2.74.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial	II - 94
Tabel 2.75.	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 95
Tabel 2.76.	Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kota Pekanbaru	II - 96
Tabel 2.77.	Kondisi ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2017–2021	II - 96
Tabel 2.78.	Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perjanjian Bersama dan Anjuran.....	II - 98
Tabel 2.79.	Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	II - 98
Tabel 2.80.	Tenaga Kerja yang Terdaftar Ikut Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat	II - 98

Tabel 2.81.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani pada P2TP2A Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2019	II - 100
Tabel 2.82.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD di Kota Pekanbaru	II - 102
Tabel 2.83.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Pekanbaru	II - 102
Tabel 2.84.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita tahun 2017-2021	II - 103
Tabel 2.85.	Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru	II - 104
Tabel 2.86.	Data Kelompok Penerima Manfaat Bantuan P2I Stunting APBD Tahun 2021 & 2022	II - 105
Tabel 2.87.	Kewenangan Bidang Pertanahan.....	II - 106
Tabel 2.88.	Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	II - 106
Tabel 2.89.	Perhitungan Luasan RTH Publik Sesuai Fungsinya untuk Kota Pekanbaru	II - 108
Tabel 2.90.	Ruang Terbuka Hijau Publik Eksisting di Kota Pekanbaru.....	II - 109
Tabel 2.91.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman di Kota Pekanbaru Tahun 2021	II - 110
Tabel 2.92.	Luas RTH Publik Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021	II - 111
Tabel 2.93.	Dokumen Lingkungan yang telah Dinilai oleh DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	II - 112
Tabel 2.94.	Izin Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit yang Telah Diterbitkan Tahun 2016 – 2021.....	II - 112
Tabel 2.95.	Data Izin Pembuangan Air Limbah yang Telah Diterbitkan.....	II - 113
Tabel 2.96.	Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2021	II - 113
Tabel 2.97.	Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2020.....	II - 113
Tabel 2.98.	Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021.....	II - 115
Tabel 2.99.	Indikator Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun 2017- 2020 ..	II - 115
Tabel 2.100.	Cakupan Penerbitan/Perekaman KTP di Kota Pekanbaru tahun 2016-2020.....	II - 116
Tabel 2.101.	Data Rasio Bayi Berakta Kelahiran Tahun 2017-2021 di Kota Pekanbaru	II - 117
Tabel 2.102.	Data Rasio Pasangan Berakta Nikah Tahun 2017-2021 di Kota Pekanbaru	II - 117
Tabel 2.103.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2017-2021	II - 118
Tabel 2.104.	Data Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) terkait Rumah Ibadah (PMB-RI), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Rukun Warga (RW) serta Rukun Tetangga (RT)	II - 119

Tabel 2.105. Data Indeks Pembangunan Kelurahan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.....	II - 121
Tabel 2.106. Angka TFR Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021	II - 123
Tabel 2.107. Jumlah Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Bulan Desember 2021	II - 123
Tabel 2.108. Data Angkutan Umum Transportasi Darat Tahun 2021 Kota Pekanbaru	II - 124
Tabel 2.109. Trayek dan Kode Trayek Trans Metro Pekanbaru	II - 128
Tabel 2.110. Lokasi Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru	II - 129
Tabel 2.111. Jumlah Halte di Kota Pekanbaru	II - 129
Tabel 2.112. Jumlah Penumpang dan Barang yang Berangkat dan Datang di Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2021	II - 130
Tabel 2.113. Rekapitulasi Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	II - 131
Tabel 2.114. Rekapitulasi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru	II - 132
Tabel 2.115. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021.....	II - 132
Tabel 2.116. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer/Laptop di Kota Pekanbaru	II - 134
Tabel 2.117. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Pernah Mengakses Internet di Kota Pekanbaru	II - 135
Tabel 2.118. Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.....	II - 135
Tabel 2.119. Capaian Kinerja UMKM Kota Pekanbaru 2017-2021	II - 136
Tabel 2.120. Capaian Kinerja UMKM Kota Pekanbaru 2017-2021	II - 136
Tabel 2.121. Data Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Kota Pekanbaru	II - 136
Tabel 2.122. Data Koperasi Berdasarkan Kesehatan KSP/USP Kota Pekanbaru.....	II - 137
Tabel 2.123. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2016-2021	II - 138
Tabel 2.124. Jenis Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020.....	II - 140
Tabel 2.125. Jenis Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021.....	II - 140

Tabel 2.126. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pekanbaru pada Tahun 2014 – 2021.....	II - 141
Tabel 2.127. Ketersediaan Data Statistik Sektor Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2021.....	II - 142
Tabel 2.128. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2021	II - 142
Tabel 2.129. Pelaksanaan Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 143
Tabel 2.130. Indikator Perpustakaan Tahun 2017-2021	II - 144
Tabel 2.131. Indikator Kearsipan Tahun 2017-2021	II - 147
Tabel 2.132. Jumlah Produksi Perikanan di Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2020	II - 149
Tabel 2.133. Angka Konsumsi Ikan (Aki) Kota Pekanbaru (kg/kapita/tahun).....	II - 149
Tabel 2.134. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Setiap Bulannya Tahun 2017 – 2021.....	II - 150
Tabel 2.135. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara Yang Masuk ke Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 151
Tabel 2.136. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 153
Tabel 2.137. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	II - 153
Tabel 2.138. Jumlah Populasi Ternak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020.....	II - 154
Tabel 2.139. Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020	II - 155
Tabel 2.140. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru (Ha) Tahun 2020	II - 155
Tabel 2.141. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Sebagai Penerangan Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021	II - 156
Tabel 2.142. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Terhadap PDRB Kota Pekanbaru (dalam miliar rupiah) Tahun 2016-2021	II - 156
Tabel 2.143. Nilai Ekspor Bersih Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021	II - 157
Tabel 2.144. Rekap Data Pedagang Pasar Rakyat Kota Pekanbaru	II - 157
Tabel 2.145. Jumlah Industri Kecil Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Sampai Dengan Tahun 2021.....	II - 158
Tabel 2.146. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021 (dalam miliar rupiah).....	II - 159

Tabel 2.147. Konsistensi dan Kesesuaian	II - 160
Tabel 2.148. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru	II - 161
Tabel 2.149. Persentase SILPA Terhadap APBD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 161
Tabel 2.150. Persentase Belanja Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 162
Tabel 2.151. Persentase Belanja Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 162
Tabel 2.152. Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021	II - 162
Tabel 2.153. Jumlah PNS yang Sudah dan yang Belum Mengikuti Uji Kompetensi Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2021	II - 163
Tabel 2.154. Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 164
Tabel 2.155. Indikator Kinerja Pengawasan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020.....	II - 164
Tabel 2.156. Data Rehabilitasi Kasus Narkoba di Kota Pekanbaru 2017 – 2020	II - 167
Tabel 2.157. Angka Konsumsi RT per Kapita Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021	II - 167
Tabel 2.158. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Tahun 2017-2021	II - 168
Tabel 2.159. Angka Kriminalitas yang tertangani Tahun 2017-2019.....	II - 169
Tabel 2.160. Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	II - 169
Tabel 2.161. Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2021	II - 170
Tabel 2.162. Angka Beban Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2021	II - 170
Tabel 2.163. Perkembangan Jumlah Penumpang, Bagasi dan Barang Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 171
Tabel 2.164. Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kota Pekanbaru	II - 172
Tabel 2.165. Produksi Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 172
Tabel 2.166. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2020 (dalam juta rupiah) untuk Pengadaan Listrik dan Gas	II 173
Tabel 2.167. Capaian Indikator TPD di Kota Pekanbaru.....	II - 174
Tabel 2.168. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial	II - 176
Tabel 2.169. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi	II - 178

Tabel 2.170.	Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan	II - 179
Tabel 2.171.	Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	II - 180
Tabel 2.172.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	II - 186
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	III - 1
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pekanbaru	III - 12
Tabel 3.3.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekanbaru	III - 15
Tabel 3.4.	Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru	III - 15
Tabel 3.5.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru	III - 16
Tabel 3.6.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekanbaru	III - 16
Tabel 3.7.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 - 2026 Kota Pekanbaru	III - 18
Tabel 3.8.	Kapasitas Ril Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026.....	III - 20
Tabel 3.9.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026.....	III - 20
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026	V – 1
Tabel 6.1.	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekanbaru	VI - 8
Tabel 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekanbaru	VI - 13
Tabel 6.3.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Pekanbaru.....	VI -15
Tabel 7.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekanbaru	VII - 2
Tabel 8.1.	Penetapan Indiktor Kinerja Utama Kota Pekanbaru.....	VIII - 2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekanbaru	VIII - 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	II - 4
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Pekanbaru	II - 6
Gambar 2.3. Peta Kelerengan Kota Pekanbaru.....	II - 7
Gambar 2.4. Peta Kawasan Meranti Pandak	II - 12
Gambar 2.5. Peta Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki	II - 13
Gambar 2.6. Peta Kawasan Komersial Hijau (Setia Maharaja)	II - 14
Gambar 2.7. Peta Kawasan Industri tenayan (KIT).....	II - 15
Gambar 2.8. Peluang Investasi Kawasan Bandar Khayangan	II - 17
Gambar 2.9. Peta Titik Banjir dan Sungai Kota Pekanbaru	II - 20
Gambar 2.10. Peta Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru.....	II - 26
Gambar 2.11. Peta Sebaran Penduduk di Kota Pekanbaru.....	II - 26
Gambar 2.12. Bagan Proporsi RTH Kawaan Perkotaan (Ilustrasi)	II - 108

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021	II - 25
Grafik 2.2.	Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 – 2021	II - 29
Grafik 2.3.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 30
Grafik 2.4.	PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)	II - 32
Grafik 2.5.	Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021	II - 34
Grafik 2.6.	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru	II - 36
Grafik 2.7.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 39
Grafik 2.8.	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 40
Grafik 2.9.	Rata-rata Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021	II - 41
Grafik 2.10.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2021	II - 41
Grafik 2.11.	Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau	II - 56
Grafik 2.12.	Angka Cure Rate, Complete Rate, Succes Rate dan Jumlah Kematian TB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	II - 58
Grafik 2.13.	Persentase Luasan Penanganan Kawasan Kumuh)	II - 76
Grafik 2.14.	Perbandingan Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 115
Grafik 2.15.	Indeks Minat Baca Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	II - 146
Grafik 2.16.	Nilai LAKE Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021	II - 148
Grafik 2.17.	Persentase Capaian TPB Kota Pekanbaru	II - 174
Grafik 2.18.	Capaian TPB Setiap Tujuan Kota Pekanbaru	II - 175
Grafik 2.19.	Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	II - 176
Grafik 2.20.	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial	II - 177
Grafik 2.21.	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi	II - 179
Grafik 2.22.	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan	II - 180
Grafik 2.23.	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola	II - 181

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 1. Tahapan Pengurangan Kumuh Kota Pekanbaru Tahun 2017 s.d 2021

II - 76

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah satu diantara daerah yang memiliki Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Pemilihan Kepala Daerah yang baru dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sesuai dengan amanah Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sehingga Kota Pekanbaru tidak memiliki Kepala Daerah hingga Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu dalam hal penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan tahunan disusunlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026**.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yang berakhir pada tahun 2022, akan diteruskan oleh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah dan disusun secara teknokratis, yakni menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.

Tata cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diatur oleh **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022**. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mengamanatkan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dalam hal ini adalah Kota Pekanbaru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi Riau 2018-2023;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 ;
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru ;
25. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
26. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 akan disesuaikan dan diselaraskan dengan Dokumen RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025, RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini juga berhubungan dan selaras dengan dokumen lain yang relevan.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 juga akan menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026, Dokumen Perencanaan Tahunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 adalah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah sebelum pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dilakukan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan tahunan. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 juga dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 adalah untuk :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 4 (empat) tahun kedepan dari Periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.
3. Merumuskan Dokumen yang selaras dengan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024,
4. Merumuskan Dokumen yang memiliki Kesesuaian serta selaras dengan RPJMD Provinsi Riau 2018-2023 dan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025,
5. Merumuskan Dokumen yang memperhatikan Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, Isu-isu strategis yang berkembang, Kebijakan nasional dan Regulasi yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM,

Menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, penelaahan rencana tata ruang wilayah

Kota Pekanbaru dan penelaahan RTRW Provinsi Riau yang berkaitan dengan Kota Pekanbaru.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang sedang berjalan, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang sedang berjalan dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kota Pekanbaru.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

BAB V TUJUAN, DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Berisi strategi, arah kebijakan dan Program Prioritas Kota Pekanbaru

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berisikan seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisikan Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografi Kota Pekanbaru meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan kondisi demografi meliputi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Pekanbaru meliputi luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 Km² (Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021) terletak antara 101°14' – 101°34' BT dan 0°25' – 0°45' LU, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara spasial, Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di Jantung Pulau Sumatera yang dilalui ruas jalan Lintas Timur Sumatera, dan berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia Bagian Barat menuju Negara-Negara Asean dan juga sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan.

Secara administratif, terhitung sejak tahun 2021, Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Pemekaran Kecamatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan, dilakukan penataan kecamatan dalam bentuk pembentukan kecamatan dan penyesuaian kecamatan. Pada Peraturan Daerah ini, jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru yang semula berjumlah 12 kecamatan menjadi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan

Raya, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Buah Madani, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur dan Kecamatan Kulim. Secara rinci luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

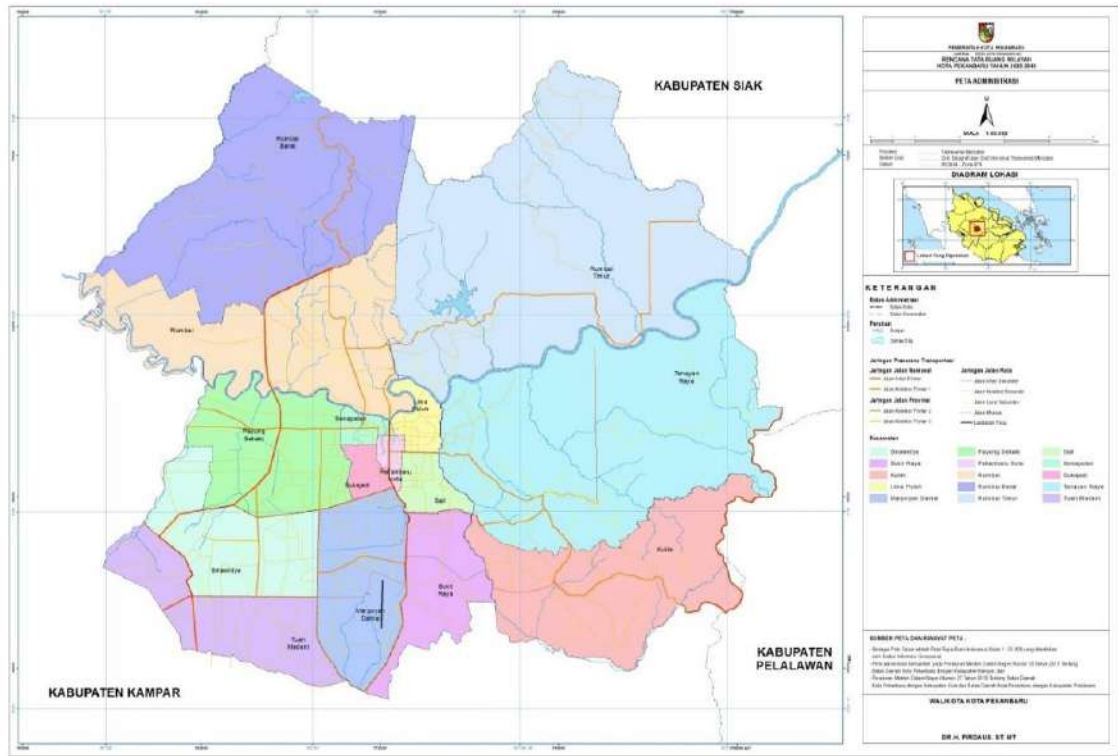
No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Total Luas
	(15 Kecamatan)	(83 Kelurahan)	(KM2)	Wilayah (KM 2)
1	Payung Sekaki	1. Air Hitam	7,43	35,55
		2. Bandar Raya	7,05	
		3. Labuh Baru Barat	7,32	
		4. Labuh Baru Timur	4,07	
		5. Tirta Siak	4,78	
		6. Tampan	4,91	
2	Buah Madani	1. Sidomulyo Barat	8,11	29,84
		2. Sialang Munggu	4,74	
		3. Buah Karya	5,99	
		4. Buah Madani	5,23	
		5. Air Putih	5,77	
3	Binawidya	1. Simpang Baru	7,67	36,59
		2. Delima	6,29	
		3. Tobek Godang	5,99	
		4. Bina Widya	8,46	
		5. Sungai Sibam	8,16	
4	Bukit Raya	1. Simpang Tiga	5,34	22,05
		2. Tangkerang Selatan	3,09	
		3. Tangkerang Utara	2,65	
		4. Tangkerang Labuai	2,67	
		5. Air Dingin	8,3	
5	Marpoyan Damai	1. Tangkerang Tengah	4,64	29,74
		2. Tangkerang Barat	5,31	
		3. Maharatu	6,91	
		4. Sidomulyo Timur	7,19	
		5. Wonorejo	1,35	
		6. Perhentian Marpoyan	4,34	
6	Tenayan Raya	1. Sialang Sakti	9,27	114,4
		2. Bambu Kuning	4,55	
		3. Industri Tenayan	19,02	
		4. Melebung	35,81	
		5. Rejosari	6,56	
		6. Bencah Lesung	10,1	
		7. Tangkerang Timur	4,55	
		8. Buah Negeri	24,54	
7	Kulim	1. Kulim	20,32	56,87
		2. Mentangor	5	
		3. Pebatuan	7,91	
		4. Pematang Kapau	5,37	
		5. Sialang Rampai	18,27	

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Total Luas
	(15 Kecamatan)	(83 Kelurahan)	(KM2)	Wilayah (KM 2)
8	Limapuluh	1. Rintis	0,68	4,04
		2. Sekip	0,82	
		3. Tanjung Rhu	1,68	
		4. Pesisir	0,86	
9	Sail	1. Cinta Raja	0,87	3,26
		2. Suka Maju	1,21	
		3. Suka Mulia	1,18	
10	Pekanbaru Kota	1. Simpang Empat	0,66	2,26
		2. Suma Hilang	0,51	
		3. Tanah Datar	0,29	
		4. Kota Baru	0,24	
		5. Sukaramai	0,25	
		6. Kota Tinggi	0,31	
11	Sukajadi	1. Jadirejo	0,6	3,76
		2. Kampung Tengah	0,55	
		3. Kampung Melayu	0,93	
		4. Kedungsari	0,41	
		5. Harjosari	0,39	
		6. Sukajadi	0,44	
		7. Pulau Karomah	0,44	
12	Senapelan	1. Sidomulyo Barat. Padang Bulan	1,59	6,65
		2. Padang Terubuk	1,54	
		3. Sago	0,68	
		4. Kampung Dalam	0,68	
		5. Kampung Bandar	0,97	
		6. Kampung Baru	1,19	
13	Rumbai	1. Lembah Damai	24,95	61,86
		2. Limbungan Baru	1,58	
		3. Meranti Pandak	2,93	
		4. Sri Meranti	7,06	
		5. Palas	18,3	
		6. Umban Sari	7,03	
14	Rumbai Barat	1. Muara Fajar Timur	15,41	86,01
		2. Muara Fajar Barat	24,1	
		3. Rumbai Bukit	11,03	
		4. Rantau Panjang	11,16	
		5. Maharani	7,42	
		6. Agrowisata	16,89	
15	Rumbai Timur	1. Tebing Tinggi Okura	9,4	138,31
		2. Sungai Ukai	29,78	
		3. Sungai Ambang	42,33	
		4. Lembah Sari	9,85	
		5. Limbungan	27	
JUMLAH TOTAL			632,26	632,26

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2022

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Pekanbaru



Sumber : Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

B. Topografi

Secara umum kondisi wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar arealnya mempunyai kelas lereng datar dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0–2 persen dengan luas 27.818 Ha dan sekitar 10.806 Ha kemiringan lereng 2–8 persen yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota. Kemiringan 0–2 persen ini terletak di daerah bagian Selatan, sedangkan kemiringan lereng 2–8 persen terletak menyebar di bagian Tenggara Kota Pekanbaru dan sebagian lagi di daerah Utara.

Untuk kemiringan dengan kelas kelereng 26–40 persen yang merupakan daerah agak curam mempunyai luasan terkecil yaitu 2.917 Ha, yang terletak di daerah Utara dan juga daerah Tenggara Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Tenayan Raya. Lahan dengan kondisi morfologi demikian umumnya cenderung memiliki faktor pembatas yang cukup tinggi terutama untuk kegiatan terbangun, oleh karena itu pada lokasi dengan tipikal kemiringan seperti ini pengembangannya lebih diarahkan sebagai kawasan konservasi.

Tabel 2. 2. Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Datar 0-2 %	27.818	44,00
2	Agak Landai 2-15 %	10.806	17.09
3	Landai 15-40%	13.405	21.20
4	Sangat Landai	8.280	13.10
5	Agak Curam	2.917	4.61
Total		63.226	100.00

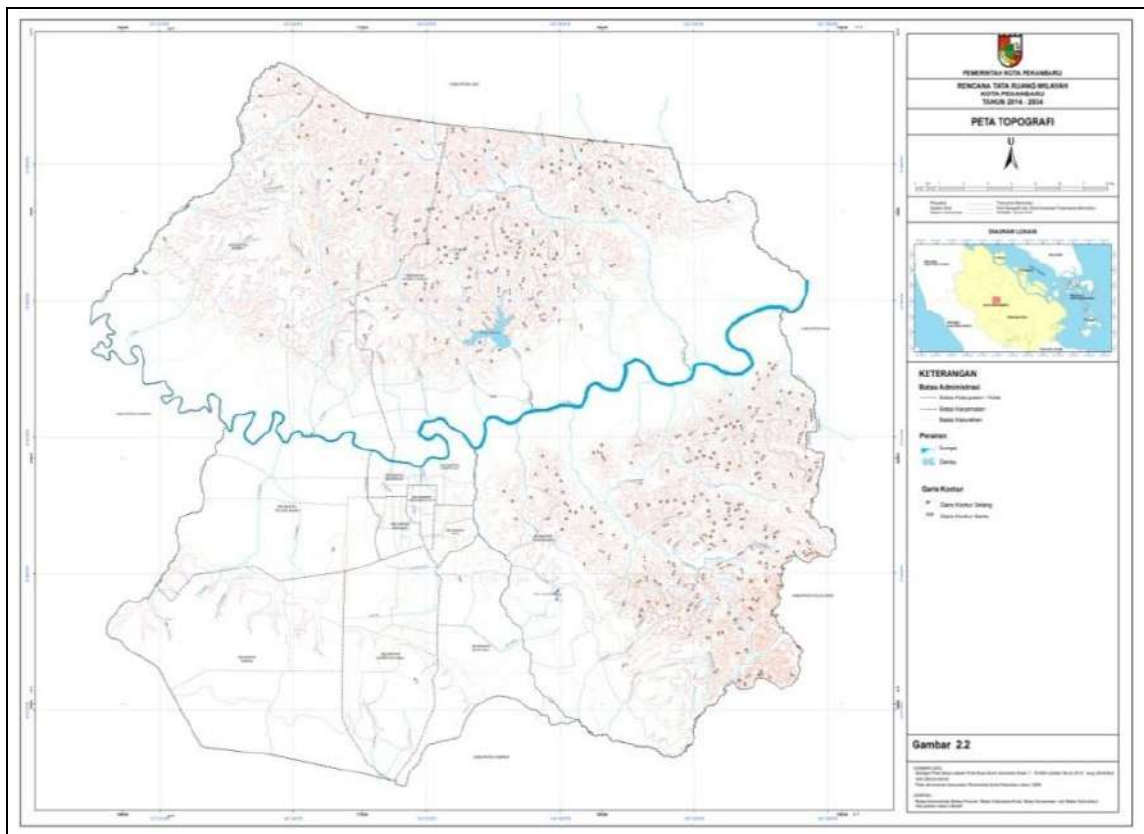
Sumber : RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Berdasarkan keadaan topografi, maka pengembangan wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kemiringan 0–2 persen (datar), lahan pada interval ini masuk dalam klasifikasi sangat layak bagi pengembangan semua kegiatan budidaya karena kondisi permukaan tanah yang datar. Wilayah dengan kemiringan ini memanjang dari Barat ke Timur di sepanjang Sungai Siak yang mencakup dan Kecamatan Payung Sekaki, Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Lima Puluh, dan sebagian Kecamatan Rumbai, sebagian Rumbai Pesisir, Kecamatan, serta sebagian Tenayan Raya.
2. Kemiringan 2–15 persen (datar s/d landai), memiliki kelayakan fisik bagi pengembangan kegiatan budidaya. Wilayah yang tercakup kedalamnya adalah sebagian di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Bukit Raya.
3. Lahan dengan kemiringan 15–40 persen (agak landai s/d agak curam), pemanfaatan lahan pada interval ini masih memungkinkan bagi pengembangan kegiatan budidaya terbangun secara terbatas, yang meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Tenayan Raya seluas 2.917 Hektar (4,61 persen)

Dari uraian di atas, maka pengembangan fisik di Kota Pekanbaru tidak menghadapi kendala morfologi lahan dan pengembangan fisik kawasan sebagai kawasan permukiman karena dapat dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk ketinggian 26–40 persen, sangat sesuai bagi pengembangan kawasan konservasi tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Tenayan Raya. Adapun peta topografi dan peta kemiringan lereng masing-masing dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Pekanbaru

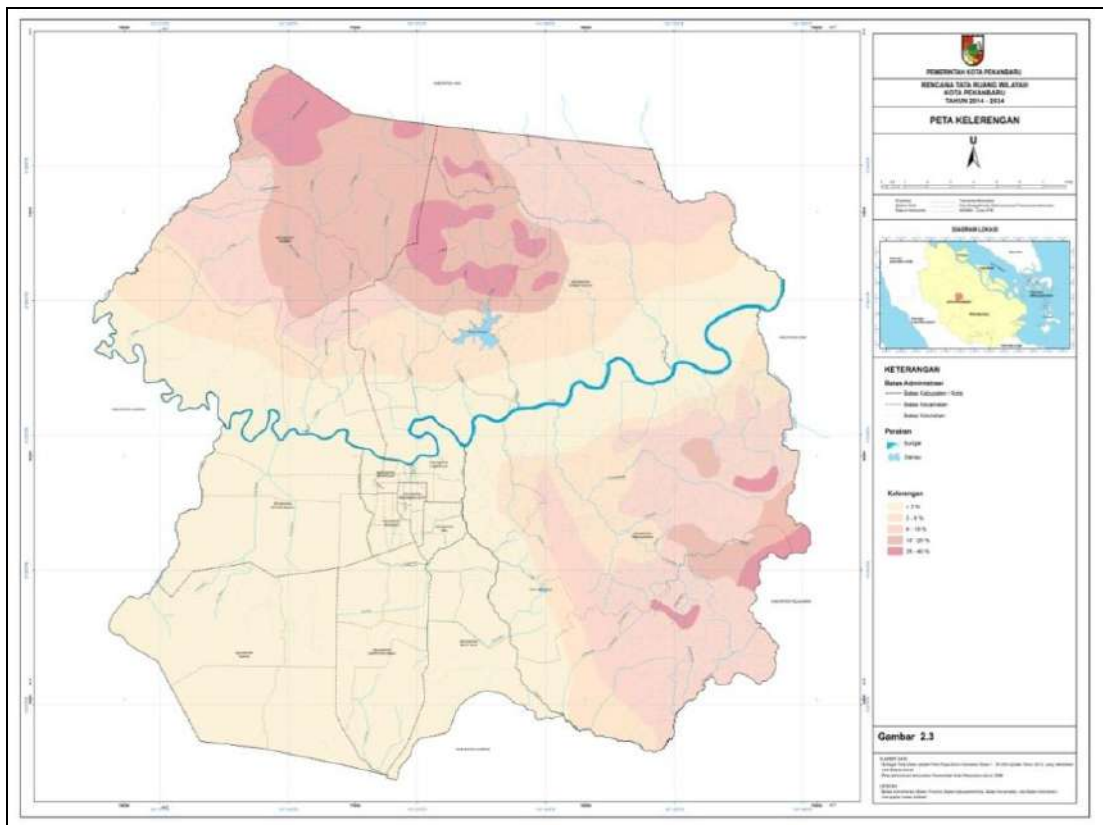


Sumber : Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Dari peta topografi diatas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 10–50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Jika dilihat dari peta lereng berikut, sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44 persen) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2 persen atau relatif datar. Wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17 persen, landai (21 persen), dan sangat landai (13 persen), sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4-5 persen yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Gambar 2.3. Peta Kelereng Kota Pekanbaru



Sumber: Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

C. Geologi

Berdasarkan pada peta geologi Lembar Pekanbaru dan sekitarnya (M.C.G. Clarke dkk,1982.) dengan skala 1:250.000, struktur geologi yang terdapat di Kota Pekanbaru terdiri dari sesar mendatar dengan arah umum Barat Laut–Tenggara, lipatan Sinklin dan Antiklin dengan arah penunjaman berarah relatif Timur Laut–Barat Daya. Struktur–struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera, sementara itu sesar–sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan Semangko, diduga terjadi pada Kala Miosen Tengah.

Struktur geologi dengan skala regional misalnya Sesar Semangko yang relatif kearah Barat Laut–Tenggara atau relatif searah dengan Pulau Sumatera dapat berfungsi sebagai pemicu terjadinya gempa di sepanjang/ disekitar zona sesar tersebut.

Pembahasan geologi daerah perencanaan disamping mengenai jenis, sebaran dan sifat fisik batuan/ tanah, struktur geologi, juga geomorfologinya, yaitu gambaran yang berkaitan dengan bentang alam dalam hubungannya dengan jenis batuan pembentuknya.

1. Stratigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Pekanbaru dan sekitarnya (M.C.G. Clarke dkk,1982.) dengan skala 1:250.000, wilayah Kota Pekanbaru secara umum terbentuk dari batuan sedimen berumur Plistosen–Holosen, serta endapanalluvium yang proses pengendapannya masih berlangsung hingga sekarang. Secara Lithostratigrafi tidak resmi

batuan penyusun daerah perencanaan dapat dipisahkan menjadi 4 (empat) satuan batuan sebagai berikut:

a. Satuan Batu Lumpur (Tup)IKM

Tersusun dari batulumpur, mengandung karbonan, lignit, sedikit batu lanau dan batu pasir, yang tersebar luas di bagian Utara dan membentuk daerah yang relatif datar hingga berbukit landai, seluas lebih kurang 30 persen dari luas daerah perencanaan. Ciri-ciri satuan tufa ini adalah kandungan batulumpur yang dominan. Satuan batuan ini termasuk dalam Formasi Petani yang terendapkan pada Kala Pliosen Awal-Tengah.

b. Satuan Pasir (Qpmi)

Tersusun dari kerikil, kerakal, pasir dan lempung yang tersebar di bagian Utara dan Selatan seluas lebih kurang 35 persen dari luas daerah perencanaan, membentuk perbukitan landai sampai agak terjal. Satuan batuan ini termasuk dalam Formasi Minas yang terbentuk pada Kala Plistosen.

c. Satuan Aluvium Tua (Qp)

Satuan batuan ini penyebarannya relatif hampir sama dengan satuan batuan lempung tufan (Qpke) tersusun oleh kerikil, pasir, lempung, sisa-sisa tumbuhan dan rawa gambut dan tersebar di bagian Utara, Selatan dan Barat kurang dari 10 persen dari luas daerah perencanaan, dan merupakan batuan endapan lepas yang membentuk pedataran yang luas. Batuannya berwarna abu-abu kehitaman, satuan batuan ini terbentuk pada Kala Plistosen Akhir.

d. Satuan Aluvium Muda (Qh)

Sebaran satuan ini meliputi sepanjang Sungai Siak dan anak-anak sungainya, dengan luas sebaran kurang dari 5 persen dari luas daerah perencanaan. Litologinya terdiri dari lempung, pasir dan kerikil serta endapan sungai atau rawa lainnya dengan ketebalan mencapai 4m. Proses pengendapannya masih berlangsung hingga kini.

2. Jenis Tanah

Secara umum kondisi tanah di Kota Pekanbaru mempunyai daya pikul (T tanah) antara 0,7 kg/cm² - 1 kg/cm², kecuali di beberapa lokasi yang berdekatan dengan anak sungai (T tanah) antara 0,4 kg/cm² - 0,6 kg/cm². Kedalaman efektif tanahnya (*top soil*) sebagian besar kurang dari atau sama dengan 50 cm yang terdapat di bagian tengah. Kedalaman efektif tanah 50–75 cm terdapat di bagian Selatan dan kedalaman lebih dari 100 cm terdapat di bagian Utara Kota Pekanbaru. Fisiografi grup aluvial berdasarkan klasifikasi tanah USDA, tanahnya didominasi oleh Dystropepts dengan asosiasi Tropofulvents dan Tropaquents, sedangkan pada fisiografi dataran (plain) jenis tanah yang mendominasi adalah Topaquents pada areal datar, Humitropepts pada areal datar berombak, dan Kandiodults pada areal berombak sampai perbukitan. Tanah–tanah tersebut terbentuk dari bahan induk sedimen halus masam sehingga walaupun tanah sama tetapi mempunyai perbedaan kepekaan terhadap erosi atau berdasarkan klasifikasi tanah PPT (1983)

termasuk dalam jenis tanah podsolik dan sebagian aluvial. Untuk lebih jelasnya, grup fisiografi tanah dan satuan lahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3. Grup Fisiografi Tanah dan Satuan Lahan Kota Pekanbaru

No	Grup Fisiografi/	Uraian	Lokasi	Komposisi Tanah	Luas	
	Satuan Lahan		(Kecamatan)	(Gol./PPT/USDA)	Ha	%
1	Aluvial	Dataran banjir dari sungai yang bermeander	Tampan	Spodosol/Podzolik Gleiiik/ Tropaquepts	3.919	6,20
		Sedimen tidak dibedakan	Payung Sekaki	Inceptisol/Kambisol Distrik/ Dyspropepts		
			Bukit Raya	Entisol/Litosol/ Tropofluvents		
		Lereng < 3%	Marpoyan Damai	Tropohemists		
			Tenayan Raya			
			Lima Puluh			
			Rumbai			
			Rumbai Pesisir			
2	Aneka Bentuk	Daerah permukiman	Rumbai		6.024	9,53
		Kota besar dan daerah pembangunan	Rumbai Pesisir			
3	Dataran	Dataran banjir dari sungai yang bermeander	Semua Kecamatan	Ultisol/ Podzollik Kandik/ Kandiodults	49.461	78,23
		Sedimen tidak dibedakan		Inceptisol/ Kambisol Distrik/ Dyspropepts		
		Batuan sedimen halus dan kasar		Hapludox		
		Masam		Hapluduts		
		Lereng < 3%		Humittropepts		
		Datar sampai bergelombang (< 8%)		Ultisol/ Podzollik Merah/ Paleodults		
		Berombak		Spodosol/ Podzollik Gleiiik/ Tropaquepts		
		Berombak sampai bergelombang		Entisol/Litosol/ Tropofluvents		
		Berbukit kecil		Tropohemists		
		Perbukitan kecil (lereng > 16%)				
4	Kubah Gambut	Kubah gambut oligotrofik air tawar	Payung Sekaki	Troposaprits	3.822	6,04
		Kedalaman gambut 0.5 - 2 m	Rumbai	Tropohemists		
				Tropofibrits		
		Datar sampai sedikit cembung		Sulfihemits		
Jumlah					63.226	100

Sumber : Rancangan Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan (RHL) Kota Pekanbaru, 2004

D. Hidrologi

Kondisi hidrologi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah.

1. Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai–sungai yang mengalir di Kota Pekanbaru yaitu Sungai Siak, mengalir dari Barat ke Timur di dalam kota, dengan panjang 300 Km dan kedalaman 29 meter serta lebar 100–400 meter yang mempunyai anak–anak sungai seperti : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau, dan Tampan.
2. Hidrologi air tanah kurang baik sebagai air minum, khususnya hidrologi air tanah dangkal dari Formasi Petani. Sedangkan untuk air tanah dangkal dari Formasi Minas memiliki potensi ketersediaan air yang cukup banyak, mengingat kondisi batuan Formasi Minas memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi.

Aliran Sungai di Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

1. Sungai Siak ; dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter/detik
2. Sungai Senapelan ; merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat Jl. Jendral Sudirman dan sebelah utara Jalan Tuanku Tambusai, dengan lebar rata-rata 3-4 meter
3. Sungai Sail ; merupakan penampung utama bagi wilayah sekitar Pasar Laket yang dibatasi Jl. Pelajar di sebelah barat, Jl. Pepaya di sebelah timur, Jl. Mangga di sebelah utara dan Jl. Tuanku Tambusai di selatan
4. Sungai Sago ; merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Jl. Sudirman, Sungai Lunau, Sungai Tanjung Datuk I dan II

Sistem drainase Kota Pekanbaru memanfaatkan saluran alami yang ada, seperti; sungai, rawa, dan lain-lain. Sistem drainase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Lokasi pembuangan utama drainase kota adalah Sungai Siak;
2. Saluran drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak;
3. Saluran drainase sekunder dan tersier pada sub basin anak-anak Sungai Siak;
4. Sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik.

Sistem drainase yang berfungsi sebagai *retention pond* adalah rawa-rawa di sebelah utara Sungai Siak, sampai dengan batas Jl. Sekolah, wilayah rawa ini dibagi 2 (dua) oleh Jl. Yos Sudarso menjadi rawa sebelah barat dan rawa sebelah timur.

E. Klimatologi

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,3°C-36,8°C dengan suhu udara minimum berkisar antara 20,4°C-22,4°C. Curah hujan antara 43-323 mm/tahun. Kelembaban maksimum berkisar antara 98-100 persen dan kelembaban minimum berkisar antara 42,0-55 persen.

F. Penggunaan Lahan

Rencana Hirarki Pusat Pelayanan, Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) dan Arahan Fungsi masing-masing Wilayah Pengembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4. Rencana Arahan Fungsi Setiap Wilayah Pengembangan (WP)

No	WP	Cakupan	Luas WP (Ha)	Hirarki	Arahan Fungsi
1	I	Pekanbaru Kota Sukajadi Limapuluh Senapelan Sail	1.997	Pusat Pelayanan Kota Pekanbaru Kota	• Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa; • Kawasan Perkantoran Swasta; • Pusat Perkantoran Pemerintahan Provinsi; • Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota;
2	II	Rumbai	12.885	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai	• Kawasan Pendidikan; • Kawasan Permukiman; • Kawasan Perdagangan; • Kawasan Pertanian; • Kawasan Lindung; • Kawasan Rekreasi / wisata;
3	III	Rumbai Pesisir	15.733	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai Pesisir	• Pusat Kegiatan Olahraga; • Kawasan Lindung; • Kawasan Permukiman; • Pusat Kegiatan Pariwisata;
4	IV	Bukit Raya Tenayan Raya	19.332	Pusat Pelayanan Kota Tenayan Raya	• Kawasan Permukiman; • Pusat Kegiatan Industri; • Pusat Kegiatan Pergudangan; • Kawasan Perdagangan; • Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota; • Kawasan Pariwisata; • Kawasan Pendidikan Tinggi • Kawasan Pertanian
5	V	Tampan Payung Sekaki Marpoyan Damai	13.279	Sub Pusat Pelayanan Kota Tampan	• Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi; • Pusat Kegiatan Olah Raga • Kawasan Permukiman; • Kawasan Perkantoran; • Kawasan Perdagangan • Kawasan Pergudangan Terbatas

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Penetapan kawasan strategis kota dinilai berdasarkan sudut kepentingannya, antara lain sebagai berikut:

1. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
2. kawasan yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
3. kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
4. kawasan yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

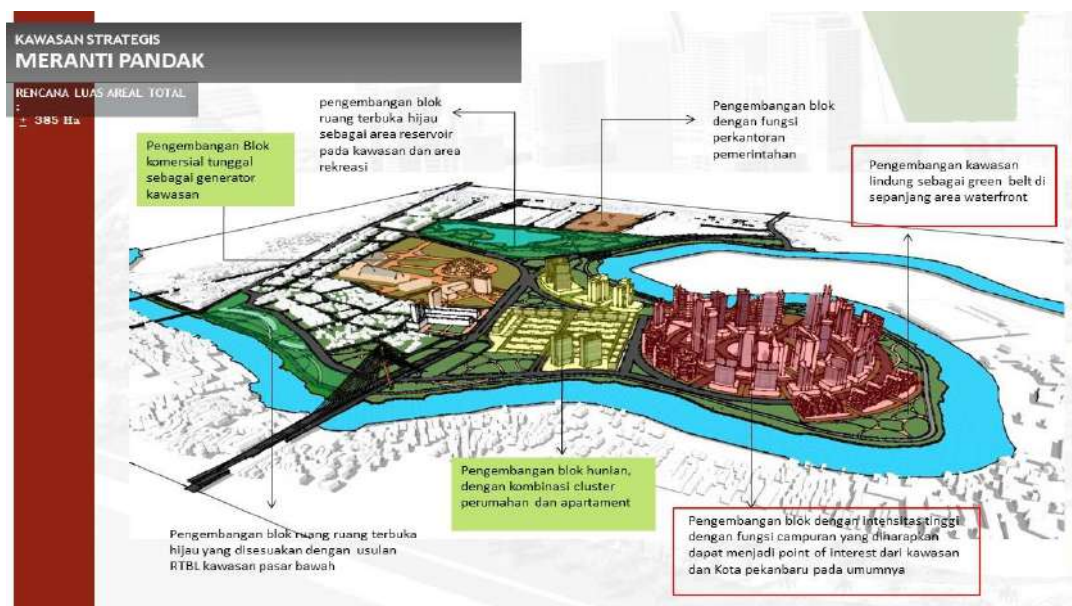
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, maka kawasan strategis di kota Pekanbaru ditetapkan sebagai berikut:

A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Kawasan Meranti Pandak

Kawasan Meranti Pandak dengan tema pusat bisnis kota. Kawasan ini memiliki lokasi yang strategis karena berada tepat di seberang kawasan perdagangan Pasar Pusat dan akan terhubung dengan adanya Jembatan Siak IV. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka meningkatkan pembangunan dan nilai ekonomi wilayah sekitar Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir telah menyusun strategi pengembangan wilayah dengan menyusun penataan blok pada wilayah Kelurahan Meranti Pandak.

Gambar 2.4. Peta Kawasan Meranti Pandak

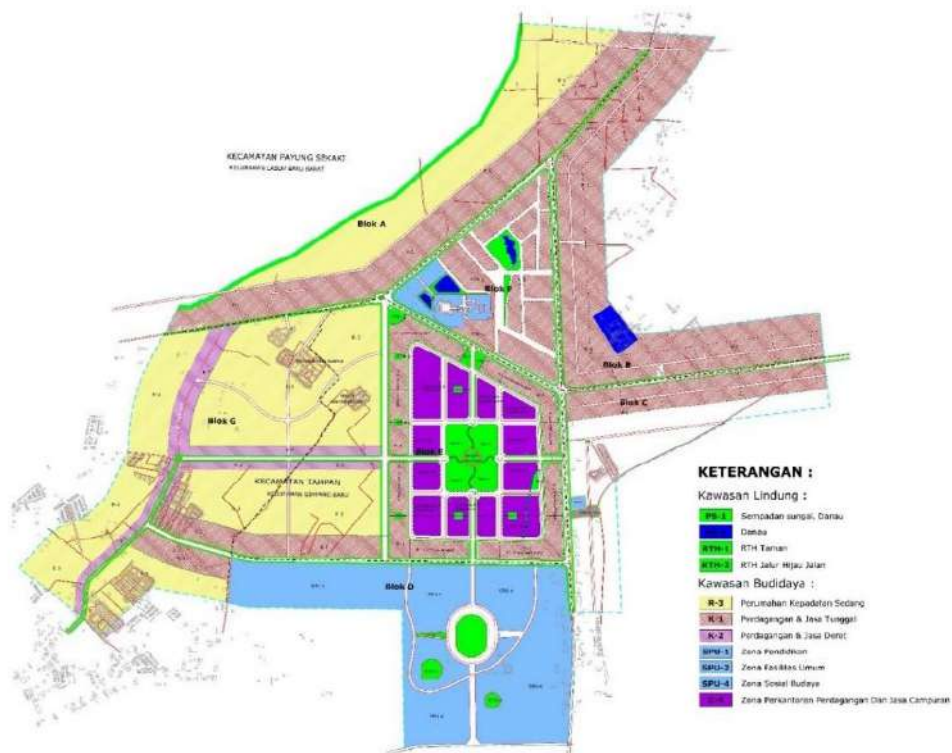


Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

2. Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki

Kawasan ini berada di Kecamatan Payung Sekaki. Kecamatan Payung Sekaki memiliki arahan sebagai peruntukkan Kawasan Pergudangan Terbatas, Kawasan Olahraga, Kawasan Terminal, Kawasan Perdagangan, dan Jasa. Kawasan ini memiliki pusat terminal bus lintas kota. Selain itu, juga sudah ada beberapa pergudangan yang beroperasi. Kawasan Payung Sekaki juga merupakan titik pertemuan antara jalan-jalan besar di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah Jalan Lintas Sumatera. Kawasan Superblok ini sudah terdapat Stadion Utama Riau yang telah beroperasi. Stadion ini juga terhubung dengan Universitas Riau (UNRI). Superblok Payung Sekaki direncanakan untuk didominasi oleh Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang jalannya. Kawasan ini juga memiliki zona untuk pendidikan tinggi sehingga ada potensi keramaian. Selain itu, juga terdapat kawasan untuk perkantoran dan permukiman.

Gambar 2.5. Peta Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

3. Kawasan Komersial Hijau Setia Maharaja

Kawasan Strategis Setia Maharaja merupakan kawasan yang terdapat Lapangan Purna MTQ Pekanbaru. Kawasan ini berada di Kecamatan Bukit Raya, yang diarahkan sebagai tempat Kawasan Permukiman, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa. Kawasan ini meliputi blok Jl. Jenderal Sudirman-Jl.Dt. Setia Maharaja, Jl. Citra/Labersa, Jl. Unggas seluas kurang lebih 1000 Ha dengan tema kawasan adalah

untuk menampung kegiatan komersial yang dilengkapi dengan taman kota. Kawasan ini direncanakan dapat menjadi tempat untuk berinvestasi untuk kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa. Kawasan ini juga diperuntukkan untuk tempat hunian, sehingga adanya potensi permintaan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan kawasan Dt Setia Maharaja akan di wujudkan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta perkantoran dan super blok. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat bisnis terkemuka di Kota Pekanbaru. Jika ditinjau dari lokasinya, kawasan ini berada di simpul jalan yang memiliki kegiatan ekonomi yang kuat, yaitu pertemuan Jalan Arifin Ahmad dan Jalan Jendral Sudirman. Maka dari itu, kawasan strategis ini merupakan kawasan yang menjanjikan sebagai tempat untuk berinvestasi.

Gambar 2.6. Peta Kawasan Komersial Hijau (Setia Maharaja)



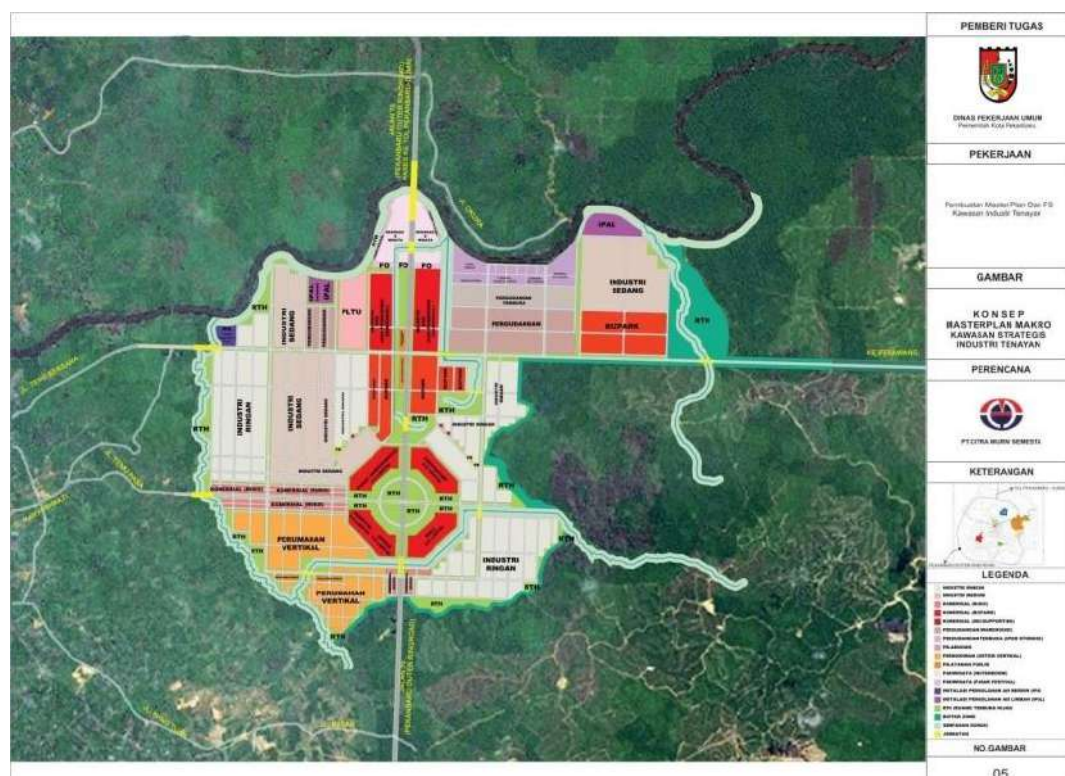
Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

4. Kawasan Perkantoran dan Bisnis

Pengembangan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru salah satunya berfungsi sebagai pemerataan kegiatan pembangunan. Penetapan Kawasan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Tenaya Raya juga memiliki filosofis tersebut. Sehingga kawasan Kecamatan Tenayan Raya dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Untuk pengembangan kawasan tersebut tidak hanya untuk perkantoran pemerintahan namun juga untuk kawasan perkantoran secara umum serta menjadi pusat perdagangan dan jasa dan dikembangkannya superblok di kawasan tersebut.

Dalam rangka memberikan ruang bagi pengembangan industri di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota telah mempersiapkan lahan seluas 1.550 Ha, di Kawasan Tenayan Raya yang diperuntukkan sebagai kawasan industri yang disebut dengan Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru. Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru menjadi bagian pengembangan kawasan industri strategis prioritas RPJMN 2020-2024. Keberadaan Kawasan Industri Tenayan telah diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.

Gambar 2.7. Peta Kawasan Industri Tenayan (KIT)



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengelola Kawasan Industri Tenayan. Kawasan Industri ini

diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp. 28 Triliun, dan berpotensi menyerap 155.000 tenaga kerja, dengan prediksi penerimaan Negara sebesar Rp.14,5 triliun per tahun. Keberadaan Kawasan Industri tenayan ke depan sekaligus sebagai peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dengan munculnya kawasan perkotaan baru berikut dibarengi dengan munculnya lapangan pekerjaan baru.

Untuk menunjang operasional Kawasan Industri Tenayan, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memulai tahap awal pembangunan Jalan Lingkar Kota sepanjang 28,80 Km, yang terdiri dari segmen :

- a. Pintu Tol Pekanbaru – Dumai menuju Rencana Jembatan Siak V sepanjang 12,90 Km;
- b. Rencana Jembatan Siak V – Jalan Badak, sepanjang 7,80 Km;
- c. Jalan Badak – Jalan Lintas Timur, sepanjang 3,60 Km;
- d. Jalan lintas Timur – Batas Kabupaten Kampar, sepanjang 4,50 Km.

Progres sampai dengan saat ini terdiri dari pembebasan lahan (70%) dan pembukaan badan jalan, serta pada beberapa lokasi telah dilaksanakan pembangunan konstruksi perkerasan jalan. Keberadaan Jalan Lingkar ini akan berfungsi untuk menghubungkan Kawasan Industri Tenayan dengan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai (sudah beroperasi) dan dengan Jalan Tol Pekanbaru – Jambi yang saat ini sedang tahap pembebasan lahan. Disamping itu, juga berfungsi untuk pengembangan Kota Pekanbaru di masa mendatang.

B. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan Kota Lama Senapelan, Meliputi Kawasan dengan batasan wilayah Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Riau, Jl. Panglima Undan, Sungai Siak. Sub Tema Kawasan kota lama lini meliputi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi dan budaya, diantaranya:

1. Kampung Bandar dengan tema perlindungan sejarah dan wisata religi. Kampung Bandar dengan Mesjid Raya Pekanbaru sebagai titik utama (*centralpoint*) juga merupakan kawasan cagar budaya karena merupakan bagian dalam perjalanan awal terbentuknya Kota Pekanbaru.
2. Kampung Dalam dengan tema wisata belanja dan budaya.
Bersebelahan dengan sub kawasan Kampung Bandar, Kampung Dalam merupakan sub kawasan yang memiliki hubungan sejarah dengan Mesjid Raya Pekanbaru. Keberadaan Pasar Wisata Pasar Bawah menjadi titik utama kawasan mengusung sejarah sebagai salah satu pasar barang-barang impor dengan harga “miring”. Saat ini pasar tersebut telah mengalami transformasi bentuk menjadi lebih modern dan menyediakan barang-barang dari dalam dan luar negeri (negeri jiran).

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Sekitar Danau Bandar Khayangan, Danau Bandar Kayangan yang terletak di Kecamatan Rumbai Timur berada di sebuah tanjung pada sebuah danau yang dibuat dengan membendung aliran air. Danau Bandar Kayangan dijadikan ikon unggulan wisata di Kota Pekanbaru sebagai sebuah kawasan untuk berwisata bagi penduduk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Konsep dari Kawasan Wisata Bandar Kayangan adalah Taman hiburan/kawasan untuk semua orang. Luas area Lahan Danau Bandar Kayangan sebesar 800 hektar dengan Fasilitas yang tersedia di Kawasan Danau Bandar Kayangan adalah sebagai berikut:

1. Hotel, cafe serta pusat souvenir
2. Zona taman air, Zona Jet coaster, Zona rumah kaca, Zona taman bermain, Zona Bungalow, Zona Gokart, Zona restoran dan roda putar, Zona pemancingan, Zona pemancingan, Zona petualangan/outbond, Zona piknik dan Zona pusat jajan.

Kawasan Danau Buatan Bandar Kayangan meliputi kawasan danau dan sekitarnya dengan radius kurang lebih 500 m ke arah darat. Kawasan ini termasuk kawasan strategis dengan fungsi ekologi dengan tujuan utama mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan danau. Selain itu, pemanfaatan yang diperkenankan pada kawasan ini adalah kegiatan pariwisata dan permukiman terbatas yang diatur lebih lanjut dalam rencana rinci/detail serta peraturan zonasi.

Gambar 2.8. Peluang Investasi Kawasan Bandar Khayangan



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

2.1.1.3.1 Wilayah Rawan Bencana Banjir/ Genangan

Kota Pekanbaru memiliki 18 (Delapan belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara ke Sungai Siak, diantaranya:

- Wilayah Utara Sungai Siak, muara di Sungai Siak: Takuana, Umban, Meranti, Limbungan, Ukai, Lukud.
- Selatan Sungai Siak, muara di Sungai Siak: Sibam, Air Hitam, Pembangunan, Senapelan, Sago, Limau, Sail, Tenayan, Pendana
- Selatan Sungai Siak, muara di Sungai Kampar: Tarai, Cipta Karya, Kelulut

Wilayah yang terletak di tepian Sungai Siak dan anak sungai Siak merupakan kawasan yang berpotensi banjir dan genangan. Secara topografi kawasan ini terletak pada daerah yang relatif rendah dengan ketinggian elevasi antara 1,50 sampai 2,50 meter di atas permukaan air laut dan setiap musim hujan sering mengalami banjir yang disebabkan oleh :

- Meluapnya Sungai Siak ;
- Tingginya curah hujan, terutama di bagian hulu dan ;
- Pengaruh pasang dari laut.

Disamping masalah tersebut, anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi. Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020, terdapat 121 Titik Banjir/Genangan di Kota Pekanbaru, dengan luas genangan sebesar 294,36 Ha.

Kondisi yang dijelaskan diatas, mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di musim penghujan. Secara umum penyebab munculnya genangan/banjir di Kota Pekanbaru antara lain:

- Perilaku pengembang ruko/perkantoran yang menutupi drainase tanpa memperhatikan kaidah teknis sehingga ketika hujan, air dari halaman ruko/perkantoran tersebut tidak masuk ke drainase malah terperangkap di badan jalan.
- Banyaknya sampah dan sedimentasi di dalam drainase akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam drainase sehingga menghambat aliran air.
- Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun disebabkan pertumbuhan pemukiman dan pembangunan Kota yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan.
- Belum terintegrasinya drainase di beberapa titik di Kota Pekanbaru serta rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana prasarana pengendali banjir untuk mengantarkan air permukaan di kawasan terbangun ke pembuangan akhir (badan air penerima).

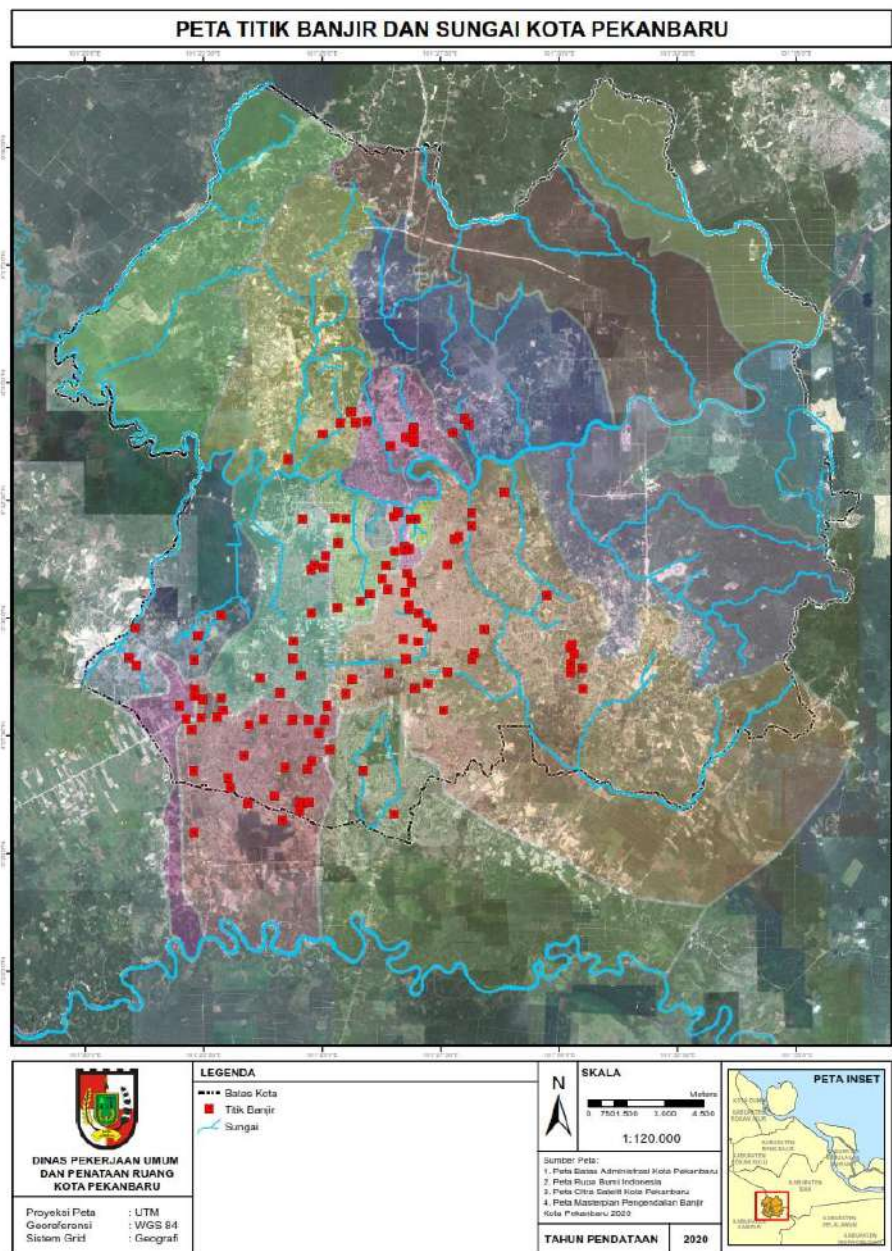
Tabel 2. 5. Titik-Titik Genangan dan Lokasi Banjir di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Luas banjir (Ha)
1	Bina Widya	23	49,93724
2	Bukit Raya	5	5,918172
3	Kulim	4	4,937334
4	Lima Puluh	4	2,875073
5	Marpoyan Dama	17	42,135673
6	Payung Sekaki	11	24,543613
7	Pekanbaru Kota	5	2,43151
8	Rumbai	10	24,107342
9	Rumbai Timur	6	43,378283
10	Sail	1	0,686921
11	Senapelan	2	5,07429
12	Sukajadi	7	14,219966
13	Tenayan Raya	7	4,852323
14	Tuah Madani	17	67,760755
15	Pekanbaru, Kampar	2	1,502873
Total		121	294,36

Sumber: Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 121 titik banjir dengan luasan banjir 294,36 Ha yang terjadi pada sistem drainase Kota Pekanbaru. Adapun saluran drainase di Kota Pekanbaru meliputi saluran primer dengan panjang 163,8 Km dan saluran sekunder dengan panjang 172,3 Km.

Gambar 2.9. Peta Titik Banjir dan Sungai Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2022

2.1.1.3.2 Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebagaimana dimaklumi bahwa Kota Pekanbaru disamping rentan terhadap bencana banjir di musim hujan, namun juga rentan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jenis tanah yang ada di Kota Pekanbaru terdapat jenis tanah organosol. Tanah Organosol merupakan tanah organik yang berasal dari gambut dan rawa, selain jenis tanah lahan kebun juga merupakan salah satu penyebab rawan kebakaran hutan dan lahan.

Khusus pada Bencana Karhutla di Kota Pekanbaru, kejadian bencana hanya melanda kebakaran lahan, persisnya pada lahan gambut yang mendominasi 60 % lahan yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan bencana kebakaran selama ini belum pernah melanda hutan yang ada di Kota Pekanbaru. Tingginya frekuensi dan intensitas bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai akibat:

- Belum optimalnya dukungan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
- Perilaku masyarakat yang masih belum memperhatikan lingkungan
- Meningkatnya kebutuhan lahan yang pembersihannya dengan cara membakar.
- Pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca ekstrem telah mempengaruhi dampak bencana,
- Kemampuan mitigasi bencana secara umum masih belum memadai, baik mitigasi struktural maupun non struktural.

Menurut Indeks Risiko Bencana 2015-2021 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Pekanbaru Tahun 2021 adalah 34,16 dengan kelas risiko Tinggi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sejak awal Februari 2022, kasus Karhutla di Riau sudah mencapai 91,46 hektare, dengan wilayahnya sebagian besar di kawasan pesisir, dimana kebakaran lahan/hutan di Kota Pekanbaru sebesar 2,13 hektare.

BPBD Kota Pekanbaru telah mendata kejadian kebakaran lahan di beberapa wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah kejadian yang mengalami penurunan pada tahun 2021. Berikut data kejadian kebakaran lahan per wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 2. 6. Kejadian Kebakaran Lahan per Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru
Tahun 2019 – 2021

No	Kecamatan	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Kejadian	Luas (Ha)	Kejadian	Luas (Ha)	Kejadian	Luas (Ha)
1	Tenayan Raya	14	33,2105	11	9,0753	8	17,2015
2	Kulim					-	-
3	Bina Widya (Tampan)	36	15,522	14	2,4399	11	6,715
4	Tuah Madani (Tampan)					1	0,012
5	Rumbai	18	47,1075	11	54,43	10	13,38
6	Rumbai Barat					1	1
7	Rumbai Timur (Rumbai Pesisir)	5	13,5265	7	5,335	2	2,1
8	Payung Sekaki	60	85,5455	11	1,6375	13	18,9075
9	Marpoyan Damai	19	4,9215	4	0,495	7	4,9175

No	Kecamatan	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Kejadian	Luas (Ha)	Kejadian	Luas (Ha)	Kejadian	Luas (Ha)
10	Bukit Raya	44	57,937	22	4,0248	12	17,323
11	Senapelan	-	-	-	-	-	-
12	Sukajadi	-	-	-	-	-	-
13	Sail	-	-	-	-	-	-
14	Pekanbaru Kota	-	-	-	-	-	-
15	Lima Puluh	2	0,56	1	1	-	-
Total		198	258,3305	81	78,4375	65	81,5565

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2022 (diolah)

Jumlah titik api yang banyak berdampak pada menurunnya kualitas udara di Kota Pekanbaru menjadi “berbahaya” sehingga mengganggu kesehatan dan penerbangan serta hubungan baik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, upaya meminimalisir kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi prioritas penanganan bencana di Kota Pekanbaru.

Disamping bencana banjir dan kebakaran lahan, Kota Pekanbaru juga mengalami bencana puting beliung, tanah longsor, dan semburan gas lumpur yang terjadi di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2021 yang tidak memakan korban jiwa. Berikut ini adalah lokasi kejadian dan yang terdampak bencana banjir, kebakaran lahan, puting beliung, dan semburan gas lumpur yang telah didata oleh BPBD Kota Pekanbaru sejak tahun 2021:

Tabel 2. 7. Kejadian Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Jumlah Lokasi	KK Terdampak
1	Januari	2	5	487
2	Februari	-	-	-
3	Maret	4	17	502
4	April	4	17	120
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	1	6	110
11	November	2	8	18
12	Desember	4	5	15
Jumlah		17	58	1252

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2022 (diolah)

Tabel 2. 8. Kejadian Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Jumlah Lokasi	Luas (Ha)
1	Januari	2	2	0,1675
2	Februari	4	4	1,95
3	Maret	8	14	45,6009
4	April	4	4	10,68
5	Mei	1	1	0,02
6	Juni	4	4	0,63
7	Juli	10	12	8,138
8	Agustus	5	7	4,3325
9	September	4	5	2,07
10	Oktober	5	9	5,36
11	November	2	2	1,5
12	Desember	3	4	3,1
Jumlah		52	68	83,5489 Ha

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2022 (diolah)

Tabel 2. 9. Kejadian Puting Beliung di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Jumlah Lokasi	Terdampak (KK)
1	April	1	1	1
Jumlah		1	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2022 (diolah)

Tabel 2. 10. Kejadian Gas Lumpur di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Jumlah Lokasi	Luas (Ha)
1	Februari	1	1	± 0,5 Ha
Jumlah		1	1	± 0,5 Ha

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2022 (diolah)

2.1.1.4. Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Dalam perspektif pembangunan berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, namun juga berperan penting sebagai subjek pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil

apabila pembangunan direncanakan secara seksama dengan memperhitungkan berbagai aspek. Salah satu detrmnan penting dalam perencanaan pembangunan adalah aspek penduduk beserta dampak-dampaknya.

Kota Pekanbaru sebagai Kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Riau dihadapkan pada tantangan dinamika kependudukan yang lebih kompleks dibandingkan kota/kabupaten lain. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 sebesar 1.064.566 jiwa, sampai dengan tahun 2019 meningkat menjadi 1.143.359 jiwa. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Pekanbaru tercatat sebesar 983.356 jiwa atau ekuivalen dengan 15,38 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Riau. Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 994.585 jiwa, yang terdiri dari 500.330 penduduk laki-laki dan 494.255 penduduk perempuan, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.064.566	1.091.088	1.117.359	1.143.359	983.356	994,585
- Laki-laki (orang)	546.400	559.917	573.206	586.299	495.177	500.330
-Perempuan (orang)	518.166	531.171	544.153	557.060	488.239	494.255
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)	1.684	1.725	1.767	1.817,86	1.555	1.576
Laju pertumbuhan Penduduk (%)	2,55	2,49	2,70	2,86	0,89	1,53

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tuahmadani (14,32%), Marpoyan Damai (12,86%), dan Tenayan Raya (10,45%) adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Jika dibagi dengan luas wilayah, terlihat bahwa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh memiliki kepadatan penduduk paling besar dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaran penduduk di 15 kecamatan Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan Peta jumlah penduduk serta sebaran penduduk dibawah ini sebagai berikut.

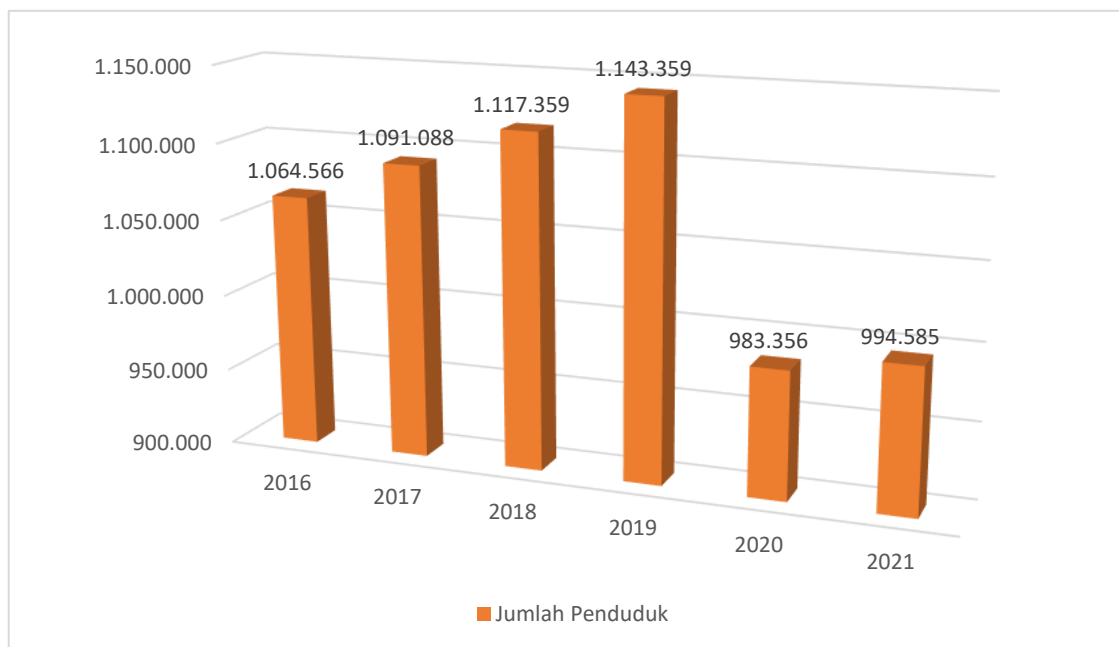
Tabel 2. 12. Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK (%)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK PER KM2
1	Payung Sekaki	35,55	89.309	8,98	1,32	2.512
2	Tuah Madani	29,84	142.464	14,32	2,48	4.774
3	Binawidya	36,59	72.614	7,30	2,61	1.985

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK (%)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK PER KM2
4	Bukit Raya	22,05	93.712	9,42	0,33	4.250
5	Marpoyan Damai	29,74	127.897	12,86	0,32	4.301
6	Tenayan Raya	114,40	103.899	10,45	3,07	908
7	Kulim	56,87	53.898	5,42	3,07	948
8	Limapuluh	4,04	38.647	3,89	0,12	9.566
9	Sail	3,26	20.402	2,05	0,12	6.258
10	Pekanbaru Kota	2,26	22.624	2,27	0,12	10.011
11	Sukajadi	3,76	42.889	4,31	0,12	11.407
12	Senapelan	6,65	35.388	3,56	0,12	5.322
13	Rumbai	61,86	92.195	9,27	1,46	1.490
14	Rumbai Barat	86,01	25.205	2,53	2,97	293
15	Rumbai Timur	138,31	33.442	3,36	2,53	242
Total		632,26	994.585	100,00	1,53	1.576

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022

Grafik 2.1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

PETA JUMLAH PENDUDUK

DIAGRAMA LOKASI

KETERANGAN

Sudut Koordinat
Lintang : 0° 0' 0"
Bujur : 103° 0' 0"

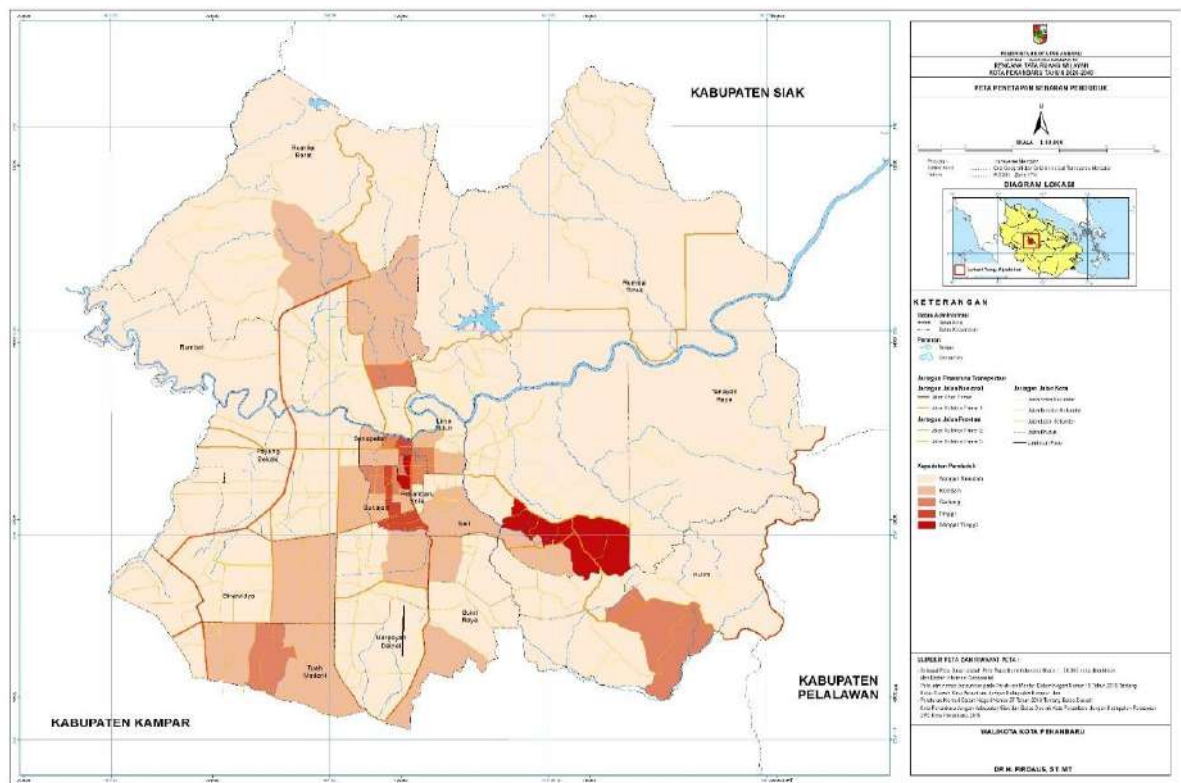
Tipe Jalur
Jalan
Jalan Tol

Legenda Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Warna
< 70 jiwa/km ²	Putih
70 - 199 jiwa/km ²	Hijau Muda
200 - 499 jiwa/km ²	Hijau Tua
≥ 500 jiwa/km ²	Biru

Informasi & Sumber Peta:
Peta ini dibuat dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Geografi Kabupaten Siak.
Peta ini dibuat untuk keperluan administrasi pemerintahan dan sebagai acuan dalam pembangunan wilayah.
Peta ini dibuat pada tanggal 10 Mei 2023 di Kabupaten Siak.

Gambar 2.11. Peta Sebaran Penduduk di Kota Pekanbaru



RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 | BAB II - 26

Komposisi penduduk Kota Pekanbaru digolongkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua.

Tabel 2. 13. Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
0 - 4	49.915	47.114	97.029	9,76
5 - 9	45.241	43.272	88.513	8,90
10 - 14	41.681	38.585	80.266	8,07
15 - 19	39.984	37.968	77.952	7,84
20 - 24	41.967	42.082	84.049	8,45
25 - 29	42.991	43.883	86.874	8,73
30 - 34	42.023	42.666	84.689	8,52
35 - 39	39.206	40.477	79.683	8,01
40 - 44	36.728	37.497	74.225	7,46
45 - 49	33.953	34.296	68.249	6,86
50 - 54	28.046	28.152	56.198	5,65
55 - 59	23.044	22.442	45.486	4,57
60 - 64	16.041	15.484	31.525	3,17
65 - 69	10.860	11.041	21.901	2,20
70 - 74	4.893	4.948	9.841	0,99
75+	3.757	4.348	8.105	0,81
PEKANBARU	500.330	494.255	994.585	100

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh kelompok umur 0-5 tahun (9,76%), diikuti kelompok umur 5-9 tahun (8,90%), dan kelompok umur lainnya (8,73 %). Jika dilihat dari kelompok umur 0-5 tahun menunjukkan angka masa golden age anak, di mana anak tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sehingga, itu menjadi fase penting dipantau orangtua. Untuk kelompok umur sekolah mulai dari TK hingga sekolah menengah atas atau kisaran umur 5-19 tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 246.731 jiwa atau 24,81% dari total penduduk tahun 2021. Dengan tingginya usia sekolah maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan harus dipersiapkan.

Adapun penduduk usia 20-54 tahun sejumlah 533.967 jiwa atau sebesar 53,69% dari total penduduk Kota Pekanbaru. Hal ini menggambarkan pentingnya penduduk usia kerja yang nantinya akan meningkatkan produksi dan dengan bekerja akan meningkatkan pendapatan serta dalam rumah tangga akan mengkonsumsi produk lebih banyak. Rumah tangga ini juga akan menabung lebih banyak yang berdampak pada kenaikan investasi, peningkatan modal, dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian.

Jumlah penduduk yang berumur antara 65 hingga di atas 75 tahun sebanyak 39.847 jiwa atau 4,01% dan penambahan kelompok umur ini menunjukkan terjadinya perbaikan dari aspek kesehatan masyarakat, namun tetap memperhatikan kelompok ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Bila umur dikelompokkan lagi maka komposisi penduduk tahun 2021 menunjukkan populasi penduduk Kota Pekanbaru termasuk populasi muda dan berkembang. Terdapat 26,73 persen kelompok penduduk yang termasuk kategori usia muda (0-14 tahun), kelompok usia kerja (15-64 tahun) sebesar 69,27 persen dan kelompok usia tua/lansia (65 tahun ke atas) sebesar 4,00 persen.

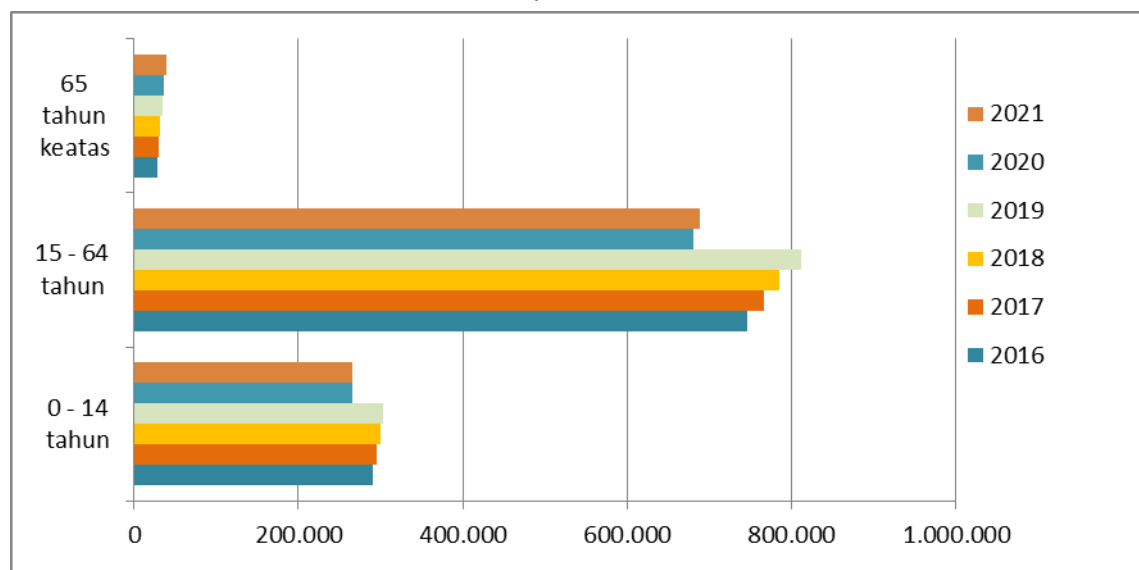
Tabel 2. 14. Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016-2021

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN DAN PERSENTASE											
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	0 – 14 tahun	290.561	27,29	294.961	27,03	299.195	26,77	303.129	26,37	266.060	27,06	265.808	26,73
2	15 – 64 tahun	745.829	70,05	766.025	70,21	785.938	70,33	811.622	70,62	680.441	69,19	688.930	69,27
3	65 tahun ke atas	28.178	2,65	30.102	2,76	32.226	2,88	34.608	3,01	36.855	3,75	39.847	4,00
JUMLAH		1.064.568	100	1.091.088	100	1.117.359	100	1.149.359	100	983.356	100	994.585	100

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat gambaran kelompok umur penduduk kota Pekanbaru kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Dilihat dari tabel tersebut, persentase terbesar jumlah penduduk Kota Pekanbaru berada pada usia produktif yaitu pada kelompok umur 15–64 tahun, dimana Kota Pekanbaru memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang karena sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif.

Grafik 2.2. Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru
Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 - 2021



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terbagi kedalam 3 fokus yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga.

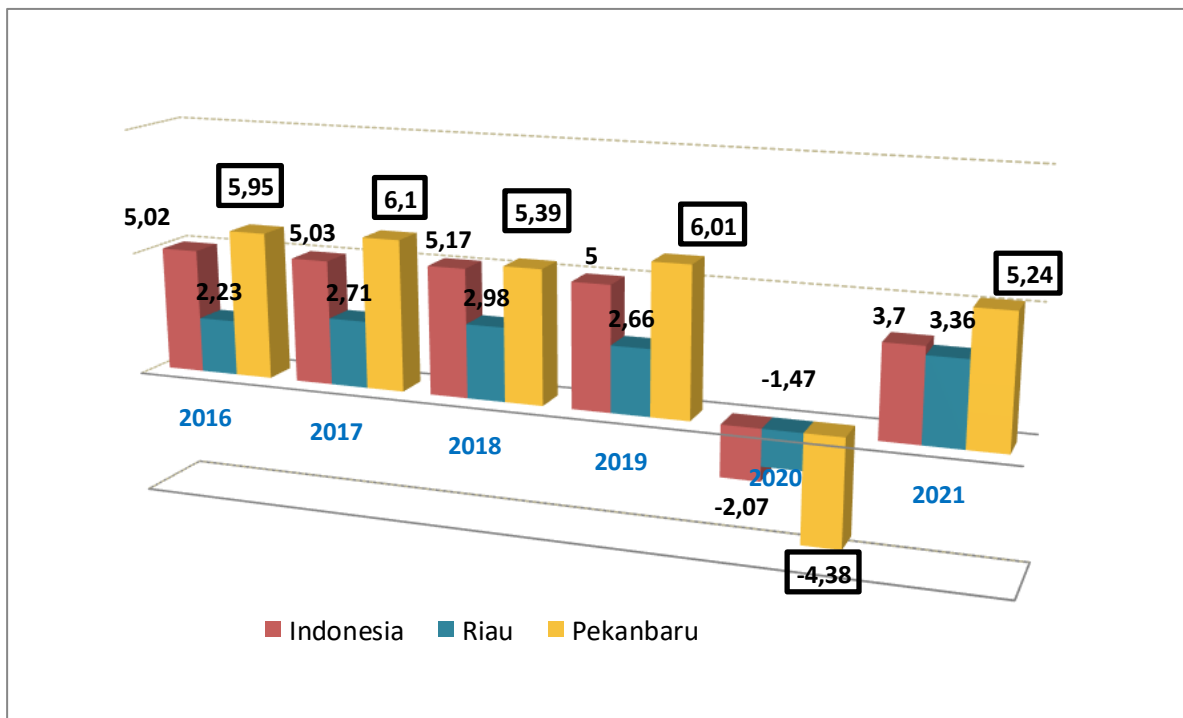
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, indeks gini pemerataan pendapatan, persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja perekonomian Kota Pekanbaru selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir selalu berada lebih baik atau di atas angka nasional dan angka provinsi Riau, dengan selisih yang bervariasi. Puncaknya pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mencapai 6,1 persen.

Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2021 sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diyakini bahwa kegiatan *refocusing* dan vaksinasi covid-19 serta upaya penanggulangan covid maupun kebijakan kemudahan berinvestasi dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Kota Pekanbaru. Hal ini jauh meningkat jika dibandingkan tahun 2020, ekonomi Kota Pekanbaru berkontraksi sebesar 4,38 persen, dengan kontribusi PDRB sebesar 15,8 persen terhadap Provinsi

Riau, hal ini lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,01 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor Perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi yang mengalami tekanan pandemi covid-19 dan akibat situasi global dan domestik.

Grafik 2.3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022 (diolah oleh Bappeda Kota Pekanbaru)

Perekonomian Kota Pekanbaru berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 126,555 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2021 mencapai Rp.72,619 triliun. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dihasilkan oleh sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yakni sebesar 29,23 persen. Selanjutnya sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 29,57 persen dan Industri Pengolahan sebesar 21,09 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada sector penyediaan akomodasi dan makan minum (17,59 persen) dan paling rendah pada sektor pengadaan listrik dan gas (-3,86 persen).

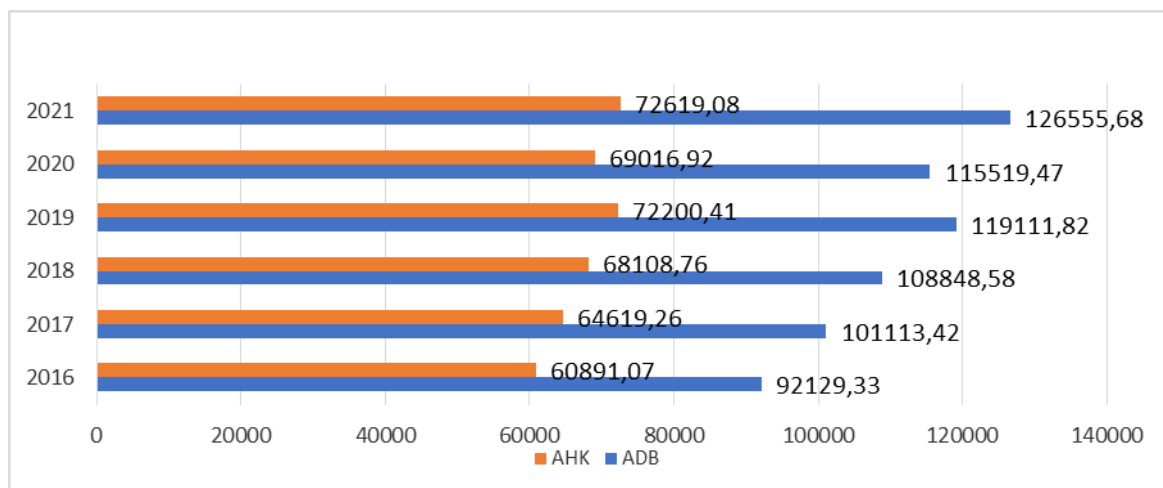
Tabel 2. 15. PDRB Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usahan Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sektor		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan		Distribusi Persentase Atas Dasar Harga Berlaku 2021	Laju Pertumbuhan 2021
		2020	2021	2020	2021		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,946,110	2.094,47	1,094,890	1.116,83	1,65	2,02
B	Pertambangan dan Penggalian	20,83	21,76	10,44	10,65	0,02	2,02
C	Industri Pengolahan	24,001,300	26.689,97	15,954,080	16.286,78	21,09	2,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	306,93	298,62	185,55	178,28	0,24	-3,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,75	17,24	12,44	12,81	0,01	3,02
F	Konstruksi	34,855,990	37.422,52	20,074,510	20.680,99	29,57	3,02
G	Perdagangan Besar da Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	33,771,530	37.897,05	17,956,630	19.895,41	29,94	10,81
H	Transportasi dan Pergudangan	2,281,380	2.378,07	1,289,030	1.322,97	1,88	2,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,701,680	2.019,35	886,27	1.043,19	1,6	17,59
J	Informasi dan Komunikasi	3,217,740	3.472,00	2,792,440	2.997,46	2,74	7,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,810,220	4.260,99	2,545,450	2.694,50	3,37	5,86
L	Real Estat	3,038,660	3.202,52	1,985,560	2.051,35	2,53	3,18
M	Jasa	18,180	18,40	11,040	11,22	0,01	1,69
N	Perusahaan						
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,193,270	31.188,32	2,335,920	2.316,96	2,52	-0,81
P	Jasa Pendidikan	1,340,300	1.400,28	709,1	733,81	1,1	3,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	871,66	984,27	497,86	556,49	0,78	11,78
R	Jasa Lainnya	1,126,940	1.189,85	675,71	709,39	0,94	4,99
S							
T							
U							
Total		115,519,460	126.555,68	69,016,920	72.619,08	100.00.00	5,24

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022

Perkembangan nilai PDRB Kota Pekanbaru baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan 2010 selama periode 2016–2021 yang selalu mengalami peningkatan, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.4. PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

Struktur perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2021 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 83,27 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (50,48 persen), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,77 persen. Pada tahun 2021, Jika ditelaah menurut komponen pengeluaran, nilai PDRB ADHB untuk setiap komponen tercatat lebih tinggi dari tahun 2020 karena adanya faktor inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) selama tahun 2021.

Tabel 2. 16. PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016–2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49.959,90	54.376,92	57.737,08	60.793,83	60.956,82	63.888,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	802,29	922,29	1.079,62	1.325,26	1.331,90	1.332,82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.826,75	8.221,45	8.541,27	9.650,47	10.181,39	9.836,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto	83.649,46	89.376,15	92.389,20	97.854,92	96.472,93	105.378,52
Perubahan Inventori	2.111,60	662,29	954,49	1.262,95	201,53	363,11
Net Expor Barang dan Jasa	-52.220,66	-52.445,69	-52.130,28	-52.123,52	-53.625,11	-54.243,14
PDRB	92.129,33	101.113,42	108.571,37	118.763,89	115.519,46	126.555,68

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

Catatan: *Angka sementara, **Angka sangat sementara

Tabel 2. 17. PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun 2016–2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	31.592,90	33.217,66	34.827,79	35.430,42	34.583,72	35.626,56
Pengeluaran Konsumsi LNPR	539,71	588,28	658,46	788,88	776,72	766,77
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.746,33	5.786,55	5.813,75	5.964,91	5.633,17	5.463,05
Pembentukan Modal Tetap Bruto	51.133,53	53.210,56	54.277,37	55.931,39	54.840,16	57.413,53
Perubahan Inventori	1.130,63	562,37	436,40	597,51	971,00	208,65
Net Expor Barang dan Jasa	-29.252,01	-28.746,17	-27.909,17	-26.529,67	-27.825,39	-26.861,49
PDRB	60.891,07	64.619,26	68.104,59	72.183,56	69.000,14	72.619,08

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

Catatan: *Angka sementara, **Angka sangat sementara

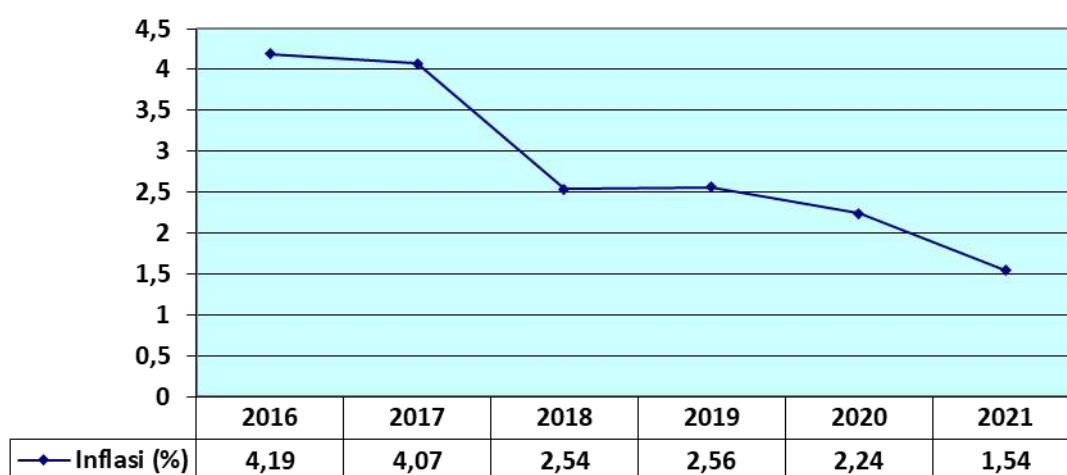
terlihat bahwa nilai PDRB Kota Pekanbaru atas dasar harga konstan yakni dari 60.891,07 miliar rupiah (2016) menjadi 72.169,08 miliar rupiah (2021).

A. Laju Inflasi Kota Pekanbaru

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Inflasi di Kota Pekanbaru selama periode Tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi naik turun. Tahun 2021, inflasi Kota Pekanbaru sebesar 1,54 %. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2016 yakni 4,19 % year on year (yoy). Sedangkan pada tahun 2020, inflasi dipengaruhi oleh pandemi covid-19, dimana inflasi Kota Pekanbaru lebih rendah dari inflasi Provinsi Riau sebesar 2,42 %.

Grafik 2.5. Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021



Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2. 18. Tingkat inflasi bulanan Kota Pekanbaru 2021

No	Bulan	Tingkat Inflasi
		(%)
1	Januari	0,47
2	Februari	-0,33
3	Maret	0,15
4	April	0,10
5	Mei	-0,04
6	Juni	0,01
7	Juli	0,31
8	Agustus	-0,07
9	September	0,19
10	Oktober	0,29
11	Nopember	0,39
12	Desember	0,07

Sumber: BPS Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru mengalami inflasi tertinggi pada bulan Januari yang mencapai 0,47%. Pada bulan Februari dan Mei Kota Pekanbaru mengalami deflasi sebesar -0,33 % dan -0,04 %.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, dimana bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Konsep kemiskinan yang digunakan mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pengentasan kemiskinan ini telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan berbagai macam program yang telah direncanakan seperti: 1) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro; 2) Program pengembangan UMKM; 3) Program penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota; 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga, adat dan masyarakat hukum adat; 5) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; 6) Program penempatan tenaga kerja; 7) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 8) Program kerawanan pangan; 9) Program Perlindungan jaminan sosial; 10) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; 11) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 12) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 13) Program pengelolaan profil kependudukan; 14) Program kawasan permukiman; 15) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 16) Program penyelenggaraan statistik sektoral; 17) Program aplikasi informatika; 18) Informasi dan komunikasi publik; 19) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum; 20) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah; 21) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS); 22) Program pembinaan keluarga berencana (KB); 23) Program pengelolaan pendidikan; 24) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 25) Program pengelolaan perikanan budidaya; dan 26) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan data statistik, tetapi penanganan program kemiskinan harus dapat langsung menyentuh terhadap manfaat kepada masyarakat melalui adanya integrasi antar program. Dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021 direkomendasikan beberapa strategi antara lain : 1). Fokus pada target melalui pemberdayaan masyarakat miskin terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan dan kesehatan); 2). Mensinergikan program lintas OPD di Kota Pekanbaru; 3). Mengoptimalkan Alokasi Anggaran Penaggulangan Kemiskinan; 4). Menyesuaikan Target Kinerja Yang Akan Dicapai; 6). Memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui Dana Dekon dan CSR.

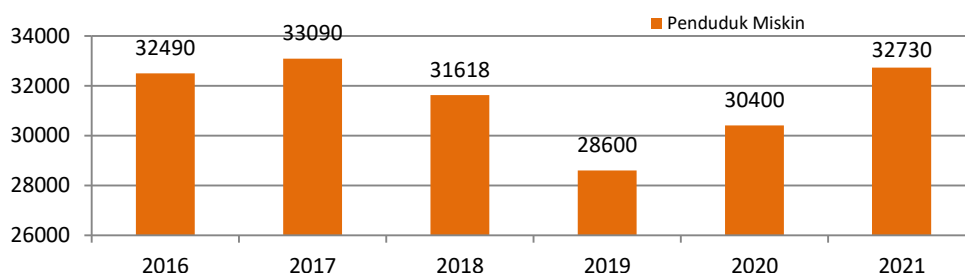
Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sebesar Rp.613.183, naik sebesar 4,06 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp. 589.281.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode tahun 2017 –2021, P1 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Nilai P1 pada tahun 2017 sebesar 0,61 mengalami penurunan menjadi 0,49 pada tahun 2018 dan 0,31 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, nilai P1 mengalami peningkatan menjadi 0,48. P1 mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 0,19. Nilai P1 yang rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 di Kota Pekanbaru berfluktuasi pada periode tahun 2017 -2021. Nilai P2 pada tahun 2021 adalah nilai P2 yang terendah sepanjang 5 (lima) tahun terakhir.

Persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2021 sebesar 2,83 persen, naik 0,21 persen poin terhadap tahun 2020. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2021 sebanyak 32.730 orang, naik 7,66 persen terhadap tahun 2020. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang melanda Kota Pekanbaru.

Grafik 2.6. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru



Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2. 19. Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp)	435.082	473.788	499.852	516.368	589.281	613.183
Penduduk Miskin (orang)	32.490	33.090	31.618	28.600	30.400	32.730
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,07	3,05	2,85	2,52	2,62	2,83
Indeks Gini Rasio	-	-	0,351	0,363	0,345	0,391

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, untuk skala Provinsi Riau angka kemiskinan di Kota Pekanbaru tercatat paling rendah, yakni hanya 2,83% dan setelahnya ada Kota Dumai dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,42%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau adalah Kepulauan Meranti dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 48,5 ribu jiwa atau 25,68%.

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika indeks gini antara 0,20 sampai 0,35.

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru, selama periode 2018-2021, angka indeks gini berkisar antara 0,351 – 0,391 dengan trend berfluktuatif. Indeks gini ini memberi arti distribusi pendapatan di Kota Pekanbaru bergerak dari 0,351 pada tahun 2018 dan kemudian meningkat menjadi 0,363 di tahun 2019. Tahun 2020 menurun menjadi 0,345 dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 0,391. Pergerakan kategori tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Pekanbaru kedepan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (multi stakeholders) sehingga seluruh program dan kegiatan dapat saling melengkapi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru. Melalui TKPK ini diharapkan seluruh program kemiskinan dapat dilaksanakan secara sinergi pada seluruh aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu; Index pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita. Kinerja pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru untuk setiap indikator disajikan sebagai berikut:

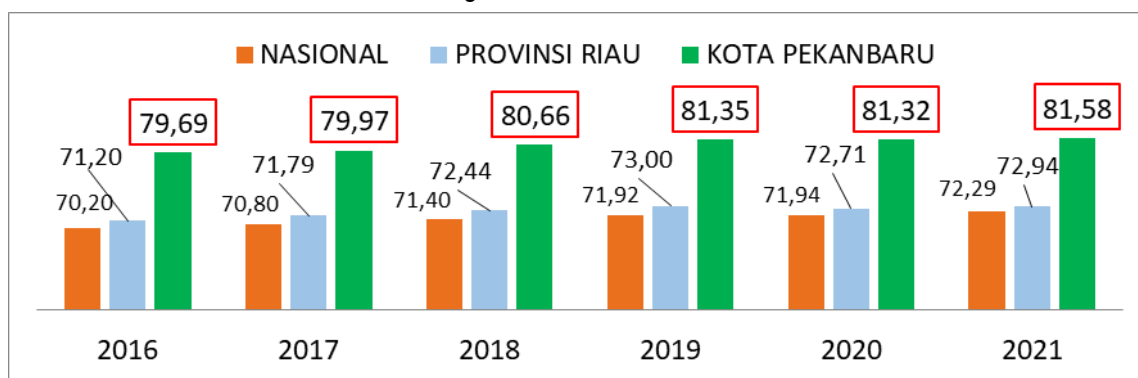
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata skor capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sejak tahun 2016 IPM Kota Pekanbaru terus tumbuh secara konsisten.

Di Kota Pekanbaru, perekonomian wilayah ini utamanya ditopang oleh Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri pengolahan. Pada tahun 2020 pertumbuhan IPM Kota Pekanbaru menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat yang semula pada tahun 2019 sebesar 81,35, turun 0,03 poin menjadi 81,32 pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Sebagaimana yang terjadi di daerah lain, kategori perdagangan adalah salah satu yang paling terdampak pandemi COVID-19. Penurunan ini turut berkontribusi pada melemahnya daya beli dan penurunan konsumsi rumah tangga masyarakat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan IPM.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru capaian IPM Kota Pekanbaru Tahun 2021 mengalami kenaikan nilai 0,26 poin yakni 81,58 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 81,32. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2021 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 72,94 dan IPM Indonesia sebesar 72,29. Peningkatan laju pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Grafik 2.7. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2021

Gambar di atas adalah indeks pembangunan manusia Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021. Peningkatan pembangunan manusia memerlukan upaya yang tepat dan terkoordinasi dan saling mendukung antar bidang. Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia di Indonesia pada umumnya, dan Kota Pekanbaru pada khususnya. Karenanya, kebersamaan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan

Peningkatan IPM Kota Pekanbaru dalam kurun Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Berbagai program/kegiatan prioritas atau unggulan yang dijalankan di masing-masing Perangkat Daerah merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah Kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam mengakselerasi pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa UHH Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 meningkat hingga mencapai 72,41 tahun. Angka ini berarti setiap bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 72,41 tahun. UHH Kota Pekanbaru tersebut meningkat sebanyak 0,07 tahun dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 72,34 tahun. Peningkatan UHH di Kota Pekanbaru ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Umur Harapan Hidup di Kota Pekanbaru pada kurun waktu tahun 2016-2021 cenderung meningkat. Secara rinci perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20. Umur Harapan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,70	71,75	71,94	72,22	72,34	72,41

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2021

2. Angka Harapan Lama Sekolah

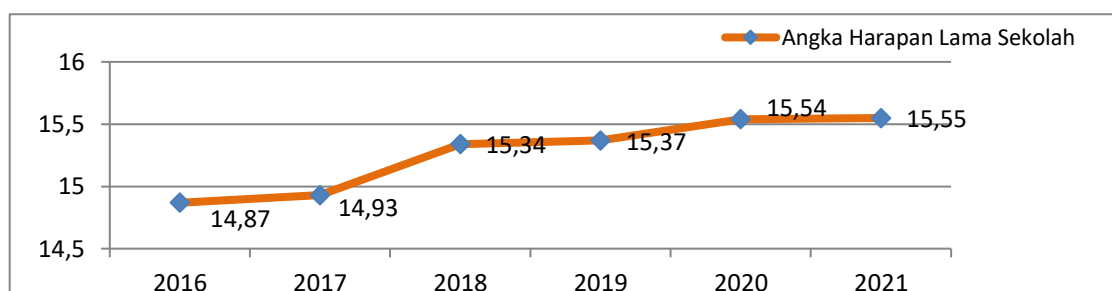
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Kota Pekanbaru tahun 2021 meningkat sebesar 0,01 tahun menjadi 15,55 tahun dari tahun sebelumnya sebesar 15,54 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 di Kota Pekanbaru memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,55 tahun atau setara dengan duduk pada bangku kuliah Diploma III.

Tabel 2. 21. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,87	14,93	15,34	15,37	15,54	15,55

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

Grafik 2.8. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021



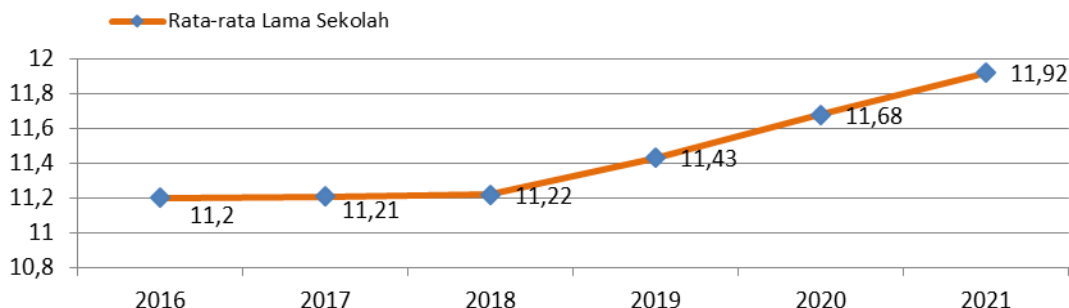
Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 11,92 tahun meningkat 0,24 tahun dari tahun 2020 yaitu sebesar 11,68. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kota Pekanbaru yang lebih baik. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2016-2021

Kota Pekanbaru menunjukkan tren yang positif, dan sudah diatas wajib belajar 9 tahun atau hampir menamatkan kelas 3 SMA.

Grafik 2.9. Rata-rata Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021

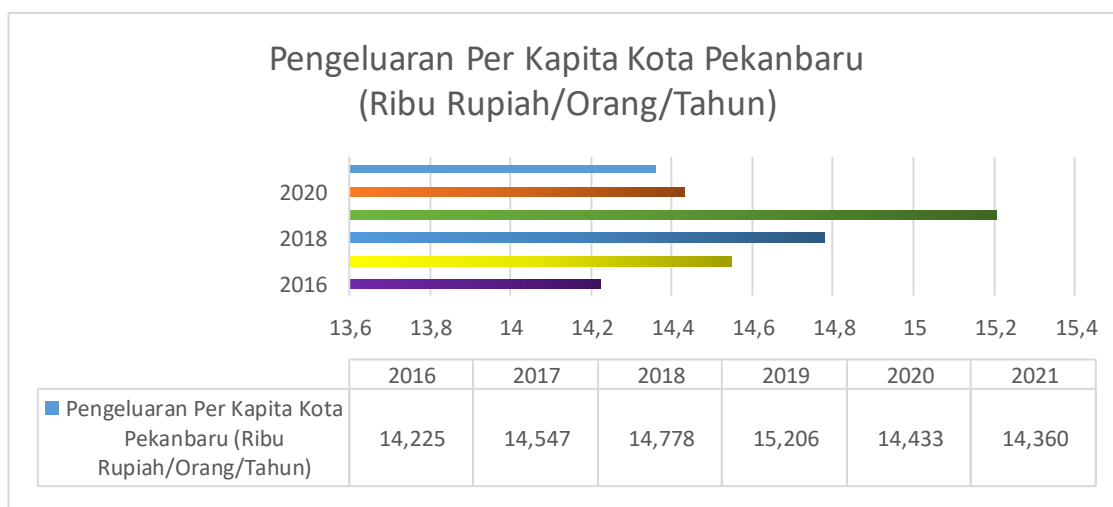


Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Salah satu indikator membaiknya pembangunan manusia di Kota Pekanbaru adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Pengeluaran per kapita (PPP) disesuaikan penduduk Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari Rp. 14.225.000/tahun pada Tahun 2016 terus meningkat menjadi Rp. 15.206.000,- /tahun pada tahun 2019, pada tahun 2020, pengeluaran per kapita mengalami penurunan menjadi 14.433.000,- /tahun. Tahun 2021, PPP mengalami penurunan menjadi 14.360.000/tahun. Penyusutan PPP ini imbas pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis ekonomi, sehingga banyak masyarakat di Kota Pekanbaru memutuskan untuk membatasi pengeluaran keuangannya.

Grafik 2.10. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

B. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Tabel 2. 22. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Di bawah Sekolah Dasar	70.274	80.118	72.719	47.913	47.578
Sekolah Menengah Pertama	77.188	88.500	96.444	81.679	82.209
Sekolah Menengah Atas	129.555	140.412	139.299	94.526	96.642
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	74.243	92.132	115.146	29.717	34.913
Diploma I/II/III/Akademi	31.640	22.614	25.746	10.751	12.234
Universitas	93.520	89.495	90.477	21.391	22.455
Total	476.420	513.271	539.831	285.977	296.031

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja Kota Pekanbaru, yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 61,61 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja 61 orang diantaranya berpartisipasi aktif di dunia kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2021 adalah sebesar 492.354 orang bekerja. Untuk perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 2. 23. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	467.555	494.362	514.200	507.617	492.354
Angkatan Kerja	181.531	212.545	228.223	211.586	157.770
Bukan Angkatan Kerja	286.024	281.817	285.977	296.031	334.584
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,22	65,66	65,86	65,22	61,61

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

2.1.2.1. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 24. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2021 Kota Pekanbaru

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah group kesenian per 10.000 Penduduk	0,59	0,62	0,60	0,60	0,60
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	120	120	125	125	125
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	74	74	82	82	82

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru, 2022

Seni budaya di Kota Pekanbaru relatif kurang berkembang, Pada tahun 2017, jumlah grup kesenian sebanyak 65 grup, dan jumlah tersebut meningkat di tahun berikutnya hingga sebanyak 70 grup pada tahun 2018, dan tidak terjadi penambahan hingga tahun 202. Lembaga Adat Melayu sejak tahun 2017 telah tersedia di setiap kecamatan, sehingga ada 12 Lembaga Adat Melayu tingkat kecamatan ditambah dengan 1 Lembaga Adat Melayu tingkat Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 25. Lembaga Seni Budaya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

No	Lembaga Seni dan Budaya	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Group Kesenian/Sanggar Seni	65	70	70	70	70
2	Lembaga Adat Melayu (Kab dan Kec)	13	13	13	13	13
3	Jumlah Penduduk	1.091.088	1.117.359	1.149.360	983.356	994.585

Sumber: SIPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

Data fasilitas olahraga di Kota Pekanbaru tahun 2020, secara rinci mengenai jenis fasilitas, kepemilikan dan kondisi dari masing-masing fasilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 26. Data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru Tahun 2021

Cabang Olahraga	Kecamatan (Lapangan)		Status Kepemilikan (Lapangan)		Kondisi	
1. SEPAK BOLA	Binawidya	4	Pemprov Riau	2	Sangat baik	4
	Tuah Madani	2				
	Bukitraya	5	Pemko Pekanbaru	4	Baik	43
	Marpoyan Damai	7	Organisasi / Swasta	5	Kurang baik	5

Cabang Olahraga	Kecamatan (Lapangan)		Status Kepemilikan (Lapangan)		Kondisi	
	Tenayan raya	9	Pinjam Pakai	4		
	Kulim					
	Sail	5	Perorangan	3		
	Pekanbaru kota	1	Masyarakat/ Fasos	26		
	Sukajadi	4	TNI/Polri	5		
	Senapelan	1	Hibah	3		
	Payung Sekaki	1				
	Rumbai	4				
	Rumbai Barat	6				
	Rumbai Timur	3				
	JUMLAH	52	JUMLAH	52	JUMLAH	52
2. FUTSAL	Binawidya	5	Organisasi / Swasta	1	Sangat baik	26
	Tuah Madani	4				
	Bukitraya	4	Pinjam Pakai	1	Baik	20
	Marpoyan Damai	13	Perorangan	44	Kurang baik	
	Tenayan raya	4				
	Kulim					
	Pekanbaru kota	2				
	Sukajadi	4				
	Payung Sekaki	4				
	Rumbai	1				
	Rumbai Barat	3				
	Limapuluh	2				
	Senapelan	2				
	JUMLAH	46	JUMLAH	46	JUMLAH	46
3. BADMINTON	Binawidya	6	Pemko Pekanbaru	1	Sangat baik	32
	Tuah Madani	6				
	Bukitraya	13	Organisasi / Swasta	1	Baik	45
	Marpoyan Damai	14	Perorangan	75	Kurang baik	
	Tenayan raya	3				
	Kulim	3				
	Sail	1				

Cabang Olahraga	Kecamatan (Lapangan)		Status Kepemilikan (Lapangan)		Kondisi	
	Sukajadi	9				
	Senapelan	2				
	Payung Sekaki	9				
	Rumbai	2				
	Rumbai Timur	1				
	Rumbai Barat	6				
	Limapuluh	2				
	JUMLAH	77	JUMLAH	77	JUMLAH	77
4. VOLLY BALL	Binawidya	1	Pemprov Riau	2	Sangat baik	2
	Tuah Madani	1				
	Bukitraya	13	Pemko Pekanbaru	6	Baik	70
	Marpoyan Damai	14	Organisasi / Swasta	4	Kurang baik	4
	Tenayan raya	6	Pinjam Pakai	45		
	Kulim	4				
	Sail	5	Perorangan	14		
	Pekanbaru kota	2	Masyarakat/ Fasos	3		
	Sukajadi	4	TNI/Polri	2		
	Senapelan	4				
	Payung Sekaki	4				
	Rumbai	4				
	Rumbai Timur	4				
	Rumbai Barat	9				
	Lima puluh	1				
	JUMLAH	76	JUMLAH	76	JUMLAH	76
5. BASKET	Bukitraya	2	Pemprov Riau	1	Sangat baik	4
	Marpoyan Damai	0	Pemko Pekanbaru	9	Baik	8
	Tenayan raya	2	Organisasi / Swasta	6	Kurang baik	8
	Kulim					
	Sail	2	Perorangan	4		
	Sukajadi	1				
	Senapelan	1				
	Rumbai	2				
	Rumbai Timur	1				

Cabang Olahraga	Kecamatan (Lapangan)		Status Kepemilikan (Lapangan)		Kondisi	
	Rumbai Barat	2				
	Pekanbaru Kota	0				
	Lima Puluh	3				
	Binawidya	1				
	Tuah Madani	1				
	Payung Sekaki	2				
	JUMLAH	20	JUMLAH	15	JUMLAH	15
6. RENANG	Binawidya	2	Pemprov Riau	1	Sangat baik	6
	Tuah Madani	1				
	Bukit raya	3	Organisasi / Swasta	6	Baik	15
	Marpoyan Damai	2	Perorangan	15	Kurang baik	1
	Tenayan raya	2				
	Kulim	0				
	Pekanbaru kota	3				
	Senapelan	1				
	Payung Sekaki	5				
	Rumbai	1				
	Rumbai Barat	2				
	Rumbai Timur	0				
	JUMLAH	22	JUMLAH	22	JUMLAH	22

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.3.1 Fokus Urusan Layanan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

A. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kota Pekanbaru yaitu meliputi: bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

1. Bidang Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kota Pekanbaru tahun 2021 telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan rata-rata lama sekolah 11,92 tahun. Kemajuan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur sekolah (sarana dan prasarana) dan bantuan *soft skill* lainnya serta program Wajib Belajar 9 tahun yang diakui cukup sukses.

a. Indikator Partisipasi Pendidikan

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" disetiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan.

Ukuran partisipasi yang ke-tiga, Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Tabel 2. 27. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
1	SD/MI	104.38	107.43	101.37	104.42	104.63	103,09
2	SMP/MTs	97.20	90.69	93.81	94.31	95,36	97,94
B	Angka Partisipasi Murni (APM)						
1	Usia 7-12 tahun (SD/MI)	94.25	94.50	92,34	92.77	94,02	94,25
2	Usia 13-15 tahun (SMP/MTs)	77.01	71.93	71.35	72.74	74,96	75,54
C	Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
1	Usia 7-12 tahun (SD/MI)	98,87	98,23	99,17	99,55	99,54	99,99
2	Usia 13-15 tahun (SMP/MTs)	92,89	96,19	97,05	97,50	97,81	97,95

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2021

Berdasarkan pengertiannya:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2016, APK SD/MI sudah melebihi 100 persen yakni sebesar 104,38 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun di Kota Pekanbaru sudah bersekolah, bahkan tahun 2021 APK SD/MI mencapai 103,09 persen. sementara APM Kota Pekanbaru sampai tahun 2021 masih belum mencapai 100%, APM pada jenjang Usia 7-12 tahun (SD/MI) sebesar 94,25 persen, jenjang Usia 13-15 tahun (SMP/MTs) sebesar 75,54 persen, artinya Kota Pekanbaru masih belum menuntaskan program wajib belajar karena ada 5,75 persen penduduk usia sekolah SD/MI yang tidak mampu merasakan indahnya dunia sekolah. Situasi semakin miris untuk jenjang Usia 13-15 tahun (SMP/MTs) yang menyisakan 24,46 persen penduduk tidak bisa merasakan bangku sekolah SMP/MTs.

Berdasarkan Statistik Daerah (BPS: 2021), APS Kota Pekanbaru untuk kelompok umur 7-12 tahun tercatat sebesar 99,99 prosen. Ini artinya dalam 100 anak usia 7-12 tahun semuanya bersekolah SD/MI. Untuk APS kelompok umur 13-15 tahun tercatat sebesar 97,95 prosen. Artinya, dari 100 anak usia 13-15 tahun terdapat 3 anak yang tidak bersekolah.

b. Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ketersediaan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Pekanbaru berdasarkan data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2021 sebanyak 770 unit, naik 12 unit dari tahun 2020 sebesar 758 unit.

Tabel 2. 28. Jumlah Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pekanbaru
Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	2020			2021		
			Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK) /Raudhatul Athfal (RA)	Unit	6	423	429	7	430	437
2	Kelompok Bermain (KB)	Unit	0	233	233	0	236	236
3	Taman Penitipan Anak (TPA)	Unit	1	67	68	1	68	69
4	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Unit	0	28	28	0	28	28
JUMLAH SEKOLAH PAUD		Unit	7	751	758	8	762	770

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2021

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2. 29. Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Jumlah Penduduk
Kelompok Usia Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun	
		2020	2021
1	PAUD		
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	758	770
1.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 tahun	55.367	55.292
1.3.	<i>Rasio ketersediaan PAUD</i>	137	139
2	SD/MI		
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	336	343
2.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	100.832	100.853
2.3.	<i>Rasio Ketersediaan SD/MI</i>	33	34
3	SMP/MTs		
3.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	180	190
3.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	47.001	46.917
3.3.	<i>Rasio Ketersediaan SMP/MTs</i>	38	40

Sumber: Data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2022

BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.29, pada tahun 2020 terdapat 137 sekolah PAUD setiap 10.000 Penduduk dan tahun 2021 ketersediaan sekolah PAUD naik menjadi 139 sekolah, hal ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah sekolah PAUD sebanyak 12 unit menjadi 770 unit di tahun 2021 . Rasio ketersediaan sekolah SD/MI pada tahun 2020, terdapat 33 sekolah setiap 10.000 penduduk naik menjadi 34 sekolah di tahun 2020. Sementara pada tahun 2020, terdapat 38 sekolah SMP/MTs setiap 10,000 penduduk naik menjadi 40 sekolah di tahun 2021.

Tabel 2. 30. Akreditasi Lembaga Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Jumlah SD sederajat	309
Jumlah SD sederajat terakreditasi	291
Jumlah SD terakreditasi A	219
Jumlah SD terakreditasi B	62
Jumlah SD terakreditasi C	10
Jumlah SMP sederajat	152
Jumlah SMP sederajat terakreditasi	136
Jumlah SMP terakreditasi A	83
Jumlah SMP terakreditasi B	42
Jumlah SMP terakreditasi C	11

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2022

c. Rasio Guru/Murid PAUD, SD/MI dan SMP/MTs

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Dengan kata lain, jika rasio tinggi, berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Semakin banyak jumlah murid di dalam suatu kelas dengan jumlah pengajar hanya 1 orang maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Asumsinya, rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi di dalam kelas.

Tabel 2. 31. Rasio Guru/Murid PAUD SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekanbaru

No	Satuan Pendidikan	Guru (Orang)		Murid (Orang)		Rasio Guru/Murid	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	PAUD	1.944	2.046	20.255	16.655	10,42	8,14
2	SD	6.599	6.770	126.759	122.207	19,21	18,05
3	SMP	3.656	3.784	56.360	56.600	15,42	14,96

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021 dan BPS 2022 (diolah)

Rasio murid-guru di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel diatas. Pada jenjang pendidikan SD hingga SMP, satu orang guru rata-rata mengampu sekitar 15 hingga 19 murid. Rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2020-2021 yaitu 18,63 yang berarti satu guru mengajar 18 sampai 19 murid. Rata-rata rasio guru/murid SMP/MTs lebih rendah yakni 15,19 yang berarti satu guru mengajar 15 sampai 16 murid. Hal tersebut dikarenakan guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas, tetapi merupakan guru mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam satu kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.

Tabel 2. 32. Jumlah Guru PNS Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

PNS									
	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	18	2	4	0	0	87	2	0	113
SD	57	3	92	14	0	1732	101	0	1999
SMP	65	7	10	26	0	977	101	3	1189
Total	140	12	106	40	0	2796	204	3	3301

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2022

Tabel 2. 33. Jumlah Guru Non PNS Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NON PNS									
	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	283	38	76	45	1	1066	21	0	1530
SD	441	26	51	86	3	3874	117	1	4599
SMP	205	11	3	58	1	1816	121	0	2215
Total	929	75	130	189	5	6756	259	1	8344

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2022

d. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional

Berdasarkan data Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada tahun 2016 rerata Nilai UN SMP/MTs Kota Pekanbaru sebesar 71,21 poin, kemudian rerata nilai UN turun menjadi 57,63 poin pada tahun 2017. Pada tahun 2018, rata-rata nilai UN sebesar 56,30 poin, meningkat menjadi 59,37 poin pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, Pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional 2020 (UN 2020), alasan pembatalan yakni mengutamakan keselamatan kesehatan rakyat dan sejalan dengan kebijakan *social distancing* (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran Covid-19 serta UN itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terkait UN 2020 dapat disampaikan:

- Ujian Sekolah itu masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah ujian kelulusan sekolah, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas, sehingga ujian sekolah bisa diadministrasi
- untuk PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Mendikbud memberikan penekanan bahwa 70 persen penerimaan siswa sudah zonasi, sehingga sudah seharusnya itu berdasarkan area yang sisanya jalur prestasi, dan itu menggunakan dua opsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta SPM Sosial. Materi muatan SPM mencakup: (1) jenis pelayanan dasar; (2) mutu pelayanan dasar; serta (3) penerima pelayanan dasar.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Pendidikan Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 34. Layanan SPM Pendidikan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini. b. Pendidikan dasar. c. Pendidikan kesetaraan.

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 35. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2021	Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	Setiap tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022)

Berdasarkan tabel yang dilampirkan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian atau realisasi pelayanan dasar SPM tahun 2021 pada bidang pendidikan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh terdapat 1 indikator yaitu Pendidikan Kesetaraan yang tidak dianggarkan pada tahun 2021, sehingga capaiannya 0%. Namun pada 2 indikator lainnya dapat terlaksana dengan maksimal, yaitu indikator Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar yang masing – masing realisasi capaiannya sebesar 100%.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kota Pekanbaru dihadapkan dengan permasalahan terbatasnya anggaran, hal ini disebabkan oleh refocussing anggaran yang dialihkan untuk menangani permasalahan Covid-19. Permasalahan inilah yang menyebabkan tidak tercapainya secara maksimal target SPM Urusan Pendidikan di Kota Pekanbaru, khususnya pada jenis layanan dasar pendidikan kesetaraan yang sama sekali tidak dianggarkan untuk program dan kegiatan pendukung layanan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut yaitu alokasi penganggaran untuk SPM harus tetap ada meskipun terjadi rasionalisasi anggaran.

Berdasarkan Rakortekbang tahun 2022, Kota Pekanbaru mendukung pencapaian SPM tahun 2023 urusan Pendidikan. Terhadap indikator kinerja urusan Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional dengan target Nasional di tahun 2023 adalah dengan nilai 1.90 dengan target daerah senilai 2.14, sedangkan capaian daerah tahun 2021 senilai 1.94. Untuk Indikator Rasio pengawas dan penilik

PAUD dengan target Nasional di tahun 2023 adalah 3.20% dengan target daerah 6.93%, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 6.09%. Indikator Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV di tahun 2023 adalah 69.00% dengan target daerah 76.72%, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 74.13%. Indikator Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B di tahun 2023 adalah 63.64% dengan target daerah 66.16%, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 66.10%. Indikator Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional di tahun 2023 adalah 1.80 dengan target daerah 2.00, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 1.80. Indikator Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional di tahun 2023 adalah 1.80 dengan target daerah 1.92, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 1.72. Indikator Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional di tahun 2023 adalah 1.90 dengan target daerah 2.15, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 1.95. Indikator Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS) di tahun 2023 adalah 100% dengan target daerah 100%, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 98.97%. Indikator Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) di tahun 2023 adalah 100% dengan target daerah 100%, sedangkan capaian daerah tahun 2021 sebesar 51.91%.

2. Bidang Urusan Kesehatan

a. Jumlah Kasus Kematian Ibu, Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka kematian ibu di Kota Pekanbaru berfluktuasi mulai tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 angka kematian ibu sebanyak 28 jiwa, menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi 13 jiwa. Namun meningkat pada tahun 2020 menjadi 14 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 22 jiwa.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Tabel 2. 36. Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 kelahiran hidup	3	3	3	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2017-2019, jumlah kematian bayi sebesar 3 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya meningkat pada tahun 2020-2021 menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab meningkatnya kematian bayi di Kota Pekanbaru yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik.

AKABA adalah jumlah kematian balita sampai usia 59 bulan (anak balita) per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Tabel 2. 37. Angka kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kota Pekanbaru tahun 2017-2021

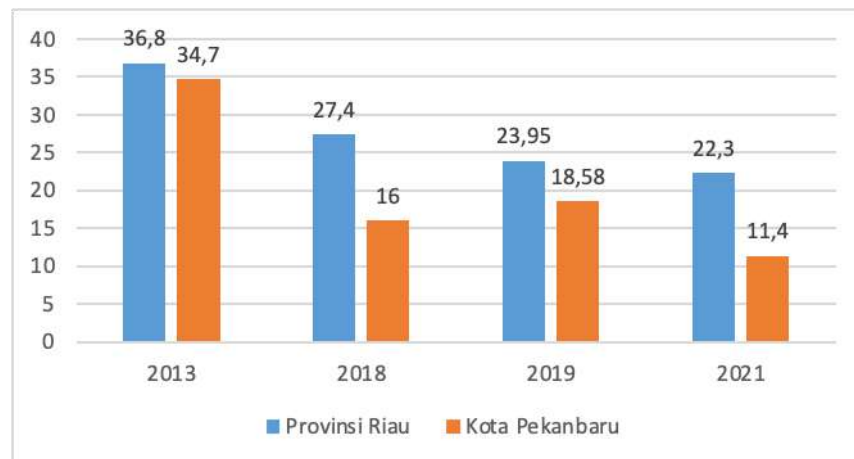
Uraian	Tahun 5				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	28	27	13	14	22
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3	3	3	6	6
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	3	3	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2022

b. Prevelensi Stunting

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 (dua) tahun. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan kasus stunting yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

Grafik 2.11. Prevalensi Stunting Kota pekanbaru dan provinsi Riau



Sumber: RISKESDAS dan SSGI

Dari grafik di atas, balita dengan status stunting di Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebesar 34,7 persen menurun menjadi 16 persen pada tahun 2018, sempat meningkat sedikit pada 18,58 persen pada tahun 2019 namun menurun kembali pada 11,4 persen pada tahun 2021. Secara umum persentase balita dengan status stunting di Kota Pekanbaru berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan Nasional.

c. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi buruk di Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 38. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1	Jumlah balita gizi buruk	Anak	5	13	9	7	8,5
2	Jumlah Balita yang ditimbang	Anak	78.817	73.967	51.818	23.619	57.055
3	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,01%	0,02%	0,02%	0.03%	0.01%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan data di atas, persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu empat tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan cukup signifikan dari 5 orang anak (0,001%) menjadi 13 orang anak (0,02%), namun pada tahun 2020, persentase balita gizi

buruk mengalami penurunan menjadi 9 orang anak (0,02%), kemudian angka tersebut terus menurun hingga menjadi 7 orang anak (0,03%) pada tahun 2021. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 disebabkan kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan. Kesadaran masyarakat kurang terkait pemberian makanan bergizi kepada balita masih kurang. Penyebab lainnya yaitu adanya perbedaan rujukan pembandingan antropometri yang lebih sensitif yaitu berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standard Anthropometri Anak yang semula berdasarkan Berat Badan/Umur menjadi Berat Badan/Tinggi Badan sehingga akan menghasilkan kesimpulan balita mendekati gizi buruk meningkat. Adapun faktor lain (misal asupan gizi, ekonomi keluarga) belum bisa dilakukan analisis karena banyak bias dalam penerapannya di lapangan. Berikut beberapa faktor penyebab Balita gizi buruk sebagai berikut:

- Faktor sosial; yang dimaksud di sini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan anak, sehingga banyak balita yang diberi makan “sekadarnya” atau asal kenyang padahal miskin gizi.
- Kemiskinan; sering dituding sebagai biang keladi munculnya penyakit ini di negara-negara berkembang. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan kebutuhan paling mendasar, yaitu pangan pun seringkali tak bisa terpenuhi.
- Laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Ini pun menjadi penyebab munculnya penyakit Kekurangan energi protein (KEP).
- Infeksi; tak dapat dipungkiri memang ada hubungan erat antara infeksi dengan malnutrisi. Infeksi sekecil apa pun berpengaruh pada tubuh. Sedangkan kondisi malnutrisi akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada gilirannya akan mempermudah masuknya beragam penyakit.
- Tindakan pencegahan otomatis sudah dilakukan bila faktor-faktor penyebabnya dapat dihindari. Misalnya ketersediaan pangan yang tercukupi, daya beli masyarakat untuk dapat membeli bahan pangan, serta pentingnya sosialisasi makanan bergizi bagi balita.

Permasalahan stunting tidak semata urusan kesehatan, namun terkait berbagai sektor diantaranya pendidikan, sanitasi, pangan, sosial, dan budaya karena stunting dibentuk secara multidimensional. Oleh karena itu diperlukan *collective action* yang melibatkan berbagai aktor baik antar instansi vertikal maupun antar instansi horizontal, masyarakat (komunitas), akademisi, dunia usaha dan media. Sosialisasi, kampanye, advokasi dan diseminasi tentang permasalahan dan penanggulangan stunting menjadi hal yang penting sebelum langkah intervensi dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman beberapa daerah, kampanye melalui media massa dan

advokasi berhasil mendorong kesadaran publik untuk mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta mempromosikan pesan-pesan kunci stunting di masyarakat. Sesuai dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk menangani masalah stunting dengan serius. Untuk mewujudkan hal tersebut Walikota beserta Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan berbagai upaya melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi stunting di Kota Pekanbaru.

d. Keberhasilan Pengobatan TB

Saat ini Kota Pekanbaru dihadapkan pada masalah, terjadinya peningkatan penyakit menular, maupun penyakit tidak menular. Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Pneumonia, PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi), dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB). Penyakit menular yang masuk kedalam standar pelayanan minimal kabupaten/kota adalah Tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS. Khusus untuk TB jumlah semua kasus TB pada tahun 2020 sebesar 2.390 jiwa, dengan 94,73 persen orang terduga TB (TBC) mendapatkan pelayanan TB sesuai Standar, cakupan penemuan Kasus TBC anak sebesar 21,67 persen, data nilai CNR sebesar 209 terhadap semua Kasus TB per 100.000 penduduk.

Grafik 2.12. Angka *Cure Rate*, *Complete Rate*, *Succes Rate* dan Jumlah Kematian TB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2020

Untuk menilai keberhasilan pengendalian TB, digunakan beberapa indikator:

- Angka Kesembuhan (Cure Rate). Angka kesembuhan adalah angka yang menunjukkan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan, diantara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Pada tahun 2020, angka kesembuhan sebesar 55,10 persen, turun dari tahun 2019 yakni 59,90 persen. Dengan angka tersebut hendaknya saat ini diperlukan sosialisasi gerakan penanganan TBC secara masif di tengah masyarakat. Terlebih mengingat penularan penyakit TBC, jauh lebih cepat dibandingkan dengan penularan penyakit HIV-AIDS.
- Angka Pengobatan Lengkap (Complate Rate). Yang menunjukkan persentase pasien tuberkulosis yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan. Angka pengobatan lengkap sebesar 68,00 persen. Angka ini turun dibandingkan tahun 2019, yakni 69,50 persen. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat penderita TBC untuk benar-benar menuntaskan pengobatannya agar tidak menularkannya ke keluarga maupun masyarakat. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC tahun 2020 sebesar 90,90 persen, turun dibandingkan tahun 2019 yakni 92,30 persen. Dalam hal ini upaya pengendalian TBC di Kota Pekanbaru harus lebih ditingkatkan dengan melakukan kerja sama dengan pihak Rumah Sakit baik negeri maupun swasta.
- Jumlah kematian TB merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, jumlah kematian selama pengobatan TB sebesar 95 jiwa (2,9 persen), naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 39 jiwa.

e. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan

Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan merupakan pelayanan di Kota Pekanbaru terdiri dari pelayanan kesehatan di 31 Rumah Sakit dan 21 Puskesmas di Kota Pekanbaru. Cakupan kunjungan rawat jalan dalam 5 Tahun terakhir lebih besar dibanding dengan kunjungan rawat inap, hal ini dapat diartikan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru telah mengalami perbaikan. Cakupan kunjungan layanan adalah perbandingan antara jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat ke rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya dengan jumlah penduduk.

Tabel 2. 39. Jumlah Kunjungan Rawat Inap dan Rawat Jalan Kota Pekanbaru
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Keterangan	Jumlah Kunjungan					
			Rawat Jalan			Rawat Inap		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2020	Jumlah Kunjungan	902.591	1.134.915	2.037.506	61.508	82.011	143.519
		Jumlah Penduduk	599.272	569.798	1.169.070	599.272	569.798	1.169.070
		Cakupan Kunjungan (%)	150,6	199,2	174,3	10,3	14,4	12,3
2	2019	Jumlah Kunjungan	1.103.251	1.461.901	2.565.152	87.262	118.005	205.267
		Jumlah Penduduk	586.299	557.060	1.143.359	586.299	557.060	1.143.359
		Cakupan Kunjungan (%)	188,2	262,4	224,4	14,9	21,2	18,0
3	2018	Jumlah Kunjungan	882.871	1.171.703	2.054.574	82.049	124.789	206.838
		Jumlah Penduduk	573.206	544.153	1.117.359	573.206	544.153	1.117.359
		Cakupan Kunjungan (%)	154,0	215,3	183,9	14,3	22,9	18,5
4	2017	Jumlah Kunjungan	643.962	826.156	1.470.118	44.628	50.768	95.396
		Jumlah Penduduk	559.917	531.171	1.091.088	559.917	531.171	1.091.088
		Cakupan Kunjungan (%)	115,0	155,5	134,7	8,0	9,6	8,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2021

Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 - 2020 cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan lebih besar di banding cakupan pelayanan kesehatan rawat inap. Cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 224,4%, artinya satu orang penduduk yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan bisa berulang kali dalam 1 tahun sehingga cakupan layanan melebihi 100%, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tingginya cakupan layanan juga disebabkan karena pelayanan di Rumah Sakit juga melayani pasien yang berasal dari daerah di luar kota Pekanbaru.

Pada tahun 2020, cakupan rawat jalan mengalami penurunan menjadi 174,30 persen, sedangkan rawat inap 12,30 persen. Penurunan cakupan layanan ini menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat kota Pekanbaru semakin membaik karena jumlah orang yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun dari 224,4% pada tahun 2019 menjadi 174,3% pada tahun 2020.

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dari aspek kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menjadikan bidang kesehatan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana

kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan kesehatan dan kebijakan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pekanbaru mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.064.566	1.091.088	1.117.359	1.143.359	983.356
Jumlah Balita (jiwa)	109.019	110.019	110.877	111.586	112.136
Jumlah posyandu	623	622	647	647	652
Rasio Posyandu	5,71	5,65	0,58	0,6	0,6
Jumlah Puskesmas, poliklinik dan pustu	228	199	226	242	248
Rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu	0,21	0,18	0,049	0,21	0,21
Jumlah Rumah Sakit	30	28	30	31	31
Rasio Rumah Sakit	0.03	0.03	0,37	0,03	0,02

Sumber: SIPD Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2021

Perkembangan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah rumah sakit di Kota Pekanbaru disebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah rumah sakit di Kota Pekanbaru didominasi oleh rumah sakit swasta.

Ketersediaan tenaga medis di Kota Pekanbaru yang diiringi dengan pemerataan tenaga medis pada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat. Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2. 41. Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	1.064.566	1.091.088	1.117.359	1.143.359	983.356	994.585
Jumlah Dokter	1.146	973	935	1.144	1.145	1.537
Rasio Dokter terhadap 100.000	107,65	89,18	83,68	100,06	116,44	-

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk						
Jumlah Perawat	2.162	2.888	3.194	3.673	3.199	4.237
Rasio Perawat per 100.000 penduduk	203,09	264,69	285,85	321,25	325,31	-
Jumlah Bidan	717	835	941	908	919	1.169
Rasio Bidan per 100.000 penduduk	67,35	76,53	84,22	79,42	93,46	-
Jumlah Farmasi	218	615	646	683	681	610

Sumber: BPS Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2021

Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2016-2020 rasio dokter sangat Fluktuatif. Pada tahun 2016 Rasio Dokter sebesar 107,65 dengan kata lain setiap 100.000 penduduk terdapat 108 orang Dokter, kemudian rasio dokter turun menjadi 83,68 pada tahun 2018, dan naik kembali menjadi 116,44 pada tahun 2020. Rasio perawat mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 203,09 menjadi 325,31 pada tahun 2020. Hal yang sama juga pada rasio bidan, pada tahun 2016 sebesar 67,35 naik menjadi 93,46 pada tahun 2020.

Permasalahan dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal dan berkualitas. Untuk itu hendaknya Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan pada pemenuhan tenaga kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Pekanbaru.

f. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Kota Pekanbaru Desa Siaga Aktif dilaksanakan di skala Kelurahan, pada tahun 2018 telah terdapat 78 kelurahan siaga aktif menurun dibandingkan dari tahun 2017 sebanyak 83 kelurahan siaga aktif.

Tabel 2. 42. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	58	83	78	83	83
Jumlah Desa/Kelurahan Siaga yang dibentuk	58	83	83	83	83
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	94%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Kesehatan Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.43. Layanan SPM Kesehatan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil. b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. d. Pelayanan kesehatan balita. e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif. g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>).

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2021	Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ini hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	83.95	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	81.27	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	78.40	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	77.96	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	5.92	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	19.10	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	33.96	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2021	Waktu Capaian
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	13.39	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	37.13	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	48.47	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	36.75	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	59.14	Setiap Tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022)

Berdasarkan data realisasi capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Pekanbaru tahun 2021 yang telah dicantumkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan dari data capaian SPM Urusan Kesehatan tahun 2020. Dimana pada tahun anggaran 2020 capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Pekanbaru adalah sebesar 96,91%. Hal ini dapat terjadi tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor penghambat internal maupun eksternal dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu tugas SPM Urusan Kesehatan ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Terjadinya refocusing anggaran untuk penanganan wabah penyakit Covid-19 sehingga anggaran untuk penerapan SPM Urusan Kesehatan tidak optimal.
- Terdapat perbedaan data sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan fakta yang terjadi di lapangan

Adapun solusi yang dibutuhkan dalam optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui :

- Komitmen dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam pencapaian setiap SPM;
- Penyusunan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan sesuai tahapan implementasi penerapan SPM sesuai Pasal 4 Permendagri Nomor: 100 tahun 2018 dilakukan dengan tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

1) Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem jaringan jalan yang ada pada Kota Pekanbaru, berdasarkan status jalan, meliputi:

- Jaringan Jalan nasional di Kota Pekanbaru = 83,45 Km (panjang total 1.336,62 Km sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
- Jaringan Jalan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru = 127,51 Km (panjang total 2.799,90 Km sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 308/VI/2017 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Riau).
- Jaringan Jalan Kota Pekanbaru = 1.277,90 Km (Sesuai Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 202 Tahun 2017 Tentang Penetapan Fungsi Status Jalan di Kota Pekanbaru).

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana jalan atau indeks aksesibilitas, dapat dianalisis melalui rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (km²). Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula daerah yang dilayani. Rasio >5 menunjukkan indeks aksesibilitas sangat tinggi, >1,5 menunjukkan indeks aksesibilitas tinggi, >0,5 dikategorikan sedang, >0,15 dikategorikan rendah, dan >0,05 dikategorikan aksesibilitas sangat rendah. Indeks aksesibilitas Kota Pekanbaru tinggi, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.45. Indeks Aksesibilitas Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Kota	Status Jalan (Km)				Luas Wilayah	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	Indek Aksesibilitas
		Kota	Provinsi	Nasional	Jumlah			
1	Pekanbaru	1.277,90	127,51	83,45	1.488,86	632,26	2,35	Tinggi

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2022

Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan

jalan kota. Ketercapaian kemandapan jaringan jalan Kota Pekanbaru cenderung naik setiap tahun. Pada Tahun 2021 tingkat kemandapan jalan adalah sebesar 70,91 persen, meningkat sebesar 9,03 persen dibandingkan pada Tahun 2019 yaitu sebesar 61,88 persen.

Tabel 2.46. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pekanbaru
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	774,52	777,71	784,57	906,10	906,01
Panjang Jalan (Km)	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik dan sedang (%)	60,61	60,86	61,88	70,91	70,91

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2022

Pada tahun 2021, kondisi jalan mantap pada jalan kewenangan Kota Pekanbaru sepanjang 906,10 km atau 70,91 persen dari panjang keseluruhan. Adapun kondisi rusak ringan dan rusak berat sebesar 5,00 persen dan 24,10 persen. Kondisi jalan rusak yang mencapai 29,10 persen ini memerlukan perhatian serius, mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.47. Kondisi Kemandapan Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

Tahun	Panjang Ruas (km)	Panjang Tiap Kondisi (%)								Ket.
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
2017	1277,90	594,18	46,50	180,34	14,11	135,81	10,63	367,57	28,76	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 60,61
2018	1277,90	590,33	46,20	187,34	14,66	130,93	10,25	369,26	28,90	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 60,86
2019	1277,90	596,53	46,68	194,22	15,20	132,55	10,37	354,60	27,75	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 61,88
2020	1277,90	749,01	58,61	157,09	12,29	63,86	5,00	307,93	24,10	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 70,91
2021	1277,90	749,01	58,61	157,09	12,29	63,86	5,00	307,93	24,10	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 70,91

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2022

2) Pelayanan pengentasan titik genangan dan lokasi banjir perkotaan

Dalam hal genangan lokal dan banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah menyusun Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru tahun 2020. Pada Masterplan tersebut terdata sebanyak 121 titik genangan/banjir yang di dalamnya terdapat 363 titik masalah genangan/banjir. Kondisi itu diakibatkan anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru (dapat dilihat pada tabel 2.5 Keterangan Masalah, Solusi, Penanggungjawab, dan Biaya pada Saluran Drainase)

Kondisi yang dijelaskan diatas, mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di musim penghujan. Secara umum penyebab munculnya genangan/banjir di Kota Pekanbaru antara lain :

- Perilaku pengembang ruko/perkantoran yang menutupi drainase tanpa memperhatikan kaidah teknis sehingga ketika hujan, air dari halaman ruko/perkantoran tersebut tidak masuk ke drainase malah terperangkap di badan jalan.
- Banyaknya sampah dan sedimentasi di dalam drainase akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam drainase sehingga menghambat aliran air.
- Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun disebabkan pertumbuhan pemukiman dan pembangunan Kota yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan.
- Belum terintegrasinya drainase di beberapa titik di Kota Pekanbaru serta rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana prasarana pengendali banjir untuk mengantarkan air permukaan di kawasan terbangun ke pembuangan akhir (badan air penerima).

3) Cakupan Pelayanan Air Minum

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan akan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk minum maupun memasak, mandi, cuci dan sebagainya. Hal ini menjadi penting karena sumber air baku yang ada sudah tidak layak, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Konsumsi air bersih menunjukkan aktifitas masyarakat, baik domestik (rumah tangga) maupun non domestik. Peningkatan konsumsi air bersih sejatinya menunjukkan aktifitas masyarakat dan kegiatan lainnya yang meningkat. Untuk itulah diperlukan peran perusahaan air minum dalam menangani hajat hidup orang banyak tersebut.

Tabel 2.48. Konsumsi Air Bersih Disalurkan PDAM Kota Pekanbaru (m3)

Jenis Konsumen	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Sosial	36,081	1.684	37,301	1.818	36,470	1.688	35,747	1.482	30,340	1.235	20,888	0.981
Non Komersial	1,490,471	69.558	1,431,370	69.768	1,517,964	70.269	1,639,930	67.967	1,682,325	68.501	1,481,026	69.530
Instansi Pemerintah	76,155	3.554	68,035	3.316	101,834	4.714	122,475	5.076	116,031	4.725	108,293	5.084
Niaga	540,025	25.202	515,049	25.105	498,174	23.061	498,999	20.681	455,179	18.534	382,708	17.967
Industri	29	0.001	29	0.001	104	0.005	406	0.017	202	0.008	23	0.001
Masyarakat		0		0	5,136	0.238	115,283	4.778	171,853	6.997	137,110	6.437
Jumlah	2,142,761	100	2,051,612	100.010	2,160,217	100	2,412,840	100	2,455,930	100	2,130,048	100

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022 (diolah)

Pada tahun 2021, jumlah kubikasi air sebesar 2.130.048 m³. Air minum dari PDAM paling banyak disalurkan untuk non-niaga yakni sebesar 69,53%, lalu diikuti oleh sektor niaga sebanyak 17,97% dan yang terkecil adalah industri yang hanya sekitar 0,001%.

Peningkatan akses air minum bagi masyarakat di Kota Pekanbaru antara lain dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Tabel 2.49. Cakupan Akses Air Bersih Dengan Sistem Perpipaan (PDAM)

No.	Tahun	Jumlah Pelanggan PDAM/ Rumah Tangga Terlayani	Persentas Rumah Tangga Yang Terlayani (%)
1.	2017	12,267	4.72
2.	2018	12,874	5.69
3.	2019	13,659	5.02
4.	2020	13,714	5.04
5.	2021	14,067	5.17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2022

Dari data tabel 2.49 terdapat penambahan yang tidak sebanding antara jumlah pelanggan pada tahun 2017-2021 dengan jumlah konsumsi air bersih tahun 2017-2021. Jumlah pelanggan PDAM di tahun 2017 (12.267 pelanggan) dan tahun 2021 (14.067 pelanggan) atau meningkat sebanyak 5.17 %. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, Kenaikan jumlah pelanggan PDAM/Rumah Tangga yang terlayani sebesar 0,45%.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan akses air minum perpipaan, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan melaksanakan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Kota Pekanbaru kapasitas 750 liter/detik, yang pembangunan fisik

sudah dimulai sejak tahun 2021. Sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah PT. PP. TIRTA MADANI, sedangkan sebagai Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama (PJPK) adalah Perumdam Tirta Siak, dengan skema kerjasama Rehabilitation, Built, Operate and Transfer (RBOT), dan masa kerjasama selama 25 tahun setelah COD Fase A (Juni 2022). Melalui program KPBU ini akan mampu meningkatkan layanan akses air minum perpipaan sampai dengan 61.000 SR (Sambungan Rumah).

Disamping KPBU SPAM Kota Pekanbaru, saat ini juga sedang berlangsung pembangunan KPBU SPAM Regional Pekanbaru-Kampar dengan kapasitas 1.000 liter/detik, yang nantinya akan didistribusi 700 liter/detik untuk melayani Kota Pekanbaru dan 300 liter/detik untuk melayani wilayah Kabupaten Kampar. Melalui program KPBU SPAM Regional ini, akan dapat meningkatkan pelayanan air minum jaringan perpipaan sebanyak 71.400 SR di Kota Pekanbaru.

b) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

Pemenuhan akses Jaringan Air Minum dan Air Bersih Bukan Perpipaan masyarakat Kota Pekanbaru disediakan melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan infrastruktur air minum skala lingkungan berupa kegiatan pengeboran Sumur Dalam dan Sumur Artesis.

Tabel 2.50. Data Cakupan Akses Air Bersih Dengan Sistem Bukan Perpipaan

No	Sarpras Air Bersih / Air Minum	Jumlah Sumur Terbangun (Unit)	Jumlah KK Terlayani (1 Sumur 50 KK)	Jumlah Jiwa Terlayani (1 KK=4 Jiwa)
1	Pembangunan Tahun 2012	14	700	2.800
2	Pembangunan Tahun 2013	46	2.300	9.200
3	Pembangunan Tahun 2014	76	3.800	15.200
4	Pembangunan Tahun 2015	60	3.000	12.000
5	Pembangunan Tahun 2016	35	1.750	7.000
6	Pembangunan Tahun 2017	9	450	1.800
7	Pembangunan Tahun 2018	18	900	3.600
8	Pembangunan Tahun 2019	5	250	1.000
9	Pembangunan Tahun 2020	14	700	2.800
10	Pembangunan Tahun 2021	6	300	1.200
Jumlah		283	14.150	56.600

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru, 2022

Keterangan : Jumlah Sumur Dalam (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) di masing- masing lokasi diestimasi dapat melayani lebih dari lima puluh Kepala Keluarga (KK) dengan asumsi 1 KK = 4 Jiwa

Secara umum penggunaan sumber air bersih bukan jaringan perpipaan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 51. Sumber Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan per Kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Bukan Jaringan Perpipaan								
		Jumlah Penduduk 2020	Sumur Gali Terlindungi	Sumur Gali Dengan Pompa	Sumur Bor Dengan Pompa	Terminal Air	Mata Air Terlindungi	PAH	Jumlah	Persentase Warga Penduduk Terlayani (%)
1	Tuah Madani	137.925	283	533	105.016	-	-	-	105.832	50,17%
2	Bina Widya	73.035								
3	Payung Sekaki	97.951	5.494	-	16.018	-	7.274	-	28.786	29,39%
4	Bukit Raya	101.811	29.093	1.796	12.903	-	-	-	43.792	43,01%
5	Marpoyan Damai	142.435	-	175	2.490	-	-	-	2.665	1,87%
6	Tenayan Raya	107.747	145	10.289	16.195	-	-	-	26.629	17,30%
7	Kulim	46.203								
8	Lima Puluh	44.929	325	39	30.907	-	-	-	31271	69,60%
9	Sail	24.769	2.159	2.353	2.637	-	-	-	7.149	28,86%
10	Pekanbaru Kota	27.278	936	1.471	1.910	424	322	-	5.063	18,56%
11	Sukajadi	49.044	35	1.049	23.819	-	-	-	24.903	50,78%
12	Senapelan	39.563	-	-	12.451	-	-	-	12451	31,47%
13	Rumbai Barat	24.364	164	4.573	16.554	41	-	7	21339	28,76%
14	Rumbai Timur	49.831								
15	Rumbai	78.154	1.397	1.182	1.335	44	11	75	4.044	5,17%
		1,045,039	40.031	23.460	242.235	509	7.607	82	313.924	30,04%

Sumber Data : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Pekanbaru

4) Cakupan Pelayanan Air Limbah

Sampai dengan saat ini, cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan Domestik Terpusat di Kota Pekanbaru masih nihil. Pada tahun 2020 telah dimulai pembangunan SPAL-DT Kota Pekanbaru melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari pembangunan jaringan distribusi utama dan Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan target pelayanan 11.000 SR, yang direncanakan beroperasi pada tahun 2023. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban membangun 10.000 SR melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

b. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu pilar pembangunan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah. Rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha. Disamping itu tata ruang juga sebagai alat untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Kinerja Bidang Urusan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru meliputi beberapa Subbidang sebagai berikut:

1) Perencanaan Tata Ruang

- a) Penetapan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru melalui Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040
- b) Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk beberapa lokasi yaitu:
 - Kecamatan Marpoyan Damai;
 - Kecamatan Tenayan Raya;
 - Kecamatan Kulim;
 - Sebagian Kecamatan Rumbai Timur;
 - Kecamatan Bina Widya;
 - Kecamatan Payung Sekaki; dan
 - Kecamatan Tuah Madani.

2) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan amanat UU CK beserta turunannya.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 52. Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 53. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM
Urusan Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian Tahun 2021
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	8.93 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	4600

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022, diolah)

Realisasi indikator capaian target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2021 belum mencapai 100 persen. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- Belum meratanya jaringan air minum perpipaan di Kota Pekanbaru, sehingga penyediaan kebutuhan air minum sehari hari masyarakat belum optimal dan menjangkau seluruh daerah di Kota Pekanbaru.
- Beberapa masalah seperti belum paham nya masyarakat terkait fungsi saluran IPAL terpusat. Terlebih lagi beberapa masyarakat terkena dampak dari pembangunan saluran lateral IPAL yang mengakibatkan terkendalanya pendataan SR Kota Pekanbaru.

Berikut solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru:

- Perluasan/Pembangunan jaringan SPAM di kawasan yang belum terlayani.
- Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat terkait maksud dan tujuan pembangunan saluran IPAL Terpusat. Untuk permasalahan tunda bayar, dianggarkan di tahun 2022 untuk pelunasannya.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan/perdesaan yang sehat dan layak huni (*livable*), aman, nyaman, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota No. 95 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Cakupan Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebesar 256.991 unit dengan jumlah penduduk 1.091.088 jiwa, dengan rasio rumah layak huni sebesar 0,236, pada tahun 2020 rasio rumah layak huni meningkat menjadi 0,386, dengan jumlah rumah layak huni 379.449 unit dan jumlah penduduk 983.356 jiwa. Rasio pemukiman layak huni Berdasarkan data capaian, pada Tahun 2020 adalah 0,9987 poin lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 0,9966 Poin. Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2017 meningkat dari 98,90 persen menjadi 99,62 persen pada tahun 2020. Untuk cakupan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2017 sebesar 63,58 persen, ditahun 2020 meningkat menjadi 76,06 persen.

Tabel 2. 54. Cakupan Rumah Layak Huni Kota Pekanbaru

No	Lokasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	256.991	263.596	270.060	276.290	284.946
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.091.088	1.117.359	1.143.359	983.356	994.580
3	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	13.424	13.482	13.500	13.502	13.502
4	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	13.519	13.519	13.519	13.519	13.519
5	Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	256.991	263.596	270.060	276.290	284.946
6	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	259.849	265.895	272.425	277.378	286.167
7	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu (jiwa)	5.010	5.212	5.040	5.790	6.572
8	Jumlah Rumah Tangga MBR pada kurun waktu tertentu (jiwa)	7.880	7.350	6.811	7.238	7.793
9	Rasio rumah layak huni (1/2)	0,236	0,236	0,241	0,280	0,286
10	Rasio permukiman layak huni (3/4)	0,9929	0,9972	0,9966	0,9987	0,9987
11	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (5/6)	98,90%	99,14%	99,13%	99,6%	99,57%
12	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (7/8)	63,58 persen	69,22 persen	73,99 persen	79,99 persen	84,33 persen

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, 2022

Sedangkan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau, berdasarkan data BPS, capaian Kota Pekanbaru terhadap indikator ini adalah :

- Tahun 2017 = 87,82 %
- Tahun 2018 = 85,94 %
- Tahun 2019 = 83,70 %
- Tahun 2020 = 86,88 %
- Tahun 2021 = 84,33 %

b. Luas Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Walikota Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebesar 113,56 Ha yang terbagi menjadi 8 (delapan) kawasan.

Tabel 2. 55. Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru

No	Lokasi	Luas	Legalitas Lahan	Priortitas
1	Kawasan Kumuh Sungai Sago	24,10 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
2	Kawasan Kumuh Kota Lama	15,46 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
3	Kawasan Kumuh Pesisir	23,00 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
4	Kawasan Kumuh Meranti	15,00 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
5	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	14,60 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
6	Kawasan Kumuh Lembah Damai	13,00 Ha		
7	Kawasan Kumuh Padang Terubuk	5,30 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
8	Kawasan Kumuh Sumahilang	3,10 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
Total		113,56 Ha		

Sumber: SK Walikota Nomor 878 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru

Berdasarkan SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, penanganan kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha merupakan kewenangan Provinsi Riau, sedangkan kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Sehubungan dengan pembagian kewenangan tersebut penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru memerlukan kolaborasi penganggaran dan koordinasi kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kota. Untuk lebih jelasnya pembagian kewenangan penanganan Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56. Kewenangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru

NO	KAWASAN	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KEWENANGAN PENANGANAN
1	Kawasan Kumuh Sungai Sago	Kampung Dalam	Senapelan	5,00	Pemerintah Pusat (APBN)
		Sago	Senapelan	1,86	
		Kota Baru	Pekanbaru Kota	4,30	
		Sukaramai	Pekanbaru Kota	6,60	
		Tanah datar	Pekanbaru Kota	6,30	
				24,10	
2	Kawasan Kumuh Kota Lama	Kampung Bandar	Senapelan	9,50	Pemerintah Pusat (APBN)
		Kampung Baru	Senapelan	2,70	
		Tirta Siak	Payung Sekaki	3,30	
				15,46	
3	Kawasan Kumuh Pesisir	Pesisir	Limapuluh	6,40	Pemerintah Pusat (APBN)
		Rintis	Limapuluh	9,50	
		Tanjung Rhu	Lima Puluh	7,10	
				23,00	
4	Kawasan Kumuh Meranti	Meranti Pandak	Rumbai Pesisir	4,60	Pemerintah Pusat (APBN)
		Sri Meranti	Rumbai	10,40	
				15,00	
5	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Rumbai Pesisir	3,90	Daerah Provinsi (APBD Provinsi)
		Limbungan	Rumbai Pesisir	2,40	
		Limbungan Baru	Rumbai Pesisir	8,30	
				14,60	
6	Kawasan Kumuh Lembah Damai	Lembah Damai	Rumbai Pesisir	13,00	Daerah Provinsi (APBD Provinsi)
				13,00	
7	Kawasan Kumuh Padang Terubuk	Padang Terubuk	Padang Terubuk	5,30	Daerah APBD Kota
				5,30	
8	Kawasan Kumuh Sumahilang	Sumahilang	Pekanbaru Kota	3,10	Daerah APBD Kota
				3,10	
				113,56	

Sumber : SIPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, 2021

Dari total Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru seluas 113,56 Ha, pengurangan kawasan kumuh yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 adalah seluas 104,59 Ha (92,10 persen) yang menyisakan kawasan kumuh belum tertangani seluas 8,97 Ha. Adapun tahapan penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Tahun 2015-2017 penanganan kawasan kumuh seluas 18,82 Ha (16,57 persen terhadap total luas kawasan kumuh Kota Pekanbaru);
- Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja pengurangan kawasan kumuh yaitu seluas 37,19 Ha (32,75 persen terhadap total luas kawasan kumuh Kota Pekanbaru);
- Pada tahun 2019 pengurangan Kawasan Kumuh 39,51 Ha;
- Pada tahun 2020, pengurangan kumuh sebesar 1,49 Ha; dan
- Tahun 2021 pengurangan kawasan kumuh sebesar 7,58 Ha.

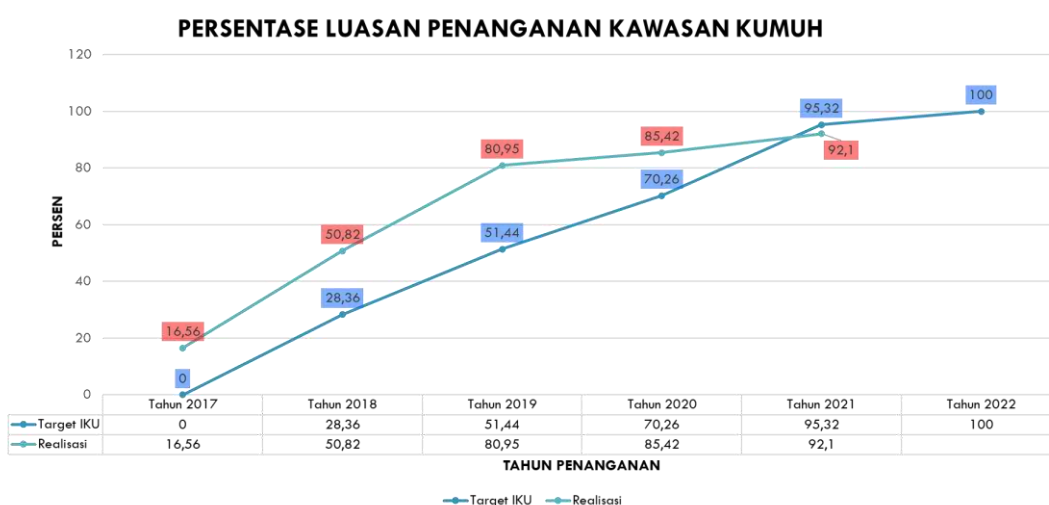
Selengkapnya pengurangan kawasan kumuh Kota Pekanbaru dapat dilihat pada diagram, grafik dan tabel dibawah ini:

Diagram 2. 1. Tahapan Pengurangan Kumuh Kota Pekanbaru Tahun 2017 s.d 2021



Sumber : Data TIM Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2022

Grafik 2.13. Persentase Luasan Penanganan Kawasan Kumuh)



Sumber : Data TIM Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2022

Tabel 2. 57. Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru

No	KAWASAN	KELURAHAN	LUAS KUMUH	PENGURANGAN KUMUH					BELUM TUNTAS
				2015-2017	2018	2019	2020	2021	
1	KAWASAN SAGO 24,10 HA	KAMPUNG DALAM	5	0,44	-	4,56	-	-	-
2		SUKARAMAI	6,6	1,83	-	-	0,67	-	4,10
3		SAGO	1,86	0,25	1,62	-	-	-	-
4		KOTABARU	4,3	-	3,42	0,88	-	-	-
5		TANAH DATAR	6,3	0,20	3,68	-	-	-	2,42
6	KAWASAN KOTA LAMA 15,46 HA	KAMPUNG BANDAR	9,5	-	1,62	3,91	-	3,97	-
7		KAMPUNG BARU	2,7	-	1,28	-	-	1,25	0,18
8		TIRTA SIAK	3,3	1,57	-	1,73	-	-	-
9	KAWASAN PESISIR 23 HA	PESISIR	6,4	3,23	3,17	-	-	-	-
10		RINTIS	9,5	1,19	4,20	4,11	-	-	-
11		TANJUNG RHU	7,1	3,61	-	2,68	0,82	-	-
12	KAWASAN MERANTI 15 HA	MERANTI PANDAK	4,6	1,23	-	3,37	-	-	-
13		SRI MERANTI	10,4	1,82	1,66	6,90	-	-	-
14	KAWASAN RUMBAI PESISIR 14,6	LEMBAH SARI	3,9	-	3,90	-	-	-	-
15		LIMBUNGAN	8,3	-	7,30	1,00	-	-	-
16		LIMBUNGAN BARU	2,4	-	1,49	-	-	-	0,91
17	KAWASAN LEMBAH DAMAI 13 HA	LEMBAH DAMAI	13	1,13	-	8,96	-	1,91	1,00
18	KAWASAN PADANG TERUBUK 5,3 HA	PADANG TERUBUK	5,3	2,32	2,97	-	-	-	-
19	KAWASAN SUMAHILANG 3,1 HA	SUMAHILANG	3,1	-	0,88	1,41	-	0,45	0,36
TOTAL			113,56	18,82	37,19	39,51	1,49	7,58	8,97

Sumber : Data TIM Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2022

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri PUPR No 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta memperhatikan perubahan parameter Penilaian Kawasan Kumuh dari semula 19 parameter menjadi 16 parameter, maka pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui program Kotaku melakukan penyusunan rencana pemutakhiran data baseline kawasan kumuh di wilayah dampingan yang ada di Kelurahan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil

Pemutakhiran data baseline Kawasan kumuh tersebut ditetapkan SK Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru. Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 703 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru ditetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh Kota Pekanbaru dengan luasan total sebesar 267,76 Ha meliputi sejumlah 15 (lima belas) lokasi kawasan kumuh di 8 (delapan) kecamatan.

Tabel 2. 58. Lokasi Pemutakhiran Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru

No	Kawasan	Kecamatan	Kelurahan		Luas Kelurahan (Ha)	Luas per Kawasan (Ha)
1	Kawasan Kumuh Kota Lama	Senapelan	1	Kampung Bandar	10,23	74,84
		Senapelan	2	Kampung Baru	35,41	
		Payung Sekaki	3	Tirta Siak	29,2	
2	Kawasan Kumuh Lembah Damai	Rumbai	4	Lembah Damai	15,73	15,73
3	Kawasan Kumuh Limbungan	Rumbai Timur	5	Limbungan	20,10	31,11
	Kawasan Kumuh Okura	Rumbai Timur	6	Tebing Tinggi Okura	11,01	11,01
4	Kawasan Kumuh Meranti	Rumbai	7	Sri Meranti	36,40	65
		Rumbai	8	Meranti Pandak	28,60	
5	Kawasan Kumuh Sungai Sago	Pekanbaru Kota	9	Tanah Datar	2,81	6,53
		Pekanbaru Kota	10	Sukaramai	3,72	
6	Kawasan Kumuh Pesisir	Lima Puluh	11	Tanjung Rhu	4,36	7,97
		Lima Puluh	12	Pesisir	3,61	
7	Kawasan Kumuh Tangkerang	Marpoyan Damai	13	Tangkerang Tengah	7,67	7,67
8	Kawasan Kumuh Muara Fajar	Rumbai Barat	14	Muara Fajar	47,13	47,13
9	Kawasan Kumuh Umban Sari	Rumbai	15	Umban Sari	11,10	11,10
	Total				267,76	267,76

Sumber : SK Walikota Nomor 703 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru

c. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan

prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.
- Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah, dan ruang terbuka hijau (RTH).
- Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk KWH meter, dan jaringan telepon.

Berdasarkan Permenpera Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak yang dibangun oleh pengembang, tercantum jenis prasarana, sarana dan utilitas di perumahan adalah sebagai berikut:

- Prasarana Perumahan, antara lain:
 - jalan;
 - drainase;
 - air minum;
 - sanitasi;
 - air limbah;
 - persampahan.
- Sarana Perumahan, antara lain:
 - sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - sarana pendidikan;
 - sarana kesehatan;
 - sarana peribadatan;
 - sarana rekreasi dan olah raga;
 - sarana pemakaman;
 - sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;

- sarana parkir.
- Utilitas Umum Perumahan, antara lain:
 - jaringan listrik;
 - jaringan telepon;
 - jaringan gas;
 - jaringan transportasi;
 - pemadam kebakaran; dan
 - sarana penerangan jasa umum.

Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan, sehingga dengan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan PSU yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim melalui Bidang PSU menjadi sangat strategis untuk dapat mewujudkan PSU Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang berkualitas dan mampu menjadi penunjang fungsi hunian secara maksimal.

Berdasarkan indikator kinerja Bidang PSU, dapat disampaikan pencapaian bidang PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 2. 59. Data Capaian Indikator Kinerja RPJMD Bidang PSU

NO.	INDIKATOR KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2016)	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM											
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		%
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	60	59,6	99,33%	62	61,55	99,27%	64	62,35	97,42%	66	71,89	108,92%
2	Persentase Saluran (Drainase) Lingkungan dengan kondisi Baik	45	45	100,00%	48	47,63	99,23%	52	43,7	84,04%	56	56,89	101,59%
3	KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	750	1100	146,67%	750	800	106,67%	750	950	126,67%	750	205	27,33%
4	Persentase TPU yang berkondisi baik	50	50	100,00%	57	57	100,00%	64	64	100,00%	73	73	100,00%
5	KK MBR yang terlayani air bersih	750	950	126,67%	750	1000	133,33%	750	500	66,67%	750	300	40,00%

Untuk pelaksanaan sub urusan penyediaan PSU pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 95 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

d. Pemakaman

RTH yang berbentuk pemakaman sebenarnya masih dapat dikategorikan sebagai RTH taman. Penetapan pemakaman sebagai salah satu ruang terbuka hijau diikuti dengan ketentuan pemanfaatan ruang pemakaman yang selain berfungsi sebagai tempat penguburan jenazah, juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, serta fungsi sosial bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.

Penyediaan RTH pemakaman, khususnya untuk pemakaman baru dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : ukuran makam 1 m x 2 m, jarak antar makam minimal 0,5 m; tidak diperkenankan melakukan perkerasan permukaan; pemakaman dibagi dalam beberapa blok yang luas dan jumlah kapasitas blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman; batas antar blok pemakaman berupa pedestrian dengan lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya; batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi pagar tanaman dan pagar buatan, atau dengan pohon pelindung; ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Sampai dengan tahun 2019 Berdasarkan data RTRW Kota Pekanbaru didapatkan luasan sebaran pemakaman saat ini 82,3 Ha dengan rincian:

- Lahan TPU Umum : 31 Ha
- Lahan Makam Masyarakat : 50.01 Ha

Untuk lahan TPU umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dirincikan sebagai berikut :

- TPU Tampan dengan luas lahan 100.000 m²
- TPU Payung Sekaki dengan luas lahan 35.616 m²
- TPU Palas dengan luas lahan 100.000 m²
- TPU Umban Sari dengan luas lahan 39.460 m²
- TPU Lokomotif dengan luas lahan 27.200 m²
- TPU Kuini dengan luas lahan 9.060 m²

Untuk rincian TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 60. Data TPU yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

NO.	NAMA TPU	LUAS *)		TOTAL DAYA TAMPUNG	SUDAH TERISI	BELUM TERISI*	KET.
				(PETAK MAKAM)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	TPU TAMPAN	100.000	M2	27.200	3.068	24.133	*) KIB 1985
2	TPU PAYUNG SEKAKI	35.616	M2	7.000	4.000	3.000	*) KIB 2007
3	TPU PALAS	100.000	M2	27.200	929	26.271	*) KIB 2007
4	TPU UMBAN SARI	39.460	M2	12.000	12.000	-	) KIB 2013-2014
5	TPU LOKOMOTIF	27.200	M2	17.000	13.000	-	*) KIB 1985
6	TPU KUINI	9.060	M2	3.000	3.000	-	*) KIB 2013
	JUMLAH TOTAL	311.336	M2	93.400	39.997	53.404	
		31	Ha				

Sumber Data Pemakaman DED TPU tahun 2017

Adanya tiga lokasi pemakaman yaitu TPU Kuini, TPU Lokomotif dan TPU Umban Sari yang sudah tidak dapat diisi lagi menjadikan Kota Pekanbaru butuh lahan Pemakaman baru agar dapat tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rencana pengembangannya TPU yang memiliki fungsi juga sebagai Ruang Terbuka diproyeksikan akan memiliki RTH skala Lingkungan yang berada di masing-masing lokasi TPU.

e. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didisain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan / atau oleh siapa saja.

- **Lingkungan Primer:** Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi

kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.

- **Lingkungan Sekunder:** Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.

Lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter ini dimaksudkan agar lebar jalur lalu lintas dapat mencapai 3 meter, dengan demikian pada keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulan, dan sebagainya.

f. Drainase Lingkungan

Drainase merupakan suatu sistem untuk menyalurkan air hujan. Sistem ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, apalagi di daerah yang berpenduduk padat seperti di perkotaan. Drainase juga merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

g. Sanitasi Lingkungan

Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru telah mulai melaksanakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Pekanbaru sejak tahun 2011, baik berupa kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendamping APBD, maupun berupa kegiatan Sanimas IDB.

Kegiatan Sanitasi DAK merupakan sebuah kegiatan inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman. Fokus kegiatan Sanitasi DAK ini adalah penanganan air limbah rumah tangga. Melalui pelaksanaan Sanitasi DAK ini, masyarakat memilih sendiri prasarana dan sarana air

limbah yang sesuai, ikut aktif menyusun rencana aksi, membentuk kelompok dan melakukan pembangunan fisik termasuk mengelola kegiatan operasi dan pemeliharaannya, bahkan perlu mengembangkannya.

Ada beberapa tujuan pelaksanaan Sanitasi DAK antara lain : meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat, meningkatkan peran serta dan pelibatan masyarakat, membina organisasi/ kelompok masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah, membina masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah, dan menumbuhkan inisiatif masyarakat/ kelompok masyarakat dalam pengembangan Sanitasi DAK.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal menggunakan sistem *anaerobic system*, yang merupakan tahapan pengolahan air limbah dengan konstruksi tertutup di bawah permukaan tanah. Tahapan pertama dari system anaerobic ini adalah settler, yang berfungsi sebagai bak sedimentasi. Tahapan selanjutnya adalah baffle reactor, yaitu untuk mengurangi tingkat pencemaran sampai 80 %, dengan komponen-komponen seperti pipa PVC D diameter 4 inch.

h. Air Bersih Skala Lingkungan

Konsumsi air bersih menunjukkan aktifitas masyarakat, baik domestik (rumah tangga) maupun non domestik. Peningkatan konsumsi air bersih sejatinya menunjukkan aktifitas masyarakat dan kegiatan lainnya yang meningkat.

Peningkatan akses air minum bagi masyarakat di Kota Pekanbaru yang menjadi urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Jaringan Air Minum bukan jaringan perpipaan.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 61. Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota. b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 62. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2021	Waktu Capaian
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota pekanbaru	Jumlah warga negara yang terkena relokasi pemerintah akibat program pemerintah kota pekanbaru yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	Setiap tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022)

Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan 2 indikator (100 persen) SPM urusan perumahan rakyat. Realisasi indikator capaian target SPM urusan perumahan rakyat untuk tahun 2021 belum mencapai 100 persen karena di wilayah Kota Pekanbaru belum ada terjadi bencana sehingga kegiatan penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana belum ada dilaksanakan selain itu Kota Pekanbaru belum ada program relokasi yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2021 sehingga program dan kegiatan penunjang SPM akan dianggarkan pada tahun 2023. Permasalahan yang terdapat dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ialah:

- Kota Pekanbaru tidak termasuk daerah terjadi bencana sehingga program dan kegiatan penunjang SPM belum tersedia di tahun 2021
- Tidak adanya program relokasi oleh Pemerintah Daerah sehingga program dan kegiatan penunjang SPM belum tersedia di tahun 2021

Sehingga Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut ialah Program dan kegiatan penunjang SPM akan dianggarkan 2023

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Berdasarkan hasil Laporan Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibbumlinmas) tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdapat 27 Laporan pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 35 Laporan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 63. Laporan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laporan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	Laporan	54	56	20	23	27	35
Laporan pelanggaran Perda/Perkada	Laporan	345	359	209	768	420	1.137

Sumber: SIPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2022

Selain anggota SATPOL PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 adalah sebanyak 488 orang, sedang pada tahun 2021 bertambah menjadi 500 orang maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 penduduk. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 64. Cakupan Petugas Linmas Kota Pekanbaru

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Petugas Linmas	857	360	475	475	488	500
Jumlah Penduduk	1.064.565	1.091.088	1.117.359	1.143.359	983.356	994.585
Luas Wilayah	632,26	632,26	632,26	632,26	632,26	632,26
Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk	8,05	3,30	4,25	4,15	4,83	5,02
Cakupan petugas Linmas	0,0094%	0,0092%	0,0089%	0,0087%	0,0077%	0.0100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2022 (diolah oleh Bappeda Kota Pekanbaru)

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2019, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani kejadian kebakaran 52 persen dari jumlah kejadian kebakaran. Pada tahun 2020 rata-rata pemenuhan waktu tanggap adalah sebesar 71 persen, sementara pada tahun 2021 sebesar 75 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 65. Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) di Kota Pekanbaru

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	55%	52%	71%	75%

Sumber: SIPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, 2021

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Pemerintah Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 66. Layanan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. b. Pelayanan informasi rawan bencana. c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode RPJMD 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 67. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	98%	70%	100%	83,3%	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	N/A	N/A	100%	90%	56%	Setiap tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahandan kesiapsiagaan terhadap bencana	N/A	N/A	100%	116%	84%	Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	N/A	N/A	100%	100%	86%	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Waktu Capaian
		evakuasi korban bencana						
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79%	49%	52%	71%	75%	Setiap tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berada pada Dinas (Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja). Dapat diketahui bahwa pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah mencapai angka 100%, dengan indikator capaian berupa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara. Selanjutnya 3 pelayanan dasar yang dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan capaian 56%, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan capaian 84%, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan capaian 86%.

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- Satuan Polisi Pamong Praja, adanya refocusing anggaran untuk Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi target pencapaian SPM sehingga diperlukan kerjasama dari stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBD untuk mencapai target SPM dengan minimnya anggaran.
- Dinas Pemadam Kebakaran, belum maksimalnya kinerja BALAKAR dikarenakan rasionalisasi anggaran akibat Covid-19, sehingga perlu memaksimalkan kinerja BALAKAR di setiap Kelurahan
- Badan Penyelamatan Bencana Daerah, anggaran yang kurang memadai dan kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana oleh karena itu diminta agar meminta TAPD mengalokasikan anggaran untuk BPBD dalam permasalahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

6. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, urusan sosial harus merupakan salah satu fokus pembangunan, karena penyelenggaraannya pada hakikatnya adalah pembangunan sumber daya manusia demi untuk terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan dinamis, yang akan berefek kepada meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat secara umum. Di kota Pekanbaru gambaran penyelenggaraan urusan sosial bisa dilihat pada tindakan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta tingkat ketersediaan rumah ibadah dan sarana prasarana sosial lainnya.

Tabel 2. 68. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	Sukajadi	12.543	4.055
2	Pekanbaru Kota	10.326	319
3	Sail	5.306	172
4	Lima Puluh	9.563	327
5	Senapelan	11.942	3.912
5	Rumbai Barat	27.799	8.474
6	Bukit Raya	20.399	6.862
7	Binawidya	45.212	14.611
8	Marpoyan Damai	34.221	11.414
9	Tenayan Raya	47.424	15.451
10	Payung Sekaki	21.674	7.702
11	Rumbai	21.451	754
12	Tuah Madani	267	138
13	Kulim	87	51
14	Rumbai Timur	87	52
	Total	268.281	74.294

Sumber : Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru, Tahun 2021

Salah satu indikator yang dijadikan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat adalah jumlah penduduk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Persentase PPKS yang telah memperoleh bantuan sosial tahun 2020 sebesar 84,44 persen.

Tabel 2. 69. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Tahun 2017-2021

NO	KATEGORI PPKS	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG HARUS DIBANTU	%
1	Anak Balita Terlantar	12	12	100	17	17	100	1	1	100	4	4	100	14	14	100
2	Anak Terlantar	187	1	0,53	283	5	1,77	11	11	100	1	1	100	14	14	100
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	42	0	0,00	13	0	0,00	4	4	100	4	4	100	2	2	100
4	Anak Jalanan	65	0	0,00	9	3	33,33	28	28	100	85	85	100	52	52	100
5	Anak Dengan Kedisabilitas	284	9	3,17	422	17	4,03	227	0	0,00	6	6	100	16	16	100
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	24	0	0,00	7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	3	3	100
7	Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan	33	0	0,00	20	0	0,00	15	15	100	9	9	100	2	2	100
8	Lanjut Usia Terlantar	975	82	8,41	443	218	49,21	492	285	57,93	21	21	100	34	34	100
9	Orang Dengan Kedisabilitas	576	53	9,20	772	31	4,02	412	400	97,09	34	34	100	74	74	100
10	Tuna Susila	73	20	27,40	60	101	168,33	60	60	100	23	23	100	1	1	100
11	Gelandangan	95	27	28,42	65	17	26,15	22	22	100	11	11	100	97	97	100
12	Pengemis	58	0	0,00	35	19	54,29	69	69	100	127	127	100	94	94	100
13	Pemulung	339	0	0,00	495	0	0,00	495	0	0,00	901	901	100	4	4	100
14	Kelompok Minoritas	5	0	0,00	20	0	0,00	20	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15	Orang Dengan HIV/AIDS	102	0	0,00	2	2	100	2	2	100	0	0	0,00	0	0	0,00
16	Korban Eks Napza	71	0	0,00	148	0	0,00	148	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	Korban Trafficking	7	0	0,00	5	0	0,00	5	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19	Bekas Warga Binaan Lembaga Permayarakatan	143	0	0,00	200	0	0,00	200	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20	Korban Bencana Alam	609	609	100,00	629	417	66,30	12	12	100	25	25	100	988	988	100
21	Korban Bencana Sosial	88	88	100,00	85	25	29,41	103	103	100	57	57	100	169	169	100
22	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10	0	0,00	14	0	0,00	14	14	100	2	2	100	0	0	0,00
23	Korban Tindak Kekerasan	12	0	0,00	3	0	0,00	3	3	100	0	0	0,00	0	0	0,00
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2659	0	0,00	1.912	0	0,00	11	0	0,00	4.154	0	0,00	0	0	0,00
25	Fakir Miskin	44315	20467	46,19	328.819	228.797	69,58	205.593	126.968	61,76	183.842	158.485	86,21			
	Fakir (DTKS)	44315	20467	46,19	181.214	81.192	44,80	162.754	84.129	51,69	148.984	123.627	82,98	264.754	193.008	72,90
	pbi apbn DTKS	N/A	N/A	N/A	81.192	81.192	100	84.129	84.129	100	123.62	123.627	82,98	140.65	140.655	100

NO	KATEGORI PSKS	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG HARUS DIBANTU	%
											7			5		
	BPNT	20467	20467	100	15.037	16.818	111,84	13.784	13.784	100	16.227	16.227	100	16.227	16.277	100
	PKH	6943	6943	100	14.654	14.654	100	13.968	13.968	100	12.558	12.558	100	10.967	10.967	100
	kube produksi	N/A	N/A	N/A	300	300	100	300	300	100	90	90	100	300	300	100
	kube jasa (e-warong)	N/A	N/A	N/A	290	580	200	290	290	100	290	290	100	290	290	100
	Fakir miskin non bdt (pbi)	N/A	N/A	N/A	67.182	67.182	100	N/A	N/A	N/A	34.858	34.858	100	264.664	26.664	100
	Fakirmiskin Jamkesda	N/A	N/A	N/A	37.584	37.584	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fakir Miskin APBD (Integrasi)	N/A	N/A	N/A	42.839	42.839	100	42.839	42.839	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Komunitas Adat Terpencil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah	78.194	48.778	62,38	334.478	229.669	68,66	209.848	127.997	61,00	188.405	158.894	84,34	266.318	194.572	73,06

Sumber: LKJiP Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021

Jumlah PPKS yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 189.306, yang telah tertangani sebanyak 159.795 atau sebesar 84,41 %. Hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 persentase PPKS yang tertangani sebesar 61,55 persen, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 70. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Total PPKS	78.194	334.478	209.848	188.405	266.318
PPKS yang diberi Pelayanan	48.778	229.669	127.997	158.894	194.572
Persentase	62,38	68,66	61,00	84,34	73,06

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2. 71. Data Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Total PSKS	888	747	1.032	1033	996
PSKS yang aktif	620	450	838	859	811
Persentase	69,82	60,24	81,20	83,16	81,43

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2022

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk membantu negara dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial, sehingga mampu mengurangi jumlah

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ada 13 jenis PSKS baik berupa individu, kelompok ataupun lembaga yang ada di Kota Pekanbaru yaitu: 1). Pekerja Sosial Profesional 2).Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3). Taruna Siaga Bencana (Tagana) 4). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 5) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 6) Karang taruna 7).Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 8). Keluarga pioner 9). Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) 10). Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 11). Penyuluh Sosial 12). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 13). Dunia usaha. Dari 13 PSKS tersebut ada 7 (tujuh) PSKS yang aktif seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 72. Data PSKS di Kota Pekanbaru Tahun 2021

NO	Jenis PSKS	Kecamatan															
		Kota Pekanbaru	Bukit Raya	Lima Puluh	Marpoyan Damai	Payung Sekaki	P. Kota	R. Barat	Rumbai	Sail	Senapelan	Sukajadi	Bina Widva	T. Raya	Tuah Madani	R. Timur	Kulim
1	TAGANA		15	6	25	6	9	8	18	10	9	1	11	34	1	0	0
2	Karang Taruna	113	2	5	6	5	35	7	5	4	7	3	13	6		0	0
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
4	Pekerja Sosial Masyarakat	0	14	12	27	13	11	11	17	5	19	16	25	27	2	0	0
5	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	15	3	1	5	4	2	7	6	0	3	3	8	11		0	0
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	0	3	1	12	6	1	2	0	2	0	2	5	6	1	1	1
7	Pekerja Sosial	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru, Tahun 2021

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021, maka layanan dasar SPM Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 73. Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 74. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2021	Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	90%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	28%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	34%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	127%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	100%	Setiap tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022)

Tahun 2021, SPM Bidang Sosial Kota Pekanbaru telah mencapai 75 persen, bahwa dalam pelaksanaannya terkendala oleh pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk menangani permasalahan yang lebih urgent, yaitu wabah penyakit Covid – 19, sehingga untuk kedepannya perlu sosialisasi dan inovasi yang lebih baik untuk pencapaian SPM ditahun berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal.

Terhadap adanya penghitungan Pencapaian SPM dibutuhkan Penghitungan Pencapaian SPM yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Capaian Mutu Pelayanan Dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata – rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis
- b. Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada public. Pelayanan dasar adalah merupakan pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Terhadap adanya capaian indicator yang belum maksimal dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Diperlukan komitmen dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam pencapaian setiap SPM;
- b. Penyusunan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa/ kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di desa/kelurahan untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR. Untuk menunjang pelaksanaan operasional Sekretariat Puskesmas pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan kontribusi natura dan anggaran.

Tabel 2. 75. Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Lembaga Puskesmas	Alamat Sekretariat
1	Sidomulyo Barat	Madani	Jl. Purwodadi / Kayu Ramin Pekanbaru 28294
2	Tobek Godang	Damai Sejahtera	Jl. Damai No. 22 Pekannbaru
3	Sialang Munggu	Sialang Munggu Peduli	Jl. Cipta Karya Gg. Limba-Lumba Pekanbaru
4	Delima	Srikandi	JL. Swadaya
5	Rejosari	Puskesmas rejosari	Jl. Pendopo
6	Tangkerang Barat	Puskesmas Tangkerang Barat	Jl. Gulama

Sumber : Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru, Tahun 2021

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan mereka.

SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Tabel 2. 76. Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kota Pekanbaru

TAHUN	Pengaduan Terlayani		Pengaduan Non DTK Yang Dilayani
	Rekomendasi KIP yang diberikan	Rekomendasi KIP yang diberikan	
2020	443	1.302	2.795
2021	502	1.614	7.176
2022	305	1.358	2.274
TOTAL	1.250	4.274	12.245

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2022

B. Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2. 77. Kondisi ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2017–2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,22	65,66	65,86	65,22	61,61
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,91	8,11	7,74	8,56	8,29
3	Jumlah Pengangguran	Orang	45.716	45.469	43.865	47.521	44.503
4	Penduduk Usia Kerja	Orang	465.755	494.362	514.200	507.617	492.354
5	Angkatan Kerja	Orang	181.531	212.545	228.223	211.586	157.770
6	Kesempatan Kerja/bekerja	%	-	-	92,14	91,44	97,71
7	Bukan Angkatan Kerja	Orang	286.024	281.817	285.977	296.031	334.584
8	Rasio Lulusan Sarjana (S1/S2/S3) terhadap	%	35,28	35,28	39,76	23,31	6,57

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	pencari kerja yang terdaftar						
9	Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	219	161	138	151	87
10	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama (PB)	Kasus	101	77	66	52	25
11	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	2.212	2.354	3.072	2.119	1.773
12	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	267.616	311.933	316.261	389.129	210.813

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021, SIPD Disnaker Kota Pekanbaru, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan *angkatan* kerja, yakni penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK di suatu wilayah maka menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pekanbaru pada Tahun 2021 TPAK mengalami penurunan 3,61 persen menjadi 61,61 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di Kota Pekanbaru untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin bertambah, penurunan yang terjadi dikarenakan tenaga kerja terkena dampak pandemi covid-19, dampak tersebut tak hanya berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga jam kerja berkurang, sementara tidak bekerja, hingga menjadi pekerja paruh waktu.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu wilayah terdapat TPT yang tinggi maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Pada tahun 2020 semasa pandemic Covid-19 TPT Kota Pekanbaru sebesar 8,56 persen, nilai TPT tahun 2021 menurun menjadi 8,29 persen seiring membaiknya penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mulai tumbuh. Tingginya tingkat pengangguran di dipicu adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya mengurangi pengangguran dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan pencari kerja lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri.

Tabel 2. 78. Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perjanjian Bersama dan Anjuran

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Penyelesaian melalui perjanjian bersama	77	66	52	31
2	Penyelesaian melalui anjuran	44	50	129	72

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2. 79. Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Mendaftar	9289	7149	4637	3928
2	Lowongan	4831	5443	3126	1696
3	Penempatan	2354	3079	2119	1773

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2. 80. Tenaga Kerja yang Terdaftar Ikut Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Pendaftar Pelatihan	1437	1753	1835	3219
2	Lulusan Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat	903	1151	1268	2418

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2022

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis, dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

a. Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Perda ini diperlukan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak

dengan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha dalam menyukseskan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan KLA yang meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2015-2017 mendapatkan peringkat pratama, pada tahun 2018 naik lagi menjadi madya, dan mendapatkan penghargaan Forum Anak terbaik, lalu tahun 2019 mendapatkan 3 penghargaan yaitu naik peringkat menjadi nindya (capaian nilai 719 poin), mendapatkan penghargaan sekolah ramah anak, dan penghargaan Puskesmas Ramah anak. Pada tahun 2020 penilaian KLA ditiadakan karena pandemi Covid-19.

Pada Bulan Juli tahun 2021, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya untuk Tahun 2020. Untuk Provinsi Riau, hanya dua penghargaan kategori Nindya yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Indikator KLA terdiri dari 3 indikator yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga sudah diratifikasi Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 substansi hak-hak anak tersebut dikelompokkan kedalam 5 kluster yaitu:

- Hak Sipil Dan Kebebasan;
- Lingkungan Keluarga;
- Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan;
- Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya;
- Perlindungan Khusus.

b. Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus KED Terhadap Perempuan dan Anak

Dalam rangka upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak, pada tahun 2020 yang lalu Pemerintah Kota Pekanbaru telah menuntaskan rangkaian proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang ditandai dengan telah ditetapkannya pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi UPT PPA tersebut. Dengan adanya UPT PPA layanan perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat semakin ditingkatkan dengan upaya penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembenahan alur, prosedur dan standar layanan. Adapun capaian penanganan kasus perempuan dan anak pada UPT PPA tahun 2020 adalah sebesar 100 persen.

Tabel 2. 81. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Pada P2TP2A Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2019

No	Jenis Kasus	2016	2017	2018	2019
1.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	15	12	16	20
2.	Kekerasan Berbasis Gender	3	2	6	7
3.	Kekerasan Terhadap Anak	4	6	11	13
4.	Penelantaran	4	9	3	2
5.	Hak Anak	7	2	17	27
6.	Hak Asuh Anak	7	14	4	3
7.	Kenakalan Anak	6	5	0	1
8.	Anak berhadapan dengan Hukum	0	4	4	19
9.	Trafficking	3	0	0	0
10.	Pencabulan	14	20	32	38
	Jumlah	63	74	93	130

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, 2020

Makin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum menjadi perhatian utama oleh pemerintah daerah terbukti masih banyak korban kekerasan perempuan yang belum mendapatkan perhatian secara penuh. Banyak perempuan yang merupakan korban kekerasan, masih enggan melaporkan kasus yang menimpanya, dengan alasan :

- Adanya rasa malu secara fisik maupun psikis untuk melaporkan kasusnya kepada aparat yang berwajib.
- Adanya rasa kasihan kepada suami, apabila melaporkan kejadian tersebut.
- Ketakutan adanya balasan Ketika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Adanya keragu-raguan bahwa masalahnya akan dapat selesai.
- Tidak taunya korban mengenai cara melaporkan kejadian tersebut.
- Kesulitan ekonomi.
- Kekhawatiran tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, tanpa adanya suami.

Hal-hal tersebut diatas yang mengakibatkan masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan bahwa korban kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Suami, isteri dan anak;

- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan anak dari berbagai perlakuan kekerasan dan diskriminasi, maka pemerintah sudah mengeluarkan berbagai payung hukum yang tertuang baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam bentuk Undang-undang lainnya seperti dalam Undang-undang HAM serta UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga masih sering terjadi pada kehidupan anak di kota Pekanbaru.

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru sebaiknya diatasi dengan upaya pembentukan perangkat hukum daerah. Pengaturan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- diskriminasi
- eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- penelantaran
- kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- ketidakadilan dan
- perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masih tingginya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat, tentunya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat meresahkan banyak kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu diambil strategi dan tindakan oleh pemerintah untuk dapat meminimalisir bahkan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat.

Tingginya jumlah perempuan dan anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi masih relative besar. Masih ada anak-anak yang terlantar, bekerja di jalanan, belum mendapatkan pelayanan yang optimal, putus sekolah, menjadi korban trafiking, penganiayaan dan lain-lain. Kondisi seperti ini mencerminkan masih kurangnya kesadaran dan kepekaan para perencana dan penentu kebijakan untuk memprioritaskan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak. Berdasarkan pemahaman pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, maka dalam perlindungan hukum dan sebagai upaya pemenuhan hak asasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

c. Cakupan Perempuan di Legislatif

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga mahaer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Pekanbaru tahun 2016 adalah 15,56 persen dan pada tahun 2018-2021 sebesar 20 persen.

Tabel 2. 82. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD di Kota Pekanbaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kursi yang diduduki perempuan	7	7	9	9	9	9
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45	45
	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	15,56	15,56	20,00	20,00	20,00	20,00

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kota Pekanbaru, 2021

d. Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender

Semangat dan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender (PUG) tidak pernah kendur. Setidaknya, hal tersebut tercermin dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meningkat dari tahun ke tahun, dari 92,86 tahun 2017, naik menjadi 93,12 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, IPG Kota Pekanbaru naik menjadi 93,27.

Tabel 2. 83. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Pekanbaru

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,86	92,97	93,2	93,01	93,27

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021

3. Pangan

Pada bidang pangan, Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) merupakan indikator yang menunjukkan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Target capaian SPPH tahun 2020 adalah 88,00 Poin.

Dalam hal ketersediaan energi dan protein, Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein dapat dijadikan salah satu indikator pemenuhan gizi dan pangan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Adapun Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) serta ketersediaan energi dan pangan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 84. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Energi	KKal/Kap/Hari	2.256	2.281	2.281	2303.23	2.401
2.	Protein	Gram/Kapita/hari	71,9	80,4	80,4	80,17	126,8

Sumber: SIPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020, ketersediaan makanan di Kota Pekanbaru untuk dikonsumsi dalam bentuk energi adalah sebesar 2303.23 kkal/kapita/hari yang bersumber dari pangan nabati sebesar 1956,97 kkal/kap/hari dan pangan hewani sebesar 324,26 kkal/kap/hari. Ketersediaan energi pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 2329,99 kkal/kap/hari. Ketersediaan Energi dari tahun 2018-2020 pada Kota Pekanbaru semakin menurun. Pada Tahun 2018 ketersediaan energi mencapai 2911,60 kkal/kap/hari. Ketersediaan energi didominasi oleh pangan nabati. Ketersediaan energi Kota Pekanbaru tahun 2018-2020 menunjukkan tren menurun. Ketersediaan energi pada Tahun 2019 dan 2020 terhadap rekomendasi adalah sedikit di bawah angka rekomendasi ketersediaan Energi berdasarkan WNPG 2018 adalah sebesar 2400 kkal/kap/hari. Sedangkan ketersediaan energi pada tahun 2018 sudah melebihi angka rekomendasi.

Menurunnya ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh menurunnya ketersediaan energi dari kelompok padi-padian sebesar 1,05 Kkal, makanan berpati 13,28 Kkal, gula 19,65 Kkal, buah/biji berminyak 32,59 Kkal dan sayur-sayuran 13,92 Kkal. Sementara itu, turunnya ketersediaan protein per kapita per hari sebesar 0,23 gram pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh turunnya ketersediaan protein pada kelompok buah/biji berminyak sebesar 1,8 gram, sayur-sayuran 6,6 gram dan telur 0,1 gram. Namun demikian penurunan tersebut juga diimbangi oleh kenaikan ketersediaan protein pada kelompok buah-buahan 0,4 gram, susu 1,1 gram dan ikan 0,5 gram.

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan Kota Pekanbaru tahun 2021, ketersediaan energi adalah sebesar 2.401 kkal/kapita/hari, ketersersediaan protein sebesar 126,8 gram/kapita/hari dan skor PPH ketersediaan sebesar 90,6. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan energi dan protein perkapita penduduk sudah di atas angka kecukupan energi dan protein yang ditetapkan (Angka Kecukupan Energi di Tingkat Ketersediaan adalah sebesar 2400 kkal/kapita per hari) dan Angka

Kecukupan Protein di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/kapita/hari). Namun jika dilihat dari kualitasnya, ketersediaan pangan Kota Pekanbaru belum beragam karena belum mencapai skor PPH 100. Keberagaman kelompok pangan yang harus ditingkatkan adalah kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula.

Saat ini Kota Pekanbaru sudah melaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dengan unit analisis kelurahan. sebagai tindak lanjut FSVA Pusat yang unit analisisnya adalah kabupaten/Kota dan FSVA Provinsi Riau yang unit analisisnya adalah kecamatan. Hasil analisis FSVA pusat tersebut ditindaklanjuti dengan hasil analisis FSVA Kota Pekanbaru yang divisualisasikan pada aplikasi siDIVA. Aplikasi ini diharapkan sebagai salah satu upaya pemerintah kota pekanbaru yang sesuai dengan kewenangannya dalam membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Hasil FSVA Kota Pekanbaru tahun 2021, bahwa masih terdapat 14 Kelurahan yang masih dalam Indeks 1, 2 dan 3 (status 1. Sangat Rentan Pangan, 2. Rentan Pangan dan 3. Agak Rentan Pangan) atau sejumlah 17% dari total kelurahan yang ada di kota Pekanbaru, dengan data-data sebagai berikut:

Tabel 2. 85. Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru

No	Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru	Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Jumlah Kelurahan Yang Dalam Indeks 1, 2 dan 3	% Kelurahan Yang Butuh Stimulus
		Sangat Rentan Rawan Pangan	Rentan Rawan Pangan	Agak Rentan Rawan Pangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 3+4+5)	(7 = 6 / Total Kelurahan)
1	Sarana Prasarana	12	13	17	42	50,60%
2	Akses Trasnportasi	0	0	0	0	0,00%
3	Penduduk Tidak Sejahtera	13	13	16	42	50,60%
4	Akses Air Bersih	13	13	16	42	50,60%
5	Tenaga Kesehatan	13	13	16	42	50,60%
6	Komposit	2	5	7	14	16,87%

Sumber Data: Data diolah dengan siDIVA, 2021

Kelurahan yang masih dalam status 1, 2 dan 3 di atas masih memerlukan intervensi yang cukup besar dalam penanganan pangan. Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan 2022 telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan sasaran

Kelompok Wanita Tani yang lokusnya diarahkan pada kelompok yang beranggotakan keluarga beresiko stunting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 86. Data Kelompok Penerima Manfaat Bantuan P2I Stunting APBD Tahun 2021 & 2022

NO	NAMA KWT	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	DANA	SUMBER DANA
Tahun Anggaran 2021						
1	KWT. MADANI MELEBUNG	Jl. Melebung	Melebung	Tenayan Raya	70.000.000,00	DAK Non Fisik (Tahap Penumbuhan)
Tahun Anggaran 2022						
1	KWT. KEMBANG SEKUNTUM	Jl. Proyek baru RT 5 RW 6	Tanjung Rhu	Limapuluh	34.533.461,54	APBD Murni
2	KWT. MEKAR SARI	Jl. Tanjung Batu RT 1 RW 4	Pesisir	Limapuluh	34.533.461,54	APBD Murni
3	KWT. SEROJA	Jl. Sri Intan	Rumbai Bukit	Rumbai Barat	34.533.461,54	APBD Murni
4	KWT.ADI MAJU	Jl. Raja Panjang Okura	Tebing Tinggi Okura	Rumbai Timur	34.533.461,54	APBD Murni
5	KWT. KAPLINGAN JAYA	Jl. Raja Panjang Okura	Tebing Tinggi Okura	Rumbai Timur	34.533.461,54	APBD Murni
6	KWT.WANITA BERSATU	Jl. Raja Panjang Okura	Tebing Tinggi Okura	Rumbai Timur	34.533.461,54	APBD Murni
7	KWT. SRI REZEKI	Jl. Karya mandiri	Air Dingin	Bukit Raya	34.533.461,54	APBD Murni
8	KWT. KEBUN MEKAR BERSERI	Jl. Kebun sari	Tangkerang selatan	Bukit Raya	34.533.461,54	APBD Murni
9	KWT. MADANI MELEBUNG	Jl. Melebung	Melebung	Tenayan Raya	30.000.000,00	DAK Non Fisik (Tahap Pengembangan)
JUMLAH TAHUN 2022					306.267.692,30	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

4. Pertanahan

Berdasarkan dan mempedomani dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana pembagian urusan Pemerintah Bidang Pertanahan mempunyai 9 (sembilan) kewenangan di daerah Kabupaten/Kota meliputi:

Tabel 2. 87. Kewenangan Bidang Pertanahan

NO	SUB DAERAH	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin Lokasi Lintas Daerah Provinsi	Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
2.	Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi	
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kab/kota
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat	Penyelesaian masalah Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian masalah Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
5.	Subjek dan Objek Redistribusi tanah, serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Provinsi	Penetapan Subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimu dan tanah absentee dalam daerah Provinsi	Penetapan Subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimu dan tanah absentee dalam daerah kab/kota
6.	Tanah Ulayat		Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kab/Kota
7.	Tanah Kosong		- Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Provinsi - Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Provinsi	- Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kab/Kota - Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Kab/Kota
8.	Izin Membuka Tanah			Penerbitan izin membuka tanah
9.	Penggunaan Tanah		Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Provinsi	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kab/Kota

Sumber: Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014

Pencapaian kinerja pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 88. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan	62,80 %	66,43%	3,63%
2	Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Sengketa Tanah yang Terasilitasi	30 %	11 %	-19%

Sumber: LKJIP Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, 2021

Realisasi pembangunan Meningkatkan Penyediaan Tanah untuk Infrastruktur, Sarana dan Prasarana berdasarkan Prioritas Pembangunan pada tahun 2020 sebesar 66,43 persen terdiri dari konsolidasi tanah, pengadaan tanah dan penyuluhan hukum.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. OPD pengguna tanah agar dapat melengkapi dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan lengkap dan benar
- b. Untuk kegiatan konsolidasi tanah langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir kegagalan-kegagalan adalah :
 - Mengadakan kembali sosialisasi konsolidasi tanah kepada masyarakat pemilik tanah.
 - Meminta kepada camat dan lurah untuk dapat melakukan pendekatan kepada pemilik tanah dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan.
 - Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan BPN dalam percepatan penyelesaian kegiatan.

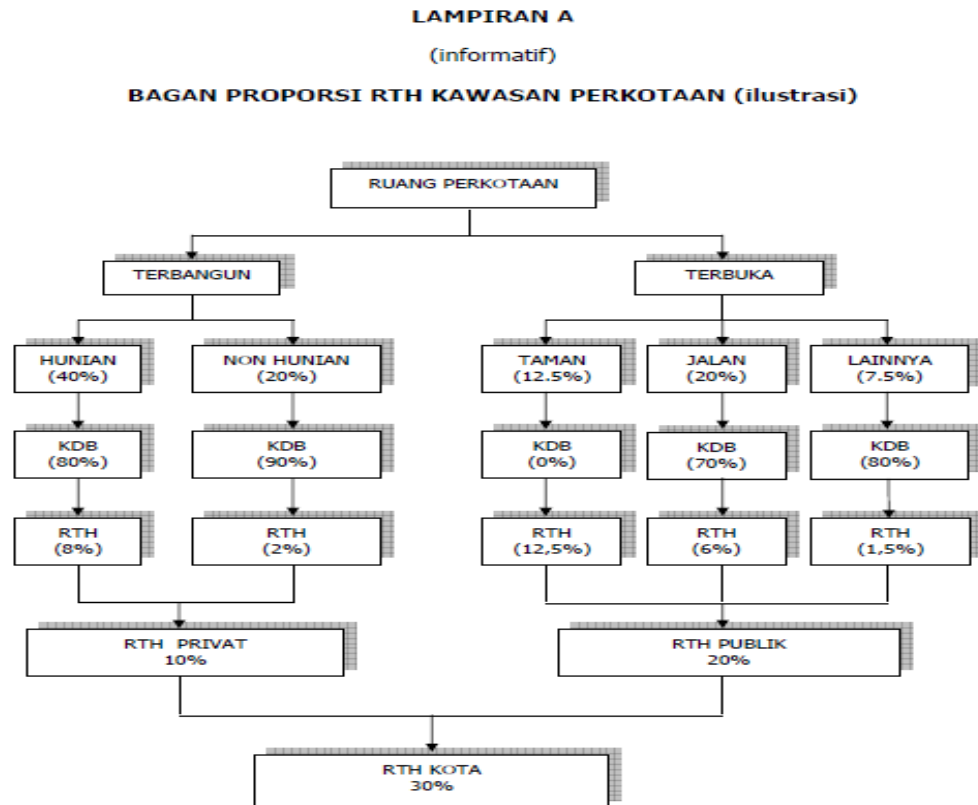
Untuk indikator Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru dengan indikator Kinerja Persentase Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru mempunyai target 30 persen dengan realisasi 11 persen disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang diakibat oleh Covid-19.

5. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang “Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen sebagai RTH Publik dan 10 (sepuluh) persen RTH Privat. Dari luas wilayah Kota Pekanbaru seluas 63.901,54 Ha seharusnya RTH Publik adalah seluas 12.780,3 Ha dan untuk RTH Privat seluas 6.390,15 Ha.

Proporsi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008 adalah sebagaimana bagan berikut :

Gambar 2.12. Bagan Proporsi RTH Kawasan Perkotaan (Ilustrasi)



Sumber : Ekspos Tim TKPRD Kota Pekanbaru 16 April 2019

Ruang Terbuka Hijau Publik juga banyak fungsinya sesuai dengan tujuan Pengelolaan dan lokasi keberadaannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 89 Perhitungan Luasan RTH Publik Sesuai Fungsinya Untuk Kota Pekanbaru

NO	JENIS RTH	ALOKASI RENCANA RTH	RENCANA LUASAN RTH (HA)	KETERANGAN
1	JALUR HIJAU JALAN	5%	2.746,6	TIDAK WAJIB TERPLOT DALAM PETA POLA RUANG
2	PEMAKAMAN	0.5%	274,7	KAWASAN YANG SKALA LUAS TERPLOT DALAM PETA POLA RUANG
3	TAMAN	6%	3.295,9	KAWASAN YANG SKALA LUAS TERPLOT DALAM PETA POLA RUANG
4	HUTAN KOTA (TERMASUK JUGA SEMPADAN WADUK/DANAU,	6.5%	3.570,5	TERPLOT DALAM PETA POLA RUANG

NO	JENIS RTH	ALOKASI RENCANA RTH	RENCANA LUASAN RTH (HA)	KETERANGAN
	SEMPADAN SUNGAI, SEMPADAN SUNGAI, JALUR SUTT, <i>BUFFER ZONE</i>)			
5	LAINNYA (AREA TERBUKA HIJAU DI FASILITAS YANG DIMILIKI PEMERINTAH)	2%	1.098,6	TIDAK WAJIB TERPLOT DALAM PETA POLA RUANG
TOTAL		20%		

Sumber : Ekspos Tim TKPRD Kota Pekanbaru 16 April 2019

Dari tabel di atas, dalam pemenuhan luas RTH Publik sebesar 20%, menjadi tanggungjawab berbagai pihak lintas Perangkat Daerah yang dapat melaksanakannya antara lain : Dinas Pertanian berupa RTH Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa RTH Pemakaman, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan berupa RTH Taman dan Jalur Hijau serta OPD terkait lainnya berupa RTH lainnya.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan ekspos Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Kota Pekanbaru pada tanggal 16 April 2019 dalam updating dan penyesuaian RTRW dengan peraturan Menteri Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2018. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 90. Ruang Terbuka Hijau Publik Eksisting di Kota Pekanbaru

NO	JENIS	LUAS (HA)
1	RTH YANG DIKELOLA BIDANG PERTAMAMAN DPUPR	319
2	HUTAN KOTA DI CHEVRON	469
3	HUTAN KOTA UNIVERSITAS RIAU	25
4	HUTAN KOTA UIN SUSKA	25
5	HUTAN KOTA LANUD ROESMIN NOERJADIN	25
6	SEMPADAN WADUK / DANAU	62
7	SEMPADAN SUNGAI	1.866
8	SEMPADAN JALUR TEGANGAN TINGGI	286
TOTAL		3.077
5,6% DARI KAWASAN PERKOTAAN		

Sumber : Ekspos Tim TKPRD Kota Pekanbaru 16 April 2019

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RTRW Kota dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis dan fungsi lainnya. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman Kota di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 91. Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Nama RTH	Lokasi	Jenis RTH	Luas RTH (m ²)
1.	Taman RTH Kacang Mayang	Jl. Sudirman Kec. Pekanbaru Kota	Taman	12.074
2.	Taman Kota	Jl. Diponegoro Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota	Taman	11.445
3.	Taman Kayu Putih	Jl. Tambelan Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota	Taman	3.970
4.	Taman Tunjuk Ajar Integritas	Jl. Ahmad Yani Kec. Senapelan	Taman	14.477
5.	Taman Bawah Jembatan Lekton II	Jl. Perdagangan Kec. Senapelan	Taman	4.678
6.	Taman Bawah Jembatan Lekton I	Jl. Yos Sudarso Kec. Senapelan	Taman	9.054
7.	Hutan Kota	Jl. MH. Thamrin Kel. Suka Mulya Kec. Sail	Hutan Kota	59.489
8.	Taman Wisata Mini/Simpang Tiga MTQ	Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai	Taman	8.468
9.	Taman di belakang Puswil	Jl. Cut Nyak Dien Kec. Sukajadi	Taman	1.192
10.	Taman Simpang Harapan Raya	Jl. Lintas Timur Simpang Jl. Sudirman	Taman	509
11.	Taman Bantaran Sungai Batak	Jl. Akasia I. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya	Taman	814
12.	Taman Simpang Badak	Jl. Hangtuh Ujung Tenayan Raya	Taman	161
13.	Taman Depan Auri	Jl. Adi Sucipto	Taman	1.026
14.	Taman Cinta Raja	Jl. Amir Hamzah Kel. Cinta Raja	Taman	1.028
15.	Taman Pasar Bawah	Jl. Saleh Abbas	Taman	321
16.	Taman Patung Kuda	Jl. T. Tambusai	Taman	382
17.	Taman PCR	Jl. Umban Sari	Taman	25.252
18.	Taman Kantor Camat Bukit Raya	Jl. Ash Shofa	Taman	250
19.	Taman Kantor Camat Payung Sekaki	Jl. KH. Nasution	Taman	372
20.	Taman Perum Rejosari	Jl. Utama	Taman	420
21.	Taman Perum Kenanga	Jl. Kenanga	Taman	72
Total				155.454

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Hutan Kota yang berada di Jalan Thamrin merupakan aset pemerintah Provinsi Riau yang sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Pengelolaan hutan kota tersebut masih dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru melalui Bidang Pertamanan melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pihak Provinsi Riau yaitu pemeliharaan/perawatan dalam hal kebersihan, keamanan, dan keindahan. Jika Hutan Kota tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru pengelolaan aset tersebut dapat dimaksimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 92. Luas RTH Publik Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021

Luas RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Luas	2019	2020	2021
	Kota Pekanbaru (m ²)	632.260.000	632.260.000	632.260.000
	RTH Eksisting (m ²)	9.357.448	15.174.240	15.174.240
	%	1,48	2,40	2,40

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Rasio RTH Publik pada tahun 2019 seluas 9.357.448 m² atau 1,48 persen dari luas wilayah Kota Pekanbaru. Dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru saat ini (632.260.000 m²), sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,92 persen menjadi 2,40 persen sebesar 15.174.240 m². Rasio RTH Publik ideal menurut peraturan perundangan tentang penataan ruang adalah seluas 127.802.000 m² (12.780,2 Ha) atau sebesar 20 persen dari luas wilayah Kota Pekanbaru.

Indikator Kinerja Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) realisasi sampai dengan tahun 2020 baru tercapai 2,4 persen sehingga ada kekurangan target 3,6 persen untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 6 persen. Untuk kegiatan RTH tidak mencapai target karena keterbatasan area yang dikelola menjadi RTH. Solusi yaitu dengan menyusun RTH prioritas untuk dibebaskan.

Untuk perencanaan pembangunan di Kota Pekanbaru, telah disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang direncanakan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017–2022.

a. Layanan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL)

Pelayanan ini dilaksanakan oleh seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan pada bidang Tata Lingkungan yang bertanggung jawab dalam menilai dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan memeriksa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Tim Teknis Penilai AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Hasil akhir penilaian AMDAL berupa Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru dan pemeriksaan UKL-UPL berupa surat rekomendasi UKL-UPL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam rentang waktu 2016-2020, DLHK Kota Pekanbaru telah melakukan penilaian Dokumen Lingkungan dengan total 1.686 Dokumen. Rinciannya yakni Dokumen AMDAL sebanyak 13 dokumen, 171 Dokumen UKL-UPL, 80 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan 5 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sebanyak 1.712 Dokumen.

Tabel 2.93. Dokumen Lingkungan yang Telah Dinilai oleh DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

No	Dokumen Lingkungan	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1.	AMDAL	4	5	3	1	0	13
2.	UKL-UPL	61	35	40	15	20	171
3.	DPLH	-	6	24	22	28	80
4.	DELH	-	-	3	2	0	5
5.	SPPL	-	100	281	695	636	1712
Jumlah		65	146	56	735	684	1686

Sumber : LKJIP DLHK Kota Pekanbaru, 2021

Tabel 2.94. Izin Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit yang Telah Diterbitkan Tahun 2016 - 2021

No.	Izin Pembuangan Air Limbah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Rumah Sakit	10	6	6	6	3	2	33
Jumlah		10	6	6	6	3	2	33

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2022

b. Layanan Pengendalian Pencemaran Air

Dalam rangka meminimalkan dampak dari aktivitas pembuangan air limbah ke lingkungan, dilakukan upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air maka setiap perorangan/pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLH/SETJEN/KUM.1/II/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 2.95. Data Izin Pembuangan Air Limbah yang Telah Diterbitkan

Jenis Dokumen	Tahun						Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Izin Pengurusan Limbah Cair	17	18	15	8	12	8	78

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan pengujian Kalitas Air Limbah pada tahun 2018 pada 15 hotel yang terdapat di Kota Pekanbaru. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, DLHK Kota Pekanbaru melakukan pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik pantau tertentu. Hasil pemantauan tersebut diinterpretasikan ke dalam kelas air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan kelas air.

Tabel 2.96. Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2021

No	Lokasi	Nilai IP dan Status Perairan		Nilai IP dan Status Perairan	
		2019		2020	2021
		I	II		
ST 1	Jembatan Siak II	2,84 (Tercemar ringan)	2,67 (Tercemar ringan)	2,915 (Tercemar Ringan)	2,31 (Tercemar Ringan)
ST 2	Jembatan Siak I	3,49 (Tercemar ringan)	2,61 (Tercemar ringan)	3,181 (Tercemar Ringan)	1,23 (Tercemar Ringan)
ST 3	Sekitar PT. Asia Forestama (AFR) Raya	4,31 (Tercemar ringan)	3,92 (Tercemar ringan)	4,199 (Tercemar Ringan)	1,01 (Tercemar Ringan)
ST 4	Pelita Pantai	3,52 (Tercemar ringan)	3,60 (Tercemar ringan)	3,062 (Tercemar Ringan)	3,42 (Tercemar Ringan)
ST 5	Pelindo	3,40 (Tercemar ringan)	3,29 (Tercemar ringan)	3,300 (Tercemar Ringan)	1,26 (Tercemar Ringan)

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2.97. Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2020

No	Lokasi	Nilai IP dan Status Perairan			
		2019		2020	2021
		I	II	Pemantauan Feb	Pemantauan Sep
1	Sungai Sail I	2,657 (cemar ringan)	2,380 (cemar ringan)	3,965 Tercemar Ringan	2,66 Tercemar Ringan
2	Sungai Sail II	2,425 (cemar ringan)	2,965 (cemar ringan)	3,496 Tercemar Ringan	1,23 Tercemar Ringan
3	Sungai Sail III	3,772 (cemar ringan)	3,135 (cemar ringan)	3,860 Tercemar Ringan	3,02 Tercemar Ringan
4	Sungai Sago	2,288 (cemar ringan)	2,229 (cemar ringan)	3,638 Tercemar Ringan	1,23 Tercemar Ringan

No	Lokasi	Nilai IP dan Status Perairan			
		2019		2020	2021
		I	II	Pemantauan Feb	Pemantauan Sep
5	Sungai Senapelan	2,547 (cemar ringan)	2,607 (cemar ringan)	3,025 Tercemar Ringan	1,19 Tercemar Ringan
6	Sungai Air Hitam	3,985 (cemar ringan)	3,309 (cemar ringan)	3,581 Tercemar Ringan	1,24 Tercemar Ringan
7	Sungai Umban	4,730 (cemar ringan)	4,878 (cemar ringan)	4,052 Tercemar Ringan	2,69 Tercemar Ringan
8	Sungai Tenayan	4,827 (cemar ringan)	3,096 (cemar ringan)	2,605 Tercemar Ringan	1,20 Tercemar Ringan
9	Sungai Pengambang	2,937 (cemar ringan)	3,142 (cemar ringan)	2,015 Tercemar Ringan	1,16 Tercemar Ringan
10	Sungai Limau	3,591 (cemar ringan)	3,341 (cemar ringan)	2,815 Tercemar Ringan	1,02 Tercemar Ringan
11	Sungai Sibam	4,068 (cemar ringan)	3,612 (cemar ringan)	3,865 Tercemar Ringan	0,81 Tercemar Ringan

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air Sungai Siak dan anak Sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 untuk Air Kelas II. Kualitas air tersebut telah tercemar dan hal ini dipengaruhi oleh;

- Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan yang berasal dari anak Sungai Siak dan pada akhirnya bermuara ke Sungai Siak.
- Proses alamiah perairan.
- Tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- Sampah yang di buang ke badan air.

Ditinjau dari segi kualitas air, maka beberapa perairan anak sungai berada dalam kondisi tercemar ringan, Indeks Pencemaran Perairan Sungai Siak dikategorikan tercemar ringan, sedangkan Indeks pencemaran anak-anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan. Sungai masih dianggap tempat pembuangan sampah dan limbah oleh masyarakat.

c. Layanan Pengendalian Pencemaran Udara

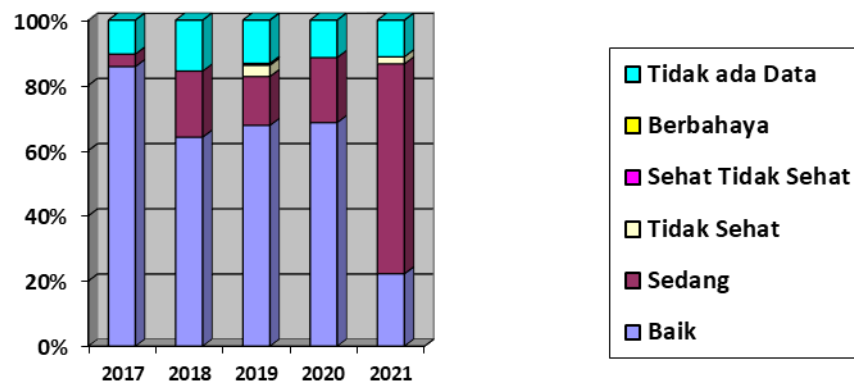
Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada umumnya dipengaruhi oleh *particulate matter* (PM₁₀), yaitu polutan khas berupa debu, asap dan partikel lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta asap yang keluar dari kendaraan diesel (berbahan bakar solar). Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada tahun 2019 cenderung mengandung konsentrasi PM₁₀ yang lebih tinggi yang disebabkan oleh kiriman asap dari daerah/kabupaten pada bulan september. Namun pada kondisi normal konsentrasi gas yang meningkat disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor/transportasi.

Tabel 2.98. Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Hari						
	Baik	Sedang	Tidak Sehat	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya	Tidak Ada Data	Total
2017	313	14	0	0	0	38	365
2018	234	74	0	0	0	57	365
2019	235	52	12	1	1	46	365
2020	251	73	0	0	0	42	366
2021	81	235	8	0	0	41	365

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2022

Grafik 2.14. Perbandingan Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2022

d. Layanan Pengelolaan Persampahan

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu, timbulan sampah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu meningkat ini dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya. Selengkapnya mengenai kinerja pengelolaan persampahan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99. Indikator Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Timbulan sampah yang ditangani	Ton	132.232	189.082	293.462	283.518
2	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	11,14	13,05	14,25	22,61

Sumber: LKJIP DLHK Kota Pekanbaru, 2021

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan disektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Cakupan penerbitan KTP adalah jumlah dokumen KTP yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Cakupan penerbitan KTP di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100. Cakupan Penerbitan/Perekaman KTP di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Penduduk ber KTP	Cakupan Penerbitan KTP
2016	876.064	619.862	550.169	88,76
2017	900.465	640.329	549.442	85,81
2018	915.866	709.275	604.198	85,19
2019	959.830	689.732	687.859	99,73
2020	1.028.237	716.752	716.807	100,01
2021	1.074.989	762.487	720.035	94.43

Sumber: Data Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2021

Target cakupan penduduk berKTP el adalah 100%. Cakupan penduduk yang berKTP elektronik pada tahun 2021 adalah 94,32%. Capaian ini berdasar jumlah penduduk terekam KTP 720.035 orang dibandingkan jumlah penduduk wajib KTP 762.487 orang. Persentase ini belum memenuhi target dikarenakan masih adanya penduduk wajib KTP yang belum terekam, umumnya penduduk berkebutuhan khusus, lansia dan siswa SLTA sebagai wajib KTP pemula.

Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan dimana tahun 2020 sebanyak 98,92%, tahun 2021 menjadi 99,27%. Kondisi ini masih menunjukkan masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran karena persentase belum mencapai 100% yaitu sebanyak 745 anak usia 0 – 5 tahun tidak memiliki akta lahir. Perkembangan selengkapny dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.101. Data Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2017-2021 di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Anak usia 0-5 Tahun	Akta Kelahiran		%
			Memiliki	Tidak Memiliki	
1	2017	84.165	74.616	9.549	88,65%
2	2018	84.905	79.631	5.274	93,79%
3	2019	97.867	96.605	1.262	98,71%
4	2020	98.475	97.407	1.068	98,92%
5	2021	102.299	101.554	745	99,27%

Sumber : LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2021

Data rasio Pasangan Berakta Nikah tahun 2017-2021 merupakan rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah, indikator ini bertujuan untuk mengukur kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan pernikahan atau yang belum memiliki Akta Perkawinan bagi pasangan non muslim, di wilayah Kota Pekanbaru.

Penerbitan dokumen kutipan Akta Perkawinan tahun 2021 adalah sebanyak 70.605 dokumen, dengan persentase capaian sebesar 100%, mengalami peningkatan jumlah penduduk yang memiliki Akta Nikah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang berjumlah 67.527 dokumen Akta Nikah, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102. Data Rasio Pasangan Berakta Nikah Tahun 2017-2021 di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk Menikah yang memiliki Akta Nikah	%
1	2017	58.863	100,00%
2	2018	61.244	100,00%
3	2019	65.125	100,00%
4	2020	67.527	100,00%
5	2021	70.605	100,00%

Sumber : LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2021

Cakupan penerbitan akta kelahiran untuk mengukur capaian kinerja kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan kelahiran anaknya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru, selain dari itu dimaksudkan juga untuk memberikan pengetahuan kepada pihak terkait mengenai pencatatan kelahiran serta memberikan pelayanan langsung ke lapangan dan juga memberikan kemudahan akses dari segi jarak untuk melakukan pencatatan kelahiran.

Tabel 2.103. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Usia <18	Akta Kelahiran		%
			Memiliki	Tidak Memiliki	
1	2017	279.934	152.085	127.820	54,33%
2	2018	268.131	166.405	101.696	62,06%
3	2019	279.473	224.213	55.236	80,23%
4	2020	322.446	267.740	54.687	83,03%
5	2021	342.078	306.226	35.836	89,52%

Sumber: LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2021

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran dapat terealisasi maksimal, dengan penerbitan dokumen Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dengan jumlah penduduk usia < 18 tahun sebanyak 322.446 orang dan terealisasi sebanyak 267.740 dokumen dan apabila dipersentasekan sebesar 83,03%, mengalami kenaikan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 89,52% dengan jumlah penduduk <18 tahun sebanyak 342.078 dan terealisasi sebanyak 306.226 dokumen.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan merupakan sarana yang digunakan untuk melihat potensi di dalam masyarakat. Apapun program yang berupa pemberdayaan tidak dapat terlaksana dengan baik, apabila tidak ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Seiring dengan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu menjadikan Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan fisik kota yang metropolitan dengan komunitas masyarakatnya yang madani. Masyarakat yang beradab, berperilaku baik, toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berilmu pengetahuan, taat dan mempunyai keimanan yang kuat. Sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram dan dapat menunjang kemajuan pembangunan daerah. Untuk menciptakan pola masyarakat yang madani, terlebih dahulu membentuk karakter manusianya.

a. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW)

PMBRW merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP). Namun PNPM Mandiri pedesaan tidak lagi dilanjutkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Hal ini seiring diberlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program PMBRW ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan program PMBRW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui

pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Tabel 2.104. Data Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW)
Terkait Rumah Ibadah (PMB-RI), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan
Rukun Warga (RW) serta Rukun Tetangga (RT)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah				
		Kelurahan	Masjid Paripurna	LPM	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1	Rumbai Barat	6	7	7	33	111
2	Rumbai Timur	5	6	6	40	145
3	Rumbai	6	7	7	79	230
4	Kulim	5	6	6	55	189
5	Tenayan Raya	8	9	9	78	310
6	Sail	3	4	4	18	76
7	Pekanbaru Kota	6	7	7	40	124
8	Limapuluh	4	5	5	30	124
9	Sukajadi	7	8	8	38	145
10	Senapelan	6	7	7	42	144
11	Bukit Raya	5	6	6	58	258
12	Marpoyan Damai	6	7	7	76	331
13	Payung Sekaki	6	7	7	39	186
14	Bina Widya	5	6	6	48	215
15	Tuah Madani	5	6	6	97	431
Total		83	98	98	771	3019

Sumber: Diolah Bappeda Kota Pekanbaru, 2022

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga, kota Pekanbaru membutuhkan kerjasama antar pemerintah dengan perangkat masyarakat di tingkat bawah yakni ketua Rukun warga (RW) itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang menjamin upaya RW dan fasilitator (pendamping) untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru. Salah satu mekanismenya adalah melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di Kota Pekanbaru.

Selain itu untuk lebih meningkatkan peran dan semangat kerja para Rukun Warga (RW) dimasing-masing wilayah kerja mereka maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan dana insentif untuk 3.019 orang RT, 771 orang RW.

Dana insentif mereka ini sudah dialokasikan sejak Tahun 2016 dengan rincian untuk RT sebanyak Rp 500 ribu perorang. Sementara untuk insentif RW masing-masing Rp 650 ribu perorang. Insentif tersebut dibayarkan per tiga bulan sekali.

PMBRW ini ditargetkan pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyentuh pada seluruh Rukun Warga (RW) di Pekanbaru yang direncanakan akan mendapatkan dana masing-masing RW. Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru melalui PMBRW telah dinyatakan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014

kemudian diperbaharui dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. Program PMBRW ini telah termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) Kota Pekanbaru.

Arah dan jangkauan pengaturan Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru adalah mendorong penguatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, kelurahan, Rukun Warga, Fasilitator, Kelompok peduli tentang PMBRW dengan membangun Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) dan Kelembagaan Rukun Warga sebagai pusat pelayanan masyarakat PMBRW Kota Pekanbaru adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD, dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta serta bantuan lain yang tidak mengikat.

b. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah (PMB-RI)

Salah satu inovasi pemberdayaan dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemberdayaan melalui rumah ibadah. Ada 98 Rumah Ibadah yang dijadikan Mesjid Paripurna dan menyebar di setiap Kecamatan serta Kelurahan dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) Mesjid Paripurna. Pengukuhan program ini sebagai salah satu program strategis dalam pemberdayaan masyarakat dituangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru tersebut perlu upaya menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Maksud pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna adalah mengoptimalkan fungsi masjid di bidang Idarah (Manajemen Masjid), Imarah (Meramaikan Masjid dan Ri'ayah (Pemeliharaan Fisik Bangunan) melalui pengelolaan manajemen secara profesional. Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru. Masjid merupakan sentral umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (habl min al-nas) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (habl min Allah). Dengan demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting apabila mempertimbangkan dua aspek di atas.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pekanbaru)

Salah satu aktor yang turut terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pekanbaru.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ini dibentuk pada setiap Kecamatan dan Kelurahan sehingga untuk LPM Kecamatan berjumlah 15 LPM, sedangkan di Kelurahan berjumlah sebanyak 83 LPM se Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah

Pada tahun 2019, Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019, dimana kepengurusan LPM Kota pekanbaru melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kota Pekanbaru. hal ini dilandasi semangat sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat yang diwakili oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

d. **Indek Perkembangan Pembangunan Kelurahan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa/kelurahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Di bawah ini ditampilkan data Indeks Pembangunan Kelurahan se-Kota Pekanbaru Tahun 2021 sesuai dengan Pemendagri N0.81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Tabel 2.105. Data Indeks Pembangunan Kelurahan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

No.	Tahun	Tingkat Perkembangan Pembangunan								
		Cepat Berkembang	%	Berkembang	%	Kurang Berkembang	%	Tidak Ada data	%	Total
1	2021	4	4,82	15	18,07	10	12,05	54	65,06	83
2	2022	6	7,23	20	24,10	13	15,66	44	53,01	83

Sumber: DP3PM Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan data di atas, dari 83 Kelurahan yang terdapat di Kota Pekanbaru, hanya sejumlah 29 Kelurahan pada tahun 2021 dan 39 Kelurahan pada

tahun 2022 yang melakukan penginputan data pada aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Sedangkan sisanya belum melakukan penginputan data perkembangan pembangunan kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dari semua kelurahan yang menginput pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) kelurahan yang mendapat nilai Cepat Berkembang atau sebesar 4,82%, 15 (lima belas) Kelurahan dengan nilai Berkembang atau sebesar 18,07 % dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan dengan predikat nilai Kurang Berkembang atau sebesar 12,05% sedangkan sisanya sebanyak 54 kelurahan atau sebesar 65,06 % tidak terdapat data perkembangan pembangunan kelurahan karena tidak melakukan penginputan data.

Dari semua kelurahan yang menginput pada tahun 2022, terdapat 6 kelurahan yang mendapat nilai Cepat Berkembang atau sebesar 7,23%, 20 kelurahan dengan nilai Berkembang atau sebesar 24,10% dan sisanya sebanyak 13 (sepuluh) kelurahan dengan predikat nilai Kurang Berkembang atau sebesar 15,66% sedangkan sisanya sebanyak 44 kelurahan atau sebesar 53,01% tidak terdapat data perkembangan pembangunan kelurahan karena tidak melakukan penginputan data.

Pelaksanaan penilaian Desa dan Kelurahan ini oleh Tim Penilai Pembangunan Desa dan Kelurahan yang menjadi bahan utama penilaian adalah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan desa dan Kelurahan yang terdiri dari delapan indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Selain itu, program KN juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Angka fertilitas total adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Diketuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, angka TFR (*Total Fertility Rate*) di Kota Pekanbaru untuk tahun 2018 adalah 2,38 dan angka tersebut terus menurun di tahun 2021 yaitu 2,21, yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Tabel 2.106. Angka TFR Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,38	2,35	2,36	2,21

Sumber : SIPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2.107. Jumlah Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Bulan Desember 2021

NO	Kecamatan	PUS	Peserta KB Aktif								PA/PUS
			IUD	MOW	MOP	Kon-dom	Implant	Sunti-kan	Pil	Jumlah	
1	Sukajadi	6,464	559	342	16	813	365	1,257	1,029	4,381	67.78
2	Pekanbaru Kota	4,283	697	320	0	135	263	727	886	3,028	70.70
3	Sail	3,599	274	73	0	413	232	726	592	2,31	64.18.00
4	Lima Puluh	4,595	692	290	2	97	256	744	747	2,828	61.55.00
5	Senapelan	4,481	354	152	7	197	152	1,354	846	3,062	68.33.00
6	Rumbai Barat	4,871	167	65	9	459	224	1,405	618	2,947	60.50.00
7	Bukit Raya	21,125	1,978	288	144	1,387	1,212	5,004	4,203	14,216	67.29.00
8	Binawidya	11,974	1,023	226	23	261	738	3,254	2,161	7,686	64.19.00
9	Marpoyan Damai	21,466	2,386	587	31	756	1,205	4,307	4,457	13,729	63.96
10	Payung Sekaki	13,718	582	124	15	1,321	394	3,514	3,075	9,025	65.79
11	Rumbai	16,305	760	212	32	1,123	843	3,989	3,094	10,053	61.66
12	Tenayan Raya	14,165	1,272	323	15	999	1,284	2,964	1,344	8,201	57.90
13	Tuah Madani	25,272	1,885	737	49	1,024	1,727	6,315	5,573	17,31	68.49.00
14	Kulim	10,418	1,22	397	12	956	1,354	2,028	980	6,947	66.68
15	Rumbai Timur	6,032	253	90	4	407	498	1,71	1,1	4,062	67.34.00
Kota Pekanbaru		168,768	14,102	4,226	359	10,348	10,747	39,298	30,705	109,785	65.05.00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2022

Permasalahan urusan pengendalian penduduk dan KB meliputi:

- Belum optimalnya pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta aktif KB, terlihat dari jumlah PUS yang aktif menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 109.785 PUS atau sebesar 65,05 persendari total jumlah PUS sebanyak 168.768 PUS;
- Masih kurangnya petugas penyuluh KB;

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap program KB terutama terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan anggaran

9. Perhubungan

Kondisi geografis Kota Pekanbaru yang berupa dataran geografis menjadikan sarana transportasi darat sebagai sarana transportasi utama. Pada tahun 2020 tercatat total panjang jalan di Kota Pekanbaru sebesar 2.117 km yang terbagi menjadi jalan tingkat nasional, provinsi dan kota. Sarana transportasi publik berupa angkutan darat, air dan udara tersedia di Pekanbaru.

a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Penyediaan perlengkapan jalan atau pemasangan rambu pada jalan kewenangan pusat dan provinsi yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dilaksanakan sebagian besar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama pada jalan kewenangan Provinsi. Sedangkan untuk terminal penumpang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki dan Terminal Tipe C Senapelan dan Rumbai yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi yang pada saat ini dengan menghadirkan layanan *door to door service* yang berdampak kepada persaingan bisnis di sektor transportasi, dimana pada saat ini kondisi sarana dan prasarana angkutan umum yang sebagian besar masih konvensional sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal yang diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan masyarakat di bidang layanan transportasi dengan menghadirkan layanan Transmetro Pekanbaru yang lebih modern dan bersubsidi kepada masyarakat sehingga mampu menjangkau luasan jaringan dan keterjangkauan tarif layanan. Data sarana angkutan umum Kota Pekanbaru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.108. Data Angkutan Umum Transportasi Darat Tahun 2021 Kota Pekanbaru

NO	JENIS ANGKUTAN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH UNIT/ TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	OPLET	KOPERASI RIAU MANDIRI (KOPRIMA)	165	115	72	33	6
2	OPLET	PT KUPANG SURYA TRANS	70	47	29	14	1
3	OPLET	PT. RATU TIGA SAUDARA	11	10	3	-	-
4	OPLET	PT. RIAU CITRA SEMESTA	123	55	35	-	-
5	BUS KOTA	KOPERASI RIAU	15	13	6	2	-

NO	JENIS ANGKUTAN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH UNIT/ TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
		MANDIRI (KOPRIMA)					
6	TAKSI	PUSKOPAU	130	70	26	17	2
7	TAKSI	KOPSI	54	44	44	12	-
8	TAKSI	PT. BLUE BIRD	199	199	120	15	55
9	TAKSI	PT. RIAU INDAH TRANSPORT	144	144	-	-	-
JUMLAH TOTAL			911	697	335	93	64

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022 (diolah)

Trans Metro Pekanbaru merupakan sarana angkutan masal yang melayani masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam melayani masyarakat Pekanbaru yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, Trans Metro Pekanbaru memiliki beberapa koridor / rute dalam melayani masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru, Nomor : 507 tahun 2020 tentang Penetapan Trayek dan Kode Trayek Angkutan Perkotaan di Kota Pekanbaru, maka untuk Trayek Utama Bus Angkutan Umum Massal, yaitu :

- Koridor 1 : PANDAU - RAMAYANA
Perum. Pandau Permai - Jalan Pasir Putih - Jalan Kaharuddin Nasution - Jalan Jenderal Sudirman – Ramayana – PP
- Koridor 1A : AWAL BROS SUDIRMAN – BANDARA SSQ II
Jalan Jenderal Sudirman (Depan RS. Awal Bross) – Bandara SSQ - PP
- Koridor2 : KULIM- TERM. BRPS
Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Jalan Tuanku Tambusai – Jl. Soekarno Hatta - Jalan Tuanku Tambusai – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Imam Munandar – PP
- Koridor 3 : UIN PANAM - RS. AWAL BROS
Kampus UIN - Jalan HR Soebrantas – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Arifin Ahmad – Jl. Jendral Sudirman - PP
- Koridor 4A : RAMAYANA - PASAR TANGOR
Ramayana – Jl.Jend. Sudirman – Jl. Hang tuah – Pasar Tangor – Polsek Tenayan - PP
- Koridor 4B : RAMAYANA –TERM. BRPS
Ramayana - Jl.Jend. Sudirman – Jl.Ratulangi – Jl.A.Yani – Jl.Riau – Jl.Soekarno Hatta – Jl.T.Tambusai – Term BRPS – PP

- Koridor 4C : KANTOR WALIKOTA SUDIRMAN – KOMPLEK PERKANTORAN WALIKOTA TENAYAN
Jl. Jend. Sudirman – Jl. Gajah Mada – Jl. Hangtuah – Jl. Sisingamangaraja – Jl. SSQ – Jl. Hangtuah – Jl. Simp. Badak – Kompl. Perkantoran Tenayan –
- Koridor 5 : PELABUHAN SUNGAI DUKU – SUDIRMAN
Pelabuhan Sungai Duku – Jalan Dr. Sutomo – Jl. WR. Supratman – Jl. Pattimura – Jl. Diponegoro – Memutar Mesjid Agung – Jl. Diponegoro - Jl. WR. Supratman - Jalan Dr. Sutomo – Pelabuhan Sei Duku
- Koridor 6 : TERM. BRPS – PANDAU
Terminal BRPS – Jl.T.Tambusai – Jl. SM.Amin -Jl.HR.Soebrantas – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Kaharudin Nasution – Jl.Pasir Putih – Perum Pandau – PP
- Koridor 7A : TRI BAKTI – PUJASERA ARIFIN AHMAD
Jl. T. Tambusai – Jl. Sudirman - Jl. T. Tambusai Jl. Paus – Jl. Arifin Achmad – PP
- Koridor 7B: PUJASERA ARIFIN AHMAD – KARTAMA
Jl. Arifin Ahmad – Jl. Rambutan – Jl. Impres – Jl. Kartama – Jl. KH. Nasution – Puskesmas Smpng. Tiga - PP
- Koridor 8A : KANTOR WALIKOTA SUDIRMAN – UNILAK (Stadion Rumbai)
Jl. Jend. Sudirman - Jl. A.Yani. – Jl. Riau – Jl. Sakinah – Jl. PCR – Unilak (Stadion Rumbai) - PP
- Koridor 8B : UNILAK (Stadion Rumbai) - PALAS
Jl. Yos Sudarso – Jl. Sri Meranti – Jl. Padat Karya – Jl. Siak II – Jl. Sakinah – Jl. PCR
- Koridor 09 : TERM. BRPS – UIN SUSKA
Terminal BRPS – Jl. Tuanku Tambusai – Jl. Air Hitam – Jl. Garuda Sakti – Jl. HR. Soebrantas – Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang – Kampus UIN – PP
- Koridor 10 : RAMAYANA – UNILAK (STADION KAHARUDIN NST / RUMBAI)
Ramayan – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Sungai Slak – Jl. Sembilang – Jl. Paus – Jl. Yos Sudarso (Stadion Rumbai) – PP

Sedangkan untuk Trayek Feeder Bus Angkutan Umum Massal yaitu sebagai berikut :

- Feeder 1 (Garuda Sakti – SM. Amin)
Rute :
Jl. Garuda Sakti – Jl. Melati – Jl. Naga Sari – Jl.SM.Amin – PP
- Feeder 2 (H.R Soebrantas – Rumah Potong)
Rute :
Jl. HR. Soebrantas – Jl. Cipta Karya – Rumah Potong – Jl. Purwodadi – Jl. HR. Soebrantas

- Feeder 3 (HR. Soebrantas – Suka Karya)
Rute :
Jl. HR. Soebrantas –Jl. Swakarya – Jl. Cipta Karya – Rumah Potong – Jl. Purwodadi – Jl. HR.Soebrantas
- Feeder 4 (T.Tambusai – HR. Soebrantas) – Via Jl. Delima
Rute :
Jl. T.Tambusai – Jl. Srikandi – Jl. Delima – Jl. H.R Soebrantas – PP
- Feeder 5 (Soekarno Hatta – SM amin) – Via Jl. Lobak/Ardat
Rute :
Jl. Soekarno Hatta – Jl. Lobak/Ardat – Jl. SM.Amin – PP
- Feeder 6 (H.I Munandar – Sudirman) – Via Jl. Kelapa Sawit
Rute :
Jl. H.I Munandar – Jl. Kelapa Sawit – Jl. Rawamangun – Jl. Datuk Setia Maharaja – Jl. Sudirman – PP
- Feeder 7 (H.I Munandar – Sudirman) Via Jl. Bukit Barisan
Rute :
Jl. H.I Munandar – Jl. Bukit Barisan – Jl. Kapau sari – Jl. Pinang Merah – Jl. Datuk Setia Maharaja – Jl. Sudirman – PP
- Feeder 8 (Hangtuah – Tanjung Datuk) – Via Rusunawa
Rute :
Jl. Hangtuah – Simpang BPG – Jl. Sail – Simpang Kuburan – Jl. Karya Bakti – Jl. KARYa Bersama – Rusunawa – Jl. Sumber Sari – Jl. Tanjung Datuk – PP
- Feeder 9 (H.I Munandar – Kantor Camat Tenayan Raya) – Via Bukit Barisan
Rute :
Jl. Bukit Barisan – Jl. Singgalang – Simpang Sepakat – Polsek Tenayan – Jl. Hangtuah Ujung (Pasar Tangor) – Jl. Budi Luhur – Kantor Camat Tenayan Raya – PP
- Feeder 10 (Garuda Sakti – Pasar Kodim) – Via Terminal Senapelan
Rute :
Jl. Garuda Sakti – Jl. Air Hitam – Jl. Sigunggung – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Jenderal – Jl. Melur – Jl. Teratai – Terminal Pasar Kodim – PP
- Feeder 11 (Sembilang – Okura)
Rute :
Jl. Sembilang – Jl. Pramuka – Danau Kayangan – Taman Bunga – Kantor Lurah Okura

Pada tanggal 11 April 2022, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT. Pengelolaan Transportasi Perkotaan melaunching pengoperasian angkutan pengumpan (feeder) yaitu Feeder 9 dengan rute H.I.Munandar – Kantor Camat

Tenayan Raya Via Bukit Barisan. Sampai dengan saat ini, baru 1 (satu) rute feeder yang beroperasi dan masih ada 10 (sepuluh) rute yang belum dapat beroperasi.

Angkutan feeder ini sangat dibutuhkan oleh trayek utama karena dapat menjangkau wilayah – wilayah yang belum dapat terjangkau oleh *trunk line* sehingga dapat menaikkan *load faktor* penumpang yang menggunakan angkutan umum massal, dimana untuk *load faktor* penumpang saat ini masih dibawah 50%.

Tabel 2.109. Trayek dan Kode Trayek Trans Metro Pekanbaru

NO	TRAYEK	JUMLAH ANGKUTAN	JUMLAH PENUMPANG
		(Unit)	(Orang)
1	Koridor 1	10	486.606
2	Koridor 1A	1	2.956
3	Koridor 2	6	159.388
4	Koridor 3	8	229.993
5	Koridor 4A	6	116.710
6	Koridor 4B	5	61.804
7	Koridor 4C	3	18.735
8	Koridor 5	-	-
9	Koridor 6	6	116.615
10	Koridor 7A	-	-
11	Koridor 7B	-	-
12	Koridor 8A	6	112.559
13	Koridor 8B	-	310
14	Koridor 9	1	3.681
15	Koridor 10	1	6.650
Jumlah		53	1.315.697

Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022 (diolah)

Program Pekansikawan (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan) juga menjadi program prioritas pembangunan jangka panjang yang dapat mengintegrasikan pembangunan 4 (empat) daerah tersebut. Pada kenyataannya, untuk transportasi sendiri, bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) telah melayani 2 daerah yaitu Pekanbaru dan Kampar melalui Koridor 1 dengan rute Pandau – Ramayana. Kedepan diharapkan, angkutan umum massal ini dapat melayani 4 daerah tersebut. Pekansiwan masuk kedalam 21 list kawasan metropolitan baru yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Melalui Pekansikawan, maka akan ada integrasi program antara Kota Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan misalnya transportasi, pembangunan jalan dan jembatan, dll. Maka dari itu perlu adanya dukungam infrastrukur.

Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Pada tahun 2020 ada 11 JPO yang tersedia di Kota Pekanbaru, untuk lokasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.110. Lokasi Jembatan Penyebrangan Orang di Kota Pekanbaru

No	Lokasi JPO
1	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN TOKO MODELUX)
2	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN PLAZA SUKARAMAI)
3	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN RS. AWAL BROSS)
4	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN SUDIRMAN SQUARE)
5	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN HOTEL RATU MAYANG GARDEN)
6	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN GOR MTQ)
7	JPO JALAN TUANKU TAMBUSAI (DEPAN TOKO HAWAI)
8	JPO JALAN TUANKU TAMBUSAI (DEPAN SIMPANG PELAJAR)
9	JPO JALAN HR. SOEBRANTAS (DEPAN GIANT PANAM)
10	JPO JALAN HR. SOEBRANTAS (DEPAN SD TABEK GADANG)
11	JPO JALAN HR. SOEBRANTAS (DEPAN TABEK GADANG)

Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022

Selain itu pada tahun 2021, jumlah halte di Kota Pekanbaru sebanyak 384 dengan tipe halte permanen sebanyak 65, semi permanen 128 dan portabel sebanyak 191, sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.111. Jumlah Halte di Kota Pekanbaru

No	Nama Ruas Jalan	Tipe Halte			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Portabel	
1	Sudirman	20	3	6	29
2	Ahmad Yani		7	5	12
3	Soekarno - Hatta	3	24	14	41
4	Riau		6	13	19
5	TuankuTambusai	8	9	11	28
6	Imam Munandar	11	2	9	22
7	K.H Nasution	6	5	11	22
8	ArifinAchmad	6	4	9	19
9	H.R Soebrantas	1	20	9	30
10	Hang Tuah		23	18	41
11	PasirPutih - Pandau	7	2	12	21
12	Diponegoro		2	5	7

No	Nama Ruas Jalan	Tipe Halte			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Portabel	
13	S.S Kasim		1	4	5
14	M. Dahlan		1	6	7
15	Umban Sari		3	6	9
16	YosSudarso		2	10	12
17	S.M Amin		10	14	24
18	Soetomo		1	5	6
19	TanjungDatuk	1	1	6	8
20	Pattimura		1	4	5
21	Paus			5	5
22	Kartama		1	6	7
23	PadatKarya			3	3
24	Bandara SSK II	2		1	3
	Jumlah	65	128	191	385

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022

b. Pelayaran

Berdasarkan KP 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pelabuhan Sungai Duku yang merupakan pelabuhan penumpang dan Pelabuhan Tenayan sebagai Pelabuhan Penumpang dan Barang. Untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Tenayan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyelesaikan penyusunan DED Pelabuhan Tenayan tersebut. Berikut ini merupakan kepadatan lalu lintas kapal penumpang dan barang di wilayah Kota Pekanbaru dari tahun 2019 – 2021 :

Tabel 2.112. Jumlah Penumpang dan Barang yang Berangkat dan Datang di Kota Pekanbaru Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Berangkat		Datang	
		Orang	Ton	Orang	Ton
1	2019	86.477	2.175	105.645	910
2	2020	1.337	0	875	0
3	2021	40.199	0	43.922	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya untuk jumlah penumpang yang berangkat pada tahun 2019 sebanyak 86.477 orang, tahun 2020 sebanyak 1.377 orang dan tahun 2021 sebanyak 40.919 orang. Sedangkan untuk penumpang yang datang pada tahun 2019 sebanyak 105.645 orang, tahun 2020

sebanyak 875 orang dan tahun 2021 sebanyak 43.922 orang. Terjadi penurunan pada tahun 2020 karena adanya wabah COVID-19 dan larangan perjalanan.

c. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah suatu perlengkapan jalan raya sebagai penunjang keamanan pemakai jalan raya. Pada tahun 2017, dilakukan pendataan LPJU di Kota Pekanbaru dan setelah diverifikasi jumlah LPJU Kota Pekanbaru berjumlah 37.133 titik yang tersebar di Jalan Provinsi sebanyak 1.217 titik, Jalan Nasional sebanyak 117 titik dan Jalan Kota sebanyak 24.609 titik. Dari 37.133 titik yang diverifikasi, sebanyak 1.934 titik sudah diremajakan ke LED SS dan PJUTS dengan merk lampu Philips, Panasonic, Hori dan Bandel. Selanjutnya, rencana peremajaan lampu konvensional ke LED Smart Ssystem ialah sebanyak 35.497 titik

d. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji berkala pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel di bawah. Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala pada tahun 2016 sebanyak 84.524 kendaraan dan pada tahun 2021 sebanyak 23.474 kendaraan.

Tabel 2.113. Rekapitulasi Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No	JenisKendaraan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Aj DP	156	146	163	163	2
2	TAKSI	1.383	1.301	490	490	163
3	OPLET	1.674	1.908	236	236	17
4	RENTAL	2.311	2.566	185	185	97
5	OTO BIS	4.118	4.191	1.078	1.078	589
6	MINI BUS	4.538	4.610	451	451	256
7	PICK UP	36.618	36.949	31.209	31.209	16.605
8	TRUCK SUMBU – 2	29.047	31.232	9.881	9.881	4835
9	TRUCK SUMBU – 3	7.609	7.723	1.126	1.126	204
10	TANKI SUMBU – 2	2.111	2.108	166	166	168
11	TANKI SUMBU – 3	766	763	103	103	114
12	TRUCKTOR HEAD	794	717	84	84	107
13	KERETA TEMPELAN	570	533	20	20	39
14	KERETA GANDENGAN	3	2	-	-	2
15	KENDARAAN KHUSUS	1.065	1.206	233	233	276
Jumlah		92.763	95.955	45.425	98.391	23.474

Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022

e. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2021 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 229 kejadian dan pada tahun 2021 sebanyak 154 kejadian.

Tabel 2.114. Rekapitulasi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1	2019	229
2	2020	192
3	2021	154

Sumber : Laporan PKL Taruna PKTJ Kemenhub

10. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 telah berhasil meningkatkan kinerja indikator-indikator bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun kegiatan-kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan pemanfaatan teknologi informasi di perangkat daerah Kota Pekanbaru. Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekanbaru untuk urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 sebesar 3,48 dengan predikat baik, berdasarkan penilaian mandiri. Berikut indikator SPBE dalam urusan komunikasi dan informatika selama 5 tahun terakhir (2017-2021)

Tabel 2.115. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2021

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2018	2019	2020	2021
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	-	1,88	3,07	2,17	3,48
				(Penilaian oleh PAN RB)	(Penilaian Mandiri)	(Penilaian oleh PAN RB)	(Penilaian Mandiri)

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2022

Evaluasi SPBE tahun 2021 dilakukan terhadap 517 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, terdiri atas 92 kementerian/lembaga dan 425 provinsi, kabupaten, dan kota. Penerapan SPBE terus didorong agar di tahun 2025 mencapai target indeks SPBE yang telah ditetapkan yakni 2,6.

Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Disampaikan jika penilaian tingkat kematangan atas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah meliputi kebijakan SPBE, proses tata kelola SPBE, proses manajemen SPBE, dan mengukur kapabilitas layanan yang mencakup layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Adapun hasil penilaian penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan penerapan SPBE dan peningkatan kualitas layanan SPBE, serta dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan SPBE nasional. Dengan keluarnya hasil evaluasi SPBE tahun 2021, diharapkan para pimpinan instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Secara umum, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki seperangkat aturan yang mendukung penerapan SPBE di kota Pekanbaru. Beberapa aturan tersebut merupakan aturan baru sehingga belum dapat dilakukan reviu dan perbaikan. Hal ini yang menyebabkan aspek kebijakan internal tata kelola SPBE di Kota Pekanbaru memiliki tingkat kematangan Cukup.

Aspek ini dapat ditingkatkan menjadi Baik pada pelaksanaan evaluasi SPBE mendatang, dengan melakukan reviu dan perbaikan pada berbagai kebijakan internal SPBE yang masih kurang. Meskipun pada kebijakan internal terkait tim koordinasi SPBE masih belum memuat tupoksi yang tegas dan jelas, pada pelaksanaan penilaian evaluasi interviu, tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Pekanbaru Nampak cukup solid. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Sekretaris Daerah selaku koordinator tim yang hadir memimpin kegiatan penilaian SPBE serta tim dari masing-masing OPD yang membantu mengklarifikasi dan melengkapi beberapa bukti dukung terkait, khususnya pada aspek layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Kami menilai, jika kebijakan internal terkait tim koordinasi SPBE dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi yang tegas dan jelas, maka pemenuhan kriteria pada 5 aspek yang masih menjadi kelemahan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Adapun untuk aspek layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang saat ini tingkat kematangannya tergolong Baik, dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan layanan-layanan yang banyak dikembangkan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan layanan SPBE lainnya atau bahkan diintegrasikan dengan aplikasi umum berbagi pakai yang bersifat nasional. Hal ini terbukti dengan sudah adanya dua layanan hasil pengembangan pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tingkat kematangan maksimal karena telah dikolaborasikan, direviu dan diperbaiki fiturnya, yakni layanan perencanaan dan layanan perizinan terpadu.

Pemerintah Kota Pekanbaru dengan domain *www.pekanbaru.go.id* merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (good governance).

Media website ini merupakan cara untuk menunjukkan eksistensi dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui website yang dapat diakses oleh siapa dan kapan saja. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah, di mana saat ini informasi telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, karena informasi memiliki peran yang sangat penting dan menentukan untuk mencapai suatu tujuan. Melalui media online website, Pemerintah Kota Pekanbaru mengharapkan adanya interaksi dari masyarakat, memberi masukan berupa kritikan dan saran kepada pemerintah melalui jaringan online yang sudah disediakan.

Komunikasi dan informatika sangat penting bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Jaringan komunikasi yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting dan untuk mendapatkan informasi dibutuhkan teknologi pendukungnya, antara lain telephone dan internet. Berikut persentase rumah tangga yang menggunakan telephone, laptop dan jaringan internet di Kota Pekanbaru:

Tabel 2.116. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer/Laptop di Kota Pekanbaru

Alat Komunikasi	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HP/Telepon	5,9 %	6,56 %	72,46 %	91,33	92,66	-	100%
PC dan Laptop	44,3 %	45,39 %	36,21 %	91,33	92,66	-	100%

Sumber : SIPD Diskominfo, 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2015 sebesar 5,9 persen terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 100 persen. Persentase rumah tangga yang telah memiliki computer pribadi PC/Laptop pada tahun 2015 sebesar 44,3 persen, terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 100 persen.

Sejak pandemi melanda Indonesia pada 2020, masyarakat dihadapkan dengan berbagai pola aktivitas baru. Kegiatan yang bersifat tatap muka dibatasi guna menekan penyebaran virus corona. Alhasil, kegiatan bekerja, belajar, bahkan berbelanja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dari rumah. Hal ini membuat kebutuhan akses internet di rumah meningkat drastis.

**Tabel 2.117. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas
Yang Pernah Mengakses Internet di Kota Pekanbaru**

Mengakses Internet	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pernah	46,9	49,06	52,12	61,70	65,58	-	100%
Tidak pernah	51,9	50,14	47,88	38,30	34,42	-	-
Tidak tahu	1,2	0,80	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD Diskominfo, 2022

Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Pekanbaru tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah merata yaitu 100 persen. Pada tahun 2021, cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan sebesar 20 persen.

**Tabel 2.118. Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

No	Indikator kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	16,66	16,66	25,00	25,00	20,00

Sumber : SIPD Diskominfo, 2022

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan terdapat :

- a. Kelompok Informasi Masyarakat Palas Mendunia Kelurahan (Kecamatan Rumbai) sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 365 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Palas Mendunia Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Periode Tahun 2015-2020;
- b. Kelompok Informasi Masyarakat Labuai Sehati (Kecamatan Bukit Raya) sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 439 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "Labuai Sehati" Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Periode Tahun 2015-2020;
- c. Kelompok Informasi Masyarakat Jaringan Komunitas Informasi Media Sosial (Tingkat Kota Pekanbaru) sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 419 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Jaringan Komunitas Informasi Media Sosial Kota Pekanbaru Periode Tahun 2019-2022

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah termasuk salah satu dari bagian isu strategis dalam isu perekonomian. Jumlah pencapaian pada urusan Koperasi dan UMKM beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119. Capaian Kinerja UMKM Kota Pekanbaru 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Koperasi Aktif	52,93	40,04	38,11	39,13	40,97
2	Persentase UKM non BPR/ LKM aktif	2,59	0,02	0,12	-	-
3	Persentase BPR/ LKM aktif	70,36	67,81	65,67	80,69	87,16
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	10,62	0,69	3,79	1,39	19,01

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2.120. Capaian Kinerja UMKM Kota Pekanbaru 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	408	392	407	425	456
2	Jumlah Koperasi Non Aktif	632	662	661	661	657
3	Jumlah UMKM	13.531	13.639	14.120	15.098	18.642
4	Jumlah UMKM Aktif (% UMKM yang mendapat penyaluran dana KUR/Jumlah uMKM)	9.520	9.249	9/273	12.183	16.249

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2022

Pada tahun 2021, jumlah Koperasi aktif sebesar 456 koperasi (40,97 persen) dari jumlah 1.113 koperasi. Jumlah UMKM meningkat sejak pandemi Covid-19 tahun 2020 dari 15.098 unit menjadi 18.642 unit (18,56 persen). Jumlah UMKM aktif tahun 2021 yang mendapatkan dana KUR sebesar 16.249 unit (87,16 persen) dari jumlah UMKM 18.642 unit.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi, UKM telah melakukan upaya meningkatkan kinerja UMKM di Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase UMKM Naik Kelas dan Pertumbuhan Wirausaha Baru (WUB). Pada tahun 2021 realisasi pertumbuhan wirausaha baru sebesar 19,01 persen, dan persentase UMKM Naik Kelas mempunyai target akhir Renstra sebesar 1,75 persen dengan realisasi indikator kinerja sebesar 1,02 persen pada tahun 2021. Tidak tercapainya persentase UMKM Naik Kelas sesuai target dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di mana aturan sebelumnya yang termasuk ke dalam Usaha Mikro, kekayaan bersih/modal usaha paling banyak 50 juta rupiah naik menjadi sebesar 1 Miliar Rupiah, hal ini menyebabkan banyaknya UMKM menjadi turun kelas.

Selanjutnya jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam masih sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah 18 unit pada tahun 2021 dari jumlah total koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam tahun 2021 yang berjumlah 1.049 unit. Lebih jelas pada tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121. Data Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Kota Pekanbaru

No.	Jenis Data	2019	2020	2021
1.	Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	20 unit	17 Unit	18 Unit

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2022

Tabel 2.122. Data Koperasi Berdasarkan Kesehatan KSP/USP Kota Pekanbaru

No.	Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KSP/USP	1012	1026	1035	1040	1049
2.	Jumlah KSP/USP yang Sehat	169	179	176	170	173
3.	Jumlah KSP/USP yang Tidak Sehat	843	847	859	870	876

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2022

Diketahui bahwa jumlah koperasi simpan/unit simpan pinjam tahun 2021 berjumlah 1.049 unit, dari total tersebut masih didominasi oleh jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang tidak sehat yaitu mencapai 876 unit atau sebesar 83,5% dan jumlah KSP/USP yang sehat hanya berjumlah 173 unit atau 16,5% dari jumlah total. Adapun ruang lingkup penilaian Kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek permodalan, kualitas aktivitas produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dari pertumbuhan dan jati diri. Selanjutnya, penilaian Kesehatan koperasi diklasifikasikan ke dalam kategori sehat yaitu jika memperoleh skor 80,00 - 100 (sehat), dan 66,00 - <80,00 (cukup sehat), dan kategori tidak sehat jika memperoleh skor 51,00 - < 66,00 (dalam pengawasan) dan skor 0 - < 51,00 (dalam pengawasan khusus).

12. Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*).

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dapat kita lihat investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri pada tabel berikut:

Tabel 2.123. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2016-2021

Tahun	PMDN					PMA					TOTAL (PMDN+PMA)	
	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)		Rasio (Orang/ Proyek)	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp Juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)		Rasio (Orang/ Proyek)	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp Juta)
			TKI	TKA				TKI	TKA			
2016	44	694.715,20	1.987	1	45,18	53	129.091,05	289	1	5,47	97	823.806
2017	43	927.355,00	5.552	-	129,12	50	171.412,20	143	1	2,88	93	1.098.767
2018	46	277.041,10	1.257	31	28,00	46	380.608,24	363	26	8,46	92	657.649
2019	184	1.052.873,70	2.376	-	12,91	88	556.317,00	126	6	1,50	272	1.609.191
2020	1.288	2.534.744,00	5.036	-	3,91	132	2.657.171,52	2.393	2	18,14	1420	5.191.916
2021	2.289	2.208.048,10	6.440	1	2,81	134	1.897.766,40	1.676	-	12,51	2423	4.105.815

Sumber : SIPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2022

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan investasi di Kota Pekanbaru. Meski dihantam pandemi Covid-19, namun nilai investasi yang masuk ke kota Pekanbaru sejak tahun 2018 hingga 2020 terus bergerak naik. Di tengah pandemi Covid-19 tahun 2020, pelayanan DPMPSTSP makin meningkat. Tingkat kepuasan masyarakat naik, tingkat pelayanan juga naik, dan hasil investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru juga naik. Kota Pekanbaru dinilai masih menjadi kota yang aman dan menjanjikan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, berbagai kemudahan yang diberikan dalam perizinan mendorong pemilik modal melakukan investasi ke Kota Pekanbaru.

Tahun 2021, realisasi total PMDN dan PMA sebesar Rp.4.105.814.500.000,- dengan jumlah proyek sebesar 2.423 proyek. Realisasi total PMDN dan PMA tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp.5.191.916.000.000,-. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah proyek sebanyak 2.289 proyek, dengan realisasi PMDN sebesar Rp.2.146.917.600.000,- turun dari tahun 2020, sebesar Rp. 2.534.744.000.000,- dan jumlah tenaga kerja TKI sebanyak 2.289 orang sementara TKA sebanyak 134, maka tahun 2021 nilai rasio investasi terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 2,81. Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) jumlah proyek tahun 2021, naik menjadi 134 proyek, dari tahun 2020 sebanyak 132 proyek, dengan realisasi PMA sebesar US. 1.756.013.540.000,- juga mengalami penurunan dari Tahun 2020, sebesar US. 2.657.171.520.000,-, dan daya serap tenaga kerja TKI sebanyak 1.676 orang, maka tahun 2021 nilai rasio investasi terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 12,51.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ada batasan usia termuda hingga tertua untuk menyebut seseorang sebagai pemuda. Berdasarkan UU Kepemudaan, pemuda itu berusia antara 16-30 tahun. Jumlah pemuda sebanyak 248.876 jiwa atau 25,30 persen dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru (sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2021), menjadikan Kota Pekanbaru merupakan kota dengan jumlah pemuda terbesar di Indonesia. Pemuda Kota Pekanbaru merupakan keunggulan demografi yang besar, tetapi belum menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang sebanding dengan jumlah dan presentasinya yang besar. Permasalahan utama pembangunan kepemudaan di Kota Pekanbaru adalah ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda Kota Pekanbaru. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru masih rendah, serta masih tingginya permasalahan gender dan diskriminasi merupakan sebagian dari permasalahan kepemudaan di Kota Pekanbaru.

Pemuda adalah generasi penerus, dan pemuda yang akan melanjutkan estapet pembangunan, penanggungjawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk mewujudkan pemuda saat ini menjadi pelaksana pembangunan dimasa mendatang, maka pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Disamping melaksanakan pembinaan dan kompetisi yang teratur, hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan keolahragaan adalah ketersediaan fasilitas olah raga. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki beberapa sarana dan prasarana olahraga, diantaranya adalah lapangan Sepak Bola ada 4 lapangan, 1 venue sky air, lapangan Badminton ada 1 lapangan, lapangan Volley Ball ada 5 lapangan, dan lapangan Basket ada 9 lapangan yang umumnya berada di Sekolah-sekolah.

Dalam kegiatan Pembangunan dibidang pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaat yang akan dirasakan dalam menanamkan investasi Pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan bersifat investasi jangka panjang. Untuk itu harus ditangani dan dilaksanakan secara profesional, terukur, berkelanjutan dan tersistematis. Agar terwujudnya harapan tersebut

bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi tentunya juga perlu peran masyarakat dan stakeholder lainnya untuk pembinaan dan pengembangan dibidang pemuda dan olahraga.

Sesuai dengan arahan PMDN 81 Tahun 2022 terkait indikator kinerja urusan, Kota Pekanbaru mendukung capaian nasional dengan target daerah di tahun 2023. Terhadap indikator kinerja urusan Jumlah Atlet yang Berasal Dari Kab/Kota yang Masuk Pelatda dimana target nasional 100 orang, target daerah 1 orang. Untuk indikator Jumlah Pemuda yang Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kab/Kota dengan target nasional 50 orang sedangkan target daerah 2 orang.

Adapun jenis penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Urusan Pemuda dan Olahraga tahun 2019 adalah Kota Layak Pemuda yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainuddin Amali. Kota Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Kota Layak Pemuda kategori Utama dengan nilai tertinggi di Indonesia. Adapun bentuk penghargaan sebagai berikut:

Tabel 2.124. Jenis Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

No	Jenis Penghargaan	Lembaga/ Negara yang memberikan
1	Juara Umum O2SN SD Tingkat Provinsi	Pemprov Riau
2	Juara Umum O2SN SMP Tingkat Provinsi	Pemprov Riau
3	Juara Umum O2SN SMA Tingkat Provinsi	Pemprov Riau
4	Juara Umum O2SN SMK Tingkat Provinsi	Pemprov Riau
5	Juara Umum POPDA Tingkat Provinsi	Pemprov Riau
6	Kota Layak Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

Tabel 2.125. Jenis Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

No	Jenis Penghargaan	Lembaga/ Negara yang memberikan
1	Juara Umum I Renang Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
2	Juara I Futsal Putra Kejurda U-18 Provinsi Riau	Pemprov Riau
3	Juara III Futsal Putri Kejurda U-18 Provinsi Riau	Pemprov Riau
4	Juara I U-14 Cabor Sepakbola Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
5	Juara I U-15 Cabor Sepakbola Kejurda pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
6	Juara III Takraw Putri Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
7	4 Orang Perwakilan Kota Pekanbaru lulus sebagai Pasibraka Tingkat Provinsi Riau	Pemprov Riau
8	2 Orang Perwakilan Kota Pekanbaru terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Riau	Pemprov Riau
9	7 Medali Emas, 9 Medali Perak, 8 Medali Perunggu PON XX Papua	Kemenpora
10	4 Medali Emas, 12 Medali Perak, 18 Medali Perunggu PEPARNAS XVI Papua	Kemenpora

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Organisasi kepemudaan di Kota Pekanbaru yang aktif tahun 2014 ada sebanyak 32 dari total 37 organisasi, terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ada 41 organisasi yang aktif dari total 48 organisasi kepemudaan, dan meningkat menjadi 61 organisasi pada tahun 2020 atau 85,24 persen.

Tabel 2.126. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pekanbaru pada Tahun 2014 - 2021

Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase
2014	32	5	37	86,49%
2015	36	5	41	87,80%
2016	38	5	43	88,37%
2017	39	5	44	88,64%
2018	41	7	48	85,42%
2019	48	9	57	84,21%
2020	52	9	61	85,24%
2021	52	9	61	85,24%

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

14. Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kota Pekanbaru Dalam Angka” dan Buku “PDRB”. Untuk pencapaian indikator “Buku Kota Dalam Angka” dan “Buku PDRB”, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap melaksanakan kegiatan pendukung serupa, namun lebih mengarah pada penyajian informasi buku secara elektronik yang dapat di akses pada website *Pekanbaru.go.id*. Pada TA 2021, pemenuhan kebutuhan indikator “Buku Kota Dalam Angka” dan “Buku PDRB” di laksanakan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berupa bantuan untuk konten/isi.

Diskominfo terbentuk pada tahun 2017, pada tahun ini belum ada bidang khusus mengelola data statistik. Pada tahun 2019 diluncurkan Program Satu Data Indonesia, namun hingga saat ini Diskominfo belum bisa melaksanakan tugasnya sebagai Wali data dikarenakan Regulasi yang belum ada. Maka pada tahun 2021 dan 2022 dalam rangka mewujudkan sistem data dan Statistik yang terintegrasi yang diwujudkan melalui PERKADA tentang Satu Data Indonesia di Kota Pekanbaru dan Portal Satu Data Pekanbaru.

Buku Pekanbaru Dalam Angka adalah produksi dari BPS dan Diskominfo hanya melakukan Publikasi dan Penggandaan setelah mendapat izin dari BPS, dan hal ini berlangsung sejak 2017 hingga saat ini.

Kedua dokumen di atas ada di Kota Pekanbaru, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan

program kegiatan. Adapun sistem data dan statistik yang terintegrasi yang sudah dibangun adalah Sistem Satu Data Pembangunan Kota Pekanbaru. Pencapaian indikator tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi diwujudkan melalui pengadaan sistem informasi data Kota Pekanbaru, yaitu Bank Data. Kehadiran Bank Data tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi untuk berbagai keperluan, seperti Perencanaan. Hal yang sama, yaitu pemenuhan kebutuhan data dan informasi untuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri akan dapat terpenuhi dari berbagai jenis *data base* pada Bank Data tersebut. Persentase ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebesar 75 persen.

Tabel 2.127. Ketersedian Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Belum	Belum	Belum	Belum	Direncanakan
2.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku PDRB	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, 2022

15. Persandian

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pengamanan untuk sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Kota Pekanbaru diperoleh melalui 5 (lima) aspek diantaranya aspek tata kelola, aspek pengelolaan risiko, aspek kerangka kerja keamanan informasi, aspek pengelolaan aset serta aspek teknologi dan keamanan informasi. Pada Tahun 2021, persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 60 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 45 persen dan tahun 2019 sebesar 38,60 persen.

Tabel 2.128. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	-	5%	38,6	45	60

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, 2022

16. Kebudayaan

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau. Selain memiliki nilai sejarah, Kota Pekanbaru juga menjadi simbol eksistensi masyarakat melayu dengan nilai-nilai budaya tradisional yang dimilikinya. Budaya Melayu dimanifestasikan dalam tradisi daerah yang terus dipertahankan, antara lain pada helat pernikahan, pantun, tari-tarian, nyanyian, bentuk atap selembayung, pakaian, dan lembaga budaya melayu. Pada lingkup yang lebih luas budaya melayu juga diterapkan dalam pandangan hidup, akhlak (etika, rasa malu, dan kejujuran), teknologi dan nilai-nilai luhur lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dimana arus informasi dan budaya asing masuk secara deras, nilai-nilai asli dan budaya tradisional cenderung melemah. Apabila keadaan ini tidak diantisipasi dengan bijaksana, dapat berakibat pada lunturnya pemahaman dan pewarisan kepada generasi penerus. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal ini, bahkan untuk mewujudkan kembali kejayaan budaya melayu, dimana hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Budaya Melayu.

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dihentikan sementara. Kegiatan Parade Tari, Bujang Dara dan Potang Balimau hingga tahun 2021 ditiadakan, karena berpotensi menularkan Covid-19.

Para seniman telah berusaha memanfaatkan ruang virtual untuk melakukan proses kreatif walau dalam keadaan yang penuh kesulitan. Fenomena tersebut menunjukkan sinyal positif pada tingkat awal bagi para pekerja seni dan juga masyarakat luas bahwa ekosistem seni pertunjukan dapat tetap produktif di tengah sekat pandemi saat ini. Hal itu menandakan sejatinya, para seniman tersebut dalam dirinya memegang prinsip tidak akan mudah menyerah sesuai dengan jiwa seninya.

Tabel 2.129. Pelaksanaan Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

NO.	BIDANG URUSAN	SATUAN	TAHUN					KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021	
1,1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	3	3	3	-	-	Parade tari, Bujang Dara dan Potang Balimau
1,2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	3	18	18	18	18	terdiri dari : 6 Cagar budaya Peringkat Kota Dan 12 Cagar Budaya Peringkat Propinsi
1,3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan investarisasi	Budaya	1	2	1	2	-	Potang balimau Dan Haul Marhum Pekan
1,4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	3	3	3	3	3	Rumah Singgah Sultan Siak Makam Marhum Pekan dan Makam Pahlawan Kerja

Sumber : SIPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2022

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kota Pekanbaru yakni Rumah Singgah Sultan Siak Makam Marhum Pekan dan Makam Pahlawan Kerja.

17. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab fasilitas perpustakaan terutama buku, baik menyangkut keragamankoleksi maupun jumlah koleksi buku yang tersedia harus menjadi perhatian di samping fasilitas lainnya. Hal ini karena masing-masing pengunjung mempunyai kepentingan referensi yang berbeda dengan buku yang ingin dicari dan memanfaatkan fasilitas

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Pekanbaru pada Tahun 2021 sebanyak 244.698 orang, meningkat dibandingkan jumlah kunjungan pemustaka tahun 2020 sebanyak 237.449 orang. Adanya peningkatan pada kunjungan website karena pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah sehingga jumlah kunjungan online menjadi meningkat, Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mempromosikan perpustakaan sebagai sarana prasarana umum bagi masyarakat, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.130. Indikator Perpustakaan Tahun 2017-2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	85.318	107.654	183.023	237.449	244.698
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	eksemplar	38.006	52.937	53.681	78.733	90.068
3	Rasio Perpustakaan Per	ratio	1:1571	1:1621	1:1549	1:1555	1:1555

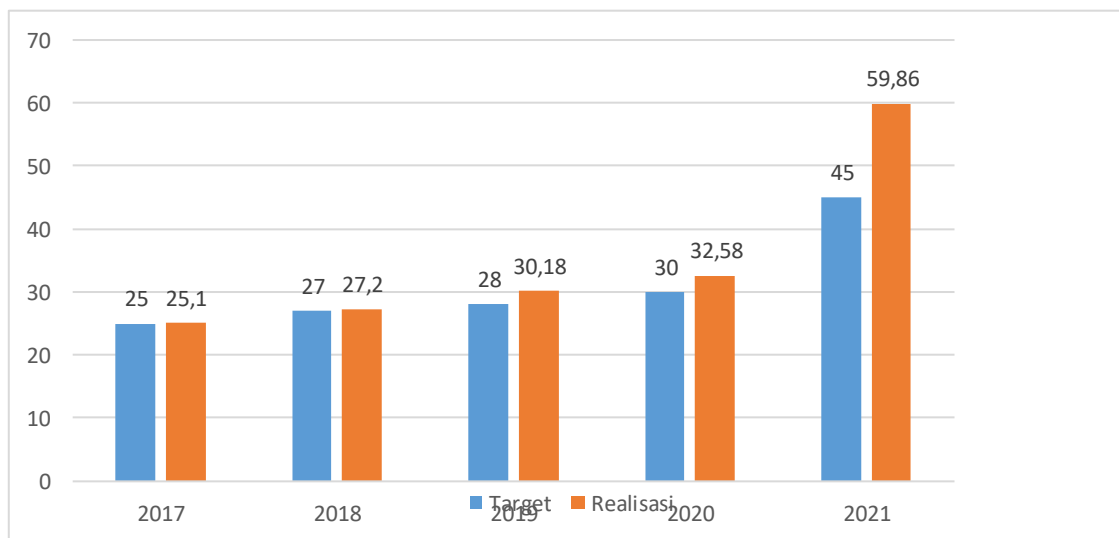
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Satuan Penduduk						
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	7.109	8.971	15.251	19.787	203.915
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	judul	25.234	39.169	39.892	51.748	62.794
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat						
	- Pustakawan	orang	1	1	5	7	6
	- Tenaga Teknis	orang	37	37	40	48	31

Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2022

Sesuai amanat PMDN 81 Tahun 2022, Kota Pekanbaru dalam urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan juga mendukung capaian nasional untuk indikator kinerja urusan tahun 2023. Untuk indikator kinerja urusan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dimana target nasional 67.3 dan target daerah senilai 60 sedangkan capaian daerah 2021 senilai 59,86. Selanjutnya untuk indikator kinerja urusan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dimana target nasional senilai 14 dan target daerah 18.2 sedangkan capaian daerah 2021 senilai 18.93.

Dalam rangka meningkatkan Indeks membaca masyarakat perpustakaan menjadi salah satu solusi peningkatan minat baca di Kota Pekanbaru, dengan meningkatkan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan dan menyeimbangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk, perpustakaan akan menjadi solusi peningkatan minat membaca masyarakat. Dalam rangka mengukur minat membaca masyarakat, indeks membaca masyarakat menjadi acuan untuk melihat keaktifan masyarakat Kota Pekanbaru dalam membaca. Pada tahun 2020 capaian indeks membaca masyarakat berada di angka 32,58 poin, capaian tersebut meningkat 2,40 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 30,18 poin. Pada tahun 2021, meningkat menjadi 59,86 poin. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah mampu meningkatkan minat baca masyarakat. Menurut Perpustakaan Nasional, selama masa pandemi kategori buku paling populer dibaca melalui perpustakaan digital iPusnas adalah fiksi. Peringkat kedua buku-buku berkategori Pendidikan, dan ketiga buku-buku kategori bisnis dan ekonomi. Nampaknya dalam situasi pandemi membaca buku-buku novel roman atau fiksi dapat menjadi penghiburan sekaligus meningkatkan imunitas tubuh. seperti grafik dibawah ini.

Grafik 2.15. Indeks Minat Baca Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021



Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2022

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Pekanbaru melalui program dan kegiatan yang mengajak dan memotivasi masyarakat agar lebih meningkatkan minat baca diantaranya dengan cara:

- meningkatkan pelayanan perpustakaan melalui Kegiatan Pengadaan bahan Pustaka Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru, Pengelolaan bahan perpustakaan (karya cetak/karya rekam dan bahan pustaka hibah), Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan Perbaikan) serta Pengembangan Jasa Pelayanan Perpustakaan.
- Meningkatkan layanan online yakni kunjungan online melalui website perpustakaan, karena pandemi Covid-19.
- Layanan perpustakaan yang dilaksanakan melalui MPK ke sekolah-sekolah maupun dalam kegiatan layanan MPK Non School (Lapas).
- Kegiatan Literasi yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru berjalan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan anggaran budgeter dan non budgeter.
- Promosi yang dilakukan oleh seksi layanan dan otomasi perpustakaan berupa pemberian informasi melalui media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru
- Penambahan Titik Layanan Perpustakaan Keliling, selain 6 titik layanan yang terdiri atas Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru, Taman Bacaan Masyarakat Rumbai, Taman Bacaan Masyarakat Tambelan, Perpustakaan Digital iPekanbaru, Radio streaming Belacan dan Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, ada 4 unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK). Keempat MPK ini memfasilitasi mobilitas layanan perpustakaan ke berbagai sekolah dan titik

layanan lain karena adanya pandemi covid-19 hanya diselenggarakan bulan januari hingga februari selanjutnya hanya dilakukan seperti LAPAS Anak, namun sejak pada tahun 2020 lokasi layanan perpustakaan keliling hanya fokus ke LAPAS Anak.

- g. Melakukan pembinaan langsung terhadap perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru yang dimulai dari Tingkat SD, SLTP, SLTA dan perpustakaan lainnya sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga), serta Melakukan Akreditasi terhadap 5 Perpustakaan Sekolah, yakni SD AL-ITTIHAD, SD AL-AZHAR SYIFA BUDI, SD DARMA YUDHA, SMP NEGERI 8 PEKANBARU, SMP IT IMAM AN NAWAWI PEKANBARU.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dan Aspek Masyarakat yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi & Promosi serta Anggota Perpustakaan. Diketahui nilai indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2021 adalah 18.93 lebih tinggi dari target nasional yaitu 13,0.

18. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada akan menghadirkan kemanfaatan besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada lembaga pemerintahan akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan indikator bukti bagi kepentingan lain.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan tertatanya kearsipan. Sumberdaya yang mengelola arsip secara baku di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Tabel 2.131. Indikator Kearsipan Tahun 2017-2021

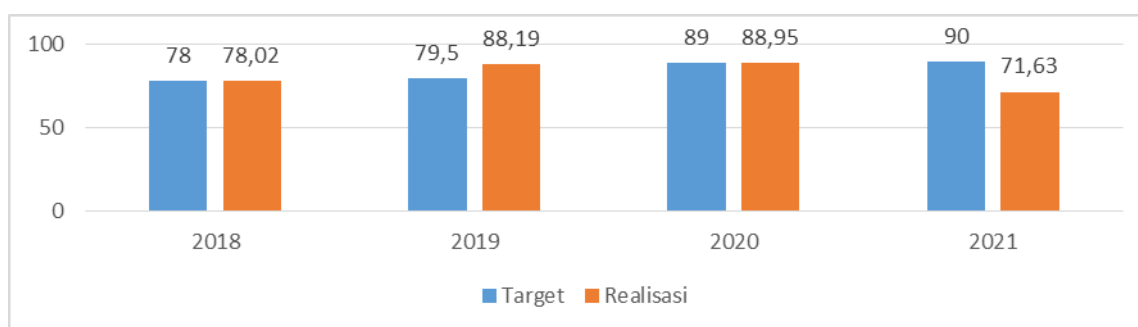
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	50	60	70	57,78	62,5
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Org	13	15	20	20	20

Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2022

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku meningkat menjadi 62,5 persen pada tahun 2016. Sementara peningkatan jumlah SDM pengelola kearsipan dari tahun 2017 sebanyak 13 orang, kemudian tahun 2021 menjadi 20 orang.

Dalam hal nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Pekanbaru Tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menargetkan nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sebesar 79,5 dengan realiasi sebesar 88,19 sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 110,9 persen. Tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menargetkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sebesar 89 persen dengan realiasi sebesar 88,95 persen sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 99,95 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami kenaikan lebih baik dari tahun sebelumnya senilai 0,76 poin.

Grafik 2.16. Nilai LAKE Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021



Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan PMDN 81 Tahun 2022, indikator kinerja urusan bidang kearsipan, Kota Pekanbaru turut serta mendukungnya di tahun 2023. Terhadap indikator kinerja urusan Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa daerah menargetkan 1.700 orang, dan untuk indikator kinerja urusan Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang Dipreservasi dengan target daerah sebanyak 13.358 arsip dimana capaian daerah 2021 sebanyak 12.434 arsip. Selanjutnya indikator kinerja urusan Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang Dipreservasi dengan target nasional 8.051 arsip, sedangkan target daerah 13.359 arsip dan capaian daerah 2021 sebanyak 12.434 arsip, dan untuk indikator kinerja urusan Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dimana target nasional 411.095 pengguna, daerah menargetkan di tahun 2023 sebesar 1.700 pengguna sedangkan capaian daerah di tahun 2021 sebanyak 8.287 pengguna.

2.1.3.2 Fokus Urusan Layanan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kota Pekanbaru. Urusan pilihan meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, dan Kelautan dan Perikanan.

A. Kelautan dan Perikanan

Walaupun statusnya kota namun Kota Pekanbaru juga mempunyai potensi perikanan, yang tidak sedikit. Ikan bisa diperoleh dari hasil penangkapan di perairan umum maupun hasil budidaya, Wilayah Kota Pekanbaru memiliki daerah perairan seluas $\pm 7.956,58$ Ha, yang terdiri dari Sungai Siak, beberapa anak sungai yaitu Sungai Sail, Air Hitam, Ukai, Senapelan, Tenayan, Pengambang, Umban Sari yang semuanya bermuara ke Sungai Siak, Danau Buatan dan beberapa daerah rawa-rawa. Produksi ikan di Kota Pekanbaru didominasi oleh hasil budidaya. Selain itu, Kota Pekanbaru juga sebagai kota transit perdagangan ikan yang akan dipasarkan untuk kota-kota sekitarnya seperti Pangkala Kerinci, Siak dan Perawang. Jumlah produksi perikanan kota pekanbaru pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.132. Jumlah Produksi Perikanan di Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2020

No	Produksi Ikan	Satuan	2017	2018	2019	2020	%	% Rata-rata
1	Ikan konsumsi	Ton	8.430	8.430	8.897	9.532	6.66%	3.97%
2	Ikan hias	Ekor	1.121.223	940.936	996.106	1.009.732	1.35%	-4.09%
3	Benih ikan	Ekor	76.733.548	76.739.000	77.806.000	85.540.000	9.04%	3.47%

Sumber: LKJiP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan data analisis Pola Pangan Harapan melalui pemanfaatan Data Susenas tahun 2021 (Diolah Dinas Ketahanan Pangan kota Pekanbaru) jumlah kebutuhan pangan penduduk Kota Pekanbaru untuk jenis pangan "Ikan" pada tahun 2020 adalah 29.519,3 ton.

Tabel 2.133. Angka Konsumsi Ikan (Aki) Kota Pekanbaru (kg/kapita/tahun)

KONSUMSI	2017	2018	2019	2020
IKAN	33.94	43.13	47.27	43.83

Sumber: Buku Statistik Pertanian Kota Pekanbaru

B. Pariwisata

Wabah virus Covid-19 membawa dampak yang nyata bagi pariwisata Indonesia. Tercatat pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Pekanbaru hanya sebanyak 73 orang atau turun 98,6 persen dari tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan mancanegara ini hanya terjadi pada bulan Januari hingga Mei dan bulan Juli, sedangkan pada bulan lainnya tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara. Ini merupakan

dampak dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menutup tempat destinasi wisata sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

Tabel 2.134. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Setiap Bulannya
Tahun 2017 – 2021

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun (orang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	JANUARI	2.100	2.235	2.056	2.101	2.896	37
2	FEBRUARI	2.029	2.029	1.888	2.314	2.324	5
3	MARET	2.100	2.746	2.457	2.332	0	9
4	APRIL	2.100	2.670	1.987	2.379	0	8
5	MEI	2.117	2.694	1.623	2.021	0	12
6	JUNI	2.106	2.676	2.765	2.261	0	0
7	JULI	2.035	2.635	2.363	2.206	0	2
8	AGUSTUS	2.170	2.779	2.922	2.744	0	0
9	SEPTEMBER	2.068	2.268	2.400	2.073	0	0
10	OKTOBER	2.047	2.147	2.674	2.334	0	0
11	NOVEMBER	2.010	2.419	3.215	2.894	0	0
12	DESEMBER	2.022	2.392	2.969	3.401	0	0
JUMLAH TOTAL		24.904	29.690	29.319	29.060	5.220	73

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2022

Kunjungan wisatawan nusantara yang masuk ke Kota Pekanbaru pada tahun 2020 berjumlah 366.235 orang lebih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2019 berjumlah 600 ribu orang, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 menyebabkan Kota Pekanbaru mengalami *lockdown* sehingga nyaris tidak ada kegiatan pariwisata ditahun tersebut. Pada tahun 2021 dampak pandemic Covid-19 masih dirasakan, namun jumlah wisatawan nusantara yang masuk ke Kota Pekanbaru mengalami kenaikan menjadi 923.089 orang. Hal ini dikarenakan walaupun masih terdampak pandemic Covid, namun sudah mulai terdapat beberapa kegiatan ekonomi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik di masa pandemi, yakni kegiatan kepariwisataan yang dilakukan pada destinasi, produk wisata, dan industri usaha mengacu pada CHSE meliputi aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. CHSE merupakan hal yang sangat penting bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata.

Tabel 2.135. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara yang Masuk ke Kota Pekanbaru
Tahun 2016-2021

No.	Bulan	JUMLAH KUNJUNGAN WISNUS TAHUN (orang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	JANUARI	40.434	42.404	51.888	82.313	77.617	96.083
2	FEBRUARI	35.788	35.788	40.788	63.800	52.393	74.578
3	MARET	39.298	41.498	42.398	70.570	16.285	70.019
4	APRIL	39.047	39.047	43.047	73.945	1.200	70.268
5	MEI	38.404	38.404	41.504	62.676	4.471	76.848
6	JUNI	89.325	90.825	91.525	161.502	31.959	72.269
7	JULI	37.482	37.502	41.528	23.792	30.933	51.440
8	AGUSTUS	35.177	35.241	35.177	20.955	29.945	49.508
9	SEPTEMBER	37.828	37.828	37.828	20.782	22.420	62.420
10	OKTOBER	44.684	44.684	44.684	25.831	28.566	83.011
11	NOVEMBER	50.996	50.996	53.002	21.559	33.207	94.478
12	DESEMBER	69.037	69.037	81.037	43.817	37.239	122.167
JUMLAH TOTAL		557.500	563.254	604.406	671.542	366.235	923.089

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2022

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, telah ditetapkan kawasan pariwisata Kota Pekanbaru, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020. Kawasan pariwisata ditetapkan seluas lebih kurang 2.004,00 Ha (dua ribu empat koma nol nol hektar) berada di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Tenayan Raya.

Perwujudan kawasan pariwisata dilaksanakan dengan program utama meliputi:

- penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata;
- pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata;
- pembangunan dan pengembangan kawasan Agrowisata;
- pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Kampung Okura;
- pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Danau Bandar Khayangan;
- pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Alam Mayang;
- peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata; dan
- pengendalian dan pengawasan kawasan pariwisata.

Kota Pekanbaru memiliki potensi pengembangan sebagai destinasi MICE khususnya Meeting, Conference, dan Exhibition. Selain itu Kota Pekanbaru juga diyakini memiliki banyak

potensi yang dapat dikembangkan untuk wisata MICE. Beraneka infrastruktur pendukung mulai dari sektor properti, khususnya gedung *convention center* dengan standar Internasional baik dari segi kapasitas maupun kualitas, telah dipersiapkan.

Aksesibilitas yang dimiliki Kota Pekanbaru sudah bagus dan memenuhi kriteria ideal dalam mendukung potensi pengembangan Kota Pekanbaru sebagai destinasi MICE karena sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan Keseluruhan aksesibilitas di Kota Pekanbaru memiliki lebih banyak kelebihan yang dapat di tawarkan kepada wisatawan MICE.

Agar wisata MICE di Pekanbaru semakin menarik, Pemerintah Kota Pekanbaru membuat paket yang digabung dengan wisata ke daerah (Pekansikawan) di sekitar Pekanbaru. Seperti yang diketahui bahwa ada berbagai tempat wisata di daerah Pekansikawan, seperti Danau PLTA Koto Panjang (Kampar), Candi Muara Takus (Kampar), Istana Siak (Siak), Sungai Bono (Pelalawan) dan lain-lain. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dengan adanya paket gabungan wisata MICE ini, para wisatawan akan bertambah lama waktu tinggalnya di Kota Pekanbaru.

Peningkatan kunjungan wisatawan yang terjadi pada tahun 2021 mayoritas merupakan agenda MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) di Kota Pekanbaru. Adapun potensi wisata MICE di Kota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru memenuhi kriteria sebagai destinasi MICE yaitu:

1. Aksesibilitas, di mana Kota Pekanbaru sudah memiliki pelayanan penerbangan nasional dan internasional serta layanan fasilitas CIQ (Custom, Immigration & Quarantine) dan Visa On Arrival pada bandara Sultan Syarif Kasim II yang memudahkan aksesibilitas pengunjung maupun barang menuju dan dari destinasi;
2. Atraksi MICE, meliputi fasilitas atraksi yang memenuhi seperti variasi venue, fasilitas akomodasi tersedia serta tempat menarik bagi wisatawan MICE untuk mengisi program untuk kegiatan Meeting
3. Amenitas (fasilitas di luar akomodasi) untuk mendukung kegiatan meeting dengan ketersediaan fasilitas lingkungan serta citra destinasi yang baik
4. Sumber daya manusia dan dukungan stakeholder lokal. Pemerintah daerah, asosiasi, stakeholder pariwisata seperti perhotelan, venue, bandara mendukung penuh untuk pengembangan potensi MICE yang ada di Kota Pekanbaru dalam membantu penyelenggaraan kegiatan MICE.

C. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan pengembangan usaha pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem.

Dalam sektor pertanian ada dua komponen dasar yang memegang peranan penting yakni petani dan lahan pertanian. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar yang terus meningkat.

Tabel 2.136. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	1,64	1,60	1,59	1,54	1,68	1,65

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2022

Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kota Pekanbaru sebesar Rp. 1.946.110.000.000, menyumbang 1,68 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru, sedangkan Pada tahun 2021, kontribusi PDRB meningkat menjadi sebesar 2.094.470.000.000,- menyumbang 1,65 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan kontribusi dari sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat lebih dioptimalkan.

Perkembangan komoditas tanaman pangan dan palawija di Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi pertumbuhan luas panen. Pada tahun 2016 jumlah luas panen 1.426,50 Ha meningkat menjadi 3.591,50 Ha pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 502,50 Ha pada tahun 2020. Dari segi produksi, secara umum jumlah total komoditas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 jumlah produksi sebesar 7.300,47 ton, naik sebesar 28.733 ton pada tahun 2019, kemudian akibat pandemic Covid-19 pada tahun 2020 turun menjadi 8.354,15 ton.

Segi produktivitas pertanian, mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 34,11 ton/Ha menjadi 53,57 ton/Ha pada tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah kelompok pengrajin bidang pertanian sebanyak 49 kelompok, Poktan 339 kelompok dan pengusaha bunga tercatat 53 kelompok.

Tabel 2.137. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Luas Panen (ha)					
1	Padi Sawah	7,00	7,70	11,50	5,00	0,00
2	Padi Ladang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jagung	876,00	529,00	2.338,00	2.808,00	310,70
4	Ubi Kayu	265,00	210,00	122,00	512,50	170,60
5	Kacang Tanah	8,50	9,00	17,00	6,00	18,20
6	Ubi Jalar	54,00	3,00	-	1,00	3,00

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kacang Kedelai	216,00	2,00	749,00	259,00	0,00
	JUMLAH	1.426,50	760,70	3.237,50	3.591,50	502,50
B	Produksi (Ton)					
1	Padi Sawah	17,50	19,25	28,75	12,50	0,00
2	Padi Ladang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jagung	1.550,02	1.587,00	7.247,80	8.704,80	963,17
4	Ubi Kayu	5.077,60	8.076,60	4.692,12	19.710,80	7.330,48
5	Kacang Tanah	18,75	22,50	42,50	15,00	45,50
6	Ubi Jalar	399,00	21,00	-	5,00	15,00
7	Kacang Kedelai	237,60	2,20	823,90	284,90	0,00
	JUMLAH	7.300,47	9.728,55	12.835,07	28.733,00	8.354,15
C	Produktivitas (Ton/Ha)					
1	Padi Sawah	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
2	Padi Ladang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jagung	1,77	3,00	3,10	3,10	3,10
4	Ubi Kayu	19,16	38,46	38,46	38,46	42,99
5	Kacang Tanah	2,21	2,50	2,50	2,50	2,50
6	Ubi Jalar	7,37	7,00	0	5,00	5,00
7	Kacang Kedelai	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00
	JUMLAH	34,11	16,10	47,66	52,66	53,57
d	Cakupan Bina Kelompok Tani					
	Kelompok Pengrajin Bidang Pertanian	46	46	46	46	49
	Kelompok Tani (Poktan)	68	68	396	396	339
	Pengusaha Bunga Tercatat	55	55	53	53	53

Sumber: SIPD Dinas Pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru, 2021

Pada tahun 2020 jumlah populasi ternak sapi tercatat sebanyak 3.811 ekor, kerbau, 448 ekor, kambing 5.923 ekor, ayam ras pedaging 6.267.376 ekor, ayam kampung 247.569 dan itik 96.831 ekor, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.138. Jumlah Populasi Ternak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020

Populasi Ternak	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Sapi	4.658	4.555	3.911	3.811
Kerbau			382	448
Kambing	5.708	5.963	5.412	5.923
Domba			219	150
Babi			19.725	18.652
Ayam Ras Pedaging	218.088	228.891	7.088.500	6.267.376
Ayah Kampung			206.617	247.569
Itik	7.041	8.602	9.307	6.831

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka, 2021)

Produksi daging dan telur, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 21.451,59 ton daging dan 265,81 ton telur, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.139. Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020

Produksi	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Daging	Ton	16.801	19.079	22.124,90	21.451,59
Telur	Ton	261,68	256	267,88	265,81

Sumber: SIPD Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, 2021

D. Kehutanan

Luas kawasan hutan dan perairan di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar 63.155 hektar. Kecamatan Tenayan Raya memiliki kawasan hutan dan perairan paling luas yaitu 27,33 persen. Disusul dengan kecamatan Rumbai Pesisir dan Rumbai yang masing masing memiliki luas 24,86 persen dan 20,64 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki kawasan hutan dan perairan paling sedikit yaitu kecamatan Pekanbaru Kota.

Tabel 2.140. Luas kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru (Ha)
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Suaka Alam	Hutan Produksi			Area Penggunaan Lain	Jumlah
			Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi		
1	Tampan	-	-	-	1	5.484	5.485
2	Payung Sekaki	-	-	-	5	4.252	4.257
3	Bukit Raya	-	-	-	5	2.534	2.539
4	Marpoyan Damai	-	-	-	-	3.086	3.086
5	Tenayan Raya	-	-	-	1.608	15.655	17.263
6	Lima Puluh	-	-	-	-	534	534
7	Sail	-	-	-	-	345	345
8	Pekanbaru Kota	-	-	-	-	228	228
9	Sukajadi	-	-	-	-	382	382
10	Senapelan	-	-	-	-	301	301
11	Rumbai	727	179	-	-	12.131	13.037
12	Rumbai Pesisir	-	401	1279	-	14.018	15.698
	Rata-rata	727	580	1.279	1.619	58.950	63.155

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2021

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan dalam Kota Pekanbaru, penggunaan tenaga listrik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Listrik memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber penerangan dan energi lainnya bagi rumah tangga maupun industri. Persentase rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebagai penerangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.141. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Sebagai Penerangan Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga Pengguna Listrik	97,84 %	100 %	99,76 %	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kota Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka, 2016-2021)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebagai sumber utama penerangannya terus meningkat dari tahun 2016 sebesar 97,84 persen hingga mencapai 100 persen pada tahun 2021. Peningkatan rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebagai sumber utama penerangannya telah mencapai 100 persen sehingga seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru dapat menikmati listrik untuk keperluan sehari-hari.

F. Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi sangat penting dalam menopang ekonomi suatu daerah, karena barang-barang dan jasa yang menjadi keunggulan suatu daerah tersebut dapat diperdagangkan baik dalam kawasan maupun keluar kawasan. Sektor ini menjadi sektor sentral dalam perekonomian Kota Pekanbaru, karena notabene kota metropolitan tidak jauh dari perdagangan dan jasa. Hal ini juga dikarenakan Pekanbaru sebagai kota tujuan Investasi yang dimana sektor perdagangan adalah sektor yang menjadi incaran para investor dalam berinvestasi karena perputaran barang dan jasa yang cepat.

Pada tabel dibawah ini kita melihat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2016-2021. Pada tahun 2016 kontribusi sektor ini hanya sekitar 29,68 persen akan tetapi pada tahun 2019 naik menjadi 31,46 persen. Kemudian dampak pandemic Covid-19, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekanbaru tahun 2020 turun sebesar 29,23 persen. Pada saat pemulihan Covid-19 tahun 2021, kontribusinya naik 0,01 persen menjadi 29,24 persen.

Tabel 2.142. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Terhadap PDRB Kota Pekanbaru (dalam miliar rupiah) Tahun 2016-2021

2016		2017		2018		2019		2020		2021	
(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
27.348,38	29,68	30.811,64	30,47	33.073,35	30,46	37.412,37	31,46	33.771,53	29,23	37.897,05	29,24

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2022

Menurut data BPS Kota Pekanbaru, ekspor Kota Pekanbaru, ekspor Riau pada tahun 2021 mencapai nilai US\$ 6.252.951,98 dengan volume 37.774,27 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor turun US\$ 13.975.857 atau tuntas sebesar -69,09 persen. Sedangkan impor Riau pada tahun yang sama mencapai nilai US\$ 64.409.187 dengan volume

58.544,96 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai impor turun US\$ 96.068.850 atau tumpas sebesar -59,86 persen.

Tabel 2.143. Nilai Ekspor Bersih Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021

Tahun	Ekspor (US\$)	Trend Ekspor	Impor (US\$)	Trend Impor
2016	14.802.096	-10,15	90.237.979	-8,49
2017	11.972.754	-19,12	97.217.955	10,06
2018	16.794.926	40,28	96.509.035	-2,83
2019	13.767.978	-18,01	85.086.678	-11,84
2020	20.228.809	46,90	160.478.037	88,61
2021	6.252.952	-69,09	64.409.187	-59,86

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2022

Nilai ekspor bersih menurun cukup tajam dibanding tahun 2020 karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, kondisi akibat pandemic menyebabkan harga-harga komoditas yang menjadi andalan juga mengalami penurunan. Penurunan ini akan berdampak terhadap turunnya nilai ekspor. Upaya untuk mendorong ekspor yaitu pemerintah harus menarik investasi yang besar, salah satu nya adalah investasi di sektor manufaktur yang memiliki potensi nilai ekspor yang sangat besar. Di mana nilai ekspor manufaktur juga dapat mengubah barang agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa produk unggulan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru. Berdasarkan Keputusan Walikota pekanbaru Nomor 333 Tahun 2021 tentang produk unggulan Kota Pekanbaru, terdapat beberapa produk unggulan yang menjadi ikon Kota Pekanbaru, meliputi Ubi Kayu, Pisang, Nenas dan Durian. Pada sektor tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, meliputi : kerajinan berbahan baku rotan dan tekstil berbasis kearifan lokal.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah memiliki UPT pangan yang bertujuan untuk pengolahan hasil ubi kayu di Kecamatan Tenayan Raya dan juga rumah kemasan untuk meningkatkan daya saing. Berikut Merupakan Data Pedagang Pasar Rakyat Kota Pekanbaru:

Tabel 2. 144. Rekap Data Pedagang Pasar Rakyat Kota Pekanbaru

No.	Nama Pasar	Kios	Los	PKL	Jumlah
1.	Pasar Lima Puluh	82	125	-	207
2.	Pasar Cik Puan	142	63	259	464
3.	Pasar Labuh Baru	77	108	-	185
4.	Pasar Agus Salim	26	1	518	545
5.	Pasar Simpang Baru	257	140	58	455
6.	Pasar Rumbai	87	110	174	371

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2022

Belum tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Pekanbaru disebabkan PKL dalam jumlah besar sementara kondisi pasar yang belum memadai dan memenuhi standar. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya menempatkan PKL pada tempat yang baik sehingga lebih tertata.

G. Perindustrian

Pertumbuhan industri kecil di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 jumlah IKM di Kota Pekanbaru berjumlah 2191 IKM, tahun 2020 berjumlah 2.271 IKM dan tahun 2021 berjumlah 2.574 IKM. Lebih lanjut jumlah industri kecil di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 2.145. Pertumbuhan IKM di Kota Pekanbaru berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian dan mampu terus berdiri Ketika kondisi ekonomi global sedang tidak stabil.

Tabel 2.145. Jumlah Industri Kecil Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Sampai Dengan Tahun 2021

Kecamatan	S/d 2017	2018	2019	2020	2021
Bukit Raya	211	221	224	227	262
Lima Puluh	89	92	93	94	108
Marpoyan Damai	238	250	254	263	313
Payung Sekaki	370	393	405	427	464
Pekanbaru Kota	101	107	111	111	117
Rumbai	92	94	98	104	117
Rumbai Pesisir	51	53	54	55	64
Sail	46	46	46	46	64
Senapelan	122	130	133	138	145
Sukajadi	242	246	252	256	273
Tampar	286	302	313	334	406
Tenayan Raya	200	205	208	216	257
Total	2.048	2.139	2.191	2.271	2574

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka 2022)

Selanjutnya dalam rangka memberikan ruang bagi pengembangan industri di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota telah mempersiapkan lahan seluas 1.550 Ha, di Kawasan Tenayan Raya yang diperuntukkan sebagai kawasan industri yang disebut dengan Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru. Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru menjadi bagian pengembangan kawasan industri strategis prioritas RPJMN 2020-2024. Keberadaan Kawasan Industri tenayan sekaligus sebagai peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dengan munculnya kawasan perkotaan baru diikuti dengan munculnya lapangan pekerjaan baru.

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 menyumbangkan 20,78 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp. 24.001.360.000. Pada saat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, jumlah ini meningkat menjadi Rp.26.689.970.000,- dengan kontribusi 21,09 persen.

Tabel 2.146. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kota Pekanbaru
Tahun 2016-2021 (dalam miliar rupiah)

Sektor	Tahun											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
Industri Pengolahan	18.417,24	19,99	20.113,84	19,89	21.366,33	19,63	22.912,46	19,24	24.001,30	20,78	26.689,97	21,09

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2022

2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Penunjang Urusan

Urusan layanan penunjang urusan meliputi perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan dan sekretariat dewan.

A. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah Kota Pekanbaru terdiri dari Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi visi dan misi daerah. Kemudian adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun hal-hal penting yang berkaitan dengan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru telah tersedia dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1).

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Pekanbaru telah tersedia. RPJMD Kota Pekanbaru telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Kemudian pada tahun 2020 terjadi revisi atas RPJMD 2017-2022 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

3. Tersedianya dokumen perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut : (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 192 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2017; (2) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 137 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018; (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 99 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019; (4) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020; dan (5) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021.
4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
Dokumen tentang RTRW telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 pada tanggal 28 Desember 2020, yang sebelumnya masih mengikuti penetapan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
5. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.
Adapun kinerja urusan perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu penunjang urusan mencapai target kinerja yang diharapkan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.147. Konsistensi dan Kesesuaian

NO	KONSISTENSI & KESESUAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022 (Diolah)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan yang perangkat daerah nya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) wajib menjamin konsistensi program-program pembangunan daerah atas setiap dokumen perencanaan baik Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD). Konsistensi tersebut tidak hanya antar dokumen perencanaan namun juga sampai pada dokumen penganggaran dalam hal ini adalah APBD. BAPPEDA Kota Pekanbaru selaku Perangkat Daerah yang mengurus urusan ini harus juga menjamin semua rencana Pembangunan sesuai dengan Dokumen RTRW. Dari data yang didapat

dan disajikan pada tabel diatas, untuk capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 konsistensi tersebut terjaga. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian 100 % penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

B. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Bidang Keuangan merupakan penunjang urusan pemerintahan, capaian kinerja bidang keuangan dapat ditunjukkan melalui capaian Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai LKPD Tahun 2016 s.d LKPD tahun 2020.

Tabel 2.148. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kota Pekanbaru

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Persentase SILPA Terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.149. Persentase SILPA Terhadap APBD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

DATA	TAHUN									
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
SILPA	16.770.485.780,73	0,78%	11.433.514.300,36	0,51%	15.293.613.939,53	0,65%	12.137.740.703,65	0,52%	30.957.965.492,61	1,17%
APBD	2.152.172.723.977,60		2.220.359.504.219,61		2.365.257.960.184,75		2.341.148.780.839,74		2.650.042.024.204,00	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2021

3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), bahwa alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah sebesar 20% telah dilaksanakan oleh Kota Pekanbaru. Hal Ini dapat dilihat dari tabel persentase realisasi belanja urusan pendidikan dari tahun 2016 s.d 2020:

Tabel 2.150. Persentase Belanja Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

DATA	TAHUN									
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
PENDIDIKAN	750.261.387.409,00	34,86%	667.060.971.290,00	30,04%	625.056.781.753,05	26,43%	598.367.374.715,00	25,56%	673.457.987.754,00	25,41%
APBD	2.152.172.723.977,60		2.220.359.504.219,61		2.365.257.960.184,75		2.341.148.780.839,74		2.650.042.024.204,00	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2021

4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan adalah sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amandemen UUD 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Persentase realisasi belanja urusan kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.151. Persentase Belanja Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

DATA	TAHUN									
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
KESEHATAN	206.209.990.837,60	9,58%	185.731.896.042,24	8,36%	220.543.752.710,52	9,32%	242.705.121.894,22	10,37%	304.059.296.038,00	11,47%
APBD	2.152.172.723.977,60		2.220.359.504.219,61		2.365.257.960.184,75		2.341.148.780.839,74		2.650.042.024.204,00	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2021

C. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi beberapa indikator kinerja, yaitu : rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. Indikator kinerja tersebut dapat di sajikan pada table dibawah ini :

Tabel 2.152. Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021

NO	KINERJA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (hari)	5	5	5	5
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	67%	65%	66%	72%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	39	2	20	37
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	1237	324	520	192

NO	KINERJA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	-	4	92	345

Sumber: Badan Kepegawaian dan Paltihan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru, 2022

Setiap pegawai harus memiliki kompetensi karena tuntutan, tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik, dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adapun data jumlah ASN Kota Pekanbaru yang telah mengikuti uji kompetensi dan ASN yang akan melaksanakan uji kompetensi, terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.153. Jumlah PNS yang Sudah dan yang Belum Mengikuti Uji Kompetensi Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2021

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pegawai Fungsional Yang Memiliki Sertifikat	-	7	703	75	217

Sumber : BKPSDM 2022 (Data yang terlapor di BKPSDM)

Pengembangan manajemen kepegawaian dilakukan melalui proses uji kompetensi kepada seluruh ASN di Kota Pekanbaru melalui Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dengan menggunakan aplikasi Learning Centre. Sehingga melalui proses sistematis tersebut dapat teridentifikasi diskrepensi antara standar kinerja dan kompetensi pegawai yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan 20 JP bagi setiap ASN.

Strategi penguatan sistem merit adalah melalui pemetaan kompetensi dan keahlian ASN, sehingga dapat diterapkannya manajemen talenta yang memetakan kualifikasi jabatan strategis dan pengembangan talenta berkelanjutan. *Assessment Center* merupakan salah satu metode dalam pencapaiannya.

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terdiri atas beberapa indikator kinerja antara lain: rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil kelitbangan, perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Indikator kinerja tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.154. Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru
Tahun 2017-2021

NO	KINERJA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai Standar yang dimanfaatkan	25%	50%	60%	70%	80%	80%
2	Persentase hasil Kegiatan kelitbangan Yang direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan	25%	50%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD dan masyarakat yang memiliki inovasi di Kota Pekanbaru	0%	0%	30,2	76,0	122,9	136,2
4	Persentase Inovasi OPD Yang difasilitasi oleh BPP Kota Pekanbaru	0%	0%	14,3	57,1	93,9	100,0
5	Persentasi inovasi masyarakat yang di bina oleh BPP Kota Pekanbaru	0%	0%	15,9	18,8	29,0	36,2
6	Persentase Diseminasi Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase hasil kajian/ Penelitian yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru Tahun 2022

Kota Pekanbaru menerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2021 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walikota Pekanbaru Firdaus menerima penghargaan dalam kategori walikota sangat inovatif. Pemberian penghargaan digelar di kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, tanggal 29 Desember 2021. Penghargaan IGA 2021 kali ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kota Pekanbaru memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah tahun ini yaitu sebesar 60,14. Artinya, Pekanbaru masuk kedalam kategori Kota Sangat Inovatif

E. Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari : jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tidak lanjut dalam proses, dan belum ditindaklanjuti. Adapun untuk indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.155. Indikator Kinerja Pengawasan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020

NO	KINERJA	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	50%	69%	68%	44%
2	Jumlah Kasus Pelanggaran Pegawai	3	13	9	8
	- Indisipliner	2	5	8	6
	- Tindak Pidana	0	7	1	1
	- Tindak Pidana Korupsi	1	1	0	1
3	Jumlah Temuan BPK (LKPD)	13	9	11	18

F. Sekretariat Dewan

Pada Sekretariat Dewan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja yang diharapkan yang **pertama** adalah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru yang telah terpenuhi oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Kinerja yang **kedua** adalah tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD). Kinerja yang kedua ini juga telah dipenuhi oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Kinerja yang **ketiga** adalah Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. Kinerja ini juga telah dipenuhi oleh Sekretariat DPRD.

2.1.3.4 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur pemerintahan umum terkait capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri tercermin dari data pemetaan wilayah rawan konflik, pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, partisipasi politik masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Kerukunan Umat Beragama.

Isu strategis pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait wilayah rawan konflik yang berhubungan erat dengan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, maka menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pemetaan terhadap beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lokasi rawan konflik yang berkemungkinan terpetakan di Pekanbaru adalah daerah pinggiran yang jauh dari sentra keramaian, seperti kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai, Tenayan Raya, Marpoyan Damai dan Tampan.

Dari segi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru mengimbau seluruh masyarakat agar selalu mewaspadaai paham radikal dan terorisme. Paham radikalisme dapat merusak generasi muda bangsa yang pada akhirnya menjadi bahaya laten. Guna memperkuat penguatan kerukunan umat beragama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru diharapkan dapat berupaya untuk memperkuat Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekanbaru. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian.

Salah satu contoh antisipasinya adalah jika dalam menghadapi masuknya paham radikalisme ke Kota Pekanbaru, kita harus menyaring tentang ajaran yang disampaikan, jika bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka ajaran itu harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk di usut tuntas agar tidak merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Selain itu dengan cara selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengertian tentang bahaya paham radikalisme diharapkan akan dapat mencegah kepada bahaya laten yang tidak kita harapkan dan untuk dapat lebih menanamkan rasa cinta terhadap tanah air.

Untuk presentase kasus narkoba, Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 ada sebanyak 230 kasus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 241 kasus atau sebesar 4,78 %. Dampak penyalahgunaan narkoba ini telah merambah ke beberapa kalangan pelajar, birokrat, legislatif dan akademisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyalahgunaan narkoba berasal dari kelompok usia produktif.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba membahayakan perkembangan Sumber Daya Manusia di Kota Pekanbaru yang menjadi modal pembangunan ke masa depan. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, maka Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Badan Narkotika Provinsi Riau dan Badan Narkotika Kota Pekanbaru melaksanakan beberapa bentuk koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam bidang pencegahan, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkoba;
2. Koordinasi dalam bidang rehabilitasi, yaitu dilakukan dengan cara medis dan spritual dalam mengobati orang yang telah mengkonsumsi narkoba yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa daripada pemakai narkoba. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial;
3. Koordinasi dalam bidang penegakan hukum, yaitu menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya.

Di bawah ini ditampilkan data rehabilitasi kasus narkoba di Kota Pekanbaru.

Tabel 2.156. Data Rehabilitasi Kasus Narkoba di Kota Pekanbaru 2017 – 2020

No	Tahun	Rehabilitas Rawat Jalan (Orang)	Rehabilitas Rawat Inap		
			Balai Rehabilitasi Lido Bogor (Orang)	RSKO (Orang)	Loka Batam (Orang)
1	2017	68	5	7	12
2	2018	99	8	8	2
3	2019	169	9	5	1
4	2020	156	2	0	3
Jumlah		492	24	20	18

Sumber: BNNK Pekanbaru, 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Angka Konsumsi RT Per Kapita Kota Pekanbaru

Konsumsi rumah tangga per kapita menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat dan juga daerah. Semakin tinggi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa masyarakat semakin mampu ekonominya. Data perkembangan konsumsi rumah tangga per kapita per tahun untuk tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.157. Angka Konsumsi RT Per Kapita Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Total Pengeluaran RT (juta rupiah)	49.959.902,37	54.489.244,98	57.737.076,22	60.893.839,41	60.956.819,15	63.888.190,00
2.	Jumlah RT	253.533	259.849	266.105	272.298	272.298	272.298
3.	Rasio (1/2.)	97.054.830,61	09.695.804,02	216.971.031,06	223.629.403,85	223.860.693,62	234.625.997,98

Sumber data : BPS Kota Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka 2016-2022)

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita/tahun mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016 tercatat sekitar Rp 197.054.830,61 dan meningkat menjadi Rp 223.860.693,62 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp.234.625.997,98

B. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Perdagangan memiliki peranan penting terhadap perekonomian Kota Pekanbaru. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar pertama terhadap PDRB Kota Pekanbaru dengan nilai kontribusi sebesar 31,41 persen.

Kondisi perdagangan mengalami perkembangan cukup baik ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB dari sektor Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari 33.091,74 Miliar Rupiah di tahun 2018 menjadi 37.412,37 Miliar Rupiah di Tahun 2019 dengan laju pertumbuhan sektor perdagangan ini sebesar 7,22 persen pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,02 persen. Masa pandemi Covid-19 tahun 2020, turun dari tahun 2019 menjadi 33.771,53 Miliar Rupiah dan naik kembali pada tahun 2021, menjadi 37.897,05 Miliar Rupiah.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2016-2021. Pada tahun 2016 kontribusi sektor ini hanya sekitar 29,68 persen akan tetapi pada tahun 2019 naik menjadi 31,41 persen. Kemudian dampak pandemic Covid-19, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 29,23 persen. Pada saat pemulihan Covid-19 tahun 2021, kontribusinya naik 0,01 persen menjadi 29,24 persen.

Menurut data BPS Kota Pekanbaru, ekspor Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai nilai US\$ 6.252.951,98 dengan volume 37.774,27 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor turun US\$ 13.975.857 atau tumpas sebesar -69,09 persen. Sedangkan impor Kota Pekanbaru pada tahun yang sama mencapai nilai US\$ 64.409.187 dengan volume 58.544,96 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai impor turun US\$ 96.068.850 atau tumpas sebesar -59,86 persen, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.158. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai ekspor	US \$	14.802.096	11.972.754	16.794.926	13.770.934	20.228.809	6.252.952
2	Nilai Impor	US \$	90.237.979	99.318.770	96.509.035	85.086.671	160.478.037	64.409.187
3	PDRB	Miliar Rupiah	92.129.331	101.113.420	108.571.370	118.761.900	115.519.460	126.555.680

Sumber Data: BPS Kota Pekanbaru, 2021

Penurunan nilai ekspor dan nilai impor tahun 2021 tidak saja terjadi di Kota Pekanbaru tetapi terjadi pula di Provinsi Riau dimana penurunan impor Provinsi Riau disebabkan oleh pandemi Covid-19.

C. Angka Kriminalitas

Berdasarkan tabel dibawah jumlah kriminalitas di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019, dapat dilihat pada tahun 2017 dengan jumlah 1.446 kasus dengan 1.023 kasus yang dapat diselesaikan (70,75 persen), kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 1.807 kasus dengan 907 kasus yang dapat diselesaikan (50,19 persen), dan menurun pada tahun 2019 menjadi 1.233 Kasus dengan 804 penyelesaian kasus (65,21 persen).

Tabel 2.159. Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Tahun 2017			2018			2019		
		Jumlah kasus	Penyelesaian kasus	Persentase penyelesaian kasus (%)	Jumlah kasus	Penyelesaian kasus	Persentase penyelesaian kasus (%)	Jumlah kasus	Penyelesaian kasus	Persentase penyelesaian kasus (%)
1	Tampar	159	107	67,30	678	114	16,81	171	109	63,74
2	Payung Sekaki	124	97	78,23	100	100	100,00	75	62	82,67
3	Bukit Raya	231	164	71	250	161	64,40	207	110	53,14
4	Marpojan Dama									
5	Tenayan Raya	181	175	96,69	149	99	66,44	155	101	65,16
6	Lima Puluh	174	120	68,97	194	138	71,13	149	100	67,11
7	Sail									
8	Pekanbaru Kota	92	47	51,09	66	51	77,27	102	60	58,82
9	Sukajadi	110	64	58,18	100	73	73,00	140	96	68,57
10	Senapelan	166	120	72,29	78	59	75,64	88	61	69,32
11	Rumbai	133	81	60,90	102	60	58,82	101	60	59,41
12	Rumbai Pesisir	76	48	63,16	68	42	61,76	45	45	100,00
	Jumlah	1.446	1.023	70,75	1.807	907	50,19	1.233	804	65,21

Sumber : Diolah dari Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2020

2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan)

Kualitas tenaga kerja antara lain tergambar dari lulusan atau ijazah yang dimiliki oleh tenaga kerja. Semakin tinggi ijazah yang diterima menunjukkan relatif lebih tinggi kualitas tenaga kerja yang dimiliki. Jumlah tidak punya ijazah pada tahun 2020 mencapai 3,54 persen turun dari tahun 2019 sebesar 8,37 persen. Pada tahun 2020, untuk pendidikan SD yang ditamatkan sebesar 8,92 persen, SLTP 16,60 persen dan SLTA 70,95 persen.

Tabel 2.160. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

No	Pendidikan yang pernah ditamatkan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak punya ijazah	9,62	11,79	13,35	8,37	3,54
2	SD	14,80	18,38	13,45	9,41	8,92
3	SLTP	18,45	14,81	19,31	21,67	16,60
4	SLTA	39,03	38,06	39,66	44,57	70,95
5	Akademi	4,77	4,58	3,35	0,72	-
6	Universitas	13,33	12,38	10,88	15,26	-

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka 2016-2021)

B. Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan adalah salah satu indikator demografi yang vital. Angka Beban Ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar dan menanggung penduduk usia belum produktif/tidak produktif yang kecil. Angka Beban Ketergantungan di bawah 50 menunjukkan bahwa satu orang penduduk belum produktif/tidak produktif ditanggung oleh 2 orang penduduk produktif.

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.161. Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2021

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN DAN PERSENTASE									
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	0 – 14 tahun	294.961	27,03	299.195	26,77	303.129	26,37	266.060	27,06	265.808	26,72
2	15 – 64 tahun	766.025	70,21	785.938	70,33	811.622	70,62	680.441	69,19	688.930	69,27
3	65 tahun ke atas	30.102	2.76	32.226	2,88	34.608	3,01	36.855	3,75	39.847	4,01
JUMLAH		1.091.088	100	1.117.359	100	1.149.359	100	983.356	100	994.585	100

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.162. Angka Beban Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

NO	Rasio ketergantungan	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Ketergantungan	42,44	42,17	41,61	44,52	44,37

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022 (Diolah)

Dari tabel Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2021 dan tabel Angka Beban Ketergantungan Tahun 2017-2021, diperoleh angka ketergantungan tahun 2021 sebesar 44,37 persen, menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Pekanbaru mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang usia non produktif (usia anak-anak dan penduduk usia lanjut) dan angka tersebut termasuk dalam kategori sedang. Angka tersebut turun bila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 44,52 persen.

2.1.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

A. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara

Kelancaran transportasi angkutan barang dan penumpang merupakan salah satu indikator dari daya saing daerah. Jumlah keberangkatan sarana transportasi serta jumlah penumpang dan barang pada suatu pelabuhan udara bisa menjadi ukurannya. Selama periode 2016–2021, jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat, jumlah penumpang (datang dan berangkat), jumlah bagasi (bongkar dan muat) dan jumlah barang (bongkar dan muat) di pelabuhan udara di Kota Pekanbaru terus meningkat.

Jumlah penumpang selama tahun 2021 menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya, karena adanya kebijakan pembatasan penerbangan selama masa pandemi. Tercatat pada tahun ini jumlah penumpang domestik kurang dari 1.500 ribu orang sedangkan penumpang internasional kurang dari 70 ribu orang.

Tabel 2.163. Perkembangan Jumlah Penumpang, Bagasi dan Barang Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2016-2021

Uraian		Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pesawat (unit)							
Domestik	Datang	15.388	14.199	14.816	12.026	7.212	6.318
	Berangkat	15.179	14.207	14.825	12.040	7.225	6.308
Internasional	Datang	1.758	1.698	1.653	1.701	487	49
	Berangkat	1.989	1.684	1.647	1.693	483	48
Jumlah	Datang	17.146	15.897	16.469	13.727	7.699	6.367
	Berangkat	17.168	15.891	16.472	13.733	7.708	6.356
Penumpang (Orang)							
Domestik	Datang	1.729.969	1.761.503	1.903.399	1.410.644	688.036	598.273
	Berangkat	1.974.284	1.814.265	1.899.363	1.377.503	655.501	604.449
Internasional	Datang	102.985	137.071	142.235	159.457	36.047	22
	Berangkat	136.113	140.713	147.529	163.069	33.136	109
Jumlah	Datang	1.832.954	1.898.574	2.045.634	1.570.101	724.083	598.295
	Berangkat	2.110.397	1.954.978	2.046.892	1.540.572	688.637	604.558
Bagasi (kg)							
Domestik	Bongkar	11.731.396	13.416.509	13.845.547	8.134.686	3.838.740	4.059.228
	Muat	10.476.831	11.998.775	12.484.005	7.035.211	3.159.405	3.960.660
Internasional	Bongkar	896.887	1.318.550	1.510.927	1.489.324	386.240	-
	Muat	700.935	957.661	1.005.072	963.936	199.320	-
Jumlah	Bongkar	12.628.283	14.735.059	15.356.474	9.624.010	4.224.980	4.059.228
	Muat	11.177.766	12.956.436	13.489.077	7.999.147	3.358.725	3.960.660

Uraian		Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kargo (kg)							
Domestik	Bongkar	8.289.777	12.648.947	16.870.886	13.122.907	13.282.965	9.138.154
	Muat	2.154.137	4.456.207	5.844.896	5.007.473	4.666.491	5.318.096
Internasional	Bongkar	3.014	5.284	16.689	22.079	8.162	-
	Muat	17.695	15.356	28.022	533.708	84.953	-
Jumlah	Bongkar	8.292.791	12.654.231	16.887.575	13.144.986	13.291.127	9.138.154
	Muat	2.171.832	4.471.563	5.912.918	5.541.181	4.751.444	5.318.096

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2022

B. Penginapan/Hotel

Jumlah kamar dan tempat tidur hotel yang tersedia menunjukkan salah satu aktifitas perekonomian suatu daerah. Jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia di Kota Pekanbaru ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur setiap tahunnya, pada tahun 2016 jumlah kamar sebanyak 6.224 meningkat menjadi 9.856 pada tahun 2021. Tempat tidur pada tahun 2016 sebanyak 9.161 juga mengalami peningkatan menjadi 37.452 pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan daya saing Kota Pekanbaru yang cukup tinggi karena terus bertumbuhnya kegiatan perhotelan ini.

Tabel 2.164 Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kota Pekanbaru

Fasilitas Hotel	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2021
Kamar	6.224	8.743	7.089	8.345	9.856
Tempat Tidur	9.161	12.217	7.241	21.583	37.452

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2022

C. Ketersediaan Listrik

Listrik memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber penerangan dan energi lainnya bagi rumah tangga maupun industri, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.165. Produksi Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2021

Penggunaan Listrik	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga	88,2 %	51,23 %	904.329.209	858.228.090	75.292.023	70.506.845
Bisnis	10,16 %	30,26 %	559.741.720	560.515.099	79.195.597	43.944.035
Pabrik	0,03 %	6,45 %	176.092.289	172.768.034	17.349.346	4.024.618
Fasilitas Sosial	1,2 %	5,65 %	106.625.539	110.849.682	8.426.225	9.318.344
Penerangan Jalan	0,2 %	3,82 %	109.296.067	82.724.844	3.838.597	3.374.474
Kantor Pemerintahan	0,21 %	2,59 %	47.412.620	48.764.351	4.500.324	4.785.704

Penggunaan Listrik	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hilang	-	-	-	293.611.644	22.453.633	-
Dipakai sendiri	-	-	-	54.229	1.452.456	-
Multiguna	-	-	1.853.311	2.133.693	-	-
Total Produksi Listrik (kwh)	1.908.887.927	1.992.140.960	1.905.350.755	1.833.850.100	212.508.291	135.954.020

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka 2016-2020)

Total penggunaan listrik selama tahun 2021 di Kota Pekanbaru sebesar 135.954.020 Kwh, dimana sebanyak 51,86 persen dipergunakan oleh rumah tangga dan 32,32 persen dipergunakan untuk bisnis.

Pada tahun 2020 kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp. 306.930.000.000, menyumbang 0,27 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru, sedangkan pada tahun 2021, kontribusi PDRB meningkat menjadi sebesar 298,620.000.000,- menyumbang 0,24 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru. Dengan pengelolaan yang lebih baik diharapkan kontribusi dari sektor pengadaan listrik dan gas dapat lebih dioptimalkan.

Tabel 2.166. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) untuk Pengadaan Listrik dan Gas

Bidang	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengadaan Listrik dan Gas	183.141,7	205.159,6	212.257,6	274.130,0	306.930,0	298,62

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka 2016-2020)

2.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Indikator TPB Kota Pekanbaru sebanyak 200 Indikator. Selanjutnya dilakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Nasional

Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

Indikator TPB yang tidak/belum ada data

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa kategori TPB Kota Pekanbaru yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional berjumlah 96 indikator, kategori yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional berjumlah 22 indikator, kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 66 indikator dan kategori tidak/belum ada data (NA) berjumlah 16 indikator (Lampiran). Pencapaian TPB di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

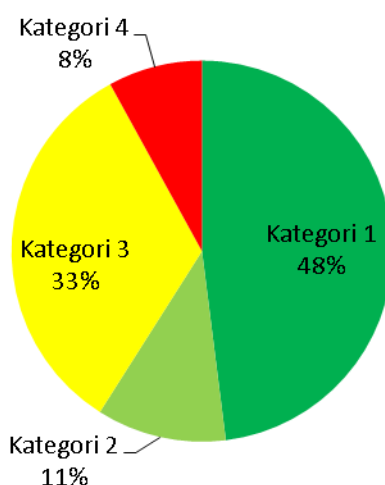
Tabel 2.167. Capaian Indikator TPD di Kota Pekanbaru

TPB	Kategori-1	Kategori -2	Kategori -3	Kategori -4
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	11	4	8	5
TPB 2. Tanpa Kelaparan	7	2	6	1
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	19	7	6	4
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	9	3	4	1
TPB 5. Kesenjaraan Gender	2	0	4	0
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	9	1	3	0
TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	0
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	8	2	1	0
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	5	0	0	1
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	3	0	5	0
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	5	2	6	2
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	1	1	2	1
TPB 13. Perubahan Iklim	0	0	2	0
TPB15. Pelestarian Ekosistem Darat	0	0	0	1
TPB16. Perdamaian dan Keadilan	12	0	17	0
TPB17. Kemitraan Berkelanjutan	3	0	2	0
Jumlah	96	22	66	16

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru, 2020

Rincian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan pencapaian terhadap indikator nasional berdasarkan kategori dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 2.17. Persentase Capaian TPB Kota Pekanbaru

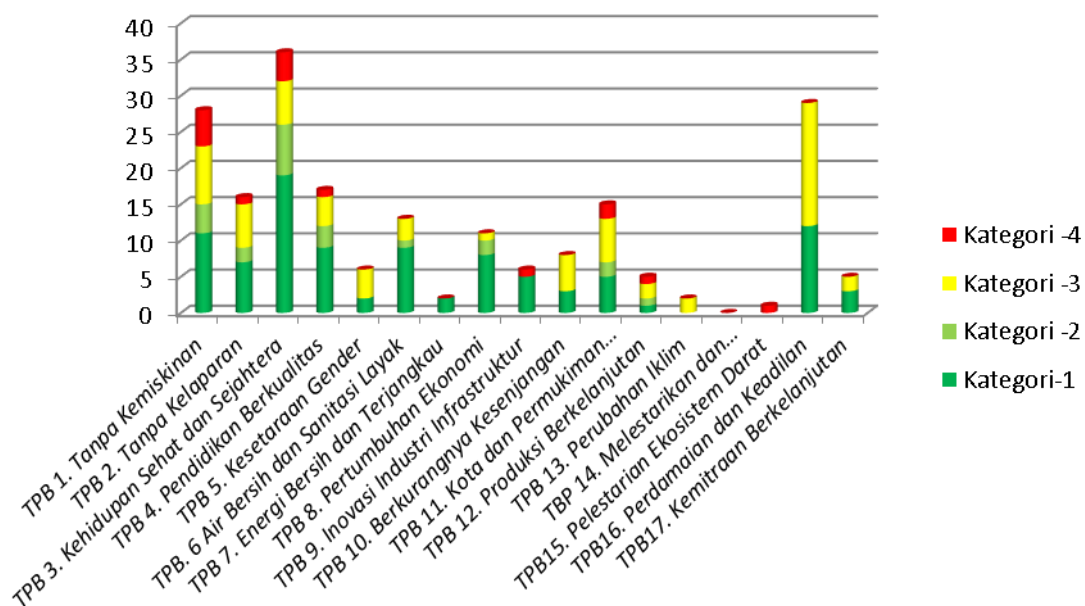


Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru, 2020

Secara umum, gambaran pencapaian TPB Kota Pekanbaru masih banyak yang belum mencapai target nasional. Dari total 200 indikator TPB, Kota Pekanbaru telah melaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 48%. Sedangkan sebanyak 11% belum tercapai tapi sudah dilakukan. Target yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 33% dan kategori yang belum/tidak ada data yaitu 8%. Khusus kategori-3 dan kategori-4, data ini dapat saja bergeser menjadi sudah tercapai atau mungkin sudah dilakukan tapi belum tercapai, asalkan tersedia data yang cukup untuk menghitung tingkat ketercapaian masing-masing target.

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kota Pekanbaru terhadap target nasional, terdapat TPB yang memiliki jumlah indikator terbanyak yaitu TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) sebanyak 36 indikator diikuti yaitu TPB 16 (Perdamaian dan Keadilan) sebanyak 29 indikator dan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) sebanyak 28 indikator. Total indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.18 Capaian TPB Setiap Tujuan Kota Pekanbaru

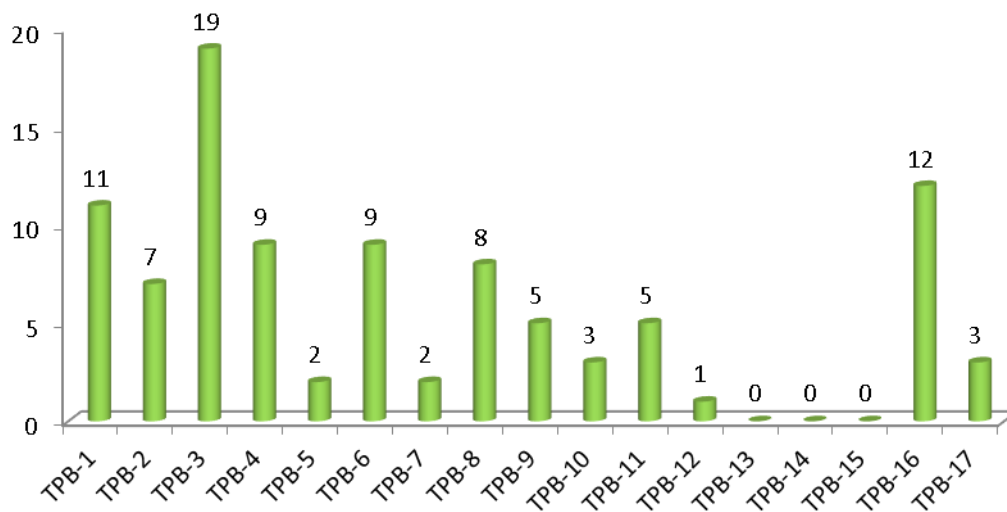


Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru, 2020

2.2.1 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan Target TPB Nasional yang relevan untuk Kota Pekanbaru (200 indikator), sebanyak 96 indikator sudah tercapai atau sebesar 48%. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan TPB 16 (Perdamaian dan Keadilan) merupakan indikator TPB paling banyak pada kategori ini yaitu berturut-turut 19 dan 12 indikator. Selengkapnya disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.19 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional



Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru, 2020

2.2.2 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan hasil analisis pada setiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pekanbaru dengan total 200 indikator yang terdiri dari 4 pencapaian yakni 1) tercapainya indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2) indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, 3) indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, serta 4) indikator yang belum/tidak ada data (NA). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pilar pembangunan mempunyai tingkat pencapaian yang berbeda pada setiap pilar pembangunan berkelanjutan.

2.2.2.1 Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 103 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial masing-masing Organisasi Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.168 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

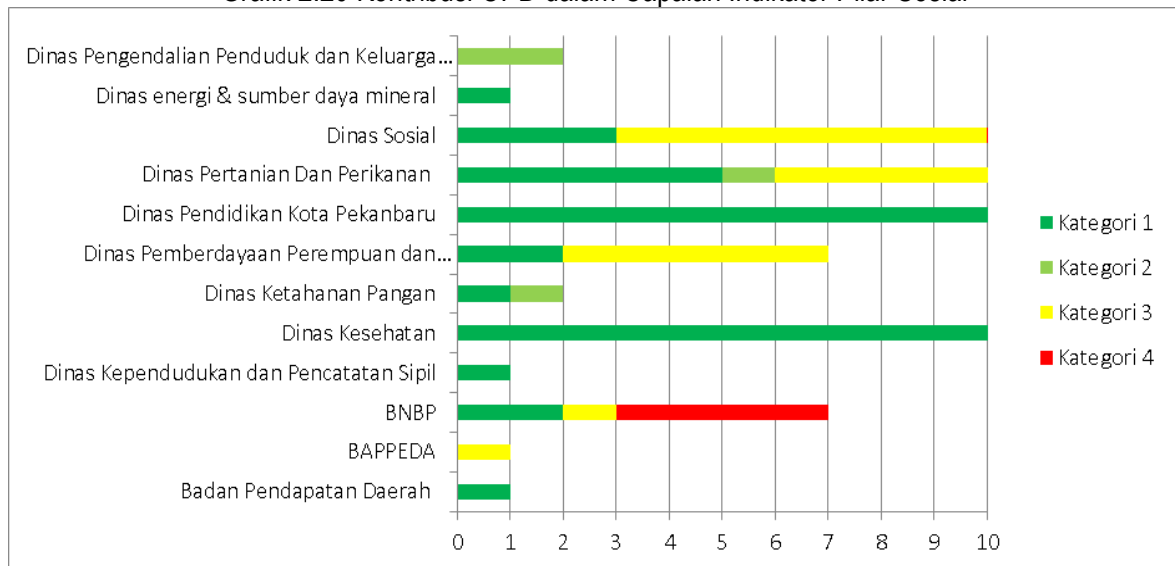
No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	Badan Pendapatan Daerah	1	0	0	0	1
2	BAPPEDA	0	0	1	0	1
3	BNBP	2	0	1	4	7
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	0	0	1
5	Dinas Kesehatan	21	8	4	4	37
6	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	0	0	2
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	0	5	0	7

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
8	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	11	4	4	1	20
9	Dinas Pertanian Dan Perikanan	5	1	6	1	13
10	Dinas Sosial	3		7	1	11
11	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	1	0	0	0	1
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	2	0	0	2
	Jumlah	48	16	28	11	103

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari 103 indikator yang terdapat pada pilar sosial terdapat 48 indikator atau 46,6% yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, sedangkan indikator yang telah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional pada pilar sosial terdapat 16 indikator atau 15,53%. Sementara itu sebanyak 27,18% atau 28 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan terdapat 11 indikator atau 10,68% yang belum/atau tidak memiliki data (NA). Berdasarkan analisis tersebut, Dinas Kesehatan merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar sosial yaitu sebanyak 37 indikator. Untuk melihat secara rinci grafik capaian indikator pilar sosial disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.20 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial



2.2.2.2 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 32 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

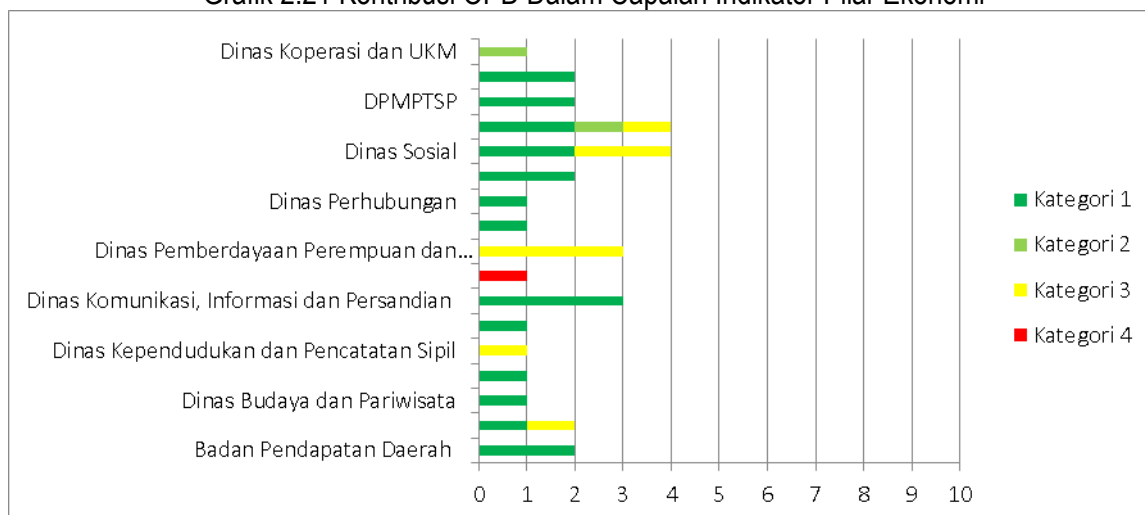
Tabel 2.169 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	Badan Pendapatan Daerah	2	0	0	0	2
2	BAPPEDA	1	0	1	0	2
3	Dinas Budaya dan Pariwisata	1	0	0	0	1
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	0	0	0	1
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	0	1
6	Dinas Ketahanan Pangan	1	0	0	0	1
7	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	3	0	0	0	3
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0	0	0	1	1
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	3	0	3
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	0	0	0	1
11	Dinas Perhubungan	1	0	0	0	1
12	Dinas Pertanian Dan Perikanan	2	0	0	0	2
13	Dinas Sosial	2	0	2	0	4
14	Dinas Tenaga Kerja	2	1	1	0	4
15	DPMPTSP	2	0	0	0	2
16	Dinas energi & sumber daya mineral	2	0	0	0	2
17	Dinas Koperasi dan UKM	0	1	0	0	1
	Jumlah	21	2	8	1	32

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru , 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 32 indikator di pilar ekonomi, terdapat 21 indikator atau 65,63% yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, sebanyak 2 indikator atau 6,25% telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Sementara itu terdapat 8 indikator atau 25% tergolong kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan sebesar 1 indikator (3,13 %) yang belum ada data (NA). Tabel di atas menunjukkan Sekretariat Daerah yang memiliki indikator terbanyak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja yaitu masing-masing sebanyak 4 indikator. Untuk melihat secara rinci grafik capaian indikator disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.21 Kontribusi OPD Dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi



2.2.2.3 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 36 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.170 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

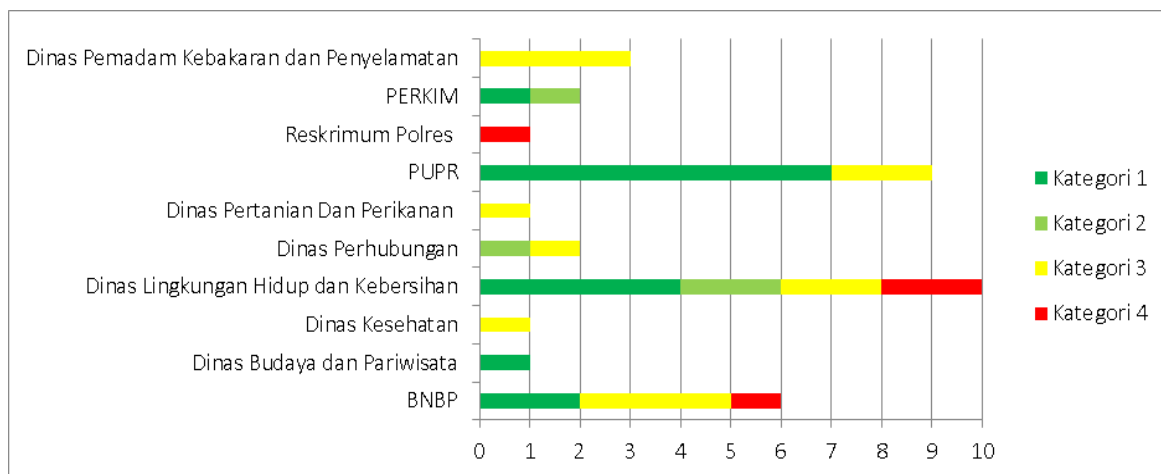
No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	BNBP	2	0	3	1	6
2	Dinas Budaya dan Pariwisata	1	0	0	0	1
3	Dinas Kesehatan	0	0	1	0	1
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4	2	2	2	10
5	Dinas Perhubungan	0	1	1	0	2
6	Dinas Pertanian Dan Perikanan	0	0	1	0	1
7	PUPR	7	0	2	0	9
8	Reskrim Polres	0	0	0	1	1
9	PERKIM	1	1	0	0	2
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	3	0	3
	Jumlah	15	4	13	4	36

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru , 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari total 36 indikator di pilar lingkungan, terdapat 15 indikator atau 41,67% yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dalam RPJMD Kota Pekanbaru. Sedangkan sebanyak 4 indikator atau 11,11% telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Sementara itu, kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 13 indikator atau 36,11%. Sedangkan kategori yang belum/tidak memiliki data sebesar 4 indikator atau 11,11 %.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki indikator terbanyak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan yaitu sebanyak 10 indikator. Grafik capaian indikator disajikan pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.22 Kontribusi OPD dalam capaian indikator Pilar Lingkungan



2.2.2.4 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yang berbunyi perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 29 indikator. Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.171 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	BAPPEDA	0	0	1	0	1
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	1	0	3
3	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	2	0	0	0	2
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	6	0	7
5	Inspektorat Kota Pekanbaru	2	0	0	0	2
6	Reskrimum Polres	1	0	3	0	4
7	Sekretariat Daerah	4	0	1	0	5
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	1
9	Balitbang Daerah	0	0	1	0	1
10	BPS	0	0	2	0	2
11	Pengadilan Tinggi	0	0	1	0	1
	Jumlah	12	0	17	0	29

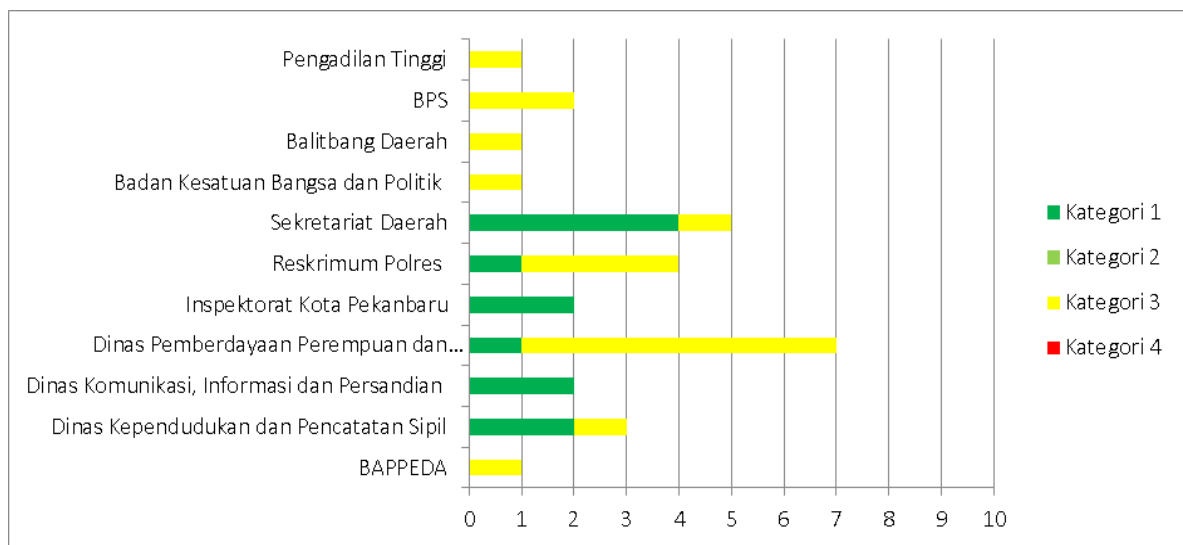
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekanbaru , 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari total 29 indikator di pilar hukum dan tata kelola, terdapat 12 indikator atau 41,38% yang telah dilakukan dan telah mencapai target nasional

dan 17 indikator atau 58,62% tergolong dalam kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Sedangkan tidak terdapat indikator pada kategori yang telah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target dan kategori yang belum/tidak memiliki data (NA).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Sekretariat Daerah yang memiliki indikator terbanyak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar hukum dan tata kelola dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak masing-masing 5 dan 7 indikator. Untuk melihat secara rinci grafik capaian indikator dalam sosial disajikan pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.23 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola



2.3 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat ini memiliki 3 (tiga) BUMD, yaitu :

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak, dengan bidang usaha penyediaan air minum Kota Pekanbaru. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru(PT.BPR Pekanbaru) dengan Bidang Usaha Perbankan. PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (PT. SPP) dengan bidang usaha (Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Transportasi, Pertanian, Pertambangan, Perbengkelan, Percetakan dan Pengelolaan Kawasan Industri Tenayan).

Adapun PT. SPP ini mempunyai anak perusahaan, yaitu :PT. Sarana Pangan Madani (PT. SPM) dengan bidang usaha Pengelolaan Pasar dan Perdagangan komodititer Utama Pangan, PT. Transportasi Pekanbaru Madani (PT. TPM) dengan bidang usaha mengelola layanan Trasnportasi Perkotaan SAUM Trans Metro Pekanbaru dan jenis layanan lainnya.

Selama ini Kinerja BUMD tersebut di atas menunjukkan kemajuan, baik berupa asset, pendapatan dan laba bersih, dengan pertimbangan ini maka perlu dilakukan pengembangan struktur

kelembagaan dan juga pengembangan bidang usaha lainnya yang berpotensi pada masa yang akan datang, namun demikian kondisi objektif yang ada juga tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi masing - masing BUMD.

2.4 Kerjasama Daerah

2.4.1 Kerjasama antar Daerah

Pengembangan Kawasan PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan) dimaksudkan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, percepatan pengembangan daerah perbatasan, pengelolaan potensi daerah dengan saling menguntungkan demi kepentingan masyarakat. Objek kesepakatan bersama ini meliputi: bidang sosial budaya, bidang sosial ekonomi, bidang tata ruang dan lingkungan hidup, dan bidang sarana dan prasarana, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.

Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 km² kini mulai terasa sempit. Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru memfungsikan daerah tetangga Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan sebagai mitra melalui program kerjasama antar daerah berbatasan PEKANSIKAWAN (Pekanbaru, Kampar, Siak dan Pelalawan) merupakan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru dimasa mendatang dengan konsep yang matang dan terstruktur.

Kota Pekanbaru tumbuh menjadi kota besar, kesan metropolitan tampak pada wajah kota bertuah ini. Perubahan kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan tidak dapat berdiri sendiri begitu saja, peran besar kabupaten tetangga sebagai penyangga ibu kota turut berandil dalam memajukan ekonomi kawasan dalam prosesnya bertransformasi menjadi metropolitan.

Konsep PEKANSIKAWAN ini bertujuan untuk membangun kota baru dengan memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dengan begitu, maka kesejahteraan masyarakat Riau semakin meningkat. Pembangunan di kawasan PEKANSIKAWAN menjadi langkah awal dari pembangunan ini yang akan menjadi katalisator utama pengembangan kawasan.

Kawasan PEKANSIKAWAN adalah mencakup wilayah Kota Pekanbaru sebagai kawasan inti (core area) dan kawasan penyangga (buffer zone) yang berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

Pembangunan daerah berbatasan pada kawasan PEKANSIKAWAN adalah merupakan implementasi dari Undang – undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah pasal 3 yang mengisyaratkan Kerjasama daerah berbatasan termasuk kategori Kerjasama Wajib

2.4.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2017, yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Keinginan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam berkontribusi untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang vokasi yang merupakan pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1 namun dibatasi oleh UU khususnya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengelola perguruan tinggi, membuat Kota Pekanbaru harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2017, yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pada tahapan awal ini untuk menjawab kehadiran perguruan tinggi vokasi di Pekanbaru, Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam. Bentuk kerjasamanya menggunakan sistem Program Studi Diluar Kampus utama (PSDKU). Dengan kerjasama ini, Pemerintah Kota Pekanbaru mengharapkan pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru dapat dipercepat.

Kehadiran perguruan tinggi vokasi di Pekanbaru didukung oleh letak geografis yang sangat strategis. Provinsi Riau berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia dan Singapura serta berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Posisi kota Pekanbaru yang tepat berada disentral Riau dan pulau sumatra dan semua infrastruktur jalan tol melewati kota Pekanbaru sehingga menjadi tumpuan investasi masa depan dan akan menjadi pusat logistik, pusat perdagangan serta pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera

Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi/gelar ahli madya. Jika pada pendidikan akademik menekankan ilmu pengetahuan, sekolah vokasi menekankan pembelajaran yang terstruktur dan keahlian yang lebih driven atau terarah. Program Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2.5 Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, social dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang.

Kewajiban pelaksanaan CSR oleh setiap badan usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Penekanan kewajiban pelaksanaan program CSR juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Peraturan Daerah tentang TJSLP ini dibentuk mengingat 5 (lima) tahun terakhir APBD mengalami defisit, sehingga pendapatan daerah tidak maksimal untuk menjalankan fungsi pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mengantisipasi tersebut, diperlukan sumber dana lain yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di kota Pekanbaru yang memperhatikan hak EKOSOS masyarakat. Salah satunya sumber pendapatan lain yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan yang maksimal, dapat dilakukan melalui sumber dana dari TJSLP/CSR.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang memiliki sedikit kekayaan SDA, akan tetapi Kota Pekanbaru merupakan pusat ibu kota propinsi dan sebagai jantung ekonomi dan investasi. Selain itu, terdapat berbagai perseroan yang berkedudukan hukum dan berdomisili di kota Pekanbaru dalam menjalankan bisnis usaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Perseroan tersebut tidak saja bergerak dalam kegiatan usaha pengelolaan SDA melainkan bergerak diluar bidang tersebut.

Perseroan yang bergerak dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan SDA (minyak bumi, kehutanan dan perkebunan) dan terdapat perwakilan domisili hukumnya di Kota Pekanbaru, antara lain bidang migas terdapat PT. Chevron, PT. Siak Pertambangan dan Energi, PT. Global Inspekindo Utama, PT. Vidia Mandiri, PT. Karya Lestari Perkasa, PT. Pura Sangkai Kencana, PT. Riau Muda Jasasarana, PT. Awal Bros, PT. Putra Rokan Gemilang, dan lain-lainnya.

Pelaksanaan CSR di Kota Pekanbaru salah satunya melalui Kontribusi PT. Chevron Pacific Indonesia adalah bukti bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia membutuhkan lisensi sosial dari masyarakat Riau demi menjaga eksistensi operasi mereka terkhususnya di Riau. Fokus program investasi sosial yang dilaksanakan antara lain Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Pengembangan Ekonomi, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kesenian, Budaya dan Infrastruktur Olahraga, Bantuan dan Rehabilitasi Pasca Bencana.

Sesuai dengan nilai-nilai perusahaan Chevron, berinvestasi dalam pendidikan dapat membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. Dengan menyediakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, PT. Chevron Pacific Indonesia mendukung generasi penerus bangsa ini. Program CSR di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia cukup beragam. Sebagian besar berbentuk dana pendidikan (beasiswa) dan sebagiannya lagi pengembangan pendidikan di bidang infrastruktur. Bantuan dalam bentuk beasiswa merupakan program CSR yang paling dominan dan sangat menarik minat masyarakat. Dapat dibuktikan dari begitu antusiasnya partisipasinya masyarakat dalam program-program ini

PT. Chevron Pacific Indonesia bermitra dengan pemerintah daerah untuk membuka sekolah-sekolah politeknik dimana pelajar Indonesia mengembangkan keahlian teknis yang dibutuhkan perekonomian modern. Untuk di Riau sendiri PT. Chevron Pacific Indonesia telah membangun SMA Negeri pertama di Pekanbaru, SMAN 1, dibangun tahun 1957 dan Politeknik Caltex Riau (PCR) yang berlokasi di Rumbai, Pekanbaru. Selain itu PT. CPI juga mengadakan pelatihan kejuruan untuk generasi muda dan pelajar putus sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi pemuda, universitas dan sekolah kejuruan. Skema ini dimaksudkan untuk mendiversifikasi ekonomi masyarakat setempat dan membuka kesempatan kerja dengan meningkatkan keahlian generasi muda.

Salah satu contoh perusahaan yang sudah menerapkan program CSR, yaitu PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru yang berkantor pusat di Jl. Rambutan No.43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai kabupaten di Propinsi Riau ini pada dasarnya merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet.

Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tempatan dan sekaligus membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial, PT.

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru memiliki beberapa jenis program CSR yang telah membantu dan diimplementasikan pada masyarakat yang berada disekitar PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Diantaranya yang terdiri dari berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, sektor kerohanian, sektor sarana dan prasarana.

Sampai saat ini, masih banyak perusahaan yang belum menjalankan program CSR atau belum terdata dan melaporkan program CSR pada perusahaannya. Dengan jumlah perusahaan cukup besar ini jika berperan aktif melaksanakan tanggungjawab social ditengah masyarakat sangat membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.

2.6 Gambaran Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Pekanbaru

Gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah kota pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.172 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekanbaru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar (Target RPJMD)	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1.	Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi								
1.1.1.	Otonomi daerah, pemeritahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian								
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	5,68	6,12	5,39	6,01	-4,38	5,24	7,13	Belum tercapai
1.1.1.2.	Laju Inflasi	4,19	4,07	2,54	2,56	2,24	1,54	5,00	Melampaui
1.1.1.3.	PDRB per kapita	86,78	92,88	97,17	103,87	117,41	127,24	121,917	melampaui
1.1.1.4.	Presentase penduduk miskin	3,07	3,05	2,85	2,86	2,62	2,83	3,04	Melampaui
1.1.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,69	80,66	81,35	81,35	81,32	81,58	80,31	Melampaui
1.2.	Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Pendidikan								
1.2.1.1	Angka rata-rata lama	11,2	11,21	11,22	11,43	11,68	11,92	11,95	Belum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar (Target RPJMD)	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	sekolah								tercapai
1.2.1.2	Angka harapan lama sekolah	14,87	14,93	15,34	15,37	15,54	15,55	14,35	Melampaui
1.2.2	Kesehatan								
1.2.2.1	Angka harapan hidup	71,70	71,75	71,94	72,22	72,34	72,41	71,75	Melampaui
1.2.2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	20.658	21.562	22.007	22.236	22.236	-	22.274	Data belum tersedia
1.2.2.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	29	28	27	13	13	4	29	Belum tercapai
2)	PELAYANAN UMUM								
2.1	Pelayanan urusan wajib								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Pendidikan Dasar								
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah								
2.1.1.1.1.1	Angka partisipasi kasar	113,86	112,44	110,84	104,42	104,63	103,09	109	Belum tercapai
2.1.1.1.1.2	Angka partisipasi murni	94.25	94.50	92,34	92.77	94,02	94,25	98	Belum tercapai
2.1.1.1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah					33	34	-	
2.1.1.1.1.4	Rasio guru/murid sekolah					19,21	18,05	-	
2.1.1.2	Pendidikan menengah								
2.1.1.2.1	Angka partisipasi kasar	95,58	98,09	96,72	94,31	95,36	97,94	96,0	melampaui
2.1.1.2.2	Angka partisipasi murni	77.01	71.93	71.35	72.74	74.96	75,54	80,50	Belum tercapai
2.1.1.2.3	Rasio ketersediaan sekolah					38	40	-	
2.1.1.2.4	Rasio guru/murid sekolah					15,42	14,96	-	
2.1.2	Kesehatan								
2.1.2.1	Rasio Posyandu	5,71	5,65	0,58	0,6	0,6	-	0,03	Data belum tersedia
2.1.2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu	0,21	0,18	0,049	0,21	0,21	-	0,05	Data belum tersedia
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit	0,03	0,03	0,37	0,03	0,03	-	0,03	Data belum tersedia
2.1.2.4	Rasio Dokter per	0,00108	0,00089	0,00084	0,001	0,001	-	0,00066	Data

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar (Target RPJMD)	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Satuan Penduduk								belum tersedia
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.1.3.1	Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)	NA	16,5	34,3	27,89	70,91	70,91	18,00	Melampaui
2.1.3.2	Cakupan Air Bersih (%)	4,9	5,3	5,5	4,7	4,7	4,7	7	Belum tercapai
2.1.3.3	Persentase ruang terbuka hijau (%)	NA	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	5	Belum tercapai
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
2.1.4.1	Persentase penurunan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	NA	16,5	34,3	27,89	14,57	18,00	18,00	Sesuai
2.1.4.2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (Ha)	NA	18,82	56,01	95,52	97,01	104,59	26,14	Melampaui
2.1.5	Penanaman Modal								
2.1.5.1	Nilai Investasi PMDN (Rp Milyar)	694,715	927,36	277,041	1.052,87	2.534,74	2.208,05	2.000	Melampaui
2.1.5.2	Nilai Investasi PMA (Rp Milyar)	129,09	171,42	380,61	556,32	2.657,17	1.897,77	70	Melampaui
2.1.6	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
2.1.6.1	Persentase Koperasi Aktif (%)	NA	39,23	37,19	38,10	40,07	40,97	57	Belum tercapai
2.1.7	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
2.1.7.1	Jumlah Penduduk (orang)	1.064.566	1.091.088	1.117.359	1,143,359	983.356	994.585	1.150.899	Belum tercapai
2.1.7.2	Laju Pertumbuhan penduduk (%)	2,55	2,49	2,70	2,86	0,89	1,53	2,70	Belum tercapai
2.1.7.3	Rasio Jumlah penduduk ber KTP (%)	88,76	85,81	85,19	99,73	100	100	90,00	Melampaui
2.1.8	Tenaga Kerja								
2.1.8.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,46	8,91	8,42	7,86	8,56	8,29	7,53	Belum Tercapai
2.1.8.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63,04	64,22	65,70	66,12	65,22	61,61	68,13	Belum tercapai
2.1.8.3	Rasio penduduk yang bekerja (%)	92,54	NA	NA	92,14	91,44	97,71	93,00	Melampaui
2.1.8.4	Persentase tenaga kerja yang	NA	NA	NA	65,66	65,66	65,66	67,44	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar (Target RPJMD)	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	bersertifikat (%)								
2.1.8.5	Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	NA	NA	NA	42,97	42,97	42,97	42,00	Melampaui
2.1.8.6	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama & Anjuran	NA	NA	NA	95,87	95,87	95,87	79,00	Melampaui
2.1.9	Sosial								
2.1.9.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	NA	62,38	76,69	61,55	84,34	73,06	50,00	Melampaui
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan								
2.2.1	Pertanian								
2.2.1.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	1,63	1,60	1,59	1,54	1,68	1,65	1,38	Melampaui
2.2.2	Ketahanan Pangan								
2.2.2.1	Ketersediaan energy per kapita (KKal/Kap/Hari)	2.595	2.256	2.281	2.281	2.281	-	2.150	Data belum tersedia
2.2.2.2	Ketersediaan protein per kapita (KKal/Kap/Hari)	86,6	71,9	80,4	80,4	80,4	-	57,0	Data belum tersedia
2.2.3	Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.2.3.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	97,84	100	99,76	100	100	100	100	Sesuai
2.2.4	Perdagangan								
2.2.4.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Pekanbaru (%)	29,68	30,47	30,40	31,41	29,23	29,94	31,41	Belum tercapai
2.2.4.2	Nilai Ekspor Bersih Kota Pekanbaru (US\$)	14.802.096	11.972.754	16.794.926	13.767.978	20.228.809	6.252.952	13.767.970	Belum tercapai
2.2.5	Perindustrian								
2.2.5.1	Jumlah IKM Formal dan Non Formal di Kota Pekanbaru (Unit)	NA	2.048	2.139	2.191	2.271	2.574	4.441	Belum tercapai
2.2.6	Kelautan dan Perikanan								
2.2.6.1	Produksi Ikan (Ton)	NA	8.430	8.430	8.897	8.897	-	6,7	Data belum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar (Target RPJMD)	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
									tersedia
3)	DAYA SAING DAERAH								
3.1	Kemampuan Ekonomi								
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. 197.054.830,61 per kapita/tahun	Rp. 209.695.804,02 per kapita/tahun	Rp. 216.917.031,06 per kapita/tahun	Rp. 223.629.403,85 per kapita/tahun	Rp. 223.860.693,62 per kapita/tahun	Rp. 234.625.997,98 per kapita/tahun	-	
3.1.1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	58.43 %	56.72 %	NA	NA	NA	-	-	
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
3.2.1	Perhubungan								
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	NA	1,38 %	1,33 %	1,33 %	1,33 %	1,33%	3,6%	Belum tercapai
3.3	Iklim Berinvestasi								
3.3.1.	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	NA	70,75 %	50,19	65,21	62,23	62,23	11,80	Melampaui
3.4	Sumber Daya Manusia								
3.4.1	Administrasi Keuangan Daerah								
3.4.1.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai

BAB III

KERANGKA KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada *self-supporting* dalam bidang keuangan, termasuk didalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*). Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (1) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (2) investasi pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota; dan (3) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah mengandung prinsip dasar yakni: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan kebijakan perimbangan keuangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan memegang prinsip: (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Penyerahan dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah akan diikuti dengan pemberian pembiayaan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Artinya pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan ataupun pelimpahan wewenang lainnya selalu diikuti dengan penyerahan pembiayaan. Demikian juga halnya dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota harus diikuti dengan penyerahan pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan maka dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023 -2026 diperlukan analisis kinerja keuangan Kota Pekanbaru. Analisis kinerja keuangan masa lalu dan proyeksinya ke depan perlu dilakukan untuk merumuskan pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru yang lebih akurat untuk masa mendatang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kota Pekanbaru, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kota Pekanbaru tahun 2012-2016, serta kinerja keuangan Kota Pekanbaru 2 tahun awal pada periode RPJMD tahun 2017-2022. Secara berturut-turut pada sub-bagian ini akan dijelaskan tentang kinerja keuangan Kota Pekanbaru, mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam kedua Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.1 menyajikan rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017-2022. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 3,50 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 9,52 persen diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar 1,61 persen per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru periode RPD Tahun 2023-2026, Anggaran Pendapatan Daerah sebesar 5,51 persen diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah 5,00 persen pertahun.

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

No	Uraian	PERIODE RPJMD 2017-2022						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Target)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.	PENDAPATAN	2.171.590.365.093	2.235.018.502.739	2.369.118.059.823	2.338.992.907.604	2.337.605.186.326	2.560.112.574.847	3,50
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	697.466.656.720	592.707.161.812	710.129.196.650	618.046.995.965	684.642.966.382	928.999.757.083	9,52
4.1.01.	Pajak Daerah	491.414.599.924	498.878.670.092	620.947.968.666	537.816.314.288	587.504.311.853	742.850.000.000	11,33
4.1.02.	Retribusi Daerah	56.859.163.538	47.964.356.740	35.970.866.667	30.512.966.997	23.162.869.063	111.649.757.083	33,63
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.461.530.656	4.756.435.349	4.640.172.597	3.578.402.212	4.056.322.578	4.500.000.000	2,20
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	144.731.362.602	41.107.699.631	48.570.188.720	46.139.312.468	69.919.462.888	70.000.000.000	1,61
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.474.123.708.373	1.545.885.460.927	1.559.911.518.142	1.600.701.692.238	1.549.702.968.074	1.631.112.817.764	2,13
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.222.248.651.620	1.304.487.744.503	1.316.972.458.679	1.360.963.511.083	1.287.025.703.524	1.396.562.837.000	2,87
4.2.01.01.	Dana perimbangan	1.222.248.651.620	1.277.237.744.503	1.304.793.092.679	1.307.245.078.083	1.264.787.491.524	1.396.562.837.000	- 19,62
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	232.710.474.963	266.167.666.922	212.983.538.700	303.609.489.988	217.325.959.535	209.767.099.000	- 21,27
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	784.376.941.000	798.138.148.000	858.748.583.000	810.814.967.000	800.145.136.000	800.145.136.000	- 19,51
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	205.161.235.657	212.931.929.581	233.060.970.979	192.820.621.095	81.152.542.747	66.367.493.000	- 31,28
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	-	166.163.853.242	320.283.109.000	-
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	-	27.250.000.000	12.179.366.000	53.718.433.000	22.238.212.000	-	-
4.2.01.02.01.	DID	-	27.250.000.000	12.179.366.000	53.718.433.000	22.238.212.000	-	-
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	251.875.056.753	241.397.716.424	242.939.059.463	239.738.181.155	262.677.264.550	234.549.980.764	- 1,32
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	212.637.357.902	234.017.716.424	234.549.980.764	205.292.421.155	246.060.987.376	-	- 17,59
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	212.637.357.902	234.017.716.424	234.549.980.764	205.292.421.155	246.060.987.376	-	- 17,59
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	39.237.698.851	7.380.000.000	8.389.078.699	34.445.760.000	16.616.277.174	-	19,34
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	39.237.698.851	7.380.000.000	8.389.078.699	34.445.760.000	16.616.277.174	-	19,34
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	PERIODE RPJMD 2017-2022						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Target)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.3.	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	96.425.880.000	99.077.345.031	120.244.219.401	103.259.251.870	-	20,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	96.425.880.000	99.077.345.031	120.244.219.401	-	-	-
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	96.425.880.000	99.077.345.031	120.244.219.401	-	-	-
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	96.425.880.000	99.077.345.031	120.244.219.401	-	-	-
4.3.03.	Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	103.259.251.870	-	20,00
4.3.03.01.	Lain lain Pendapatan	-	-	-	-	103.259.251.870	-	20,00
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-	103.256.103.870	-	20,00
4.3.03.01.02.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	-	-	-	3.148.000	-	-
5.	BELANJA DAERAH	2.152.172.723.978	2.220.359.504.220	1.834.291.017.148	1.883.129.143.266	2.650.042.024.204	2.552.262.574.847	5,15
	Belanja	2.152.172.723.978	2.220.359.504.220	-	-	-	-	19,37
	Belanja Tidak Langsung	935.717.012.075	916.732.816.552	-	-	-	-	20,41
	Belanja Pegawai	907.927.022.618	894.864.466.960	-	-	-	-	20,29
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	20,00
	Belanja Hibah	23.610.116.479	17.325.400.350	-	-	-	-	25,32
	Belanja Bantuan Sosial	1.030.750.000	1.380.000.000	-	-	-	-	13,22
	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	999.885.800	999.885.800	-	-	-	-	20,00
	Belanja Tak Terduga	149.237.178	163.063.442	-	-	-	-	18,15
	Belanja Langsung	1.216.455.711.903	1.303.626.687.668	-	-	-	-	18,57
	Belanja Pegawai	208.816.488.204	24.215.550.800	-	-	-	-	37,68
	Belanja Barang dan Jasa	541.065.378.071	748.262.271.693	-	-	-	-	12,34
	Belanja Modal	466.573.845.628	531.148.865.175	-	-	-	-	17,23

No	Uraian	PERIODE RPJMD 2017-2022						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Target)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.1.	BELANJA OPERASI	-	-	1.834.291.017.148	1.883.129.143.266	2.144.732.714.390	2.163.668.995.302	3,55
5.1.01.	Belanja Pegawai	-	-	976.732.808.429	841.455.523.876	918.964.301.031	946.705.141.510	- 0,32
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	524.876.937.464	-	20,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	-	-	-	188.583.857.579	-	20,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	169.212.339.501	-	20,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	34.996.607.396	-	20,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	181.439.091	-	20,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	1.113.120.000	-	20,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	815.388.056.511	996.393.302.576	1.180.599.617.082	1.115.790.978.472	7,16
5.1.02.01.	Belanja Barang	-	-	815.388.056.511	996.393.302.576	269.388.198.246	1.115.790.978.472	53,21
5.1.02.02.	Belanja Jasa	-	-	-	-	550.110.268.580	-	20,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-	71.067.220.248	-	20,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	-	-	-	-	55.999.107.378	-	20,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	115.216.960.463	-	20,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	93.263.133.720	-	20,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	25.554.728.447	-	20,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	18.251.311.258	19.761.662.130	22.588.937.641	10.000.000.000	- 6,63
5.1.04.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	-	-	18.251.311.258	19.761.662.130	22.588.937.641	10.000.000.000	- 6,63
5.1.05.	Belanja Hibah	-	-	21.206.340.950	24.315.067.058	22.509.858.636	91.172.875.320	62,45
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	1.566.615.360	-	20,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	19.739.655.650	-	20,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-	1.203.587.626	-	20,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	2.712.500.000	1.203.587.626	70.000.000	-	49,96
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	2.712.500.000	-	70.000.000	-	40,00
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	1.203.587.626	-	-	20,00

No	Uraian	PERIODE RPJMD 2017-2022						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Target)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.2.	BELANJA MODAL	-	-	-	-	486.309.309.814	368.643.579.545	- 4,82
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	14.515.822.458	11.405.672.346	- 4,29
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	14.515.822.458	11.405.672.346	- 4,29
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	111.425.858.423	118.328.523.491	1,29
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	7.401.263.607	-	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	-	3.248.976.000	-	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	2.215.029.287	-	-
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	412.398.550	-	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-	38.692.992.893	-	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-	6.300.096.485	-	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	16.163.610.100	-	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	9.694.290.909	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	-	13.827.262.150	-	-
5.2.02.13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	444.000.000	-	-
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu Rambu	-	-	-	-	1.651.444.000	-	-
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	70.000.000	-	-
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	9.101.440.041	-	-
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	-	2.203.054.401	-	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	165.850.577.360	90.533.595.033	- 9,06
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	-	163.726.843.458	-	-
5.2.03.02.	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-	44.327.000	-	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-	835.051.300	-	-
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	-	1.244.355.602	-	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	190.251.261.934	138.235.996.775	- 5,47
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	146.243.037.984	-	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	-	30.792.892.500	-	-
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	-	1.350.000.000	-	-
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-	11.865.331.450	-	-

No	Uraian	PERIODE RPJMD 2017-2022						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Target)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.2.	BELANJA MODAL	-	-	-	-	486.309.309.814	368.643.579.545	- 4,82
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	4.265.789.639	10.139.791.900	27,54
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	94.343.872	-	-
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-	578.407.400	-	-
5.2.05.03.	Belanja Modal Hewan	-	-	-	-	61.600.000	-	-
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	1.072.872.000	-	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	1.116.478.800	-	-
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	-	1.342.087.567	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	19.000.000.000	19.950.000.000	1,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	19.000.000.000	19.950.000.000	1,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	19.000.000.000	19.950.000.000	1,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	105.227.424.624	422.225.351.420	-	-	12.148.667.545	-	20,25
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	12.148.667.545	-	20,25
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	-	-	-	-	12.148.667.545	-	20,25
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.807.892.423	20.000.000.000	-	-	-	7.850.000.000	- 23,88
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
6.2.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	7.850.000.000	-
6.2.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	-	-	7.850.000.000	-

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2021 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Sehubungan dengan Neraca Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana per tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Dapat disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pekanbaru

No	Uraian	PERIODE RPJMD 2017-2022					
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp) milyar	(Rp) milyar	(Rp) milyar	(Rp) milyar	(Rp) milyar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	ASET	7,398,075,505,045	6,581,493,031,217	7,548,887,211,908	7,788,230,299,031	7,785,199,370,017	1.70
1.1.	ASET LANCAR	169,583,986,096	893,175,404,813	285,287,241,704	296,186,072,604	223,060,375,808	84.44
1.1.1.	Kas	11,599,585,544	459,370,084,141	15,294,541,722	12,706,052,995	31,459,390,242	973.56
1.1.2.	Piutang	126,047,573,761	396,677,495,052	222,166,614,618	210,293,360,025	92,569,209,966	27.35
1.1.3.	Persediaan	31,936,826,791	37,127,825,620	285,287,241,704	73,186,659,585	99,031,775,601	161.40
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	116,780,932,646	42,601,768,478	112,753,536,563	236,699,299,290	229,763,680,146	52.04
1.2.1.	Investasi Non permanen	-	4,459,231,562	0	-	-	-
1.2.2.	Investasi Permanen	116,780,932,646	38,142,536,916	112,753,536,563	236,699,299,290	229,763,680,146	58.82
	ASET TETAP	4,402,824,795,007	6,571,047,089,436	6,903,051,777,620.41	7,003,688,736,042	7,082,010,697,038	14.22
	Tanah	1,126,548,341,618	3,022,821,168,495	3,121,749,179,085.00	3,185,099,372,800	3,243,057,047,820	43.86
	Peralatan dan Mesin	646,858,009,478	760,038,032,817	894,490,045,864.80	1,009,862,594,067	1,111,505,389,386	14.54
	Gedung dan Bangunan	1,183,103,772,658	1,418,679,552,481	1,594,114,734,338.61	2,053,811,841,233	2,185,774,843,441	16.89
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,917,765,327,802	4,134,942,282,057	4,255,573,548,216.25	4,411,667,152,683	4,537,268,289,385	3.74
	Aset Tetap Lainnya	29,380,061,491	30,887,796,710	36,238,498,312.00	49,899,834,177	52,632,310,782	16.41
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	675,517,761,774	592,936,481,744	727,144,688,629.75	323,140,719,176	329,546,057,978	-10.79
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-3,176,348,479,814	-3,389,258,224,868	-3,726,258,916,826.00	-4,029,792,778,093	-4,377,773,241,754	8.36
	ASET LAINNYA	538,924,864,271	540,663,496,867	247,794,656,021.00	251,656,191,095	250,364,617,024	-13.20
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	0	-	-	-
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	0	-	-	-
	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	-	-	0	-	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	154,659,645,032	154,659,645,032	154,659,645,032.00	154,659,645,032	154,659,645,032	-
	Aset Tak Berwujud	12,023,308,250	13,996,552,184	15,910,102,863.00	21,771,950,501	23,916,692,391	19.19
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-5,998,954,536	-5,551,830,892	-11,422,992,095.00	13,401,037,659	16,837,353,620	35.31
	Aset Lain-lain	552,880,889,378	550,980,433,396	266,425,854,952.00	266,403,587,952	88,625,633,221	-29.68
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-174,640,023,853	-173,421,302,853	-177,777,954,731.00	177,777,954,731	-	-24.55
	JUMLAH ASET	5,259,687,878,073	7,398,075,505,045	7,548,887,211,908.94	7,788,230,299,031	7,785,199,370,017	11.46
	KEWAJIBAN	212,324,697,036	250,393,338,637	312,973,642,895.72	301,875,011,266	240,664,762,597	4.77
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	212,319,417,036	250,393,338,637	312,973,642,895.72	301,875,011,266	240,664,762,597	4.78
	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	298,732,210	166,071,244	927,783.00	557,385,450	501,424,749	14,955.81
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	8,726,250	6,086,250	-	-	48,262,500	7.56
	Utang Belanja	173,035,886,070	162,053,435,792	143,924,171,733.72	184,673,860,955	217,986,857,034	7.20
	Utang Jangka Pendek Lainnya	38,976,072,506	88,167,745,351	169,048,543,379.00	116,643,764,861	22,128,218,314	26.48

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2021 (diolah)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma pengelolaan Otonomi Daerah tidak terpisahkan terhadap perubahan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menjadikan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komperabilitas, akurat, efisien dan efektif.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD memiliki 6 fungsi, yakni:

1. Fungsi otorisasi yang berarti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi yang berarti anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang berarti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang berarti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru selama Periode 2017-2022 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengatur kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 4).

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat, masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, sementara Alokasi Dana yang diterima Pemerintah Daerah proporsinya belum signifikan dengan kebutuhan belanja daerah, ditambah lagi dengan adanya kecenderungan penurunan jumlah dana perimbangan dari pusat ke daerah.

Penggunaan anggaran tidak saja ditujukan untuk pembiayaan pembangunan tetapi juga digunakan dalam pemenuhan kebutuhan aparatur daerah. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekanbaru

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp.)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100
1.	Tahun Anggaran 2016	958,138,369,450	2,025,563,454,217	47.30
2.	Tahun Anggaran 2017	908,925,106,417	2,152,172,723,978	42.23
3.	Tahun Anggaran 2018	907,826,555,060	2,220,359,504,220	40.89
4.	Tahun Anggaran 2019	976,732,808,429	2,365,257,960,185	41.29
5.	Tahun Anggaran 2020	841,455,523,876	2,341,148,780,840	35.94
6.	Tahun Anggaran 2021**	864,771,305,920	2,318,795,888,378	37.29

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2021 diolah

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjelaskan tentang Pembiayaan Daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.4. Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru

No	Uraian	(2019) (Rp.)	(2020) (Rp.)	(2021) (Rp.)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.369.118.059.824	2.338.992.907.604	2.337.605.186.326
	Penerimaan Pembiayaan	11.433.514.300	15.293.613.940	12.148.667.545
	Dikurangi realisasi			
2.	Belanja Daerah	2.365.257.960.185	2.341.148.780.840	2.318.795.888.378
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1.000.000.000	-
	Defisit Riil	15.293.613.940	12.137.740.704	30.957.965.493

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2019, 2020 dan 2021 diolah

Tabel 3.5. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru

No	Uraian	Proporsi dari total Defisit Riil		
		(2019) (%)	(2020) (%)	(2021**) (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	11.433.514.300	15.293.613.940	12.148.667.545
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4.640.172.597	3.578.402.212	4.056.322.578
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2019, 2020 dan 2021 diolah

Tabel 3.6. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekanbaru

No	Uraian	2019		2020		2021**	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	15.293.613.939	100	12.137.740.704	100	30.957.965.493	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	11.433.514.300	100	15.293.613.940	100	12.148.667.545	100
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2019, 2020 dan 2021 diolah

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Setelah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas, berikutnya dilakukan pengalokasian sumber penerimaan tersebut ke pos-pos belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pengalokasian masing-masing sumber penerimaan memiliki sejumlah kebijakan yang harus diperhatikan, antara lain: (a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan retribusi pajak dipungut; (b)

Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah; (c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah; (d) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan, dan; (e) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat; (f) Penerimaan pembiayaan, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya, penerimaan Pinjaman Daerah Non Konvensional berupa pinjaman keuangan syariah, Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan pembiayaan sumber lainnya, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama.

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun.

Struktur proyeksi pendapatan dan belanja daerah belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.7. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023–2026 Kota Pekanbaru

NO	Uraian	Proyeksi Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.526.646.968.677	2.633.264.379.962	2.828.423.088.860	2.966.721.126.602
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	819.259.040.125	860.542.185.082	987.099.914.336	1.053.366.923.452
4.1.01.	Pajak Daerah	690.915.054.333	725.781.000.000	845.600.670.000	904.792.716.900
4.1.02.	Retribusi Daerah	50.118.985.792	52.624.935.082	55.256.181.836	58.018.990.927
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.725.000.000	4.961.250.000	5.209.312.500	5.469.778.125
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.500.000.000	77.175.000.000	81.033.750.000	85.085.437.500
4.2.	Pendapatan Transfer	1.707.387.928.552	1.772.722.194.880	1.841.323.174.524	1.913.354.203.150
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.447.058.448.750	1.500.078.841.088	1.555.750.253.042	1.614.205.235.594
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.447.058.448.750	1.500.078.841.088	1.555.750.253.042	1.614.205.235.594
4.2.01.01.01.	Dana Bagi Hasil (DBH)	220.255.453.950	231.268.226.648	242.831.637.980	254.973.219.879
4.2.01.01.02.	Dana Alokasi Umum (DAU)	840.152.392.800	882.160.012.440	926.268.013.062	972.581.413.715
4.2.01.01.03.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.367.493.000	66.367.493.000	66.367.493.000	66.367.493.000
4.2.01.01.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	320.283.109.000	320.283.109.000	320.283.109.000	320.283.109.000
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
4.2.01.02.01.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	260.329.479.802	272.643.353.792	285.572.921.482	299.148.967.556
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	246.277.479.802	258.591.353.792	271.520.921.482	285.096.967.556
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	14.052.000.000	14.052.000.000	14.052.000.000	14.052.000.000
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-

NO	Uraian	Proyeksi Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	2.526.646.968.677	2.633.264.379.962	2.828.423.088.860	2.966.721.126.602
5.1	BELANJA OPERASI	2.122.872.271.306	2.214.137.301.401	2.381.194.119.103	2.499.577.921.753
5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.893.031.177	1.073.673.022.789	1.147.755.518.343	1.201.259.817.946
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.128.889.308	1.036.400.523.207	1.121.662.384.615	1.181.076.499.043
5.1.04	Belanja Subsidi	9.869.280.724	10.285.736.674	11.048.041.858	11.588.244.813
5.1.05	Belanja Hibah	89.981.070.097	93.778.018.732	100.728.174.287	105.653.359.951
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	2.122.872.271.306	2.214.137.301.401	2.381.194.119.103	2.499.577.921.753
5.2	BELANJA MODAL	363.824.697.371	379.177.078.561	407.278.969.757	427.193.204.849
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.256.578.223	11.731.574.234	12.601.034.550	13.217.172.340
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan mesin	116.781.741.602	121.709.603.360	130.729.848.055	137.121.989.857
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.350.146.435	93.120.471.862	100.021.894.750	104.912.546.304
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.428.985.836	142.185.906.164	152.723.707.868	160.191.257.259
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	10.007.245.275	10.429.522.941	11.202.484.534	11.750.239.089
	Jumlah Belanja Modal	363.824.697.371	379.177.078.561	407.278.969.757	427.193.204.849
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.950.000.000	19.950.000.000	19.950.000.000	19.950.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.950.000.000	19.950.000.000	19.950.000.000	19.950.000.000
	Jumlah Belanja Tidak terduga	19.950.000.000	19.950.000.000	19.950.000.000	19.950.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.z.	Pembiayaan Netto	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru diolah

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.8. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026**

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	2.526.646.968.677	2.633.264.379.961	2.828.423.088.859	2.966.721.126.602
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0	0	0	0
	Total Penerimaan	2.526.646.968.677	2.633.264.379.961	2.828.423.088.859	2.966.721.126.602
	Dikurangi	1.051.893.031.177	1.093.673.022.789	1.167.755.518.343	1.221.259.817.946
4	Belanja Pegawai	1.031.893.031.177	1.073.673.022.789	1.147.755.518.343	1.201.259.817.946
5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.474.753.937.500	1.539.591.357.172	1.660.667.570.516	1.745.461.308.656

**Tabel 3.9. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2023-2026**

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.474.753.937.500	1.539.591.357.172	1.660.667.570.516	1.745.461.308.656
2	Perioritas I	884.852.362.500	923.754.814.303	996.400.542.310	1.047.276.785.194
3	Perioritas II	589.901.575.000	615.836.542.869	664.267.028.206	698.184.523.462

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah (PD). Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari data yang didapatkan sehingga menjadi agenda utama dalam perencanaan menengah, permasalahan Pembangunan yang ada adalah sebagai berikut :

4.1.1. Urusan Pendidikan

Permasalahan terkait Urusan Pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu ;

- a. Masih belum optimalnya daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan khususnya jenjang pendidikan SMP ;
- b. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Belum optimalnya tingkat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Belum meratanya mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut

4.1.2. Urusan Kesehatan

Permasalahan terkait Urusan Kesehatan di Kota Pekanbaru yaitu ;

- a. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
- b. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, Puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan.

- d. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan lain-lain.
- e. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan.

4.1.3. Urusan Kebudayaan

Permasalahan terkait Urusan Kebudayaan di Kota Pekanbaru yaitu ;

- a. Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- b. Belum optimalnya pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

4.1.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- a. Masih banyaknya jumlah titik genangan yang belum terselesaikan
- b. Rendahnya kuantitas ketersediaan air bersih perpipaan
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana jalan.
- d. Belum beroperasinya layanan pengolahan limbah domestik perpipaan di Kota Pekanbaru

4.1.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan terkait Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah

- a. Masih luasnya pemukiman kumuh yang harus ditangani.
- b. Masih rendahnya layanan Sanitasi Dasar (Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Masih rendahnya layanan sarana dan prasarana Air Bersih Skala Lingkungan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

4.1.6. Urusan Tenaga Kerja

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Tenaga Kerja antara lain:

- a. Tingginya jumlah penduduk usia kerja Kota Pekanbaru (Usia 15-64 Tahun) sebesar 492.354 jiwa pada tahun 2021.
- b. Angka pengangguran terbuka masih tinggi, dimana pada tahun 2021 tercatat mencapai angka 44.503 jiwa atau 8,29 persen
- c. Adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi covid-19.
- d. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran.

- e. Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan. Kurangnya soft skill tenaga kerja lokal dalam dunia kerja.
- f. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama)

4.1.7. Urusan Sosial

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Sosial antara lain:

- a. Perlunya pemutakhiran pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi, agar bantuan sosial tepat sasaran.
- b. Masih ditemukannya PPKS yang bukan penduduk Kota Pekanbaru
- c. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- d. Belum optimalnya program penanganan PPKS, dilihat dari banyaknya PPKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum memproduksi

4.1.8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pangan

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pangan antara lain:

- a. Rendahnya kapasitas Wirausaha (*Entrepreneur*)
masih belum memiliki kesiapan (pengalaman) yang baik, serta kurang memiliki inovasi. Wirausaha baru (*entrepreneur*) masih belum memiliki pandangan luas dan modern khususnya dalam manajemen dan peningkatan kualitas produk serta pengembangan usahanya,
- b. Rendahnya persentase Koperasi Aktif,
jumlah koperasi yang ada masih didominasi oleh koperasi yang tidak aktif mencapai 657 koperasi atau sebesar 59,03%.

4.1.9. Urusan Ketahanan pangan

Permasalahan Ketahanan Pangan di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jumlah penduduk yang tinggi
- b. Ketergantungan Pasokan pangan dari luar Kota Pekanbaru
- c. Perubahan Iklim (Climate Change)
- d. Fluktuasi Harga produk pangan utama

- e. Laju pertumbuhan konsumsi pangan
- f. Gangguan infrastruktur/transportasi dari daerah pemasok bahan pangan
- g. Tekanan perkembangan industri Non Pertanian
- h. Terbatasnya Lingkungan pendukung bagi produksi tanaman dan ternak sumber pangan
- i. Produktivitas Tanaman pangan masih Rendah
- j. Perkembangan Keberagaman Pola Konsumsi masyarakat yang rendah dan berjalan lambat
- k. Terbatasnya tenaga kerja bidang pertanian
- l. Alih Fungsi Lahan

4.1.10. Urusan Pariwisata

Permasalahan terkait Urusan Pariwisata yaitu;

- a. Penurunan jumlah wisatawan asing dan wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun,
- b. Belum optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif,
- c. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pariwisata
- d. Masih terbatasnya SDM pariwisata dan SDM ekonomi kreatif.

4.1.11. Urusan Komunikasi dan Informatika

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Belum optimal Penerapan *e-government* dalam menunjang Reformasi Birokrasi.
- b. Masih rendahnya SPBE untuk pelayanan publik.
- c. Masih kurangnya fasilitas jaringan internet pada area publik

4.1.12. Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Volume sampah yang ditangani jauh dibawah dari volume sampah yang dihasilkan masyarakat.
- b. Masih Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik yang di kelola.
- c. Pencemaran Air Permukaan yang cukup massif karena sungai masih dianggap tempat pembuangan sampah dan limbah
- d. Belum terintegrasinya pengelolaan hutan kota menjadi kawasan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem, pengurangan resiko banjir, dan sarana rekreasi kota.

4.1.13. Urusan Penanggulangan Bencana

Permasalahan terkait Urusan Penanggulangan Bencana ;

- a. Masih Rentannya Kota Pekanbaru terhadap bencana banjir di musim hujan,
- b. Masih Rentannya Kota Pekanbaru terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Hal ini didukung dengan 60 persen luasnya lahan gambut di Kota Pekanbaru.

4.1.14. Perhubungan

Permasalahan terkait Urusan Perhubungan adalah :

Keterjangkauan Trayek Angkutan Umum menjadi persoalan dalam hal konektivitas terkait urusan Perhubungan karena :

- a. Pelayanan angkutan umum massal hanya dapat menjangkau jalan – jalan besar, belum dapat mengakses jalan – jalan kecil dikarenakan angkutan umum massal yang digunakan adalah angkutan bus besar.
- b. Belum adanya angkutan feeder yang belum dapat dijangkau oleh trayek utama.

4.1.15. Urusan Perdagangan

Adapun permasalahan utama urusan perdagangan, sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya database urusan perdagangan yang valid;
- b. Belum optimalnya kerjasama dengan kementerian terkait, BUMN, antar daerah dalam provinsi, antar daerah luar provinsi serta pihak swasta dalam urusan perdagangan;
- c. Belum memadainya infrastruktur penunjang sektor perdagangan;
- d. Masih rendahnya daya saing produk (bahan baku, kualitas, biaya produksi, kemasan, design, diversifikasi produk);
- e. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap tertib ukur;
- f. Belum tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru.

4.1.16. Urusan Perindustrian

Permasalahan Urusan Perindustrian di Kota Pekanbaru adalah menjadikan Kawasan Industri Tenayan menjadi Kawasan potensial untuk berinvestasi dimasa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pengelolaan Kawasan Industri Tenayan, meliputi:

1. Belum optimalnya jaminan dan kepastian berusaha bagi investor;
2. Masih kurangnya penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
3. Belum optimalnya iklim yang kondusif bagi investor.

4.1.17. Urusan Kesatuan Bangsa

Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa adalah Persiapan Pemilu 2024. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada akan digelar pada November 2024. Permasalahan yang akan dihadapi adalah :

- a. Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan memakan anggaran dana yang cukup besar dan sudah dimulai pada tahun 2023.
- b. Kontestasi politik ini biasanya menyebabkan suhu Politik akan naik sehingga rentan Persoalan masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
- c. Para kontestan partai Politik rentan membuat isu-isu politik yang tidak baik,

4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kota Pekanbaru merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional, dan regional Provinsi Riau. Isu strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Pekanbaru kedepan. Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat penting dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Isu strategis Kota Pekanbaru sebagai berikut:

4.2.1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people center development*) mendasari isu ini. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara atau daerah. Investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variabel yang bisa mengilustrasikan isu ini antara lain:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru;
- c. Mempromosikan budaya hidup sehat di tengah masyarakat;
- d. Pengarusutamaan gender;
- e. Kesetaraan akses terhadap disabilitas;
- f. Jaminan sosial bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

- g. Pemenuhan akses terhadap kesempatan berusaha dan meningkatkan kemampuan.

4.2.2. Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Meningkatkan Ketahanan Budaya melayu

Pembangunan fisik kalau tidak diiringi dengan pembangunan mental dan peningkatan penerapan nilai-nilai budaya dan agama tidak akan memberi hasil yang maksimal untuk kemajuan Kota Pekanbaru. Perhatian terhadap pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai budaya melayu dan pengamalan ajaran agama menjadi lebih penting bagi daerah untuk menangkis pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial dan masuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pembangunan bidang ini sangat selaras dengan konsep yang diusung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rangka menyiapkan generasi muda yang cerdas, berakhlak, berdaya saing dan mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa.

4.2.3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai variabel yang bisa mengilustrasikan isu ini antara lain:

- a. Pengelolaan pemerintahan yang transparan, bersih, efektif dan terpercaya;
- b. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *information and communication technology* (ICT);
- c. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN berbasis sistem merit secara berkelanjutan;
- d. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4.2.4. Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur merupakan penunjang utama untuk terselenggaranya proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi telah mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan Kerangka kerja dalam rangka menarik investasi proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan.

Pembangunan di bidang infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu pembangunan infrastruktur yang baik dapat membentuk perekonomian daerah, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade (sesuai dengan kerangka pembangunan berkelanjutan). Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas daerah di Kota Pekanbaru. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah. Melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Business to Business (B to B)* Pemerintah Kota Pekanbaru telah memulai peningkatan pembangunan infrastruktur terutama pada pemenuhan kebutuhan akses air bersih perpipaan masyarakat Kota Pekanbaru. Di samping peningkatan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini menerima bantuan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik melalui program MSMIP (Metropolitan Sanitation Management Investment Project) yang hampir memasuki tahap penyelesaian pembangunan konstruksi. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) tersebut sudah dapat dirasakan aksesibilitasnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

Melalui program peningkatan sistem jaringan transportasi diharapkan dapat menata infrastruktur transportasi yang ada di Kota Pekanbaru, terutama menyangkut aspek konektivitas sebagai berikut :

1. Menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten/ Kota lainnya;
2. Menghubungkan antara pusat kegiatan satu dengan pusat kegiatan lainnya; dan
3. Menghubungkan perumahan dengan pusat-pusat kegiatan.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, peningkatan konektivitas regional dan nasional, serta untuk menguatkan posisi Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Riau. Di samping itu, pengembangan sarana transportasi publik menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi beban arus distribusi orang dan barang serta memperkuat konektivitas antar wilayah.

Peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya yang sampai saat ini terus berjalan adalah penanganan banjir dan genangan di Kota Pekanbaru berdasarkan *Masterplan* pengendalian banjir Kota Pekanbaru. Penanganan banjir dan genangan tersebut dalam rangka mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun;
2. Alih fungsi lahan penampungan air sementara dan bantaran sungai menjadi tempat hunian penduduk;
3. Curah hujan yang tinggi; dan
4. Rendahnya kemampuan drainase Kota Pekanbaru dan kapasitas Sarana dan Prasarana pengendali banjir.

Melalui penerapan Masterplan Pengendalian Banjir tersebut diharapkan dapat ditangani 121 titik banjir/genangan serta 363 titik masalah yang ada di Kota Pekanbaru.

Disamping peningkatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sampai saat ini, infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi yang telah tersedia di Kota Pekanbaru, terutama pada sektor energi diantaranya PLTU dan PLTG Tenayan serta Jaringan Gas.

Dengan memperkuat pembangunan di bidang infrastruktur, akan meningkatkan daya saing dan kekuatan ekonomi di masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang merupakan isu pembangunan daerah dan nasional, karena bahagian terbesar yang menggerakkan ekonomi kerakyatan Indonesia khususnya di Pekanbaru tidak lepas dari usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Sejarah telah mencatat bahwa ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh UMKM-K dapat bertahan di saat terjadi krisis moneter dan perlambatan ekonomi dunia. Isu pemberdayaan UMKM-K ini dapat dikaitkan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas, pembenahan manajemen, dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar, dukungan dan fasilitas dari pemerintah.

Sektor pariwisata juga perlu mendapat perhatian khusus karena dapat berdampak pada berkembangnya pariwisata seperti ekonomi kreatif, perhotelan, transportasi, dan lain-lain. Disamping itu diperlukan juga pengembangan ekonomi padat modal, terutama yang terkait sektor unggulan di Pekanbaru yaitu jasa, perdagangan, dan industri dengan meningkatkan iklim investasi. Pengembangan sektor perdagangan khususnya pasar diperlukan kejasama dengan pihak swasta dalam mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kawasan Tenayan Raya (KIT) merupakan kawasan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai kawasan industri yang kompetitif untuk investasi terutama di sektor industri padat modal.

4.2.5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kota Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, telah memberikan efek terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota beserta lingkungannya. Pertumbuhan kota yang tidak terkendali akan mempengaruhi terhadap lingkungan hidup. Peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berdampak secara langsung pada peningkatan daya saing daerah baik sebagai kota layak huni maupun untuk meningkatkan iklim investasi sehingga menambah minat berinvestasi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dengan pengelolaan persampahan, menjaga kelestarian lingkungan, seperti akibat aktivitas kehidupan masyarakat pada skala perumahan dan kawasan permukiman serta kebutuhan pergerakan masyarakat sehari-hari. Permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari tersebut adalah resiko pencemaran lingkungan terutama pada air tanah yang disebabkan oleh penggunaan *septic tank* individual yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penggunaan jangka panjang *septic tank* yang tidak SNI tersebut membentuk kebiasaan masyarakat tidak melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala (penyebab utama pencemaran air tanah).

Di samping hal tersebut di atas, pencemaran lingkungan lain yang berpotensi di Kota Pekanbaru adalah polusi udara, terutama yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor pribadi oleh sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru. Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat disebabkan mudahnya masyarakat mengakses kepemilikan kendaraan bermotor dan tempat aktivitas yang dituju (belum terjangkau oleh rute sarana transportasi publik).

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis. Penyusunan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD yang akan dijalankan dan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan di dalam RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024 ditujukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kota Pekanbaru. Penetapan indikator dan target Tujuan dan Sasaran yang bersifat impact dan atau outcome diharapkan mampu dicapai secara terukur, bertahap, efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sesuai amanat Undang undang 23 tahun 2014 dimana RPJMD harus berpedoman kepada RPJMN maka terkait berbagai Agenda Prioritas dan Kebijakan Pembangunan nasional beserta sasaran kewilayahan yang ditetapkan, telah pula diacu meski dengan penyesuaian terhadap target pencapaian.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Nilai	81,58	82,24	82,45	82,58	82,80	82,80
		1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,55	15,75	15,93	16,18	16,25	16,25
				1.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,92	12,01	12,15	12,23	12,30	12,30
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,41	72,50	72,58	72,61	72,70	72,70
		3	Meningkatnya Standard Hidup Layak	3	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	14.360.000	14.614.170	14.742.937	14.872.839	15.003.885	15.003.885
2	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu			2.1	Angka Kriminalitas	Angka	N/A	1.450	1.334	1.228	1.130	1.130
		4	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	N/A	100	100	100	100	100
				4.2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	88,57	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
2	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu			2.2	Persentase Pemajuan Budaya Melayu	Persen	6,2	6,3	6,35	6,4	6,5	6,5
		5	Meningkatnya Ketahanan Budaya	5	Persentase Budaya Melayu yang Direvitalisasi	Persen	10	15	20	25	30	30
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi			3.1	Indeks Infrastruktur	Indeks	72,13	72,80	73,90	74,50	75,00	75,00
		6	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	6.1	Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	70,91	72,11	73,21	74,36	75,56	75,56
				6.2	Keterjangkauan Layanan Angkutan	Persen	77	78	80	81	82	82
		7	Meningkatnya Akses Air Bersih	7	Cakupan Rumah tangga Pelayanan Air Bersih Perpipaan	SR	14.067	16.850	28.150	38.250	51.350	51.350
		8	Meningkatnya Sanitasi yang Layak	8	Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	SR	N/A	1.000	4.000	7.000	10.000	10.000
		9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	9.1	Luas Areal Kawasan Kumuh	Ha	267,76	217,76	157,76	87,76	0	0
				9.2	Rasio Perumahan yang Difasilitasi PSU	Rasio	N/A	12	14	16	18,6	60,67
				9.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	84,33	86,49	89,36	92,31	94,48	94,48

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	10	Menurunnya Titik Genangan	10	Jumlah Titik Genangan yang Tertangani	Jumlah Titik	N/A	20	40	60	80	80
		11	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	11	Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	Persen	5,60	5,62	5,65	5,68	5,70	5,70
				3.2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,24	4,73– 5,51	4,81-5,60	5,00-5,60	5,55– 6,00	5,55– 6,00
		12	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	12.1	Gini Rasio	Indeks	0,391	0,385	0,375	0,365	0,345	0,345
				12.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	21,09	21,35	21,63	21,91	22,18	22,18
				12.3	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	Rupiah (Miliar)	2.019,35	2.030,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00	2.100,00
		13	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,56	90,56	90,56	90,56	90,56	90,56
		14	Meningkatnya Investasi Daerah	14	Nilai Investasi Berskala Nasional	PMDN [Rp]	2,21 T	2.60 T	2.71 T	2.82 T	2.90 T	2.90 T
						PMA (Rp)	1,90 T	2.10 T	2.21 T	2.23 T	2.29 T	2.29 T

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	60,82	60,11	60,46	60,81	61,16	61,16
				15.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,67	51,69	51,79	51,90	52,00	52,00
				15.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,06	85,73	85,83	85,93	86,03	86,03
				15.3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	26,31	27,17	28,43	29,68	30,90	30,90
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	62,30	65,65	67,52	69,40	71,25	71,25
				16.1	Nilai IKM	Nilai	83,80	85,58	86,55	87,52	88,49	88,49
		16.2	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,17 (Cukup)	2,70 (Baik)	3,00 (Baik)	3,30 (Baik)	3,50 (Sangat Baik)	3,50 (Sangat Baik)		
		17 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17.1	Nilai AKIP	Nilai	64,09	65,0 (B)	66,0 (B)	67,0 (B)	68,0 (B)	68,0 (B)	
			17.2	Nilai LPPD	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,6 (Tinggi)	3,8 (Tinggi)	4 (Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru 2023-2024 dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2023 – 2026.

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2023 – 2026 ini selain untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta visi dan misi juga memperhatikan: (i) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dan Nasional, (ii) pencapaian Visi RPJP Kota Pekanbaru khususnya periode RPJMD ketiga, (iii) pengembangan sektor/bidang yang menjadi keunggulan kompetitif Kota Pekanbaru dan (iv) permasalahan-permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis Kota Pekanbaru.

Pendekatan yang diterapkan dalam menyusun strategi dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered development*) untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (*participatory based development*) melalui pendidikan dan keterampilan yang dilandasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Iman dan Taqwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Pendekatan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan mengembangkan investasi, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Keberadaan Kawasan Industri Tenayan ke depan sekaligus sebagai peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mengakibatkan akan munculnya kawasan perkotaan baru berikut dibarengi dengan munculnya lapangan pekerjaan baru.
4. Pendekatan Pro Job, mendorong investasi yang tinggi untuk menjamin kesempatan kerja permanen, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang kerja.
5. Pendekatan kewilayahan dan lingkungan sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan dengan melaksanakan pengembangan wilayah melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah, serta pencapaian kota madani yang smart. Kawasan Perkantoran Pemerintahan di Tenayan Raya dibangun dengan konsep green, dimana

gedung perkantoran dibuat menyatu dan menjadi hutan buatan yang akan ditanam dengan berbagai pohon atau kayu sehingga berfungsi sebagai paru-paru kota. Dengan konsep ini diharapkan kawasan perkantoran bukan hanya menjadi pusat pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah tapi juga berfungsi sebagai laboratorium alam (hutan) dan tempat rekreasi bagi masyarakat.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dibutuhkan pembangunan antar wilayah yang merata dan keikutsertaan stakeholder lainnya. Untuk melaksanakan pembangunan dimaksud, dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, untuk itu diperlukan sumber pembiayaan lainnya. Adapun kebijakan khusus daerah antara lain, yaitu:

a. Pengelolaan BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba/keuntungan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017).

Pemerintah Kota Pekanbaru, memiliki 3 (tiga) BUMD yang diharapkan mampu berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah sesuai dengan tujuan pendirian BUMD dimaksud. Dalam rangka menjalankan tujuan tersebut BUMD memerlukan pembiayaan, maka pemerintah dapat melakukan penyertaan modal dalam rangka peningkatan kapasitas BUMD dimaksud.

Kebijakan Pengelolaan BUMD antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan struktur kelembagaan

Untuk mendukung pengembangan struktur kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah tersebut, diperlukan upaya pengembangan di versifikasi bidang usaha andalan, yaitu Pengelolaan layanan transportasi perkotaan dengan sistim angkutan umum massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru dan jenis layanan lainnya serta pengelolaan pasar dan perdagangan komoditi terutama pangan yang struktur kelembagaannya masih anak Perusahaan.

2. Keterbatasan kemampuan permodalan.

BUMD dalam menjalankan pengelolaannya memerlukan permodalan yang memadai, dalam hal ini terdapat kecenderungan persepsi masyarakat bahwa BUMD selama ini memperoleh permodalan masih tergantung pada Pemerintah Daerah.

Dalam upaya menjawab persepsi masyarakat tersebut, agar BUMD mampu melakukan penguatan sumber daya secara sistematis dan terstruktur serta melakukan evaluasi terhadap kekuatan, potensi peluang serta memperhitungkan factor hambatan dan tantangannya dalam rangka mempersiapkan dalam menghadapi perubahan-perubahan dimasa yang akan datang sehingga memiliki struktur permodalan dan prospek usaha yang bernilai yang baik.

3. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan umum

Dalam upaya meningkatkan tuntutan masyarakat atas pelayanan umum dan pengelolaan BUMD dilakukan dengan :

- Memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD;
- Meningkatkan performance manajemen resiko;
- Menerapkan pelayanan umum dan pengelolaan berbasis informasi teknologi;
- Menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan; serta
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.

b. Kerjasama Daerah

1) Kerjasama antar daerah

Dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan di semua bidang, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan kerjasama, baik antar pemerintah maupun dengan swasta. Pengembangan Kawasan PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan) adalah salah satu bentuk kerjasama pembangunan daerah.

Salah satu langkah awal dari pembangunan Kawasan PEKANSIKAWAN ini adalah menetapkan daerah deliniasi dari masing masing Kabupaten tetangga yang akan dimasukkan dalam pengembangan pembangunan kawasan PEKANSIKAWAN.

Adapun tujuan penataan dan pembangunan Kawasan PEKANSIKAWAN adalah :

1. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan publik;
2. Keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, provinsi dan wilayah kabupaten/kota di kawasan PEKANSIKAWAN;
3. Sistem kawasan yang terstruktur dan seimbang sesuai dengan fungsi tingkat pelayanan;

4. Keseimbangan pada fungsi lindung dan budidaya pada kawasan PEKANSIKAWAN sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kebijakan Penataan Kawasan PEKANSIKAWAN adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi, budaya, pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup;
2. Pengembangan kawasan PEKANSIKAWAN sebagai pusat orientasi pelayanan;
3. Pengembangan kawasan PEKANSIKAWAN sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan inti dan kawasan disekitarnya;
4. Peningkatan aksesibilitas antara wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di kawasan PEKANSIKAWAN .

Sedangkan strategi penataan Kawasan PEKANSIKAWAN adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi, budaya, pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup;
 - Pelestarian situs cagar budaya lokal ;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif;
 - pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya tampung lingkungan;
2. Pengembangan kawasan PEKANSIKAWAN sebagai pusat orientasi pelayanan;
 - Mendorong kawasan perkotaan inti dan pusat-pusat pertumbuhan agar berdaya saing dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan
 - Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya dan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
 - Mendorong pembangunan kawasan PEKANSIKAWAN secara terpadu melalui lintas sektoral, lintas wilayah dan antar pemangku kepentingan.
3. Pengembangan kawasan PEKANSIKAWAN sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan inti dan kawasan disekitarnya;
 - Mendorong pengembangan pusat perdagangan dan jasa dan pusat pengolahan hasil produksi;
 - Mendorong pembangunan industri strategis kawasan dengan pemanfaatan sumber daya daerah.
4. Peningkatan aksesibilitas antara wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di kawasan PEKANSIKAWAN

- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi yang seimbang dan terpadu ;
- Mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan serta penyediaan sistem pelayanan angkutan umum massal yang terpadu;
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum dan persampahan secara terpadu;
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kawasan PEKANSIKAWAN.

Dampak yang diharapkan dari pengembangan konsep Kawasan PEKANSIKAWAN ini terhadap pembangunan daerah di provinsi Riau adalah :

1. Sebagai Motivator Ekonomi

- Membuka lapangan kerja melalui sektor perdagangan, industri (terutam industri kreatif), dan pariwisata (hotel dan restoran);
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Memasarkan produk-produk lokal kewilayahan yang lebih luas melalui pariwisata;
- Mempromosikan wisata alam di sekitar wilayah metropolitan;
- Meningkatkan suplai sumber daya alam di sekitar metropolitan;
- Mengembangkan industry kreatif untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk lokal;

2. Sebagai Motivator Kesejahteraan

- Meningkatkan kualitas hidup (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan) melalui kualitas pelayanan infrastruktur modern dan peningkatan pelayanan fasilitas publik;
- Meningkatkan daya beli masyarakat

3. Sebagai Motivator Modernisasi

- Mengembangkan industri kreatif sebagai tempat pengembangan diri para individu kreatif sehingga dapat menjadi penyalur ide-ide kreatif yang bernilai ekonomi tinggi
- Mengembangkan industry berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi;
- Mengembangkan infrastruktur berbasis teknologi untuk efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan masyarakat ;

2) Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pembangunan daerah yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah baik tantangan dalam sinkronisasi antar kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah maupun keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, strategi pemerintah diantaranya adalah :

1. Memperkuat kelembagaan dengan membentuk forum CSR di kota Pekanbaru. Forum ini akan mewadahi dan menjembatani dunia usaha baik BUMD, BUMD, swasta dalam rangka mengarahkan kualitas program CSR baik dari sisi yang membutuhkan maupun dari kepentingan dunia usaha. Dengan masuknya program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program CSR yang dirancangnya.
2. Memperkuat TJSLP/CSR dengan membentuk peraturan teknis maupun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan program TJSLP/CSR.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar stakeholders untuk mencapai keselarasan program CSR sejalan dengan program pembangunan daerah.
4. Memperkuat forum koordinasi untuk fungsi pengawasan agar diketahui sampai sejauhmana pelaksanaan CSR yang perusahaan lakukan, sudah memberdayakan masyarakat local atau malah membuat depedensi baru.
5. Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta agar lebih mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Melakukan sosialisasi secara efektif dan berkala kepada pelaku usaha agar tercipta pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya CSR dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatkan sinergitas antara peran aktif masyarakat, dukungan pemerintah daerah dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR maka diharapkan implementasi pengelolaan CSR khususnya di kota Pekanbaru dapat berjalan secara terarah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
8. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan.

9. Penegakan regulasi agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum terkait dengan CSR.

2) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam dalam bentuk kerjasama menggunakan sistem Program Studi Diluar Kampus utama (PSDKU) adalah tahap awal dalam proses Pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru. Hal-hal yang harus dilakukan berikutnya adalah Menyiapkan langkah-langkah aksi yang konkrit dan komprehensif sehingga pendirian Politeknik ini benar-benar nyata dan terencana dengan baik. Langkah-langkah tersebut seperti ;

1. Mengajak seluruh stakeholder di Provinsi Riau untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Politeknik Negeri Pekanbaru seperti Gubernur, DPRD Provinsi Riau, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau, DPRD Kota Pekanbaru, Lembaga Adat Riau dan Kota Pekanbaru, Dewan Pendidikan Provinsi Riau dan stakeholder lainnya.
2. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen pendukung lainnya seperti Dokumen Statuta, Dokumen Rancangan Perogram Akademik, Dokumen Rancangan Sistem Penjaminan Mutu, dan Dokumen Rancangan Rencana Strategis Politeknik Negeri Pekanbaru.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana kampus Politeknik Negeri Pekanbaru yang terdiri dari Tanah seluas 10,98 Ha, Bangunan ruang kantor, ruang perkuliahan, workshop (bengkel), ruang serbaguna, mesjid, lapangan olahraga. Semuanya sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam permendikbud No. 7 tahun 2020.
4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang dipersyaratkan dalam permendikbud No.7 tahun 2020.
5. Komitmen Pemerintah Pekanbaru yang telah menyanggupi untuk membantu operasional dalam bentuk Hibah selama 5 tahun selama masa transisi.

c. Kebijakan Khusus Daerah Lainnya

Dalam rangka mendukung kebijakan Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terhadap Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas, Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan, Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, serta Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, diperlukan kebijakan strategis untuk mendukung kebijakan nasional sebagai berikut:

- Pembangunan Kawasan Industri Tenayan (Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 18 Tahun 2020)
- Pembangunan Jalan Tol (Bagian Trans Sumatera), bagian Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, antara lain:
 - a) Jalan Tol Pekanbaru - Dumai (131,5 Km)

- b) Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi – Padang (254,8 Km)
- c) Jalan Tol Pekanbaru - Jambi – Rengat (175 Km)
- Relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim II, terbatasnya lahan pengembangan bandara.
- Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga kota Pekanbaru
- Sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP 42/M.PPN/KH/04/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, bahwa Kota Pekanbaru telah ditetapkan sebagai lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Upaya terobosan yang telah dilakukan antara lain: (1) Peningkatan akses & kualitas pelayanan KIA/KB, gizi, kesling, promkes - pemberdayaan masyarakat (LSM, swasta dan masyarakat), (2) Konvergensi lintas sektor dan integrasi program, (3) Penguatan tata kelola program dan manajemen di daerah lokus stunting Kota Pekanbaru dan AKI-AKB, (4) Penguatan program kesehatan remaja (UKS, PKPR dan *life skill education*), (4) Kampanye Gizi Seimbang, (5) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan gizi keluarga (PMT lokal-PKTD), (6) Penguatan surveilans gizi di puskesmas serta (7) Optimalisasi posyandu. Salah satu dukungan pembiayaan dalam penguatan intervensi stunting di tahun 2021, Kota Pekanbaru mendapatkan bantuan dana melalui DAK Fisik dan DAK Non Fisik bidang kesehatan.

Secara rinci strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru menurut tujuan diuraikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekanbaru

1		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah dasar (SD) 2. Meningkatkan pendidikan agama 3. Meningkatkan akreditasi SD 4. Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SD 5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah menengah pertama (SMP) 6. Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi 7. Meningkatkan akreditasi SMP 8. Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SMP

		9. Melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket A, B dan C 10. Meningkatkan pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 11. Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasional 13. Meningkatkan akreditasi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal 14. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 15. Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 16. Meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 17. Meningkatkan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) 18. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan 19. Meningkatkan pengelolaan sekolah inklusi 20. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan 21. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan keliling 22. Meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan Kota, sekolah dan khusus 23. Meningkatkan budaya gemar membaca 24. Meningkatkan Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku 25. Mengembangkan perpustakaan di wilayah pinggiran 26. Meningkatkan pengelolaan koleksi pustaka dan naskah kuno 27. Meningkatkan jumlah judul bahan pustaka 28. Meningkatkan pengelolaan sistem perpustakaan 29. Meningkatkan pengelolaan otomasi dan <i>digital library</i>
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit Kota Pekanbaru 3. Mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health Information System) 4. Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

		5. Meningkatkan kepastian kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Kota Pekanbaru 6. Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah 7. Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dalam memenuhi standar 8. Meningkatkan pendampingan rumah sakit 9. Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan 10. Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji 11. Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil 12. Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar 13. Mengoptimalkan pelayanan sesuai standar bagi bayi yang baru lahir 14. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita 15. Mengoptimalkan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 16. Meningkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 17. Meningkatkan rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan Meningkatkan kualitas air 18. Meningkatkan , tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan 19. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi kesehatan 20. Meningkatkan institusi yang melaksanakan UKK 21. Mengoptimalkan pelayanan TB sesuai standar bagi penderita TB 22. Mengoptimalkan layanan pemeriksaan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS 23. Mengoptimalkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 24. Meningkatkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 25. Meningkatkan penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar 26. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar

		27. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus sesuai standar 28. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar 29. Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan kelas C 30. Meningkatkan sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang terakreditasi laik sehat 31. Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi 32. Meningkatkan tenaga penyehat tradisional yang terdaftar 33. Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes 34. Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas 35. Meningkatkan pelatihan bagi karyawan dengan syarat minimal 20 jam pelajaran per tahun 36. Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar 37. Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin sesuai standar 38. Meningkatkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 39. Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR
	Meningkatnya Standard Hidup Layak	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin 2. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi 4. Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja 5. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya 6. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
2		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat 2. Meningkatkan publikasi pesan moral kepada masyarakat 3. Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam

		upaya ketentraman dan ketertiban umum di kota Pekanbaru 4. Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial 5. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik 6. Meningkatkan organisasi ber-SKT 7. Memberikan edukasi kepada pemuda melalui Pemilihan Pemuda Pelopor, Kemah Bakti Pemuda Nusantara, dan Pemuda Mencari Bakat 8. Memfasilitasi seleksi dan pendidikan parkibraha Membentuk karakter pemuda anti NAPZA 9. Mengoptimalkan lembaga kepemudaan 10. Meningkatkan edukasi olahraga melalui Kelas Khusus Olahraga 11. Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat, termasuk kaum disabilitas 12. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, termasuk untuk kaum disabilitas 13. Mengoptimalkan lembaga keolahragaan, Mengoptimalkan pengelolaan aset olahraga 14. Meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas 15. Meningkatkan penertiban vandalisme 16. Memberikan edukasi melalui patroli bina pelajar 17. Meningkatkan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah 18. Mengoptimalkan petugas intel Pol PP 19. Meningkatkan pembinaan petugas perlindungan masyarakat Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas 20. Mengoptimalkan gerakan kampung Panca Tertib 21. Mengoptimalkan operasi penertiban umum Menegakkan produk hukum daerah 22. Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) 23. Meningkatkan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 24. Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya Ketahanan Budaya	1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi

		2. Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya 3. Mengoptimalkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya 4. Meningkatkan kampanye sadar budaya 5. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Seni dan Film 6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Adat dan Tradisi 7. Mengoptimalkan pembentukan rintisan kelurahan budaya
3		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	Peningkatan Konektivitas, kualitas dan kapasitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan
	Meningkatnya Akses Air Bersih	Peningkatan akses air bersih perpipaan
	Meningkatnya Sanitasi Yang Layak	Peningkatan akses sanitasi yang layak
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh
	Menurunnya titik genangan	Peningkatan kualitas drainase perkotaan
	Meningkatnya ketersediaan RTH Publik	Peningkatan ketersediaan lahan dan Meningkatkan kualitas RTH
4		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan 2. Peningkatan Pengelolaan Persampahan
5		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekanbaru

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada tata kelola	Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun	Arah kebijakan tahun ketiga adalah melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya untuk memantapkan capaian hasil-hasil pembangunan	Arah kebijakan pembangunan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 adalah

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
pemerintahan dan keuangan daerah, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kota Pekanbaru). Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 difokuskan pada meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana aparatur yang memadai, menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan e-government serta penerapan standar pelayanan.	2023-2026 untuk mencapai target sasaran, misi dan visi. Pada tahun ketiga ini, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan sumber daya aparatur dan tata kelola keuangan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta keharmonisan bermasyarakat terus dilakukan. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan kualitas dan relevansi kesetaraan dan kepastian di bidang pendidikan menuju smart city. SDM yang berkualitas dan berdaya saing,	sehingga menjadikan rakyat Pekanbaru yang lebih sejahtera dapat dicapai. Pemantapan capaian hasil-hasil pembangunan difokuskan untuk mencapai kinerja indikator-indikator kinerja daerah sesuai target atau rencana. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada peningkatan Pembangunan Manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	melanjutkan arah kebijakan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan sekaligus memastikan capaian sasaran dan indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun keempat ini akan diarahkan untuk percepatan peningkatan pembangunan manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meliputi sektor jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Pekanbaru

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TUJUAN 1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,58	82,24		82,45		82,58		82,80		82,80		
SASARAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	1.1. Harapan Lama Sekolah	15,55 tahun	15,75 tahun		15,93 tahun		16,18 tahun		16,25 tahun		16,25 tahun		
	1.2. Rata-rata Lama Sekolah	11,92 tahun	12,01 tahun		12,15 tahun		12,23 tahun		12,30 tahun		12,30 tahun		
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar	60,95	64%	237.474.708.405	67,20 %	249.853.699.843	70,56 %	261.637.810.285	74,09 %	280.254.044.272	74,09	1.029.220.262.805	Dinas Pendidikan
PROGRAM 2: PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,62	88,44%	21.535.000.000	95,25%	37.575.000.000	95,50%	40.075.000.000	96,00%	42.575.000.000	96,00%	141.760.000.000	Dinas Pendidikan
PROGRAM 3: PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan di kota pekanbaru yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	22,57%	29,91%	5.070.263.000	34,50 %	3.392.000.000	40 %	3.837.000.000	46,42 %	4.255.000.000	46,42 %	16.554.263.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
SASARAN 2: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	72,41 tahun	72,50 tahun		72,58 tahun		72,61 tahun		72,70 tahun		72,70 tahun		

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	47,95	60%	73.311.076.532	70%	92.273.317.400	75%	101.500.649.140	80%	111.650.714.054	80%	350.767.842.731	Dinas Kesehatan
PROGRAM 2: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sumber daya Kesehatan yang sesuai dengan standar	60	65%	505.000.000	70%	572.000.000	75%	629.200.000	80%	692.120.000	80%	2.398.320.000	Dinas Kesehatan
PROGRAM 3: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar kompetensi	60	65%	450.000.000	70%	412.500.000	75%	453.750.000	80%	499.125.000	80%	1.815.375.000	Dinas Kesehatan
PROGRAM 4: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rumah tangga yang melaksanakan PHBS	30	40%	4.303.000.000	50%	2.750.000.000	60%	3.025.000.000	70%	3.327.500.000	70%	13.405.500.000	Dinas Kesehatan
SASARAN 3: MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 14.360.000	Rp.14.614.170		Rp.14.742.937		Rp.14.872.839		Rp.15.003.885		Rp.15.003.885		
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		87%	2.161.920.372	88%	7.982.675.688	89%	8.381.809.473	90%	8.800.899.947	90%	27.327.305.480	Dinas Sosial

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 2: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100%	100%	2.790.514.354	100%	16.337.835.853	100%	17.154.727.646	100%	18.012.464.028	100%	54.295.541.881	Dinas Sosial
PROGRAM 3: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	81,41%	83%	878.369.922	84%	1.186.600.308	85%	1.245.930.323	86%	1.308.226.839	86%	4.619.127.392	Dinas Sosial
PROGRAM 4: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan	44,50%	46%	1.465.638.463	47%	1.641.969.613	48%	1.805.666.574	49%	1.985.233.231	49%	6.898.507.881	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM 5 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yg bersertifikat	71,57%	75 persen	894.337.937	78 persen	1.085.887.330	80 persen	1.655.500.000	85 persen	1.823.000.000	85 persen	5.458.725.267	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 2. MEWUJUDKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI NILAI- NILAI BUDAYA MELAYU	2.1. Angka Kriminalitas	NA	1.450		1.334		1.228		1.130		1.130		
	2.2. Persentase pemajuan budaya melayu	6,20%	6,30%		6,35		6,4		6,5		6,5		
SASARAN 4. MENURUNNYA GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	4.1 Persentase penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
	4.2. persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	88,57%	100%		100%		100%		100%		100%		

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 1: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat	100	100%	2.746.418.860	100%	3.021.060.746	100%	3.323.166.820	100%	3.655.483.502	100%	1.548.154.202	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang aktif	11,63	50%	1.950.000.000	65 %	2.145.000.000	75 %	4.235.000.000	90 %	4.658.500.000	90 %	12.988.500.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM 3: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	38,9	46%	7.721.651.282	52 %	8.493.816.410	59 %	29.016.600.000	70 %	27.708.260.000	70 %	72.940.327.692	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM 4: PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran perda	88,57	100%	15.030.000.000	100%	23.605.000.000	100%	23.915.419.962	100%	23.983.735.978	100%	23.983.735.978	Satuan Polisi Pamong Praja
SASARAN 5. MENINGKATNYA KETAHANAN BUDAYA	Persentase budaya melayu yang direvitalisasi	10%	15%		20%		25%		30%		30%		
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Kebudayaan	50%	63%	893.777.612	63,5%	8.110.994.278	64%	9.429.668.416	66%	30.726.999.616	66%	30.726.999.616	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM 2: PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terselenggaranya Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50%	17 Cagar budaya	354.704.348	65%	3.156.216.912	67%	2.289.533.512	67%	2.433.823.812	67%	2.433.823.812	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 3: PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang terbina dengan baik	NA	36%	200.000.000	36%	550.000.000	37%	650.000.000	37%	650.000.000	37%	650.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TUJUAN 3. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Indeks Infrastruktur	72,13	72,80		73,90		74,50		75,00		75,00		
	2. Pertumbuhan Ekonomi	5,24%	5,51%		5,60%		5,60%		6,00		6,00		
SASARAN 6. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PELAYANAN JARINGAN JALAN	6.1. Jalan Dalam Kondisi Mantap	70,91%	72,11%		73,21		74,36		75,56		75,56		
	6.2. Keterjangkauan layanan angkutan	77%	78%		80%		81%		82%		82%		
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	70,91%	100%	76.804.029.407	73,21%	167.450.000.000	74,36%	176.450.000.000	75,56%	189.200.000.000	76,11%	684.450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM 2: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik		4 laporan	15.679.534.375	80%	60.794.158.429	80%	65.796.665.379	80%	71.395.203.918	80%	213.665.562.101	Dinas Perhubungan
SASARAN 7. MENINGKATNYA AKSES AIR BERSIH	Cakupan Rumah tangga pelayanan air bersih perpipaan	13.837 SR	16.850 SR		28.150 SR		38.250 SR		51.350 SR		51.350 SR		
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sambungan Rumah (SR) Terlayani Air Bersih	100%	100%	18.060.000.000	100%	29.468.000.000	100%	29.916.400.000	100%	31.298.950.000	100%	108.743.350.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SASARAN 8. MENINGKATNYA SANITASI YANG LAYAK	Cakupan rumah tangga bersanitasi layak	NA	1.000 SR		4.000 SR		7.000 SR		10.000 SR		10.000 SR		
PROGRAM 1:PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah yang Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	100%	100%	9.725.000.000	100%	30.480.000.000	100%	28.329.000.000	100%	25.807.950.000	100%	95.116.950.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SASARAN 9. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	9.1. Luas areal kawasan kumuh	267,6 Ha	217,76 Ha		157,76 Ha		87,76 Ha		0		0		
	9.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki akses Terhadap Hunian yan Layak dan Terjangkau	84,33%	86,49%		89,36%		92,31%		94,48%		94,48%		
	9.3 Rasio Perumahan yang difasilitasi PSU	NA	12%		14		16		18,6		60,67		
PROGRAM 1: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		18,67%	5.047.330.480	18,67 %	83.747.751.053	67,2%	99.477.751,053	100%	123.517.751,053	80%	375.255.004.212	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM 2: PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani		25%	5.571.083.536	25%	29.589.500.000	75%	29.689.500,000	100%	29.789.500,000	100%	118.558.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM 3: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		12%	91.157.980.229	12%	120.303.100.000	12%	137.471.600.000	12%	159.790.600.000	100%	522.694.900.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
SASARAN 10. MENURUNNYA TITIK GENANGAN	Jumlah titik genangan yang tertangani	NA	20 titik		40 titik		60 titik		80 titik		80 titik		

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 1: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	100%	100%	37.636.995.100	100%	114.016.344.855	100%	119.717.162.098	100%	125.703.020.203	100%	468.023.522.255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pembangunan Drainase/ Saluran yang Terselesaikan untuk Penanganan Titik Genangan	100%	100%	7.912.500.000	100%	19.040.000.000	100%	17.986.625.000	100%	20.214.956.250	100%	69.454.081.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM 3: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Sungai/ Drainase/ Saluran yang Terselesaikan untuk Penanganan Titik Genangan	100%	100%	21.357.000.000	100%	46.732.350.000	100%	48.915.217.500	100%	51.285.978.375	100%	191.440.545.875	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SASARAN 11. MENINGKATNYA KETERSEDIAAN RTH PUBLIK	Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	5,60%	5,62%		5,65%		5,68%		5,70%		5,70%		
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang dikelola	130 RTH	130 RTH	30.300.000.000	135 RTH	35.500.000.000	135 RTH	36.400.000.000	135 RTH	36.400.000.000	135 RTH	142.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
SASARAN 12. MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF	12.1 Gini Rasio	0,391	0,385		0,375		0,365		0,345		0,345		
	12.2 Kontribusi sektor industri pengolahan	21,09%	21,35%		21,63%		21,91%		22,18%		22,18%		
	12.3 Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata)	Rp.2.019,35 (Miliar)	Rp.2.030,00 (Miliar)		Rp.2.050,00 (Miliar)		Rp.2.080,00 (Miliar)		Rp.2.100,00 (Miliar)		Rp.2.100,00 (Miliar)		

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro	100%	2,10%	1.218.117.665	2,31%	2.092.491.998	2,50%	2.266.866.332	2,68%	2.441.240.665	2,68%	2.441.240.665	Dinas KUKM
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bermitra dengan lembaga permodalan	92%	70,90%	1.871.106.388	71,82%	1.713.934.242	72,53%	1.856.762.096	73,02%	1.999.589.949	73,02%	1.999.589.949	Dinas KUKM
PROGRAM 3: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Berdaya saing	41%	75%	2.000.000.000	75%	1.450.000.000	75%	1.700.000.000	75%	2.000.000.000	75%	2.000.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase terselenggaranya program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	50%	65%	628.460.796	65%	825.000.000	70%	900.000.000	75%	1.175.000.000	75%	1.175.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SASARAN 13. MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH	Indeks Ketahanan Pangan	90,56	90,56		90,56		90,56		90,56		90,56		
PROGRAM 1: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,9%	88%	1.119.744.940	88%	2.230.800.000	88%	2.167.800.000	88%	2.209.800.000	88%	2.209.800.000	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 2: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	0%	10%	150.000.000	10%	2.607.264.377	22%	3,123,502,595	23%	3,279,677,725	23%	3,279,677,725	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM 3: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	45,60%	20%	197.784.315	20%	961.816.000	26%	21.161.350.500	30%	24.335.651.875	30%	24.335.651.875	Dinas Pertanian dan Perikanan
SASARAN 14. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH	Nilai investasi berskala nasional	2,21/1,9 PMDN/PMA [Trilyun Rp]	2,6/2,1 PMDN/PMA [Trilyun Rp]		2,71/2,21 PMDN/PMA [Trilyun Rp]		2,82/2,23 PMDN/PMA [Trilyun Rp]		2,9/2,29 PMDN/PMA [Trilyun Rp]		2,9/2,29 PMDN/PMA [Trilyun Rp]		
PROGRAM 1: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal yang dilaksanakan	81,82%	70%	1.952.480.453	75%	2.147.728.498	80%	2.362.501.348	85%	2.598.751.483	85%	2.598.751.483	DPMPTSP
PROGRAM 2: PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi, kerja sama investasi dan pelayanan publik	51,30%	70%	1.726.413.367	80%	1.899.054.704	90%	2.088.960.174	100%	2.297.865.191	100%	2.297.865.191	DPMPTSP
TUJUAN 4. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,82	60,11		60,46		60,81		61,16		61,16		
SASARAN 15. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	15.1. Indeks kualitas air	52,67	51,69		51,79		51,90		52		52		
	15.2. Indeks kualitas udara	87,06	85,73		85,83		85,93		86,03		86,03		
	15.3. Indeks tutupan lahan	26,31	27,17		28,43		29,68		30,90		30,90		

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM 1: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan pemantauan kualitas lingkungan hidup	8 laporan	8 laporan	2.553.033.500	8 Laporan	8.980.685.158	8 Laporan	8.553.033.500	8 Laporan	8.980.685.158	8 Laporan	17.533.718.658	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah tonase sampah yang dikelola	804 Ton	804 Ton	76.586.289.287	850 Ton	90.100.359.751	804 Ton	85.809.866.587	850 Ton	90.100.359.751	850 Ton	175.910.226.338	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
TUJUAN 5. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Indeks Reformasi Birokrasi	62,30	65,65		67,52		69,40		71,25		71,25		
SASARAN 16. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	16.1. Nilai IKM	83,80	85,58		86,55		87,52		88,49		88,49		
	16.2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,17 (Cukup)	2,7 (Baik)		3 (Baik)		3,30 (Baik)		3,50 (Sangat Baik)		3,50 (Sangat Baik)		
PROGRAM 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	1.488.827.790.061	100%	1.743.497.913.848	100%	1.812.107.698.810	100%	1.930.932.515.584	100%	4.626.527.429.966	Semua Perangkat Daerah
PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	40%	40%	7.622.995.265	60%	8.072.675.240	80%	8.879.942.764	100%	9.767.937.040	100 %	34.343.550.309	Diskominfo

Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		OPD
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SASARAN 17. MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	17.1. Nilai AKIP	64,09	65,0 (B)		66,0 (B)		67,0 (B)		68,0 (B)		68,0 (B)		
	17.2. Nilai LPPD	3,4 (Tinggi)	3,6 (Tinggi)		3,8 (Tinggi)		4 (Tinggi)		4,21 (Sangat Tinggi)		4,21 (Sangat Tinggi)		
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Internal yang Sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu	NA	80%	1.800.000.000	100%	4.532.000.000	100%	4.985.200.000	100%	5.483.720.000	100%	1.786.450.151	Inspektorat
PROGRAM 2: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	2.865.600.869	100%	5.734.500.000	100%	5.817.950.000	100%	3.990.545.000	100%	4.142.505.564	BAPPEDA
PROGRAM 3: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Terkordinir dan Tersinkronisasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	1.103.749.790	100%	3.367.100.000	100%	3.703.810.000	100%	4.074.191.000	100%	3.825.100.914	BAPPEDA
PROGRAM 4: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terkoordinir dan terfasilitasi	100%	100%	21.903.270.237	100%	18.128.957.256	100%	19.035.405.118	100%	20.938.945.631	100%	13.645.978.653	Sekretariat Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab VII ini berisikan uraian program yang menjadi tanggung jawab OPD dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyajiannya dilengkapi dengan indikator kinerja program (outcome) dan data kondisi awal kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023-2026 yang merupakan data titik awal dimulainya Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023-2026.

Rencana capaian kinerja program 5 (lima) tahun diurai dalam tiap tahun berupa target yang ingin dicapai dengan menetapkan pagu indikatif tiap tahunnya dimana kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya digunakan sebagai indikator pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan terutama dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.

Dalam penyusunan pagu indikatif berupa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program tiap tahunnya terutama untuk program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diupayakan dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Selain menampilkan data program pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan urusan, juga ditampilkan pagu indikatif untuk program non urusan yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Banyaknya program yang direncanakan oleh OPD diperkirakan tidak hanya dibiayai dari APBD Kota Pekanbaru saja, namun juga dibutuhkan dukungan dana baik yang bersumber dari APBN, atau APBD provinsi Riau ataupun pendanaan dari sumber-sumber lainnya. Berikut ini tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekanbaru.

Tabel 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PEKANBARU

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2.659.745.636.079		3.669.233.366.410		3.655.249.489.531		3.910.157.589.018		10.524.202.482.496	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.389.703.108.785		1.925.571.150.648		1.877.466.749.212		1.988.662.054.855		7.657.266.736.138	
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				713.328.839.641		761.656.406.202		777.446.382.194		804.749.629.800		3.057.181.257.837	
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	454.319.131.236	100%	474.227.706.359	100%	475.733.571.909	100%	481.920.585.528	100%	1.886.200.995.032	Dinas Pendidikan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar	60,95	64%	237.474.708.405	67,20 %	249.853.699.843	70,56 %	261.637.810.285	74,09 %	280.254.044.272	74,09	1.029.220.262.805	Dinas Pendidikan
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,62	88,44 %	21.535.000.000	95,25%	37.575.000.000	95,50%	40.075.000.000	96,00%	42.575.000.000	96,00%	141.760.000.000	Dinas Pendidikan
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				269.578.980.656		310.830.921.500		341.914.013.650		376.105.415.015		1.234.592.012.882	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 Persen	191.009.904.124	100%	214.823.104.100	100%	236.305.414.510	100%	259.935.955.961	100%	866.204.975.151	Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	47,95	80%	73.311.076.532	70%	92.273.317.400	75%	101.500.649.140	80%	111.650.714.054	80%	350.767.842.731	Dinas Kesehatan
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar kompetensi	60	65%	450.000.000	70%	412.500.000	75%	453.750.000	80%	499.125.000	80%	1.815.375.000	Dinas Kesehatan
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sumber daya Kesehatan yang sesuai dengan standar	60	65%	505.000.000	70%	572.000.000	75%	629.200.000	80%	692.120.000	80%	2.398.320.000	Dinas Kesehatan
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rumah tangga yang melaksanakan PHBS	30	40%	4.303.000.000	50%	2.750.000.000	60%	3.025.000.000	70%	3.327.500.000	70%	13.405.500.000	Dinas Kesehatan
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				201.869.071.775		441.602.419.486		458.136.165.461		480.113.403.734		1.759.127.031.048	
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	25.178.547.268	100%	28.960.974.631	100%	31.094.273.363	100%	30.588.687.031	100%	119.507.482.293	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Sungai/ Drainase/ Saluran yang Tersesalkan untuk Penanganan Titik Genangan	100%	100%	21.357.000.000	100%	46.732.350.000	100%	48.915.217.500	100%	51.285.978.375	100%	191.440.545.875	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sambungan Rumah (SR) Terlayani Air Bersih	100%	100%	18.060.000.000	100%	29.468.000.000	100%	29.916.400.000	100%	31.298.950.000	100%	108.743.350.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah yang Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	100%	100%	9.725.000.000	100%	30.480.000.000	100%	28.329.000.000	100%	25.807.950.000	100%	95.116.950.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pembangunan Drainase/ Saluran yang Tersesalkan untuk Penanganan Titik Genangan	100%	100%	7.912.500.000	100%	19.040.000.000	100%	17.986.625.000	100%	20.214.956.250	100%	69.454.081.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	100%	100%	37.636.995.100	100%	114.016.344.855	100%	119.717.162.098	100%	125.703.020.203	100%	468.023.522.255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	70,91%	72,11	76.804.029.407	73,21%	167.450.000.000	74,36%	176.450.000.000	75,56%	189.200.000.000	76,11%	684.450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan SDM dalam Pengembangan Jasa Konstruksi	100%	100%	920.000.000	100%	966.000.000	100%	1.014.300.000	100%	1.065.015.000	100%	3.965.315.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru	100%	100%	4.275.000.000	100%	4.488.750.000	100%	4.713.187.500	100%	4.948.846.875	100%	18.425.784.375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				113.933.915.311		260.952.651.053		137.571.600.000		159.890.600.000		1.131.507.104.212	
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	9.946.960.487	100%	20.430.000.000	100%	20.630.000.000	100%	20.430.000.000	100%	83.720.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		25%	2.155.560.579	25%	6.782.300.000	75%	6.782.300.000	100%	10.532.300.000	80%	30.879.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		18,67 %	5.047.330.480	18,67 %	83.747.751.053	67,2%	99.477.751.053	100%	123.517.751.053	80%	375.255.004.212	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani		25%	5.571.083.536	25%	29.589.500.000	75,00%	29.689.500.000	100%	29.789.500.000	100%	118.558.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		12%	91.157.980.229	12%	120.303.100.000	12%	137.471.600.000	12%	159.790.600.000	100%	522.694.900.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU		12%	55.000.000	12%	100.000.000	25,00%	100.000.000	30%	100.000.000	100%	400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KENTERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				73.294.077.060		109.596.467.664		119.702.786.009		123.178.765.566		328.908.778.436	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				28.917.314.300		38.788.572.900		44.374.059.394		44.500.816.899		44.500.816.899	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	13.887.314.300	100%	15.183.572.900	100%	20.458.639.432	100%	20.517.080.921	100%	20.517.080.921	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran perda	88,57	100%	15.030.000.000	100%	23.605.000.000	100%	23.915.419.962	100%	23.983.735.978	100%	23.983.735.978	Satuan Polisi Pamong Praja
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				30.338.381.380		44.875.341.964		48.460.173.815		50.725.879.635		189.616.405.525	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	12.206.329.939	100 persen	17.323.607.356	100%	19.139.696.231	100%	20.536.185.107	100%	72.887.107.173	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran	100%	100 Persen	18.132.051.441	100 Persen	27.551.734.608	100%	29.320.477.584	100%	30.189.694.528	100%	116.729.298.352	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				14.038.381.380		25.932.552.800		26.868.552.800		27.952.069.032		94.791.556.012	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	8.503.381.380	100 persen	13.932.000.000	100%	13.877.000.000	100%	13.652.000.000	100%	49.964.381.380	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pencegahan, pengendalian dan penanganan bencana Daerah	100%	100%	5.535.000.000	100%	12.000.552.800	100%	12.991.552.800	100%	14.300.069.032	100%	44.827.174.632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17.698.224.342		40.932.284.743		42.695.801.898		44.624.240.740		145.950.551.723	
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 Persen	10.316.181.083	100	11.702.608.380	100	12.047.944.978	100%	12.487.294.236	100%	46.554.028.677	Dinas Sosial
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	81,41%	83%	878.369.922	84,00%	1.186.600.308	85,00%	1.245.930.323	86,00%	1.308.226.839	86%	4.619.127.392	Dinas Sosial
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	0 Orang	5 Orang	29.976.080	5 Orang	52.500.000	5 Orang	55.125.000	5 Orang	57.881.250	20 orang	195.482.330	Dinas Sosial
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100%	100%	2.790.514.354	100%	16.337.835.853	100%	17.154.727.646	100%	18.012.464.028	100%	54.295.541.881	Dinas Sosial
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		87%	2.161.920.372	88%	7.982.675.688	89%	8.381.809.473	90%	8.800.899.947	90%	27.327.305.480	Dinas Sosial
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	100%	100 Persen	1.307.646.771	100%	2.803.999.279	100%	2.944.199.243	100%	3.091.409.205	100%	10.147.254.498	Dinas Sosial
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kegiatan restorasi sosial yang dilaksanakan	4 Keg	100%	213.615.760	100%	866.065.235	100%	866.065.235	100%	866.065.235	100%	2.811.811.465	Dinas Sosial
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				474.589.992.826		618.001.776.853		675.911.290.266		737.563.620.022		1.892.795.749.573	
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				13.682.446.571		15.038.399.255		16.422.292.677		16.152.219.494		61.295.357.997	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	6.612.871.771	100%	7.938.042.312	100%	8.731.846.543	100%	9.605.031.198	100%	32.887.791.824	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yg bersertifikat	71,57%	75 persen	894.337.937	78 persen	1.085.887.330	80 persen	1.655.500.000	85 persen	1.823.000.000	85 persen	5.458.725.267	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan	44,50%	46%	1.465.638.463	47%	1.641.969.613	48%	1.805.666.574	49%	1.985.233.231	49 %	6.898.507.881	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama & Anjuran;	44,09%	60 persen	4.709.598.400	70 persen	4.372.500.000	80,00%	4.229.279.560	90,00%	2.738.955.065	99,20%	16.050.333.025	Dinas Tenaga Kerja
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.768.712.990		20.809.698.203		22.844.146.206		23.533.009.743		81.955.567.142	
2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100,00%	100 %	11.616.712.990	100,00%	13.534.437.283	100 persen	14.864.131.012	100 persen	14.696.203.785	100%	54.711.485.070	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender		95,83 %	871.000.000	97,92 persen	1.747.760.920	100 persen	1.899.765.194	100 persen	2.148.530.958	100 persen	6.667.057.072	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan yang ditangani		100 %	465.000.000	100 persen	1.430.000.000	100 persen	1.573.000.000	100 persen	1.730.300.000	100 persen	5.198.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga yang aktif		50 %	225.000.000	75 Persen	742.500.000	75 Persentase	816.750.000	816,750,000	898.425.000	100 persen	2.682.675.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang melaksanakan data pilah		50 %	70.000.000	75 Persen	220.000.000	75 Persentase	242.000.000	100 Persentase	266.200.000	100 persen	798.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelurahan layak anak yang terbentuk		12 %	921.000.000	24,09 persen	1.320.000.000	42,1 persen	1.452.000.000	50 persen	1.597.200.000	50 persen	5.290.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak korban Kekerasan yang ditangani		100 %	600.000.000	100 persen	1.815.000.000	100 persen	1.996.500.000	100 persen	2.196.150.000	100 persen	6.607.650.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10.178.299.314		17.437.865.294		10.882.853.294		11.388.671.544		11.388.671.544	
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	7.778.950.022	100%	11.780.513.457	100%	5.191.665.457	100%	5.091.665.457	100,00%	5.091.665.457	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan insfakstruktur pangan	3%	5%	494.618.397	17%	1.535.704.087	23%	1.612.015.087	32%	2.155.282.087	32%	2.155.282.087	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,9%	88%	1.119.744.940	88%	2.230.800.000	88%	2.167.800.000	88%	2.209.800.000	88%	2.209.800.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tingkat capaian indeks ketahanan pangan	90,56 Score	90,56 Score	651.828.935	90,56 Score	1.675.553.000	90,56 Score	1.675.553.000	90,56 Score	1.675.553.000	90,56 Skor	1.675.553.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	60%	62,5%	133.157.020	68,75%	215.294.750	75%	235.819.750	81,25 %	256.371.000	81,25%	256.371.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				18.387.495.377		16.832.476.777		18.107.849.646		19.122.842.032		19.122.842.032	
2.10.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	5.913.990.177	100%	9.572.615.190	100%	10.250.820.599	100%	10.831.337.639	100,00%	10.831.337.639	Dinas Pertanahan
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kualitas penanganan konflik dan sengketa tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru	40%	45%	1.550.000.000	45%	1.885.058.555	55%	2.040.116.006	60%	2.148.644.403	60%	2.148.644.403	Dinas Pertanahan
2.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Kasus Ganti kerugian dan santun tanah untuk pembangunan		-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pertanahan
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase rencana dan realisasi penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur	79,37%	85,62%	10.923.505.200	85,62%	5.374.803.032	98,12 persen	5.816.913.041	100 persen	6.142.859.990	100%	6.142.859.990	Dinas Pertanahan
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				123.927.431.001		150.714.899.735		146.460.856.356		151.617.899.735		369.097.661.591	
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	13.076.225.364	5 Dokumen	14.651.377.836	5 Dokumen	14.286.073.419	5 Dokumen	14.654.377.836	5 Dokumen	29.959.356.755	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	744.689.750	2 Dokumen	781.924.236	3 Dokumen	744.689.750	2 Dokumen	781.924.236	2 Dokumen	1.526.613.986	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan hidup	8 Laporan	8 Laporan	2.553.033.500	8 Laporan	8.980.685.158	8 Laporan	8.553.033.500	8 Laporan	8.980.685.158	8 Laporan	17.533.718.658	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang dikelola	130 RTH	130 RTH	30.300.000.000	135 RTH	35.500.000.000	135 RTH	36.400.000.000	135 RTH	36.400.000.000	135 RTH	142.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.06.	PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan	50 Kegiatan/Usaha	50 Kegiatan/Usaha	258.798.700	50 Kegiatan/Usaha	271.738.635	50 Kegiatan/Usaha	258.798.700	50 Kegiatan/Usaha	271.738.635	50 Kegiatan/Usaha	530.537.335	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang lingkungan Hidup	340 Orang	340 Orang	401.252.000	340 Orang	421.314.599	340 Orang	401.252.000	340 Orang	421.314.599	340 Orang	822.566.599	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 Kegiatan	3 Kegiatan	7.142.400	3 Kegiatan	7.499.520	3 Kegiatan	7.142.400	3 Kegiatan	7.499.520	3 Kegiatan	14.641.920	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah tonase sampah yang dikelola	804 Ton	804 Ton	76.586.289.287	850 Ton	90.100.359.751	804 Ton	85.809.866.587	850 Ton	90.100.359.751	850 Ton	175.910.226.338	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.332.000.000		25.010.525.000		25.775.037.500		26.289.247.500		99.217.810.000	
2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	21.622.000.000	100 persen	24.097.175.000	100 persen	24.778.225.000	100 persen	25.262.812.500	100 persen	95.760.212.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82,61%	83 persen	215.000.000	84 persen	235.250.000	85 persen	251.200.000	86 persen	262.260.000	86 persen	963.710.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	95,43%	96 persen	210.000.000	97 persen	273.250.000	98 persen	331.800.000	99 persen	342.300.000	99 persen	1.157.350.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	47,92%	100 persen	210.000.000	100 persen	322.350.000	100 persen	329.437.500	100 persen	335.625.000	100 persen	1.008.412.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100 persen	75.000.000	100 persen	82.500.000	100 persen	84.375.000	100 persen	86.250.000	100 persen	328.125.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.578.561.932		5.225.000.000		5.747.500.000		6.322.250.000		21.873.311.932	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan nilai evaluasi perkembangan pembangunan berkategori baik		100 persen	182.216.485	100 persen	330.000.000	100 persen	363.000.000	100 persen	399.300.000	100 persen	1.274.516.485	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentasi lembaga kemasyarakatan yang aktif		50 persen	4.396.345.447	50 persen	4.895.000.000	75 persen	5.384.500.000	75 persen	5.922.950.000	75 persen	20.598.795.447	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				24.491.468.843		26.566.818.690		27.868.231.827		25.428.327.941		104.354.847.301	
2.14.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	8.922.011.752	100%	9.324.818.690	100%	10.932.231.827	100%	8.552.327.941	100%	37.731.390.210	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Keluarga yang Memiliki Anak 2-3 Orang	2,34 Orang	100 persen	970.000.000	100 persen	865.000.000	100 persen	970.000.000	100 persen	800.000.000	100 persen	3.605.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kesertaan ber KB	61%	62 Persen	9.596.625.000	70 Persen	11.297.000.000	75 Persen	11.586.000.000	80 Persen	11.696.000.000	80 Persen	44.175.625.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan (POKTAN)		100 persen	5.002.832.091	100 persen	5.080.000.000	100 persen	4.380.000.000	100 persen	4.380.000.000	100 persen	18.842.832.091	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				112.654.163.788		123.331.790.858		138.451.332.916		150.066.403.175		524.503.690.737	
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	96.416.746.438	100%	61.665.895.429	100%	71.782.930.537	100%	77.773.962.257	100%	307.639.534.661	Dinas Perhubungan
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik		80%	15.679.534.375	80%	60.794.158.429	80%	65.796.665.379	80%	71.395.203.918	80%	213.665.562.101	Dinas Perhubungan
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Terselenggaranya Pelabuhan dengan Baik		80%	557.882.975	80%	871.737.000	80%	871.737.000	80%	897.237.000	80%	3.198.593.975	Dinas Perhubungan
													-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				21.418.076.693		51.687.387.765		57.864.126.542		63.650.539.196		194.620.130.196	
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	7.489.261.481	100 persen	18.685.687.548	100 persen	21.562.256.303	100 persen	23.718.481.934	100 persen	71.455.687.266	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	65%	70 persen	6.305.819.947	75 persen	24.929.024.977	80 persen	27.421.927.475	85 persen	30.164.120.222	85 persen	88.820.892.621	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	40%	40%	7.622.995.265	60%	8.072.675.240	80%	8.879.942.764	100 %	9.767.937.040	100 %	34.343.550.309	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
													-	
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				13.084.247.008		15.709.321.699		17.020.264.817		18.326.057.934		18.326.057.934	
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100,00%	100,00%	7.356.765.702	100%	8.209.261.264	100%	8.895.199.344	100%	9.575.987.425	100%	9.575.987.425	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pelayanan izin usaha simpan pinjam	110,00%	0,72%	292.242.410	0,97%	536.991.720	1,30%	581.741.030	1,79%	626.490.340	1,79%	626.490.340	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	100,00%	21,00%	636.159.056	21,50%	500.846.282	22%	542.583.473	22,5%	584.320.663	22,5%	584.320.663	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan Kesehatan KSP/USP Koperasi	4253 unit usaha	31,15%	248.803.179	32,64%	298.284.257	34,85%	323.141.278	36,25%	347.998.300	36,25%	347.998.300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi dan usaha mikro yang kompeten	0,00%	48,52%	1.461.052.608	52,07%	2.357.511.936	55,99%	2.553.971.264	60,28%	2.750.430.592	60,28%	2.750.430.592	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bermitra dengan lembaga permodalan	92,00%	70,90%	1.871.106.388	71,82%	1.713.934.242	72,53%	1.856.762.096	73,02%	1.999.589.949	73,02%	1.999.589.949	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro	100,00%	2,10%	1.218.117.665	2,31%	2.092.491.998	2,50%	2.266.866.332	2,68%	2.441.240.665	2,68%	2.441.240.665	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				43.751.047.351		74.233.304.774		81.656.635.250		89.922.658.975		89.922.658.975	
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	77,17%	100%	36.586.290.493	70%	62.942.072.230	75%	69.236.279.452	80%	76.159.907.398	80%	76.159.907.398	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Iklim Investasi yang Kondusif	0,00%	65%	619.465.850	70%	791.412.435	75%	870.553.679	80%	1.057.960.246	80%	1.057.960.246	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi, Kerjasama Investasi dan Pelayanan Publik	51,30%	70%	1.726.413.367	80%	1.899.054.704	90%	2.088.960.174	100%	2.297.865.191	100%	2.297.865.191	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan	81,82%	70%	1.952.480.453	75%	2.147.728.498	80%	2.362.501.348	85%	2.598.751.483	85%	2.598.751.483	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	44,36%	60%	939.061.400	70%	4.332.967.540	80%	4.766.264.294	90%	5.242.890.723	90%	5.242.890.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	74,11%	100%	1.927.335.788	100%	2.120.069.367	100%	2.332.076.303	100%	2.565.283.934	100%	2.565.283.934	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
													-	
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				21.984.000.000		24.082.400.000		50.892.300.000		52.195.030.000		149.153.730.000	
2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	11.812.348.718	100 persen	12.893.583.590	100 persen	16.854.200.000	100 persen	18.963.120.000	100 persen	60.523.252.308	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang aktif	11,63	50%	1.950.000.000	65 %	2.145.000.000	75 %	4.235.000.000	90 %	4.658.500.000	90 %	12.988.500.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	38,89	46%	7.721.651.282	52 %	8.493.816.410	59 %	29.016.600.000	70 %	27.708.260.000	70 %	72.940.327.692	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	100 persen	500.000.000	100 persen	550.000.000	100 persen	786.500.000	100 persen	865.150.000	100 persen	2.701.650.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				426.664.510		1.373.350.000		1.510.685.000		1.661.753.500		4.972.453.010	
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	40%	50 persen	426.664.510	65 persen	1.373.350.000	80 persen	1.510.685.000	100 persen	1.661.753.500	100 persen	4.972.453.010	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.108.851.761		2.805.851.075		3.086.436.182		3.395.079.801		10.396.218.819	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	35%	35 persen	1.108.851.761	40 persen	2.805.851.075	60 persen	3.086.436.182	75 persen	3.395.079.801	75 persen	10.396.218.819	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				11.775.766.776		28.808.067.728		31.593.010.053		55.775.324.252		55.775.324.252	
2.22.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100,00%	100%	10.327.284.816	75%	16.990.856.538	75%	19.223.808.125	75%	21.964.500.824	75%	21.964.500.824	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Kebudayaan	50,00%	63%	893.777.612	63,5%	8.110.994.278	64%	9.429.668.416	66%	30.726.999.616	66%	30.726.999.616	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina dengan Baik	NA	36%	200.000.000	36%	550.000.000	37%	650.000.000	37%	650.000.000	37%	650.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terselenggaranya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	50%	65%	354.704.348	65%	3.156.216.912	67%	2.289.533.512	67%	2.433.823.812	67%	2.433.823.812	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				15.501.558.911		17.488.500.000		18.797.000.000		21.692.500.000		73.479.558.911	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	10.256.295.911	100 persen	13.620.500.000	100 persen	14.400.000.000	100 persen	16.777.500.000	100 persen	55.054.295.911	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan di kota pekanbaru yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	22,57	29,91 %	5.070.263.000	34,50 %	3.392.000.000	40 %	3.837.000.000	46,42 %	4.255.000.000	46,42 %	16.554.263.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	61,50%	75 persen	175.000.000	82 persen	476.000.000	85 persen	560.000.000	88 persen	660.000.000	88 persen	1.871.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				539.200.000		846.120.000		930.732.000		1.023.805.200		3.339.857.200	
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai B Audit Kearsipan Internal	62,50%	63 persen	392.000.000	65 persen	684.200.000	70 persen	752.620.000	75 persen	827.882.000	75 persen	2.656.702.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan arsip yang dilindungi dan diselamatkan	8,72%	10 persen	147.200.000	16 persen	161.920.000	22 persen	178.112.000	28 persen	195.923.200	28 persen	683.155.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				39.824.182.387		94.234.021.912		123.740.525.386		137.891.269.795		137.891.269.795	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				417.784.315		2.621.816.000		24.687.700.500		28.062.886.875		28.062.886.875	
3.25.03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	0%	20%	100.000.000	20%	250.000.000	27%	736.250.000	25%	697.500.000	25%	697.500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	45,60%	20%	197.784.315	20%	961.816.000	26%	21.161.350.500	30%	24.335.651.875	30%	24.335.651.875	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.06.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	0%	2%	120.000.000	2%	1.410.000.000	26%	2.790.100.000	28%	3.029.735.000	28%	3.029.735.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.151.479.260		11.946.239.414		15.185.250.000		16.619.275.000		16.619.275.000	
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Terselenggaranya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	50,00%	65%	548.868.100	70%	6.245.000.000	70%	7.708.000.000	75%	8.104.300.000	75%	8.104.300.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Terselenggaranya Program Pemasaran pariwisata	50,00%	65%	974.150.364	65%	4.051.239.414	65%	5.677.250.000	65%	6.164.975.000	65%	6.164.975.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Terselenggaranya Program Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	NA	-	-	40%	825.000.000	50%	900.000.000	60%	1.175.000.000	60%	1.175.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50,00%	65%	628.460.796	65%	825.000.000	70%	900.000.000	75%	1.175.000.000	75%	1.175.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				16.057.800.500		45.774.915.231		45.151.060.683		46.954.183.308		46.954.183.308	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	14.838.578.284	100%	40.105.317.695	100%	45.151.060.683	100%	46.954.183.308	100%	46.954.183.308	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	0%	6%	242.500.000	22%	420.000.000	26%	1.477.453.100	30%	1.744.645.755	30,00%	1.744.645.755	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	0%	10%	150.000.000	10%	2.607.264.377	22%	3.123.502.595	23%	3.279.677.725	23,00%	3.279.677.725	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWIAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	8,45%	23%	685.222.216	23%	1.432.333.159	26%	1.991.865.157	27%	2.091.458.415	27,00%	2.091.458.415	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi penyuluhan pertanian	16,99%	5%	141.500.000	5%	1.210.000.000	26%	2.101.521.100	29%	2.309.447.155	29,00%	2.309.447.155	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				19.119.608.266		31.916.051.267		36.366.514.203		43.454.924.612		43.454.924.612	
3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100,00%	100%	14.761.172.161	100%	21.599.596.549	100%	24.838.194.513	100%	30.651.009.549	100%	30.651.009.549	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		75%	233.249.020	75%	340.581.024	75%	399.858.627	75%	470.107.892	75%	470.107.892	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kelancaran Barang dan Jaringan Distribusi Serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat yang Representatif		70%	1.015.000.000	70%	4.700.000.000	70%	5.325.000.000	70%	5.950.000.000	70%	5.950.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		100%	72.725.033	100%	255.372.865	100%	280.910.152	100%	309.001.167	100%	309.001.167	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal Guna Memberikan Perlindungan Pada Konsumen		100%	1.047.915.819	100%	1.227.383.761	100%	1.350.122.136	100%	1.485.134.351	100%	1.485.134.351	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah pelaku usaha yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kota		80%	1.989.546.233	85%	3.793.117.068	85%	4.172.428.775	85%	4.589.671.653	85%	4.589.671.653	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.077.510.046		1.975.000.000		2.350.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000	
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Berdaya saing	41,00%	75%	2.000.000.000	75%	1.450.000.000	75%	1.700.000.000	75%	2.000.000.000	75%	2.000.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATENKOTA	Persentase Pertumbuhan Legalitas IKM	NA	80%	12.510.046	80%	200.000.000	80%	250.000.000	80%	300.000.000	80%	300.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penggunaan SIINAS	NA	15%	65.000.000	25%	325.000.000	35%	400.000.000	45%	500.000.000	45%	500.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				277.781.331.460		299.484.824.590		298.651.843.961		309.156.184.650		148.336.056.330	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				127.709.445.672		134.405.750.223		141.126.037.724		155.238.641.483		74.168.028.165	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	103.028.001.903	100%	113.220.802.085	100%	118.881.842.181	100%	130.770.026.386	100%	58.835.687.004	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang	100%	100%	21.903.270.237	100%	18.128.957.256	100%	19.035.405.118	100%	20.938.945.631	100%	13.645.978.653	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terkoordinir dan terfasilitasi	100%	100%	2.778.173.532	100%	3.055.990.882	100%	3.208.790.425	100%	3.529.669.466	100%	1.686.362.508	Sekretariat Daerah
4.02.	SEKRETARIAT DPRD				150.071.885.788		165.079.074.367		157.525.806.237		153.917.543.167		74.168.028.165	
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	69.369.945.347	100%	76.086.939.882	100%	75.320.211.629	100%	76.729.441.138	100%	39.547.168.126	Sekretariat DPRD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.03.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	80.701.940.441	100%	88.992.134.485	100%	82.205.594.608	100%	77.188.102.029	100%	34.620.860.039	Sekretariat DPRD
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				202.898.069.766		278.450.673.851		293.530.368.715		302.897.837.820		373.228.668.265	
5.01.	PERENCANAAN				20.366.808.915		28.753.829.806		31.001.492.787		31.554.662.065		26.700.490.139	
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	16.397.458.256	100%	19.652.229.806	100%	21.479.732.787	100%	23.489.926.065	100%	18.732.883.661	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	2.865.600.869	100%	5.734.500.000	100%	5.817.950.000	100%	3.990.545.000	100%	4.142.505.564	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoordinir dan Tersinkronisasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	1.103.749.790	100%	3.367.100.000	100%	3.703.810.000	100%	4.074.191.000	100%	3.825.100.914	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
													-	
5.02.	KEUANGAN				149.395.050.373		207.425.615.984		215.234.086.917		219.395.963.436		171.878.738.257	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				66.649.385.535		107.806.092.391		113.622.172.852		115.751.811.091		68.234.585.912	
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	23.111.138.639	100%	48.651.574.891	100%	50.533.374.891	100%	51.479.774.891	100%	37.582.701.757	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	80%	80%	41.838.233.256	80%	55.421.707.300	80%	58.604.487.761	80%	63.016.267.000	80%	27.552.796.647	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	100%	1.700.013.640	100%	3.732.810.200	100%	4.484.310.200	100%	1.255.769.200	100%	3.099.087.507	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
													-	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				82.745.664.838		99.619.523.593		101.611.914.065		103.644.152.345		103.644.152.345	
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	56.219.618.688	100%	62.978.976.851	100%	64.238.556.388	100%	65.523.327.515	100%	65.523.327.515	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pendapatan daerah	100%	100%	26.526.046.150	100%	36.640.546.742	100%	37.373.357.677	100%	38.120.824.830	100%	38.120.824.830	Badan Pendapatan Daerah
													-	
5.03.	KEPEGAWAIAN				19.090.533.982		23.148.375.629		25.463.213.192		28.009.534.511		95.711.657.314	
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	15.057.533.982	100 persen	17.721.525.629	100 persen	19.493.678.192	100 persen	21.443.046.011	100 persen	73.715.783.814	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	N/A	48,80%	4.033.000.000	51,50 persen	5.426.850.000	54,20 persen	5.969.535.000	57,00 persen	6.566.488.500	57,00 persen	21.995.873.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
													-	
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.300.000.000		4.565.000.000		5.021.500.000		5.523.650.000		18.410.150.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia	N/A	65,02%	3.300.000.000	65,04 persen	4.565.000.000	65,08 persen	5.021.500.000	65,10 persen	5.523.650.000	65,10 persen	18.410.150.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
													-	
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.745.676.496		14.557.852.432		16.810.075.819		18.414.027.808		60.527.632.555	
5.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100 persen	9.059.964.350	100 persen	9.865.352.432	100 persen	11.674.950.819	100 persen	12.779.509.058	100 persen	43.379.776.659	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan penelitian yang terlaksana	100%	100 persen	1.685.712.146	100 persen	4.692.500.000	100 persen	5.135.125.000	100 persen	5.634.518.750	100 persen	17.147.855.896	Badan Penelitian dan Pengembangan
													-	
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				21.177.255.812		37.404.400.000		41.144.840.000		45.259.324.000		26.700.490.140	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH				21.177.255.812		37.404.400.000		41.144.840.000		45.259.324.000		26.700.490.140	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	18.562.255.812	100%	31.904.400.000	100%	35.094.840.000	100%	38.604.324.000	100%	24.583.215.887	Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Internal yang sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu	NA	80%	1.800.000.000	100%	4.532.000.000	100%	4.985.200.000	100%	5.483.720.000	100%	1.786.450.151	Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistansi	NA	30	815.000.000	30%	968.000.000	30%	1.064.800.000	30%	1.171.280.000	30%	330.824.102	Inspektorat Daerah
													-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.					225.514.399.408		305.357.885.751		323.206.539.203		366.540.881.008		258.316.300.988	
7.01.	KECAMATAN				225.514.399.408		305.357.885.751		323.206.539.203		366.540.881.008		258.316.300.988	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SUKAJADI				14.460.154.321		17.806.050.000		19.119.300.000		20.773.550.000		21.063.719.999	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	10.745.604.721	100%	12.887.750.000	100%	13.712.500.000	100%	14.046.750.000	100%	15.016.822.097	Kecamatan Sukajadi
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	50%	80%	15.000.000	85%	70.000.000	85%	74.000.000	90%	120.000.000	90%	90.477.275	Kecamatan Sukajadi
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	19.32%	60%	1.718.800.000	65%	2.643.300.000	70%	3.152.800.000	75%	3.896.800.000	40%	3.317.500.096	Kecamatan Sukajadi
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	218.97%	70%	155.749.600	75%	240.000.000	75%	245.000.000	80%	260.000.000	80%	226.193.188	Kecamatan Sukajadi
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	77.17%	85%	1.825.000.000	90%	1.965.000.000	90%	2.180.000.000	95%	2.450.000.000	95%	2.412.727.342	Kecamatan Sukajadi
													-	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN PEKANBARU KOTA				12.306.000.227		16.499.721.400		18.511.335.404		17.935.080.890		17.206.982.534	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	63%	100%	8.910.046.535	100%	11.376.721.400	100%	11.918.735.400	100%	12.450.960.890	100%	11.495.211.341	Kecamatan Pekanbaru Kota
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	0%	80%	26.038.800	80%	48.000.000	80%	57.600.000	80%	69.120.000	100%	57.978.696	Kecamatan Pekanbaru Kota
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	19%	70%	1.550.643.425	70%	3.060.000.000	70%	3.065.000.000	70%	3.370.000.000	85%	3.291.160.654	Kecamatan Pekanbaru Kota
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	201%	90%	149.555.200	90%	150.000.000	90%	1.600.000.004	90%	170.000.000	90%	144.946.739	Kecamatan Pekanbaru Kota
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	85%	85%	1.669.716.267	85%	1.865.000.000	85%	1.870.000.000	85%	1.875.000.000	85%	2.217.685.105	Kecamatan Pekanbaru Kota
													-	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SAIL				10.318.409.760		11.698.531.512		12.835.384.663		14.153.923.130		11.976.868.168	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	8.347.771.252	100%	9.541.697.700	100%	10.462.867.470	100%	11.544.154.217	100%	8.958.743.936	Kecamatan Sail
7.01.03.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	13.200.000	100%	14.520.000	100%	1.585.239.734	Kecamatan Sail
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100%	85%	821.974.365	85%	975.443.240	85%	1.072.987.564	85%	1.180.286.321	85%	-	Kecamatan Sail
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	95%	136.972.000	95%	127.200.000	95%	139.920.000	95%	153.912.000	100%	125.941.755	Kecamatan Sail
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%	100%	1.001.692.143	100%	1.042.190.572	100%	1.146.409.629	100%	1.261.050.592	100%	1.306.942.744	Kecamatan Sail
													-	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN LIMA PULUH				12.710.812.373		13.417.300.192		14.166.840.192		14.510.150.192		13.710.299.260	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	9.774.458.011	100%	10.120.300.192	100%	10.650.840.192	100%	10.793.550.192	100%	10.097.757.888	Kecamatan Limapuluh
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	0	80%	14.510.460	85%	22.000.000	85%	27.000.000	90%	35.000.000	90%	28.849.199	Kecamatan Limapuluh
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	50%	60%	1.477.302.170	65%	1.786.500.000	70%	1.901.000.000	75%	2.004.600.000	75%	1.930.083.303	Kecamatan Limapuluh
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	100	70%	144.858.805	75%	148.500.000	75%	155.000.000	80%	162.000.000	80%	166.386.492	Kecamatan Limapuluh
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	100%	1.299.682.927	90%	1.340.000.000	90%	1.433.000.000	95%	1.515.000.000	95%	1.487.222.378	Kecamatan Limapuluh
													-	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SENAPELAN				12.937.267.736		17.373.081.536		21.221.707.215		26.187.065.741		17.800.326.760	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	9.178.441.915	100%	12.920.796.528	100%	15.700.302.608	100%	19.188.979.741	100%	12.172.650.679	Kecamatan Senapelan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	19.178.910	85%	73.545.070	90%	80.899.577	85%	88.989.535	85%	244.112.816	Kecamatan Senapelan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	85%	100%	1.965.069.647	75%	2.255.487.945	80%	2.419.539.640	90%	2.594.896.650	90%	3.274.845.274	Kecamatan Senapelan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	0%	149.555.200	85%	175000000	90%	196.000.000	95%	218.000.000	95%	-	Kecamatan Senapelan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.625.022.064	85%	1.948.251.993	90%	2.824.965.390	95%	4.096.199.815	95%	2.108.717.991	Kecamatan Senapelan
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN RUMBAI BARAT				14.540.328.581		21.689.604.636		22.762.834.868		23.890.876.612		16.613.638.309	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	46.15%	100%	10.773.707.089	100%	14.937.846.476	100%	15.684.738.800	100%	16.468.875.740	100%	10.584.791.364	Kecamatan Rumbai Barat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang dilaksanakan	0%	100%	52.808.165	85%	278.250.000	90%	292.162.500	90%	308.770.625	90%	270.721.699	Kecamatan Rumbai Barat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	10.25%	100%	1.770.603.976	70%	4.321.008.160	75%	4.537.058.568	80%	4.763.911.497	80%	3.296.835.067	Kecamatan Rumbai Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	171.98%	100%	149.555.200	75%	410.000.000	75%	420.000.000	80%	430.000.000	80%	752.552.457	Kecamatan Rumbai Barat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	101.28%	100%	1.793.654.151	90%	1.742.500.000	90%	1.828.875.000	95%	1.919.318.750	95%	1.708.737.721	Kecamatan Rumbai Barat
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BUKIT RAYA				15.313.292.110		24.873.957.164		27.897.723.592		28.752.729.093		16.101.917.232	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	96.5%	100%	10.335.509.324	100%	14.500.125.020	100%	15.902.125.020	100%	15.254.725.020	100%	8.382.882.859	Kecamatan Bukit Raya
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	182.671.284	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	80.596.150	Kecamatan Bukit Raya
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	56,3%	85%	2.896.518.377	90%	6.588.142.556	95%	7.512.771.067	95%	8.192.211.067	95%	4.965.668.704	Kecamatan Bukit Raya
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	100%	243.360.800	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	95%	100.000.000	Kecamatan Bukit Raya
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	80.9%	85%	1.655.232.325	90%	3.385.689.588	95%	4.062.827.505	95%	4.865.793.006	95%	2.572.769.519	Kecamatan Bukit Raya
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN BINA WIDYA				16.379.835.553		18.017.819.108		19.819.601.019		21.801.561.120		17.800.326.760	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	80%	100%	11.847.275.935	100%	13.032.003.529	100%	14.335.203.881	100%	15.768.724.269	100%	10.606.915.303	Kecamatan Bina Widya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	85%	90%	110.000.000	90%	121.000.000	90%	133.100.000	90,0%	146.410.000	90,0%	212.237.960	Kecamatan Bina Widya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	20%	30%	2.796.597.841	30%	3.076.257.625	35%	3.383.883.388	40%	3.722.271.726	40%	4.905.957.884	Kecamatan Bina Widya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terciptanya Ketertaman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	141.491.974	Kecamatan Bina Widya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	90%	90%	1.475.961.777	90%	1.623.557.954	90%	1.785.913.750	95%	1.964.505.125	95%	1.933.723.639	Kecamatan Bina Widya
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI				16.903.256.411		23.589.449.247		23.228.316.488		26.068.216.379	100,00%	20.173.703.861	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	39%	100%	11.466.106.815	100%	16.083.966.070	100%	15.037.116.488	100%	17.206.896.379	100%	13.430.317.409	Kecamatan Marpoyan Damai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	50%	90%	62.963.100	90%	126.000.000	95%	150.000.000	95%	170.000.000	95%	163.013.773	Kecamatan Marpoyan Damai
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	25%	85%	3.478.514.249	90%	4.752.000.000	90%	5.226.200.000	90%	5.612.820.000	90%	3.277.723.413	Kecamatan Marpoyan Damai
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	50%	100%	149.555.200	100%	245.000.000	100%	255.000.000	100%	275.000.000	100%	373.884.800	Kecamatan Marpoyan Damai
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	42%	85%	1.746.117.047	90%	2.382.483.177	90%	2.560.000.000	95%	2.803.500.000	95%	2.928.764.266	Kecamatan Marpoyan Damai
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN TENAYAN RAYA				18.709.636.073		25.681.106.958		30.817.328.349		36.980.794.020	100,00%	24.733.769.013	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	12.324.508.224	100%	18.424.929.377	100%	22.109.915.252	100%	26.531.898.303	100%	11.952.374.309	Kecamatan Tenayan Raya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	24.940.200	100%	29.928.240	100%	35.913.888	100%	43.096.666	100,0%	6.290.879.095	Kecamatan Tenayan Raya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	3.529.810.860	100%	4.151.371.795	100%	4.981.646.154	100%	5.977.975.385	100%	3.728.703.808	Kecamatan Tenayan Raya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	100%	161.944.000	100%	120.000.000	100%	144.000.000	100%	172.800.000	100%	107.782.314	Kecamatan Tenayan Raya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	2.668.432.789	100%	2.954.877.546	100%	3.545.853.055	100%	4.255.023.666	100%	2.654.029.487	Kecamatan Tenayan Raya
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI				15.646.425.827		17.211.068.408		18.932.175.248		20.319.560.812	100,00%	14.833.605.633	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	65.5%	80%	11.292.442.683	80%	12.421.686.951	85%	13.663.855.646	85%	15.030.241.210	85%	8.191.072.982	Kecamatan Payung Sekaki
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	82.5%	80%	110.400.000	100%	121.440.000	100%	133.584.000	100%	133.584.000	100%	204.878.133	Kecamatan Payung Sekaki
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	60%	80%	2.138.120.588	80%	2.351.932.646	85%	2.587.125.910	85%	2.587.125.910	85%	4.245.552.897	Kecamatan Payung Sekaki
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	142.000.000	100%	266.452.322	Kecamatan Payung Sekaki
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	90%	2.005.462.556	85%	2.206.008.811	90%	2.426.609.692	90%	2.426.609.692	90%	1.925.649.299	Kecamatan Payung Sekaki
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN RUMBAI				17.433.213.157		23.861.640.184		26.020.117.046		28.428.012.454		16.613.638.309	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	10.771.667.892	100%	16.436.261.247	100%	18.225.200.646	100%	20.184.930.679	100%	9.092.774.227	Kecamatan Rumbai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	75%	80%	235.156.526	85%	247.816.673	90%	260.227.500	90%	293.237.950	90%	209.700.846	Kecamatan Rumbai
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	20%	60%	3.735.306.699	65%	4.633.234.264	70%	4.870.645.900	75%	5.160.098.225	75%	5.062.973.652	Kecamatan Rumbai
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	60%	70%	151.187.640	75%	150.000.000	75%	150000000	80%	150.000.000	80%	222.125.781	Kecamatan Rumbai
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	75%	85%	2.539.894.400	90%	2.394.328.000	90%	2.514.043.000	95%	2.639.745.600	95%	2.026.063.804	Kecamatan Rumbai
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN TUAH MADANI				18.303.661.045		31.367.732.856		34.220.006.140		37.381.006.755		17.800.326.760	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	80%	100%	9.202.542.859	100%	16.656.201.057	100%	18.071.821.162	100%	19.629.003.279	100%	7.213.459.844	Kecamatan Tuah Madani
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	70%	80%	135.296.605	85%	331.729.443	85%	364.902.387	90%	401.392.626	90%	238.722.623	Kecamatan Tuah Madani
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	20%	60%	6.636.610.585	65%	11.076.945.284	70%	12.150.139.812	75%	13.354.153.793	75%	7.971.307.622	Kecamatan Tuah Madani
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	60%	70%	143.360.000	85%	110.000.000	85%	121.000.000	90%	133.100.000	90%	79.159.354	Kecamatan Tuah Madani
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	75%	85%	2.185.850.996	90%	3.192.857.072	90%	3.512.142.779	95%	3.863.357.057	95%	2.297.677.316	Kecamatan Tuah Madani
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN KULIM				15.720.263.352		16.084.776.520		4.820.238.346		17.623.216.113		18.536.933.520	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	11.359.027.552	100%	11.505.478.930	100%	11.975.876	100%	12.574.540.520	100%	11.570.013.619	Kecamatan Kulim
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	88.575.000	100%	93.003.750	100%	97.653.938	100%	102.536.634	100%	106.655.715	Kecamatan Kulim
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	2.472.800.000	100%	2.596.440.000	100%	2.726.262.000	100%	2.862.575.100	100%	4.828.985.993	Kecamatan Kulim
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	110.000.000	100%	115.500.000	100%	121.275.000	100%	127.338.750	100%	118.506.350	Kecamatan Kulim

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL KINERJA RPD (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)	TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET	RP.	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.689.860.800	100%	1.774.353.840	100%	1.863.071.532	100%	1.956.225.109	100%	1.912.771.843	Kecamatan Kulim
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN RUMBAI TIMUR				13.831.842.882		26.186.046.030		28.833.630.633		31.735.137.697		13.350.245.070	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	10.143.906.784	100%	17.246.314.570	100%	18.970.946.027	100%	20.868.040.630	100%	7.124.213.735	Kecamatan Rumbai Timur
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanaka	70%	75%	51.405.150	80%	275.731.500	85%	303.304.650	90%	333.635.115	90%	192.031.826	Kecamatan Rumbai Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksanakan	70%	75%	1.951.327.641	80%	5.713.799.960	85%	6.285.179.956	90%	6.913.697.952	90%	3.979.347.450	Kecamatan Rumbai Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	75%	80%	143.360.800	85%	358.600.000	90%	423.440.000	95%	483.928.000	95%	249.745.179	Kecamatan Rumbai Timur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	70%	75%	1.541.842.507	80%	2.591.600.000	85%	2.850.760.000	90%	3.135.836.000	90%	1.804.906.879	Kecamatan Rumbai Timur
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				28.257.295.635		110.728.632.805		21.597.332.788		22.186.416.868		29.667.211.266	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				28.257.295.635		110.728.632.805		21.597.332.788		22.186.416.868		29.667.211.266	
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	10.793.599.596	100%	11.128.708.888	100%	11.296.904.218	100%	11.700.671.616	100%	16.229.235.220	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman dan Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat	100%	100%	2.746.418.860	100%	3.021.060.746	100%	3.323.166.820	100%	3.655.483.502	100%	1.548.154.202	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan partisipasi pemilih	100%	100%	9.127.766.683	100%	92.299.220.815	100%	3.062.676.150	100%	2.915.676.150	100%	4.012.596.421	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS yang dibina	100%	100%	653.056.756	100%	705.056.756	100%	440.000.000	100%	440.000.000	100%	645.882.545	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	1.361.868.140								834.515.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik dimasyarakat	100%	100%	3.574.585.600	100%	3.574.585.600	100%	3.474.585.600	100%	3.474.585.600	100%	6.396.827.679	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran Daerah selama periode RPD. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Pekanbaru terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi.

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pekanbaru

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Nilai	81,58	82,24	82,45	82,58	82,80	82,80
		1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,55	15,75	15,93	16,18	16,25	16,25
				1.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,92	12,01	12,15	12,23	12,30	12,30
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,41	72,50	72,58	72,61	72,70	72,70
		3	Meningkatnya Standard Hidup Layak	3	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	14.360.000	14.614.170	14.742.937	14.872.839	15.003.885	15.003.885
2	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu			2.1	Angka Kriminalitas	Angka	N/A	1.450	1.334	1.228	1.130	1.130
		4	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	N/A	100	100	100	100	100
				4.2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	88,57	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
2	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu			2.2	Persentase Pemajuan Budaya Melayu	Persen	6,2	6,3	6,35	6,4	6,5	6,5
		5	Meningkatnya Ketahanan Budaya	5	Persentase Budaya Melayu yang Direvitalisasi	Persen	10	15	20	25	30	30
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi			3.1	Indeks Infrastruktur	Indeks	72,13	72,80	73,90	74,50	75,00	75,00
		6	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	6.1	Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	70,91	72,11	73,21	74,36	75,56	75,56
				6.2	Keterjangkauan Layanan Angkutan	Persen	77	78	80	81	82	82
		7	Meningkatnya Akses Air Bersih	7	Cakupan Rumah tangga Pelayanan Air Bersih Perpipaan	SR	14.067	16.850	28.150	38.250	51.350	51.350
		8	Meningkatnya Sanitasi yang Layak	8	Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	SR	N/A	1.000	4.000	7.000	10.000	10.000
		9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	9.1	Luas Areal Kawasan Kumuh	Ha	267,76	217,76	157,76	87,76	0	0
				9.2	Rasio Perumahan yang Difasilitasi PSU	Rasio	N/A	12	14	16	18,6	60,67
				9.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	84,33	86,49	89,36	92,31	94,48	94,48

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	10	Menurunnya Titik Genangan	10	Jumlah Titik Genangan yang Tertangani	Jumlah Titik	N/A	20	40	60	80	80
		11	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	11	Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	Persen	5,60	5,62	5,65	5,68	5,70	5,70
				3.2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,24	4,73– 5,51	4,81-5,60	5,00-5,60	5,55– 6,00	5,55– 6,00
		12	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	12.1	Gini Rasio	Indeks	0,391	0,385	0,375	0,365	0,345	0,345
				12.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	21,09	21,35	21,63	21,91	22,18	22,18
				12.3	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	Rupiah (Miliar)	2.019,35	2.030,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00	2.100,00
		13	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,56	90,56	90,56	90,56	90,56	90,56
		14	Meningkatnya Investasi Daerah	14	Nilai Investasi Berskala Nasional	PMDN [Rp]	2,21 T	2.60 T	2.71 T	2.82 T	2.90 T	2.90 T
						PMA (Rp)	1,90 T	2.10 T	2.21 T	2.23 T	2.29 T	2.29 T

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	60,82	60,11	60,46	60,81	61,16	61,16
				15.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,67	51,69	51,79	51,90	52,00	52,00
				15.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,06	85,73	85,83	85,93	86,03	86,03
				15.3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	26,31	27,17	28,43	29,68	30,90	30,90
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	62,30	65,65	67,52	69,40	71,25	71,25
				16.1	Nilai IKM	Nilai	83,80	85,58	86,55	87,52	88,49	88,49
		16.2	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,17 (Cukup)	2,70 (Baik)	3,00 (Baik)	3,30 (Baik)	3,50 (Sangat Baik)	3,50 (Sangat Baik)		
		17 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17.1	Nilai AKIP	Nilai	64,09	65,0 (B)	66,0 (B)	67,0 (B)	68,0 (B)	68,0 (B)	
			17.2	Nilai LPPD	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,6 (Tinggi)	3,8 (Tinggi)	4 (Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)	

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekanbaru

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Indikator Makro							
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,24	4,73– 5,51	4,81-5,60	5,00-5,60	5,55– 6,00	5,55– 6,00
1.1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Miliar (Rupiah)	126.556	127.655	127.899	128.765	129.808	129.808
1.1.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Miliar (Rupiah)	72.619	72.968	73.128	73.785	74.128	74.128
1.2	Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi							
1.2.1	Pertumbuhan PDRB (ADHK Tanpa Migas)	Persen	5,24	6,03	6,05	6,07	7,02	7,02
1.2.2	Laju Inflasi	Persen	1,54	1,68	1,72	1,80	1,82	1,82
1.2.3	PDRB Per Kapita	Juta (Rupiah)	127,24	128,35	129,82	130,20	131,25	131,25
1.2.4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	2,83	2,82	2,81	2,80	2,79	2,79
1.2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,58	82,24	82,45	82,58	82,80	82,80

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Kesejahteraan Sosial							
1.3.1	Angka Melek Huruf	Persen	N/A	99,97	99,98	99,99	99,99	99,99
1.3.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	11,92	12,01	12,15	12,23	12,30	12,30
1.3.3	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	15,55	15,75	15,93	16,18	16,25	16,25
1.3.4	Angka partisipasi kasar							
	SD/MI	Persen	103,09	100	100	100	100	100
	SMP/MTs	Persen	97,94	100	100	100	100	100
1.3.5	Angka partisipasi murni							
	SD/MI	Persen	94,25	100	100	100	100	100
	SMP/MTs	Persen	75,54	100	100	100	100	100
1.3.6	Angka usia harapan hidup	Tahun	72,41	72,50	72,58	72,61	72,70	72,70
1.3.7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.3.8	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	94,00	92,05	93,00	93,05	94,00	94,05

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	WAJIB PELAYANAN DASAR							
2.1.1	PENDIDIKAN							
2.1.1.1	Angka Kelulusan							
2.1.1.1.1	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	98,60	100	100	100	100	100
2.1.1.1.2	Angka kelulusan SMP/MTs	Persen	99,65	100	100	100	100	100
2.1.1.2	Angka partisipasi kasar							
2.1.1.2.1	SD/MI	Persen	103,09	100	100	100	100	100
2.1.1.2.2	SMP/MTs	Persen	97,94	100	100	100	100	100
2.1.1.3	Angka partisipasi murni							
2.1.1.3.1	SD/MI	Persen	94,25	100	100	100	100	100
2.1.1.3.2	SMP/MTs	Persen	75,54	100	100	100	100	100
2.1.1.4	Persentase Cakupan Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persen	N/A	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.5	Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	56,64 (N+S)	88,44	89,26	90,28	90,90	90,90
			85,61 (N)					
2.1.2	KESEHATAN							
2.1.2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,41	72,50	72,58	72,61	72,70	72,70
2.1.2.2	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	83.95	100	100	100	100	100
2.1.2.3	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	81.27	100	100	100	100	100
2.1.2.4	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	78.40	100	100	100	100	100
2.1.2.5	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	77.96	100	100	100	100	100
2.1.2.6	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	5,92	100	100	100	100	100
2.1.2.7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	19,10	100	100	100	100	100
2.1.2.8	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	Persen	33,96	100	100	100	100	100
2.1.2.9	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	13,39	100	100	100	100	100
2.1.2.10	Pelayanan kesehatan penderita diabetes sesuai standar	Persen	37,13	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.11	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	48,47	100	100	100	100	100
2.1.2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar	Persen	36,75	100	100	100	100	100
2.1.2.13	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	Persen	59,14	100	100	100	100	100
2.1.2.14	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000KH	6	6	6	5	4	4
2.1.2.15	Angka kematian balita per jumlah balita	per jumlah balita	1	1	1	1	1	1
2.1.2.16	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000KH	5	5	5	5	5	5
2.1.2.17	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000KH	4	4	4	4	4	4
2.1.2.18	Rasio posyandu per satuan balita	persen	100	100	100	100	100	100
2.1.2.19	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 / Kecamatan	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
2.1.2.20	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1 / 100.000 PDDK	33	12	12	12	12	12
2.1.2.21	Rasio dokter per satuan penduduk	1 / 1.000 PDDK	0.9	1	1	1	1	1
2.1.2.22	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 / 1.000 PDDK	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2.1.2.23	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.24	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	55	70	80	90	100	100
2.1.2.25	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	80	85	90	93	95	95
2.1.2.26	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.2.27	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	90	93	95	97	98	98
2.1.2.28	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Orang	6	6	6	7	7	7
2.1.2.29	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.2.30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	70	80	90	95	100	100
2.1.2.31	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	173	181	188	195	203	203
2.1.2.32	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	1,98	1,79	1,67	1,45	1,31	1,31
2.1.2.33	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	36,80	38,60	40,50	42,50	44,50	44,50
2.1.2.34	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	60	80	85	90	90	90
2.1.2.35	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.2.36	Penderita Diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.2.37	Angka kejadian malaria	Persen	0,75	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.38	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045	0,045
2.1.2.39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	16,84	18,52	20,37	22,40	24,64	24,64
2.1.2.40	Cakupan kunjungan bayi	Persen	95	96	97	98	100	100
2.1.2.41	Cakupan puskesmas	Persen	140	140	140	140	140	140
2.1.2.42	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75
2.1.2.43	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	92	94	96	98	100	100
2.1.2.44	Cakupan pelayanan nifas	Persen	85	88	90	95	100	100
2.1.2.45	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.2.46	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	77,96	100	100	100	100	100
2.1.2.47	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.2.48	Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat	Persen	96	97	98	99	100	100
2.1.2.49	Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin	Persen	16,84	18,52	20,37	22,40	24,64	24,64
2.1.2.50	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.51	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
2.1.3.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	70,91	72,11	73,21	74,36	75,56	75,56
2.1.3.2	Cakupan rumah tangga pelayanan air bersih perpipaan	SR	14.067	16.850	28.150	38.250	51.350	51.350
2.1.3.3	Cakupan rumah tangga bersanitasi layak	SR	N/A	1.000	4.000	7.000	10.000	10.000
2.1.3.4	Jumlah titik genangan yang ditangani	Titik	N/A	20	40	60	80	80
2.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
2.1.4.1	Luas areal kawasan kumuh	Ha	267,76	217,76	157,76	87,76	0	0
2.1.4.2	Jumlah rumah layak huni yang ditangani	Unit	1.237	386	386	386	79	2.474
2.1.4.3	Persentase PSU lingkungan berkondisi baik	Persen	N/A	12	14	16	18,67	60,67
2.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
2.1.5.1	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	Persen	88,57	100	100	100	100	100
2.1.5.2	Persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
2.1.5.3	Rata-rata waktu tanggap bencana	Menit	25	22	20	20	20	20

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.5.4	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai ancaman	Persen	90	100	100	100	100	100
2.1.5.5	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit (<i>response time rate</i>)	Persen	75	82	83	85	87	87
2.1.6	SOSIAL							
2.1.6.1	Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan sosial	Persen	73,06	73,36	73,66	73,86	74	74
2.1.6.2	Persentase PSKS yang meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	Persen	81,43	83	84	85	86	86
2.2	WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
2.2.1	TENAGA KERJA							
2.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,29	8,17	8,11	8,05	7,99	7,99
2.2.1.2	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama & Anjuran	Persen	44,09	60	70	80	90	90
2.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.2.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,01	93,12	93,23	93,34	93,45	93,45

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,23	70,61	71,99	73,37	74,75	74,75
2.2.2.3	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
2.2.2.4	Persentase Lembaga Layanan Masyarakat yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif	Persen	50	75	75	100	100	100
2.2.2.5	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100
2.2.2.6	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Persen	100	100	100	100	100	100
2.2.2	KETAHANAN PANGAN							
2.2.2.1	Nilai indeks ketahanan pangan	Indeks	90,56	83,25	83,5	83,75	84	84
2.2.2.2	Jumlah kegiatan infrastruktur yang dibangun	Jumlah kegiatan	3	3	3	1	1	1
2.2.2.3	Persentase daerah rentan rawan pangan yang dikurangi	Persen	17	12,05	10,84	9,64	8,43	8,43
2.2.2.4	Persentase cadangan pangan Pemerintah Daerah	Persen	5,75	1,25	1,75	2,25	2,75	2,75
2.2.3	PERTANAHAN							
2.2.3.1	Persentase penyediaan tanah untuk infrastruktur, sarana dan prasarana berdasarkan prioritas pembangunan	Persen	79,37	85,62	91,87	98,12	100	100
2.2.3.2	Persentase kualitas penanganan konflik dan sengketa tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru	Persen	40	45	50	55	60	60

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4	LINGKUNGAN HIDUP							
2.2.4.1	Indeks kualitas air	Indeks	52,67	51,69	51,79	51,90	52,00	52,00
2.2.4.2	Indeks kualitas udara	Indeks	87,06	85,73	85,83	85,93	86,03	86,03
2.2.4.3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	26,31	27,17	28,43	29,68	30,90	30,90
2.2.5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.2.5.1	Indeks Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Indeks	64.76	71.01	76.64	82.28	87.86	87.86
2.2.5.2	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	indeks	81.61	85.77	88.71	91.65	94.48	94.48
2.2.5.3	Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan	Persen	47.92	56.25	64.58	72.92	81.25	81.25
2.2.6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.2.6.1	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan kota	Persen	N/A	100	100	100	100	100
2.2.6.2	Persentase Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif	Persen	N/A	50	50	75	75	75
2.2.7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.2.7.1	Penurunan Angka Kelahiran Per Wanita Pasangan Usia Subur (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,34	2,31	2,26	2,24	2,21	2,21
2.2.7.2	Persentase Kampung KB mandiri.	Persen	30	60	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
2.2.7.3	Presentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	Persen	14.20	14.50	14.75	15	15.25	15.25
2.2.7.4	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)	Persen	3.72	3.50	3.25	3.20	3.15	3.15
2.2.7.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0 -100)	52,36	54,28	55,79	56,82	57,36	57,36
2.2.7.6	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan usia 25-49 tahun	Tahun	22	22	22	23	23	23
2.2.7.7	Persentase Baduta Stunting	Persen	16,76%	16,70%	16,60%	16,50%	16%	16%
2.2.7.8	Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ mCPR)	Persen	43,67%	44,00%	45,03%	47,03%	50,92%	50,92%
2.2.7.9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	13,86%	8,97%	8,50%	8%	7,20%	7,20%
2.2.7.10	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	17,40%	17,50%	18%	18,20%	19%	19%
2.2.8	PERHUBUNGAN							
2.2.8.1	Tersedianya MRT	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2.8.2	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan yang Teratasi	Persen	68	86	88	90	92	92
2.2.8.3	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Angkutan Umum di Jalan	Persen	100	100	100	100	100	100
2.2.8.4	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Ada Terpelihara dengan Baik	Persen	68	86	88	90	92	92
2.2.8.5	Persentase Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan yang Terbangun dan Berfungsi Baik	Persen	100	76	78	80	81	81

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.2.9.1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,17	2,7	3	3,3	3,5	3,5
2.2.9.2	Persentase pemanfaatan layanan publik berbasis TIK	Persen	N/A	35	45	65	80	80
2.2.9.3	Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Indeks	N/A	C	B	A	A	A
2.2.10	KOPERASI DAN UKM							
2.2.10.1	Jumlah Koperasi Berkualitas	Unit	86	120	130	140	150	150
2.2.10.2	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Unit	N/A	400	450	500	550	550
2.2.10.3	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra dengan Lembaga Pembiayaan	Unit	16.248	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
2.2.11	PENANAMAN MODAL							
2.2.11.1	Nilai investasi PMDN	Triliun (Rupiah)	2,21 T	2.60 T	2.71 T	2.82 T	2.90 T	2.90 T
2.2.11.2	Nilai investasi PMA	Triliun (Rupiah)	1,90 T	2.10 T	2.21 T	2.23 T	2.29 T	2.29 T
2.2.12	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
2.2.12.1	Persentase lembaga kepemudaan yang aktif	Persen	11,63	50	65	75	90	90

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.12.2	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	38,89	46	52	59	70	70
2.2.13	STATISTIK							
2.2.13.1	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persen	42	45	55	75	85	85
2.2.14	KEBUDAYAAN							
2.2.14.1	Persentase peningkatan objek budaya yang terkelola dengan baik	Persen	6	6	6	6	7	7
2.2.14.2	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Cagar budaya	15	22	24	24	26	26
2.2.14.3	Persentase kesenian tradisional yang terbina dengan baik	Kesenian tradisional	N/A	36	36	37	37	37
2.2.15	PERPUSTAKAAN							
2.2.15.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,92	12,01	12,15	12,23	12,30	12,30
2.2.15.2	Indeks pembangunan literasi	Indeks	18.93	19.20	19.30	19.40	19.60	19.60
2.2.15.3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	59,86	60	61	63	65	65
2.2.16	KEARSIPAN							
2.2.16.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Pekanbaru	Nilai	71.63	72	72.25	72.50	73	73

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	PILIHAN							
2.3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
2.3.1.1	Jumlah produksi pertanian, produksi hasil perikanan dan produksi ikan konsumsi	Ton	480.229,68	482.807,60	485.539,75	488.059,63	490.597,12	490.597,12
2.3.1.2	Jumlah populasi ternak, ikan hias dan benih ikan	Ekor	106.252.570	107.633.853	109.236.060	110.859.605	112.509.503	112.509.503
2.3.1.3	Jumlah produksi pengolahan/hasil olahan	Ton	12.781	12.947	13.115	13.286	13.459	13.459
2.3.1.4	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	98,25	99,53	100	100	100	100
2.3.1.5	Jumlah produksi ikan budidaya	Ton	9.871,67	10.095,62	10.459,06	10.595,03	10.732,76	10.732,76
2.3.1.6	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	98.642.646	99.925.000	101.425.000	102.945.000	104.490.000	104.490.000
2.3.1.7	Jumlah produksi ikan hias	Ekor	963.136	977.500	992.200	1.007.100	1.022.200	1.022.200
2.3.1.8	Jumlah populasi ternak	Ekor	6.599.692	6.731.353	6.818.860	6.907.505	6.997.303	6.997.303
2.3.1.9	Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan	Ton	173,75	176,01	178,30	180,62	182,96	182,96
2.3.2	PARIWISATA							
2.3.2.1	Jumlah ekonomi kreatif yang difasilitasi	Ekonomi kreatif	50	77	82	89	91	91

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.3	PERTANIAN							
2.3.3.1	Jumlah produksi bibit perkebunan	Batang	450.654	451.105	451.556	452.008	452.460	452.460
2.3.3.2	Jumlah produksi tanaman pangan	Ton	7.798,62	7.900,00	8.002,70	8.106,74	8.212,12	8.212,12
2.3.3.3	Jumlah produksi hortikultura	Ton	44.607,46	45.187,36	45.774,80	46.369,87	46.972,68	46.972,68
2.3.3.4	Jumlah produksi perkebunan	Ton	417.853,68	419.525,09	421.203,19	422.888,00	424.579,56	424.579,56
2.3.3.5	Jumlah produksi bibit perkebunan	Batang	450.654	451.105	451.556	452.008	452.460	452.460
2.3.3.6	Jumlah produksi olahan hasil pertanian	Ton	3.455,08	3.500,00	3.545,50	3.591,59	3.638,28	3.638,28
2.3.3.7	Jumlah produksi BAH (Bahan Asal Hewan) dan HBS (Hasil Bahan Asal Hewan)	Ton	9.152,02	9.271,00	9.391,52	9.513,61	9.637,29	9.637,29
2.3.3.8	Persentase status kesehatan hewan	Persen	92,45	93,65	93,84	94,02	94,21	94,21
2.3.4	PERDAGANGAN							
2.3.4.1	Persentase kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	Persen	29,94	32,6	33,5	34,5	36,5	36,5
2.3.4.2	Jumlah regulasi distribusi Bapokting	Regulasi	N/A	1	1	1	1	1
2.3.4.3	Jumlah Jenis UTTP yang di awasi	Jenis	38	85	85	85	87	87

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.5	PERINDUSTRIAN							
2.3.5.1	Persentase IKM berdaya saing	Persen	41	75	75	75	75	75
2.3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN							
2.3.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
2.3.1.1	Persentase Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen		100	100	100	100	100
2.3.1.3	Tingkat keselarasan Dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100
2.3.1.4	Persentase Capaian Kinerja RPJMD	Persen	90	100	100	100	100	100
2.3.1.5	Nilai evaluasi AKIP Kota	Kategori	64,09	65,0 (B)	66,0 (B)	67,0 (B)	68,0 (B)	68,0 (B)
2.3.2	KEUANGAN							
2.3.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3.2.2	Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	Persen	95	96	97	98	99	99
2.3.2.3	Persentase bidang lahan aset daerah yang sudah bersertifikat	Persen	45	46	47	48	49	49

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
2.3.2.5	Tingkat Kepatuhan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
2.3.2.6	Persentase Aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	Persen	70	80	85	87	90	90
2.3.2.7	Persentase Tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	45	48	50	55	60	60
2.3.2.8	Jumlah pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah	Rupiah	3 M	4 M	4,5M	4,7 M	4,8 M	4,8 M
2.3.2.9	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Miliar (Rupiah)	587,50	780,92	1077,31	1073,20	1148,04	1148,04
2.3.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
2.3.3.1	Nilai System Merit Kota Pekanbaru	Nilai	325	330	335	340	345	345
2.3.3.2	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	Persen	N/A	68	71	74	76	76
2.3.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
2.3.4.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai standar yang dimanfaatkan	Persen	70	80	85	85	90	90
2.3.4.2	Persentase hasil Kegiatan kelitbangan Yang direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	100
2.3.4.3	Persentase OPD dan masyarakat yang memiliki inovasi di Kota Pekanbaru	Persen	50	75	80	85	90	90

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.4.4	Persentase Inovasi OPD yang difasilitasi oleh BPP Kota Pekanbaru	Persen	93,9	100	100	100	100	100
2.3.4.5	Persentase Diseminasi Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100
2.3.5	PENGAWASAN							
2.3.5.1	Persentase perangkat daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Daerah/Negara yang material	Persen	50 (22 OPD)	55 (24 OPD)	59 (26 OPD)	64 (28 OPD)	71 (31 OPD)	71 (31 OPD)
2.3.5.2	Tingkat implementasi SPIP Kota Pekanbaru	Level	level 3 (terdefinisi)	level 3 (terdefinisi)	level 3 (terdefinisi)	level 3 (terdefinisi)	level 3 (terdefinisi)	level 3 (terdefinisi)
2.3.5.3	Persentase perangkat daerah yang memperoleh evaluasi nilai AKIP kategori B	Persen	12 (5 OPD)	23 (10 OPD)	34 (15 OPD)	46 (20 OPD)	57 (25 OPD)	57 (25 OPD)
2.3.6	SEKRETARIAT DAERAH							
2.3.6.1	Nilai LPPD	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,6 (Tinggi)	3,8 (Tinggi)	4 (Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)
2.3.6.2	Persentase perangkat daerah dengan IKM sangat baik	Persen	100	100	100	100	100	100
2.3.6.3	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	Persen	N/A	66.66	80.00	93.33	100	100
2.3.6.4	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	Persen	N/A	72.29	84.33	96.38	100	100
2.3.6.5	Persentase rancangan produk hukum daerah yang Harmonis	Persen	100	100	100	100	100	100
2.3.7	SEKRETARIAT DEWAN							
2.3.7.1	Fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja 2021	TAHUN				Target Kinerja Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.7.2	Fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
3	ASPEK DAYA SAING							
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Pengeluaran konsumsi RT perkapita	Rupiah	14.360.000	14.614.170	14.742.937	14.872.839	15.003.885	15.003.885
3.2	Fokus Fasilitas wilayah/ infrastuktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,036	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
3.2.1.2	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Penumpang	78	79	82	85	88	88
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	85%	86%	87%	88%	89%	89%
3.2.2.2	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	Persen	80%	82%	84%	86%	90%	90%
3.2.2.3	Persentase Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen	68%	68%	68%	68%	68%	68%
3.2.2.4	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IX
PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Pekanbaru dalam 4 tahun ke depan. Dokumen RPD ini merupakan dokumen yang menerjemahkan dan menyesuaikan Tujuan dan Sasaran berdasarkan permasalahan dan Isu Strategis Kota Pekanbaru yang akan diselesaikan. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPD ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan untuk 4 (empat) tahun ke depan. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Walikota Pekanbaru berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 kepada masyarakat;
- b. Walikota Pekanbaru menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026;
- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

9.2. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Pekanbaru dan mengacu pada RPJMD Provinsi Riau atau menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun 2027.

9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan maka Pemerintah Kota Pekanbaru masih akan menerapkan kebijakan untuk diarahkan :

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi;
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.